SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

JDIH Kabupaten Banyumas

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

JDIH Kabupaten Banyumas

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan

JDIH Kabupaten Banyumas

pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahunan mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Sistematika dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

JDIH Kabupaten Banyumas

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB VI : PEMBANGUNAN DAERAH
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
BAB VII : PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX : PENUTUP

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB III
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi daerah dalam menyusun rencana strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2018-2023.

JDIH Kabupaten Banyumas

Pasal 6

(1) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Renja SKPD.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
    c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH DAERAH

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan kemanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

JDIH Kabupaten Banyumas

(3) Perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2028 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 dengan tetap mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJMN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Maret 2019
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVa
NIP. 196701281993021001

JDIH Kabupaten Banyumas

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2018-2023 yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan RPJMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

RPJM Daerah memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program / kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

JDIH Kabupaten Banyumas

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar, meliputi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dan hasil rencana pembangunan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

JDIH Kabupaten Banyumas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah serentak merupakan agenda politik nasional pada tahun 2018. Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2018. Kepala pemerintahan yang baru akan mengemban tugas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, melalui pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien disusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan pembangunan di daerah ikut mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah memiliki kewajiban menyusun rencana pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.

Kepala daerah terpilih Kabupaten Banyumas hasil pemilihan umum tahun 2018 berkewajiban menyusun RPJMD sesuai periode jabatannya selambat-lambatnya 6 bulan sejak kepala daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah terpilih, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan tahap RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 periode ke-3 dan tahap ke-4.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

JDIH Kabupaten Banyumas

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tahapan: a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan; d) pelaksanaan Musrenbang; e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan RPJMD.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, atas-bawah, dan pendekatan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Rancangan teknokratik RPJMD yang telah tersusun mencakup analisis gambaran umum kondisi Daerah, gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, dan perumusan isu strategis Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan forum konsultasi publik. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD.

Secara substansi, penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas juga menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan RPJMD agar tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Banyumas dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam penyusunan RPJMD Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan (PB), berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian (target pencapaian) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan sesuai periode RPJMD, dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa skenario KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas antara lain:

- Dibutuhkan upaya tambahan untuk mempertahankan daya dukung air bagi kehidupan sejalan dengan perubahan tutupan lahan, peningkatan lahan

permukiman, peningkatan luasan kawasan peruntukkan industri, dan pertambahan penduduk;

- Dengan asumsi luas lahan pertanian untuk pangan sesuai luasn LP2B dan dukungan rehabilitasi dan pembangunan sistem jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas (sebagaimana program kegiatan terkait telah dilaksanakan) tidak diperlukan upaya tambahan untuk dapat meningkatkan daya dukung lahan untuk pangan;
- Koefisien lindung Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori sedang menuju baik tanpa upaya tambahan untuk meningkatkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi lindung terutama untuk kawasan hutan dan sempadan sungai, meningkatkan konservasi lahan melalui peningkatan tutupan lahan pada lahan terbuka, kebun, semak maupun ladang;
- Daya Dukung Lahan Terbangun (DDLB) Kabupaten Banyumas masih dalam kategori sedang mendekati baik namun diperkirakan akan turun dengan perkembangan lahan terbangun tanpa upaya pengelolaan dan pengendalian pembangunan.
- Perkiraan timbulan sampah di Kabupaten Banyumas. sampai dengan 2023 mencapai 450.015 ton per tahun dengan asumsi peningkatan timbulan sampah tersebut berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk yang mencapai 0,94% per tahun. Untuk itu diperlukan upaya tambahan untuk pengelolaan sampah agar memenuhi pelayanan penanganan sampah.
- Peningkatan kebutuhan energi sebagai akibat peningkatan penduduk dan kegiatan berbanding lurus dengan peningkatan emisi GRK, dengan demikian diperlukan upaya untuk mempertahankan kualitas lingkungan.

Skenario pembangungan hasil analisis KLHS menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. RPJMD Kabupaten Banyumas memiliki kedudukan yang sangat strategis dan akan menentukan masa depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dan keberlanjutan masyarakat dan Kabupaten Banyumas di masa yang akan datang. RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

JDIH Kabupaten Banyumas

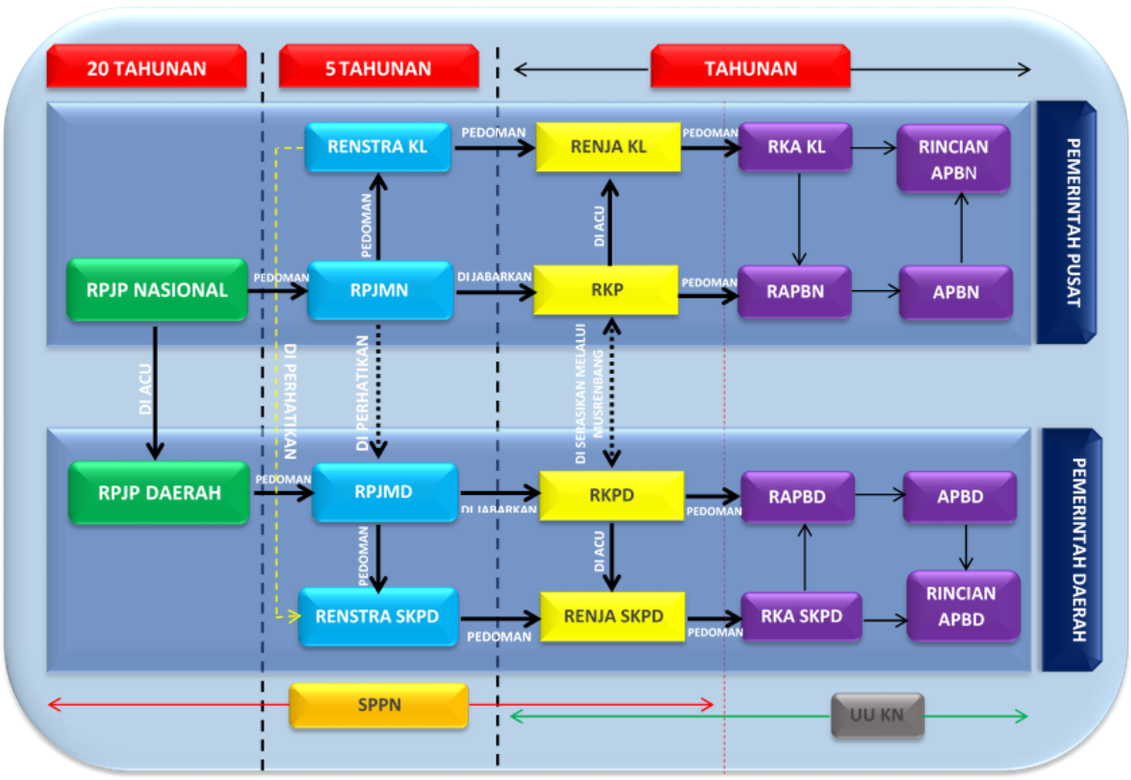
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009, Nomor 4 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan daerah memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional penyusunan RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Integrasi antar dokumen perencanaan pembangunan ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah maupun antar waktu/periode. RPJMD harus sinkron dan bersinergi antar daerah, waktu, ruang dan fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 khususnya tahap ke-3 dan tahap ke-4, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2019, serta memperhatikan RPJMD Kabupaten lainnya yang berbatasan, dan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 khususnya Pembangunan Jangka Menengah tahap ke-3.

Keterkaitan/hubungan dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar lembaga pemerintah, maupun antar waktu dapat dilihat di Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan RPJMN 2015-2019 menunjukan keselarasan visi RPJMN dengan visi RPJMD pada visi untuk mewujudkan wilayah yang mandiri. Selanjutnya dari 7 misi RPJMN 2 misi tidak memiliki keterkaitan dengan misi RPJMD Kabupaten Banyumas dikarenakan merupakan kewenangan Pusat, dan 1 misi tidak memiliki

JDIH Kabupaten Banyumas

keterkaitan karena tidak sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Banyumas. Keterkaitan misi RPJMD dengan misi RPJMN diuraikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJMN tahun 2015-2019

RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
Visi: "**Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**	Visi: **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**
Misi:	Misi:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	-
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	**1.** Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	-
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	**2**. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	**4**. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

JDIH Kabupaten Banyumas

RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	-
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	**8.** Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 harus mempedomani RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2.
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
1	Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	1	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	a l	Terwujudnya kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya Terwujudnya perubahan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan pemerintahan: Terciptanya *Good Local Governance* mencakup: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektivitas dan Profesionalisme dalam setiap aspek

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
							pembangunan daerah
		2	Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	l	Terwujudnya perubahan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan pemerintahan: Terciptanya *Good Local Governance* mencakup: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektivitas dan Profesionalisme dalam setiap aspek pembangunan daerah
		3	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelengga-raan pemerintahan	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	a	Terwujudnya kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya
						l	Terwujudnya perubahan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan pemerintahan: Terciptanya *Good Local Governance* mencakup: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektivitas dan Profesionalisme dalam setiap aspek pembangunan daerah
				4	Terwujudnya Daerah Kabupaten Banyumas Yang Lestari	a	Terwujudnya tahapan pembangunan jangka panjang yang memberikan landasan kokoh kepada kebijakan pembangunan tahap berikutnya

JDIH Kabupaten Banyumas

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	l	Terwujudnya perubahan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan pemerintahan: Terciptanya Good Local Governance mencakup: Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Kesetaraan, Daya tanggap, Wawasan ke depan, Akuntabilitas, Pengawasan, Efisiensi dan Efektivitas dan Profesionalisme dalam setiap aspek pembangunan daerah
2	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	1	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan formal dan non formal	1	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Sejahtera	b	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas yag ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender
						f	Terlayaninya kebutuhan dasar dan rasa aman secara adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya Kabupaten Banyumas mampu membangun sarana prasarana dan mampu menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan yang terjangkau dan berkualitas
				3	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Berdaya Saing	a	Terwujudnya kualitas SDM yang mampu menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan IPTEK dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga mempunyai pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif.

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
		2	Meningkatnya akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Sejahtera	b	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas yag ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender
						f	Terlayaninya kebutuhan dasar dan rasa aman secara adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya Kabupaten Banyumas mampu membangun sarana prasarana dan mampu menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan yang terjangkau dan berkualitas
				3	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Berdaya Saing	h	Terwujudnya masyarakat yang sehat fisik dan psikhis dan berprestasi olahraga dalam bidang olahraga tertentu.

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
		3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Sejahtera	b	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatnya perananan perempuan dalam pembangunan ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
		4	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Sejahtera	d f	Terwujudnya target penanganan kemiskinan Terlayaninya kebutuhan dasar dan rasa aman secara adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Banyumas mampu meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang kesejahteraan sosial yang adil, terjangkau seluruh masyarakat
				2	Terwujudnya Daerah Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	a c	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, pemerataan pendapatan perkapita dengan dibarengi penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan jumlah penduduk miskin sehingga masyarakat memiliki ketahanan ekonomi. Berkembangnya perekonomian yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
							mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
		5	Meningkatnya penanganan bencana	4	Terwujudnya Daerah Kabupaten Banyumas Yang Lestari	b	Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan terjaganya kualitas sumberdaya alam sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
		6	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Sejahtera	a	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang rendah dan memiliki angka harapan hidup yang lebih baik, serta kualitas pelayanan sosial yang semakin baik yang tercermin pada peningkatan produktivitas penduduk
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	1	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	d	Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan perdagangan pariwisata dan pertanian, dalam arti luas, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik.
						f	Berkembangan sektor-sektor ekonomi terutama sektor perdagangan, pariwisata dan pertanian sebagai basis perekonomian wilayah dan sebagai sektor-sektor pembangunan strategis yang mampu

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
							menempatkan Kabupaten Banyumas sebagai pusat pelayanan perdagangan, pariwisata dan pertanian dalam wilayah regional maupun nasional.
		2	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	b	Berkembangnya perekonomian dalam bentuk keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang handal
						c	Berkembangnya perekonomian yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika global
						d	Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan perdagangan pariwisata dan pertanian, dalam arti luas, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik
						e	Berkembangan sektor-sektor ekonomi terutama sektor perdagangan,

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
							pariwisata dan pertanian sebagai basis perekonomian wilayah dan sebagai sektor-sektor pembangunan strategis yang mampu menempatkan Kabupaten Banyumas sebagai pusat pelayanan perdagangan, pariwisata dan pertanian dalam wilayah regional maupun nasional.
4	Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan	1	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	d	Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan perdagangan pariwisata dan pertanian, dalam arti luas, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik
5	Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	1	Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	a	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, pemerataan pendapatan perkapita dengan dibarengi penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan jumlah penduduk miskin sehingga masyarakat memiliki ketahanan ekonomi.
						d	Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan perdagangan

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
							pariwisata dan pertanian, dalam arti luas, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik
		2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	4	Terwujudnya Daerah Kabupaten Banyumas Yang Lestari	a b c d	Terwujudnya tahapan pembangunan jangka panjang yang memberikan landasan kokoh kepada kebijakan pembangunan tahap berikutnya Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan dan terjaganya kualitas sumberdaya alam sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan Terbentuknya karakter masyarakat yang memiliki kesadaran, sikap mental dan perilaku yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terwujudnya kemampuan mengelola seluruh sumber daya yang ada dan bersama dengan semua pelaku pembangunan menciptakan kawasan perkotaan dan perdesaan yang manusiawi, kompetitif dan berkelanjutan

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	3	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Maju Dan Berdaya Saing	a	Terwujudnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal dan dapat meningkatkan daya tarik investasi lokal, nasional maupun internasional dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal	1	Meningkatnya pengembangan Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya local	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	b	Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan perdagangan pariwisata dan pertanian, dalam arti luas, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal	1	Meningkatnya pengembangan Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	c d	Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan perdagangan pariwisata dan pertanian, dalam arti luas, yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
							Berkembangan sektor-sektor ekonomi terutama sektor perdagangan, pariwisata dan pertanian sebagai basis perekonomian wilayah dan sebagai sektor-sektor pembangunan strategis yang mampu menempatkan Kabupaten Banyumas sebagai pusat pelayanan perdagangan, pariwisata dan pertanian dalam wilayah regional maupun nasional.
		2	Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK	2	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Mandiri	e	Berkembangnya kelembagaan koperasi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan pengelolan koperasi yang efisien, efektif, menjaga, mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi anggota koperasi dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM).
				3	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Maju Dan Berdaya Saing	a	Terwujudnya kualitas SDM yang mampu menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan IPTEK dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga mempunyai pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif.

RPJMD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023				RPJPD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2005-2025			
Visi : Menjadikan Banyumas yang maju, Adil Makmur dan Mandiri				Visi : Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing, Serta Lestari			
Misi		Sasaran		Misi		Sasaran	
8	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius	1	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara	1	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Sejahtera	b	Terbentuknya karakter masyarakat yang berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
				3	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Maju Dan Berdaya Saing	a	Terwujudnya kualitas SDM yang mampu menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan IPTEK dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga mempunyai pola pikir yang inovatif, prediktif, kompetitif.
		2	Meningkatnya kelestarian Seni Budaya daerah	3	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Maju Dan Berdaya Saing	b	Terwujudnya Kabupaten Banyumas dengan kearifan lokalnya sebagai obyek dan atraksi beserta fasilitas pendukung dan pelayanannya sehingga dapat menjadi daerah tujuan wisata unggulan, baik dalam tingkat regional, nasional maupun internasional

Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan wilayah penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018 dengan visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diuraikan dalam tabel berikut:

JDIH Kabupaten Banyumas

Tabel 1.3
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	**RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023**
Visi: **Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi**	Visi: **Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri**
Misi:	Misi:
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/kota	1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	2.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal 4. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan 6. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan	1. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan 2. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. RTRW merupakan pedoman keruangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk membentuk struktur dan pola ruang wilayah. Kebijakan, strategi, dan indikasi program RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan strategi dan program RPJMD. Indikasi program RTRW pada tahap pembangunan jangka menengah yang berkesesuaian dengan periode RPJMD yang disusun menjadi perhatian untuk menjadi program RPJMD, sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten, prioritas

JDIH Kabupaten Banyumas

daerah, serta janji politik Bupati terpilih. Tabel 1.4. menguraikan keterkaitan dan keselarasan program RPJMD Kabupaten Banyumas dengan kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

Tabel 1.4
Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dengan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	**Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3**	**Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023**
Kebijakan (1) Pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi utama Kabupaten		
Strategi		
1. Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan 2. Mengembangkan kawasan pertanian 3. Mempertahankan luasan lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan	Mencegah konversi lahan pertanian lahan basah untuk penggunaan diluar pertanian	1. Program Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
4. Mengembangkan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi sawah beririgasi teknis	1. Rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan 2. Peningkatan fungsi jaringan irigasi dari irigasi setengah teknis menjadi irigasi teknis dan dari irigasi non-teknis menjadi irigasi setengah teknis 3. Pemeliharaan saluran irigasi pada kawasan pertanian lahan basah	1. Program Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2. Program Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah
5. Mengembangkan kawasan agropolitan dan sistem agribisnis pertanian	1. Pengembangan teknologi dan informasi pertanian 2. Peningkatan mutu produksi dan perbaikan pemasaran.	1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 2. Program Pengembangan Produksi Tanaman

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	3. Peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) 4. Peningkatan mutu intensifikasi - perbaikan varietas dan diversifikasi 5. Perluasan areal tanam dan pengolahan lahan dengan menggunakan teknologi yang sesuai 6. Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi, pertanian, dan kelembagaan	Pangan dan Hortikultura 3. Program Perlindungan Tanaman 4. Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian 5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian 6. Program Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 7. Program Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah 8. Program Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah 10. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan 11. Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jembatan 12. Program Pengembangan Perumahan 13. Program Pengembangan

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
		Lingkungan Sehat Perumahan 14. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 15. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan
6. Mengembangkan sektor peternakan dan perkebunan		1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan 3. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan 4. Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT 5. Program Penyediaan Daging Ternak ASUH 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Program Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan
Kebijakan (2) Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan		
Strategi		
1. Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata	1. Pengembangan kawasan wisata buatan dan wisata budaya 2. Penyediaan sarana dan prasarana berstandar	1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Industri Kreatif

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
2. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata; 3. Mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata 4. Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.	sesuai tingkat layanan obyek wisata	2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 4. Program Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah 6. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan 7. Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jembatan
Kebijakan (3) Pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal dan regional.		
Strategi		
1. Mengembangkan fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala regional, lokal, dan lingkungan 2. Mendorong fungsi kawasan perdagangan dan jasa berskala nasional 3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kawasan perdagangan dan jasa.	Pengembangan fasilitas perdagangan berskala regional, skala kabupaten	1. Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan 2. Program pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
Kebijakan (4) Pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu.		
Strategi		

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
1. Mendorong pengembangan pusat kegiatan di kawasan perkotaan berskala regional 2. Mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala kecamatan atau beberapa desa 3. Mendorong pengembangan pusat pelayanan berskala antar desa 4. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.	1. Peningkatan pelayanan jasa pemerintahan. 2. Pengembangan fasilitas pendidikan 3. Peningkatan fasilitas kesehatan 4. Pengembangan sarana lingkungan perkotaan 5. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi	1. Program peningkatan Sarana, prasarana dan alat kesehatan UPT Dinas Kesehatan 2. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung 3. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan 4. Program Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah 5. Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung 6. Program Peningkatan Perencanaan Teknis
Kebijakan (5) Pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya sebagai pendukung potensi wilayah.		
Strategi		
1. Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan	1. Pengembangan jalan kolektor primer dan/atau jalan strategis provinsi yang berstatus jalan provinsi 2. Peningkatan dan pengembangan jalan berstatus jalan kabupaten	1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan 2. Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jembatan 3. Program Pembangunan Bangunan Perlengkapan Jalan/ Jembatan 4. Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan/Jembatan

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
		5. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 6. Program Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah 7. Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan
2. Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah meliputi terminal penumpang dan terminal barang	1. Penyediaan angkutan umum 2. Pengembangan terminal penumpang Tipe C (Sokaraja, Patikraja, Karanglewas, dan Purwojati)	1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 6. Program Peningkatan Pelayanan Sarana Perhubungan
3. Mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif	1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di wilayah yang tidak terjangkau oleh sambungan jaringan listrik	

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	3. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro	
4. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
5. Meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air	1. Penyediaan instalasi pengolahan air permukaan 2. Pemanfaatan sumur air dalam sesuai kapasitas terpasang 3. Pelaksanaan reboisasi pada kawasan di sekitar sumber air baku 4. Pemeliharaan kawasan di sekitar sumber air baku dari pencemaran air 5. Pembangunan tebing pengaman di wilayah sungai 6. Normalisasi sungai di wilayah sungai Serayu – Bogowonto 7. Pembuatan embung 8. Konservasi situ 9. Konversi lahan tidak produktif	1. Program Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah 2. Prgram Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 3. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 4. Program Pembangunan Turap/ Talud/Brojong
6. Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu	1. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan konsep 3R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recyle (mendaur ulang) 2. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir dengan sistem Sanitary Landfill 3. Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1. Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA / TPST

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di lokasi strategis 4. Penambahan fasilitas persampahan di setiap wilayah meliputi tempat sampah di perkotaan, gerobak sampah, kontainer, dan truk sampah.	
5. Mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata	1. Pengembangan dermaga penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage 2. Pengembangan sarana penyeberangan Wisata Sungai Serayu River Voyage.	
6. Mengambangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi kereta api	1. Pembukaan jalur kereta api 2. Pengembangan jalur ganda kereta api Cirebon – Kroya 3. Peningkatan stasiun kereta api eksisting	
7. Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase	1. Pembuatan dan pengembangan IPAL 2. Pengembangan IPAL Komunal. 3. Penyediaan sistem pengolahan limbah mandiri dan komunal 4. Pembuatan sumur resapan air hujan dan biopori di kawasan perkotaan	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	1. Pembangunan jaringan pipa distribusi dan transmisi air minum dalam perluasan jangkauan pelayanan	1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	2. Pemeliharaan sarana dan prasarana distribusi air minum 3. Pemeriksaan kualitas sumber air minum tradisional secara berkala 4. Penyediaan hidrant umum dan kran umum pada wilayah yang belum terlayani air minum	
8. Mengembangkan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana alam.	Pemeliharaan jalur dan ruang evakuasi bencana alam.	1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan 2. Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jembatan
Kebijakan (6) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung.		
Strategi		
1. Mengembalikan fungsi hutan lindung yang mengalami kerusakan; 2. Membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung; 3. Mempertahankan dan melestarikan kawasan resapan air; 4. Mengendalikan secara ketat pemanfaatan sumber air baku; 5. Melestarikan habitat dan ekosistem khusus pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; 6. Membatasi kegiatan pariwisata pada radius pengamanan kawasan	1. Pembangunan Kebun Raya Baturaden 2. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 3. Perlindungan keseimbangan tata guna air 4. Perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna 5. Rehabilitasi daerah rawan bencana longsor 6. Penanganan dampak lingkungan. 7. Mempertahankan luasan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan 8. Pelestarian fungsi kawasan Kebun Raya Baturaden	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2. Program Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Program Pembangunan Turap/ Talud/Brojong

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
pada kawasan perlindungan setempat; 7. Mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau; 8. Meningkatkan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagai tempat wisata, dan obyek penelitian; 9. Mengembangkan tanaman konservasi di kawasan rawan bencana tanah longsor; dan 10. Mengembangkan sistem peringatan dini, jalur, dan ruang evakuasi bencana.	9. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang berfungsi wisata 10. Pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung plasma Nutfah 11. Penetapan batas kawasan lindung yang dikelola masyarakat	
Kebijakan (7) Pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.		
Strategi		
1. Menetapkan kawasan budidaya sesuai fungsinya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 2. Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup		1. Program Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3. Mengembangkan kawasan budidaya melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan dan fungsi sosial	1. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi 2. Penyediaan sarana dan prasarana berstandar	1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan 2. Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jembatan

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
	sesuai tingkat layanan obyek wisata	3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
4. Mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan		
5. Mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan		1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar 4. Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar
6. Mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan	1. Pengembangan komoditas hasil tambang yang bernilai ekonomi 2. Pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan 3. Pengembangan panas bumi Baturaden	
7. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pada jalur transportasi regional dan nasional 8. Mengembangkan dan memberdayakan industri berbasis bahan baku lokal dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan hasil tambang	Pembinaan dan pembentukan kelompok industri menengah dan industri kecil	1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Industri Kreatif 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3. Program Penataan Struktur Industri 4. Program Penguatan dan Pengembangan Industri Agro 5. Program Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
		6. Peningkatan Investasi di Kawasan Industri
9. Mengembangkan kawasan peruntukan permukiman terpadu.	1. Pengembangan sarana lingkungan perkotaan 2. Pengembangan rumah sehat huni 3. Pengembangan IPAL Komunal.	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 3. Program Pengembangan Kawasan Permukiman 4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kebijakan (8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.		
Strategi		
1. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; 2. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; 3. Mengembangkan kawasaan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan dengan kawasan budidaya terbangun	1. Penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan 2. Pemenuhan syarat-syarat standar kebutuhan militer dan keamanan bagi permukiman penduduk di sekitarnya	

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
4. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.		
Kebijakan (9) Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai dengan penetapannya.		
Strategi		
1. Menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya	1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan 2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	1. Program Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
2. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat	1. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertumbuhan ekonomi	1. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan 2. Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jembatan
3. Mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian 4. Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian 5. Menetapkan, mengembangkan, dan mempertahankan luasan lahan pada kawasan minapolitan	Mencegah konversi lahan pertanian lahan basah untuk penggunaan diluar pertanian	1. Program Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2. Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah
6. Melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan	1. Pemanfaatan energi panas bumi Baturaden	1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031	Indikasi Program RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 PJM ke-2 dan ke-3	Program RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan 7. Memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan 8. Mengendalikan kegiatan sesuai tujuan pemanfaatan kawasan dalam wilayah kerja pertambangan panas bumi dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan 9. Memanfaatkan kawasan bagi penelitian dan pendidikan yang berbasis lingkungan hidup 10. Mempertahankan keanekaragaman hayati pada kawasan suaka alam dan hutan lindung; dan 11. Mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan Gunung Slamet yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.	2. Pembangunan Kebun Raya baturaden 3. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 4. Perlindungan keseimbangan tata guna air 5. Perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna 6. Rehabilitasi daerah rawan bencana longsor 7. Penanganan dampak lingkungan	2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4. Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup

Beberapa kebijakan, strategi dan indikasi program dalam RTRW Kabupaten Banyumas tidak memiliki keterkaitan dengan program RPJMD dikarenakan perubahan kewenangan daerah terhadap beberapa urusan seperti urusan kehutanan dan energi sumber daya mineral. Kebijakan dan strategi yang tidak memiliki keterkaitan dengan program RPJMD antara lain: kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, strategi mengembangkan jaringan energi dan sumber daya energi alternatif, strategi mengembangkan jaringan transportasi sungai sebagai pendukung sarana wisata, startegi mengendalikan secara ketat pengelolaan lingkungan kawasan peruntukan pertambangan, dan strategi mengembangkan sektor kehutanan dan pengolahan hasil hutan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas juga memperhatikan visi dan misi RPJMD Kabupaten sekitar. Rumusan detail setiap visi dan misi berbeda,

namun secara substansi dan makna tetap terdapat hubungan atau kesamaan. Hubungan dan kesamaan visi dan misi tersebut dapat berbeda dalam penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran dan program, sesuai permasalahan, potensi dan prioritas masing-masing RPJMD. Perbedaan permasalahan, potensi dan prioritas tersebut menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus suatu daerah dalam sebuah sistem pembangunan wilayah/regional yang lebih makro. Sebaliknya permasalahan, potensi dan prioritas yang sama yang dihadapi oleh Kabupaten Banyumas dan Kabupaten sekitar dapat menjadi dasar kerjasama antar daerah dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penyelesaian permasalahan bersama, serta mengoptimalkan potensi yang ada pada suatu kawasan. Berikut adalah tabel yang menjelaskan keterkaitan antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan visi dan misi RPJMD kabupaten dalam lingkup Barlingmascakeb.

JDIH Kabupaten Banyumas

Tabel 1.5

Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Dalam Lingkup Barlingmascakeb

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022	RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
Visi:	Visi:	Visi:	Visi:	Visi:
"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"	"CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA" "Bangga Mbangun Desa"	"Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia"	"Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera"	"Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"
Misi	Misi	Misi	Misi	Misi
1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*. 3. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. 4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional. 5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan	1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. 2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan 3. Mengupayakan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak	1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, dan demokratis 2. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar 3. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik 4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga professional 5. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada	1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; 2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi,

JDIH Kabupaten Banyumas

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022	RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.	memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat 5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif, dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja 6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana	pengembangan ekonomi kerakyatan	kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat 3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan 4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan 5. Menyediakan sarana danprasarana pendidikan yang baik, meningkatkan

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022	RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022	RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021
		prasarana wilayah yang memadai 7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup		nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat 6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal *(Good and Clean Government)* dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketata-laksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan system pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Banyumas untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
b. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
c. Memberikan tolok ukur bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan RPJMD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran kondisi daerah pada aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejateraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini berisi tentang rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang alokasi belanja langsung untuk pendanaan pembangunan, dan rincian program perangkat daerah.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini berisi tentang penetapan indikator kinerja utama dan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bab IX Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 132.759,56 ha. Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas terletak di antara 108^{O}39'17"BT–109^{O}27'15"BT dan di antara 7^{O}15'05"LS– 7^{O}37'10"LS. Wilayah Kabupaten Banyumas terletak pada posisi strategis, yaitu pada persimpangan perhubungan lintas daerah.

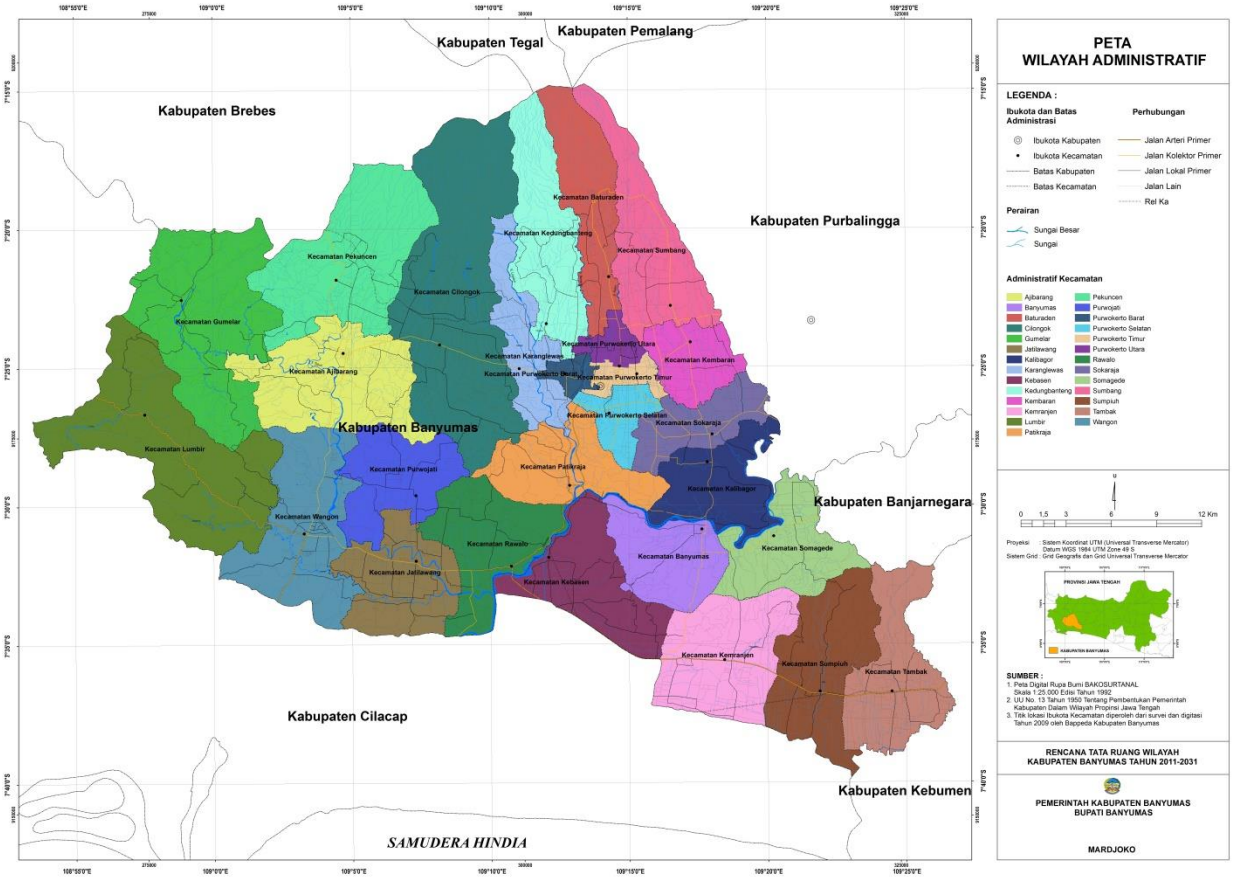


Gambar 2.1.
Orientasi Wilayah Kabupaten Banyumas Terhadap Provinsi Jawa Tengah
Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

Wilayah administratif Kabupaten Banyumas meliputi 27 Kecamatan dengan 301 desa dan 30 kelurahan, dibatasi oleh:

a. Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang;
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap;
c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes;

d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.



Gambar 2.2.
Peta Wilayah Kabupaten Banyumas
Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

2.1.1.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banyumas ditunjukkan dengan kondisi ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Berdasarkan ketinggian tanahnya wilayah Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Dataran dengan ketinggian > 0 – 250 meter di atas permukaan laut (dpl) seluas kurang lebih 95.335,47 ha atau 71,81% dari luas wilayah, meliputi perkotaan Purwokerto, Kecamatan Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, sebagian Kecamatan Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Banyumas, Kebasen, Patikraja, Rawalo, Purwojati, Jatilawang, Wangon, Ajibarang, Lumbir, Gumelar, sebagian Pekuncen, sebagian Cilongok, sebagian Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturraden, dan sebagian Kecamatan Sumbang.
b. Dataran dengan ketinggian >250 - 500 meter dpl seluas kurang lebih 19.918,27 ha atau 15,00% dari luas wilayah, meliputi sebagian Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian Kecamatan Gumelar, sebagian kecil Kecamatan Lumbir, sebagian kecil Kecamatan Wangon, sebagian kecil Kecamatan Ajibarang, sebagian kecil Kecamatan Purwojati, sebagian kecil Kecamatan Jatilawang, sebagian kecil Kecamatan Kebasen, sebagian kecil

Kecamatan Banyumas, sebagian kecil Kecamatan Kemranjen, sebagian Kecamatan Somagede, sebagian Kecamatan Sumpiuh, dan sebagian Kecamatan Tambak.

c. Dataran dengan ketinggian >500 – 1500 meter dpl seluas kurang lebih 13.511,18 ha atau 10,18% dari luas wilayah, meliputi sebagian Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturaden, sebagian Kecamatan Sumbang, sebagian kecil Kecamatan Somagede, sebagian kecil Kecamatan Sumpiuh, dan sebagian kecil Kecamatan Tambak.
d. Dataran dengan ketinggian >1500 – 2500 meter dpl seluas kurang lebih 3.578,76 ha atau 2,70% dari luas wilayah, meliputi sebagian kecil Kecamatan Cilongok, sebagian Kecamatan Karanglewas, sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturaden, dan sebagian Kecamatan Sumbang.
e. Dataran dengan ketinggian >2500 – 3500 meter dpl seluas kurang lebih 411,93 ha atau 0,31% dari luas wilayah, meliputi sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Kecamatan Baturraden, dan sebagian Kecamatan Sumbang.
f. Dataran dengan ketinggian >3000 – 3900 meter dpl seluas kurang lebih 3,39 ha atau 0,003% dari luas wilayah, meliputi puncak Gunung Slamet yang ada di Kecamatan Baturraden dan Sumbang.

Sedangkan berdasarkan kemiringan tanahnya wilayah Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kemiringan 0° – 2° meliputi areal seluas kurang lebih 43.876,9 ha atau 33,05 % dari luas wilayah, meliputi wilayah bagian tengah dan selatan
b. Kemiringan 2° – 15° meliputi areal seluas kurang lebih 21.294,5 ha atau 16,04 % dari luas wilayah, meliputi sekitar Gunung Slamet.
c. Kemiringan 15° – 40° meliputi areal seluas kurang lebih 35.141,3 ha atau 26,47 % dari luas wilayah, meliputi daerah lereng Gunung Slamet.
d. Kemiringan > 40° meliputi areal seluas kurang lebih 32.446,3 ha atau 24,44 % dari luas wilayah, meliputi daerah lereng Gunung Slamet.

Ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Banyumas membentuk relief bervariasi berupa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan. Lebih dari 45% wilayah Kabupaten Banyumas adalah daerah dataran yang tersebar di bagian tengah dan selatan serta membujur dari Barat ke Timur. Daerah dataran rendah terutama berada di bagian Selatan. Dataran tinggi dan perbukitan di sebelah Utara yang merupakan kaki Gunung Slamet, sedangkan dataran tinggi dan perbukitan di sebelah Selatan wilayah Kabupaten Banyumas membentang Perbukitan Serayu.

2.1.1.3. Kondisi Geologi

Kabupaten Banyumas secara fisiografi terletak pada zona pegunungan Serayu Utara, Zona Serayu dan Pegunungan Serayu Selatan. Zona pegunungan Serayu Utara sebagian besar tertutup oleh produk endapan Gunung Slamet sedangkan Pegunungan Serayu Selatan ditempati oleh pegunungan lipatan yang memanjang dari Barat Laut–Tenggara mulai dari Kecamatan Lumbir hingga pegunungan di sekitar Kebasen dan pegunungan di sebelah selatan Banyumas. Antara pegunungan Serayu Utara dengan pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh zona depresi longitudinal memanjang dari Barat Timur yang disebut zona Serayu. Zona Serayu Selatan pada umumnya ditempati batuan hasil endapan turbidit laut dalam, sedangkan zona Serayu ditempati oleh endapan aluvium gunung api.

Secara stratigrafi, Kabupaten Banyumas terdiri atas formasi 1) Endapan Aluvial/Aluvium, 2) Endapan Gunung Api, 3) Formasi Tapak, 4) Formasi Kumbang, 5) Formasi Halang, 6) Anggota Batugamping Formasi Halang, 7). Anggota Breksi Formasi Halang, dan 8) Formasi Rambatan.

Endapan aluvial atau aluvium menempati porsi yang cukup besar di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyebarannya di bagian Selatan wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu di Kecamatan Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Rawalo, Jatilawang dan Wangon. Kawasan endapan aluvium ini merupakan kawasan yang subur.

Kondisi geologi Kabupaten Banyumas juga menyimpan potensi bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Bahan galian yang ada di Kabupaten Banyumas tersebar merata hampir di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas. Potensi bahan galian yang telah dilakukan inventarisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Potensi Bahan Galian di Kabupaten Banyumas

No	Bahan Galian	Cadangan (Ton)	Penyebaran
1	Andesit	169.090.173,09	Kec. Baturaden, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Wangon, Pekuncen, Karang lewas, Kedungbanteng, Sumbang, Patikraja, dan Cilongok
2	Andesit Homblende	180.451,65	Kec. Kedungbanteng
3	Batu Tempel Adesit	150.536,67	Kec. Kedungbanteng dan Pekuncen
4	Diorit	35.900,00	Kec. Ajibarang & Purwojati
5	Granodiorit	11.566,978	Kec. Kedungbanteng
6	Basalt	21.511.646,08	Kec. Somagede, banyumas, Kebasen, Wangon, Lumbir, Jatilawang, Tambak, Kemranjen, Ajibarang, dan Rawalo
7	Batu Gamping	483.192.403,53	Kec. Ajibarang & Gumelar
8	Phospat	362.900,25	Kec. Ajibarang & Gumelar
9	Kaolin	2.400.000	Kec. Lumbir, Cilongok, Kalibagor, dan Gumelar
10	Pasir	11.597.363,54	S. Serayu, Logawa, Klawing, dan Tajum
11	Trass	560.000	Kec. Kedungbanteng dan Lumbir
12	Sirtu	5.846.340,57	S. Serayu, Logawa, Tajum, Banjaran, Cangkok, dan Krukut
13	Tanah Liat	45.487.328	Seluruh Kabupaten Banyumas
14	Tanah Urug	481.347,28	Seluruh Kabupaten Banyumas
15	Emas	9,6	Kec. Gumelar,Lumbir, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Kebasen, Rawalo, banyumas, Sumpiuh, Tambak dan Somagede.

Sumber: RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031

2.1.1.4. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi menggambarkan potensi sumber daya air yang meliputi distribusi, pergerakan dan kualitas sumber daya air. Kondisi hidrologi dipengaruhi oleh struktur tanah, topografi, geologi, geomorfologi dan curah hujan. Sumberdaya air di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi curah hujan, air permukaan (sungai dan mata air)

dan air tanah. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai debit (Q) sebesar 45.456.342 m3/hari atau 16.591.564.830 m3/tahun yang berasal dari sungai besar, seperti Sungai Serayu, Sungai Tajum, Sungai Kranji, Sungai Pelus, Sungai Banjaran, Sungai Logawa serta sungai-sungai kecil lainnya.

Sementara itu potensi air bawah tanah di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu:

a. Potensi air bawah tanah tinggi. Berada pada kelulusan sedang pada batuan bersifat tufaan dan tinggi pada lava vesikuler dan breksi (vulkanik muda). Debit (Q) air bawah tanah bervariasi antara 800 sampai >1000 m3/hari/km. Debit (Q) mata air bisa mencapai > 300 liter/detik.
b. Potensi air bawah tanah tinggi sampai sedang. Berada pada kelulusan sedang sampai tinggi, air tanah berada pada alluvium gunung api, debit (Q) mata air bisa mencapai 50 liter/detik.
c. Potensi air bawah tanah sedang. Berada pada kelulusan sedang, meliput: 1) air tanah pada struktur celah, saluran dan rekahan dalam batu gamping Formasi Tapak, debit (Q) mata air bisa < 10 liter/detik, dan 2) air tanah pada alluvium dataran dan sungai, debit (Q) air tanah sebesar 300 m3/hari/km, debit mata air bisa 10 - 50 liter/detik.
d. Potensi air bawah tanah rendah. Berada pada kelulusan kecil sampai sangat kecil, air tanah berada pada alluvium endapan rawa (dataran pantai, hasil rombakan batuan tersier).
e. Potensi air bawah tanah langka. Berada pada kelulusan sangat kecil sampai langka, air tanah berada pada lokasi puncak Gunung Api Slamet di batuan Lava dan puncak penyebaran endapan tersier hanya sebagai media aliran.

Kondisi hidrologi menyediakan potensi sumber daya air yang diperlukan oleh berbagai kegiatan budidaya manusia. Air tanah yang telah termanfaatkan di wilayah Kabupaten Banyumas berasal dari Cekungan Air Tanah Purwokerto–Purbalingga dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 503.000.000 m3/tahun dan jumlah aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 10.000.000 m3/tahun; Cekungan Air Tanah Kroya jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 65.000.000 m3/tahun dan Cekungan Air Tanah Cilacap dengan jumlah aliran air tanah bebas (Q1) sebesar 43.000.000 m3/tahun.

Kabupaten Banyumas termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimeneng, Serayu, Ijo, dan Tipar. Keempat DAS ini mencakup beberapa sungai dan anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber daya pertanian, sumber air baku untuk air minum, dan sumber energi terbarukan. Namun demikian potensi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Banyumas tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Banyumas tidak memiliki potensi air permukaan sedangkan potensi air tanah sulit untuk diperoleh seperti terdapat di beberapa desa di wilayah Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Cilongok. Beberapa desa di wilayah Kabupaten Banyumas juga tidak berada pada cekungan air tanah dan memiliki kualitas air tanah yang kurang baik.

2.1.1.5. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi wilayah Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata-rata suhu udara bulanan 26,3°C, dengan suhu minimum tercatat 24,4°C dan suhu maksimum 30,9°C. Sedangkan curah hujan di wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 rata-rata sebesar 4.601 mm/tahun. Angka ini menunjukkan bahwa curah hujan di Kabupaten Banyumas cukup tinggi, hal tersebut didukung oleh kondisi geografis wilayah yang terletak di lereng Gunung Slamet.

Beberapa daerah yang mempunyai curah hujan tinggi adalah Kecamatan Baturraden dengan stasiun penakar hujan di Bendung Ketenger Baturraden yaitu 8.134 mm/tahun, Stasiun hujan Rempoah Baturraden 5.835 mm/tahun, Stasiun Bendung Sumbang, Banjarsari Kulon Sumbang 5.746 mm/tahun. Adapun curah hujan minimum 3.189 mm/tahun di Stasiun Bendung Tajum, Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang

Daerah yang mempunyai hari hujan terbanyak adalah Kecamatan Baturraden dengan stasiun penakar hujan di Bendung Ketenger Baturraden yaitu 307 hari hujan/tahun, Stasiun hujan Rempoah Baturraden 245 hari hujan/tahun, Stasiun Bendung Kedung Kancil, Bogangin, Sumpiuh 225 hari hujan/tahun. Adapun hari hujan minimum 172 hari hujan/tahun di Stasiun UPT Banyumas, Sudagaran, Banyumas.

Untuk parameter curah hujan di wilayah mempunyai besaran curah hujan menunjukkan kriteria curah hujan cukup tinggi. Keberadaan Gunung Slamet yang secara geografis berada di Kabupaten Banyumas telah mendorong kondisi curah hujan tinggi. Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Baturraden merupakan beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Banyumas yang mempunyai curah hujan cukup tinggi. Curah hujan yang tinggi pada satu sisi sangat mendukung kegiatan pertanian, namun pada kondisi tertentu dapat menjadi pemicu genangan atau bahkan banjir yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut tabel banyak hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Banyumas tahun 2017.

Tabel 2.2.
Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan
di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

No	Bulan	Curah Hujan (mm^3)	Hari hujan
1	Januari	463,336	20
2	Februari	395,36	18
3	Maret	279,45	14
4	April	376,91	19
5	Mei	136,82	8
6	Juni	153,73	10
7	Juli	39,91	6
8	Agustus	12,45	3
9	September	145,00	8
10	Oktober	648,73	21
11	November	329,27	15
12	Desember	327,18	11

Sumber: Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2018

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08 % dibanding dari luas wilayah Jawa Tengah (3.254 juta Ha). Luas wilayah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.528 Ha atau 24,50 %, lahan pertanian bukan sawah seluas 69.026 Ha atau 51,99 % dan lahan bukan pertanian seluas 31.204 Ha atau 23,50 %. Berikut luas wilayah Kabupaten Banyumas menurut penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.3.
Luas Wilayah Kabupaten Banyumas Menurut Penggunaan Lahan
Tahun 2013 – 2017

No.	Luas Penggunaan Lahan (Ha)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Lahan Pertanian	93.864	93.845	85.187	101.554	102.420
	a. Lahan Sawah	32.266	32.255	32.600	32.528	32.163
	b. Lahan Pertanian Bukan Sawah	61.598	61.590	52.587	69.026	70.257
2.	Lahan Bukan Pertanian	38.395	38.914	47.572	31.205	30.339
	Total	132.759	132.759	132.759	132.759	132.759

Sumber : Kabupaten Banyumas Dalam Angka, 2013-2016, Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2018 Diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat penggunaan lahan sawah memiliki luas yang lebih kecil dibandingkan dengan lahan pertanian bukan sawah. Penggunaan lahan pertanian bukan sawah dapat berupa tambak, kebun, hutan dan lain-lain. Di samping itu, dapat dilihat bahwa luas penggunaan lahan sawah mengalami penurunan tiap tahunnya, sedangkan luas lahan pertanian bukan sawah semakin meningkat. Hal ini dapat diakibatkan karena terjadinya kecenderungan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun yang semakin meningkat serta kebutuhan untuk kegiatan non pertanian yang semakin meluas. Kawasan terbangun umumnya digunakan untuk pembangunan perumahan/permukiman, industri serta jasa dan perdagangan.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, diidentifikasi potensi wilayah Kabupaten Banyumas untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas 2011-2031. Pengembangan kawasan budidaya dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian dan asas kesesuaian untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang optimal. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat dimasa yang datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian dimaksudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

Tabel 2.4.
Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Banyumas
Berdasarkan RTRW Kabupaten Banyumas

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak,

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Kecamatan Patikraja, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja, luas kurang lebih 36.616 Ha
2	Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan	
	a. *Kawasan pertanian lahan basah* kurang lebih 32.310 Ha	Meliputi wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Wangon.
	b. *Kawasan pertanian lahan kering* seluas kurang lebih 13.623 Ha	Wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak.
3	Kawasan Peruntukan Hortikultura	Seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan lahan kering
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan	Tersebar di bagian selatan Kabupaten Banyumas yang mencakup wilayah Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang dan Kecamatan Wangon.
5	Kawasan Peternakan	Semua kecamatan kecuali Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara
6	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan Minapolitan meliputi 13 kecamatan dengan luasan 432 Ha, yaitu Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, dan Kecamatan Patikraja.
7	Kawasan Pertambangan Mineral	

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam	Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Somagede, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, dan Kecamatan Tambak.
	b. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Kecamatan Lumbir, Gumelar, Pekuncen, Ajibarang, Wangon, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Sumbang, Kembaran, Jatilawang, Purwojati, Rawalo, Patikraja, Kebasen, Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh, dan Tambak.
8	Kawasan Pertambangan Panas Bumi	Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Pekuncen.
9	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kecamatan Baturaden, Sumbang, Kedungbanteng, Cilongok, Pekuncen, Kembaran, Sokaraja, Ajibarang, Gumelar, Lumbir, Wangon, Purwojati, Jatilawang, Kebasen, Banyumas, Somagede, Kalibagor, Patikraja, Rawalo, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Karanglewas, dan Perkotaan Purwokerto.
10	Kawasan peruntukan industry	
	a. Kawasan peruntukan industri besar dan menengah	Kecamatan Kemranjen, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang seluas kurang lebih 580 hektar.
	b. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro	Di setiap kecamatan
11	Kawasan Peruntukan Permukiman	Perdesaan dan Perkotaan

Sumber : RTRW Kabupaten Banyumas 2011-2031

Perkembangan potensi wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan kondisi aktual pemanfaatan ruang dalam kajian Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Banyumas tahun 2016 antara lain sebagai berikut:

1. Sektor pertanian yang merupakan kekuatan Kabupaten Banyumas mengalami penurunan. Kebijakan pertanian terkendala pada kebijakan pengendalian alih fungsi

lahan, dimana penetapan LPPB belum ditindaklanjuti dalam Perda, sehingga belum efektif untuk mengontrol alih fungsi lahan pertanian.
2. Investor industri khususnya industri besar-menengah kurang meminati lokasi yang ditetapkan, selain harga lahan menjadi tinggi, aspek dukungan infrastruktur menuju site sangat terbatas
3. Pengembangan kawasan strategis minapolitan dan agropolitan di Kabupaten Banyumas masih terfokus pada pada sistem budidaya.
4. Pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata pada objek wisata alam maupun buatan melalui investasi pariwisata dan keterlibatan masyarakat masih terbatas dan hanya terfokus pada potensi Kawasan Pariwisata Baturraden, di mana dukungan fasilitas pendukung yang sudah baik.
5. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rumah tinggal tanpa mengajukan izin.

Kawasan peruntukan pertanian merupakan lahan yang paling banyak mengalami alih fungsi menjadi penggunaan lain. Berdasarkan pendataan lahan pertanian oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2018 lahan pertaian di Kabupaten Banyumas telah berkurang menjadi seluas 34.048 Ha yang terdiri atas lahan basah/sawah dan tegalan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan wilayah, namun demikian pengendalian alih fungsi lahan pertanian perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Banyumas belum optimal. Pembangunan infrastruktur kawasan dan pengembangan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan belum mampu mendorong rantai produksi perikanan yang efisien untuk memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari dinamika lingkungan eksternal. Berbagai dinamika eksternal tersebut menjadi peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan program pembangunan.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa kegiatan strategis jangka menengah nasional yang diprioritaskan untuk pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kegiatan strategis di Jawa Tengah tersebut berada di wilayah Kabupaten Banyumas dan berpotensi mempengaruhi pengembangan wilayah Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto–Kroya;
2. Reaktivasi jalur KA antara Purwokerto–Wonosobo; dan
3. Pembangunan Jalan Tol Pejagan–Pemalang.

Selain kegiatan-kegiatan strategis tersebut rencana pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga juga perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Banyumas. Pengembangan bandara membuka peluang pengembangan pariwisata Kabupaten Banyumas untuk kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran). Dalam industri pariwisata atau pameran MICE adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan.

Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga telah bekerjasama membangun akses yang terhubung dengan Jembatan Linggamas, sebagai jalur alternatif yang menghubungkan kedua wilayah dan pendukung pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman. Sementara itu kecederungan aglomerasi Kabupaten Banyumas dan kabupaten sekitarnya telah diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengembangkan transportasi masal dengan mengoperasionalkan *Bus Rapid Transit* (BRT) Koridor Banyumas-Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mensinergikan operasional BRT tersebut dalam mengembangkan transportasi wilayah yang dilalui rute BRT sekaligus untuk mendukung pengembangan Bandara Jendral Besar Soedirman.

2.1.1.8. Kondisi Lingkungan Hidup

Pembangunan daerah mempertimbangkan kapasitas daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup sebagai faktor pembatas agar pembangunan daerah dapat berkelanjutan. Dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Analisis kondisi lingkungan dalam KLHS RPJMD mengadopsi cara penghitungan kapasitas lingkungan alam mengintegrasikan hasil dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan pedoman lainnya yang relevan.

Hasil analisis kondisi lingkungan menjadi dasar perumusan skenario pembangunan yang merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan menggunakan analisis secara *Bussiness As Usual (BAU)* terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB pada tahun 2023 berdasarkan kinerja pembangunan Kabupaten Banyumas. Kondisi lingkungan hidup dan proyeksinya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Daya Dukung Air Permukaan

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*supply* air) dan kebutuhan air (*demand* air). Ketersediaan air dihitung dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Berdasarkan analisis KLHS ketersediaan air di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah sebesar 1.359.208.044 m^3/tahun. Sedangkan kebutuhan air di Kabupaten Banyumas adalah sebesar 1.120.877.035 m^3/tahun. Nilai daya dukung air diperoleh dengan membandingkan ketersediaan air dengan kebutuhan air. Dengan demikian nilai daya dukung air permukaan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah 1,21, yaitu kelompok daya dukung air bersyarat atau sedang.

Dengan memproyeksikan berbagai variabel yang mempengaruhi daya dukung air tanpa upaya pengendalian dan konservasi sumber daya air daya dukung air akan terus menurun dan akan terjadi defisit air permukaan sekitar 0,1 milyar m^3/tahun yang mengakibatkan daya dukung air permukaan turun dari 1,21 pada tahun 2017 menjadi 0,93 pada tahun 2023. Jika proyeksi ditambahkan sampai dengan tahun 2030 sesuai arahan TPB, dengan variabel peningkatan ditambahkan pada jumlah penduduk, sedangkan faktor lainnya dinyatakan tetap maka akan ada kenaikan kebutuhan air di Kabupaten Banyumas menjadi 1.427.486.075 milyar m^3. Dengan demikian daya

dukung air semakin turun pada 2030 menjadi 0,92 atau defisit sebesar 0,107 milyar m^3.

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Banyumas, yaitu Indeks Daya Dukung Lahan untuk Pangan (DDL), dengan rumus jumlah produksi beras per tahun dibagi dengan jumlah konsumsi beras per tahun.

Hasil perhitungan daya dukung pangan/indeks daya dukung lahan untuk pangan KLHS RPJMD diketahui bahwa daya dukung lahan untuk pangan di Kabupaten Banyumas tahun 2017 sebesar 1,43 dengan kondisi surplus sebesar 69.559 ton. Hasil perhitungan tersebut dibangun dengan asumsi luas lahan pertanian pagan sama dengan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 36.616 Ha.

c. Daya Dukung Lahan Terbangun (DDLB)

Daya dukung lahan untuk bangunan mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun. daya dukung lahan terbangun Kabupaten Banyumas secara keseluruhan sebesar 2,67 termasuk dalam daya dukung lahan permukiman baik. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Banyumas masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan wilayah. Namun jika dilihat daya dukung lahan terbangun pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1 kecamatan yaitu Kecamatan Purwokerto Timur berada pada kategori daya dukung lahan terbangun terlampaui atau buruk, 13 kecamatan berada pada kategori bersyarat/sedang terdapat, dan 13 kecamatan dalam kategori baik.

d. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya Dukung fungsi lindung (DDL), memiliki kisaran nilai 0 sampai dengan 1. Nilai DDL mendekati angka 1 berarti fungsi lindung suatu wilayah semakin baik. Sebaliknya nilai DDL mendekati 0 berarti bahwa fungsi lindung semakin buruk.

Daya dukung fungsi lindung Kabupaten Banyumas sebesar 0,43 termasuk dalam kategori DDL sedang menuju baik. Luas lahan dengan vegetasi/tanaman tegakan memberikan kontribusi besar dalam daya dukung fungsi lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung fungsi lindung menjadi rendah. Hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 menunjukan bahwa dengan perubahan lahan pada masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan wilayah koefisien lindung Kabupaten Banyumas masih bisa meningkat nilainya menjadi 0,44 pada tahun 2023, dengan meningkatkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi lindung.

e. Daya Tampung Lahan

Kondisi daya tampung lahan didefinisikan dengan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Salah satu metode untuk mengidentifikasi daya tampung lahan adalah menggunakan pemetaan kemampuan lahan. Kemampuan lahan dibagi menjadi 8 kelas, dimana semakin rendah kelasnya maka dapat digunakan untuk seluruh kegiatan budidaya dan sebaliknya semakin tinggi kelasnya maka hanya diarahkan untuk kawasan lindung atau konservasi dan dihindarkan dari kegiatan budidaya apa pun. Dalam menyusun kemampuan lahan dilakukan *overlay/superimposed* terhadap peta dengan kriteria/faktor yang ada di Kabupaten Banyumas sehingga dapat diidentifikasi kelas dan sub kelas lahan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut. Dari hasil analisis kemampuan lahan di atas, dapat

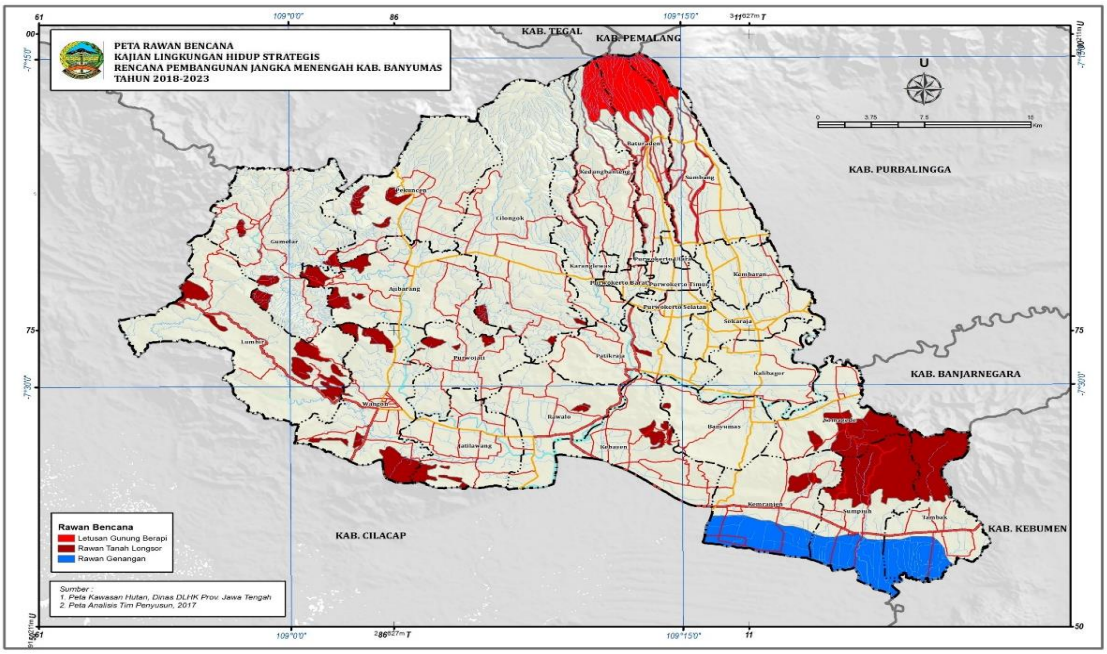
diketahui bahwa kelas kemampuan lahan di Kabupaten Banyumas termasuk di dalam kelas kemampuan lahan kelas zona I, II, zona III, Zona IV, VI dan VII.

Tabel 2.5.
Kriteria dan Pemanfaatan Kelas Lahan di Kabupaten Banyumas

KATEGORI	LUAS	KRITERIA	PEMANFAATAN
I	6.284,72	1. Tidak mempunyai atau hanya sedikit hambatan yang membatasi penggunaannya. 2. Sesuai untuk berbagai penggunaan, terutama pertanian. 3. Karakteristik lahannya antara lain: topografi hampir datar - datar, ancaman erosi kecil, kedalaman efektif dalam, drainase baik, mudah diolah, kapasitas menahan air baik, subur, tidak terancam banjir	Pertanian: 1. Tanaman pertanian semusim. 2. Tanaman rumput. 3. Hutan dan cagar alam.
II E1	28.108,21	1. Mempunyai beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan tindakan konservasi yang sedang. 2. Pengelolaan perlu hati-hati termasuk tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan.	Pertanian: 1. Tanaman semusim. 2. Tanaman rumput. 3. Padang penggembalaan 4. Hutan produksi. 5. Hutan lindung. 6. Cagar alam.
II E1 O1	4.377,43		
II L1	6.040,58		
II O1	694,24		
III L2	25.503,26	1. Mempunyai beberapa hambatan yang berat yang mengurangi pilihan penggunaan lahan dan memerlukan tindakan konservasi khusus dan keduanya. 2. Mempunyai pembatas lebih berat dari kelas II dan jika dipergunakan untuk tanaman perlu pengelolaan tanah dan tindakan konservasi lebih sulit diterapkan. 3. Hambatan pada angka I membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, pilihan tanaman atau kombinasi dari pembatas tersebut.	a. Pertanian: 1. Tanaman semusim. 2. Tanaman yang memerlukan pengolahan tanah. 3. Tanaman rumput. 4. Padang rumput. 5. Hutan produksi. 6. Hutan lindung dan cagar alam. b. Non-pertanian.
IV L3	35.367,75	1. Hambatan dan ancaman kerusakan tanah lebih besar dari kelas III, dan pilihan tanaman juga terbatas. 2. Perlu pengelolaan hati-hati untuk tanaman semusim, tindakan konservasi lebih sulit diterapkan.	a. Pertanian: 1. Tanaman semusim dan tanaman pertanian pada umumnya. 2. Tanaman rumput. 3. Hutan produksi. 4. Padang penggemba-laan. 5. Hutan lindung dan suaka alam. b. Non-pertanian.
IV L3 E2	1.484,25		
VI L4	25.259,43	1. Mempunyai faktor penghambat berat yang menyebabkan penggunaan tanah sangat terbatas karena mempunyai ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan. 2. Umumnya terletak pada lereng curam, sehingga jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi.	a. Pertanian: 1. Tanaman rumput. 2. Padang penggembalaan. 3. Hutan produksi. 4. Hutan lindung dan cagar alam. b. Non-pertanian.

KATEGORI	LUAS	KRITERIA	PEMANFAATAN
VII L5	5.794,49	Mempunyai faktor penghambat dan ancaman berat yang tidak dapat dihilangkan, karena itu pemanfaatannya harus bersifat konservasi. Jika digunakan untuk padang rumput atau hutan produksi harus dilakukan pencegahan erosi yang berat.	1. Padang rumput. 2. Hutan produksi.
Total	**138.914,41**		

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023



Gambar 2.3.
Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Banyumas
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

f. Kinerja Jasa Ekosistem

Kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan ukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat dipantau. Layanan ekosistem meliputi 4 fungsi layanan utama, yaitu fungsi penyedia, fungsi pengatur dan/atau pengendali, fungsi sosial budaya atau kultur, dan fungsi pendukung primer. Kinerja jasa ekosistem dalam KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas terdiri dari 9 jasa ekosistem yang dirangkum dari Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Persentase Luasan Jasa Ekosistem Kabupaten Banyumas

No.	Jasa Lingkungan	Kelas		
		Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
1.	Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan	62,60%	9,59%	27,81%
2.	Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih	32,23%	25,01%	42,76%

No.	Jasa Lingkungan	Kelas		
		Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
3.	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	18,69%	61,51%	19,80%
4.	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir	51,53%	37,25%	11,23%
5.	Jasa Ekosistem Perlindungan Pencegahan Bencana	50,71%	46,47%	2,82%
6.	Jasa Ekosistem Pemurnian Air	33,14%	17,06%	49,80%
7.	**Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pengurai Limbah**	24,05%	49,76%	26,19%
8.	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	19,00%	24,63%	56,37%
9.	Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas	18,67%	58,39%	22,94%

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas, 2018

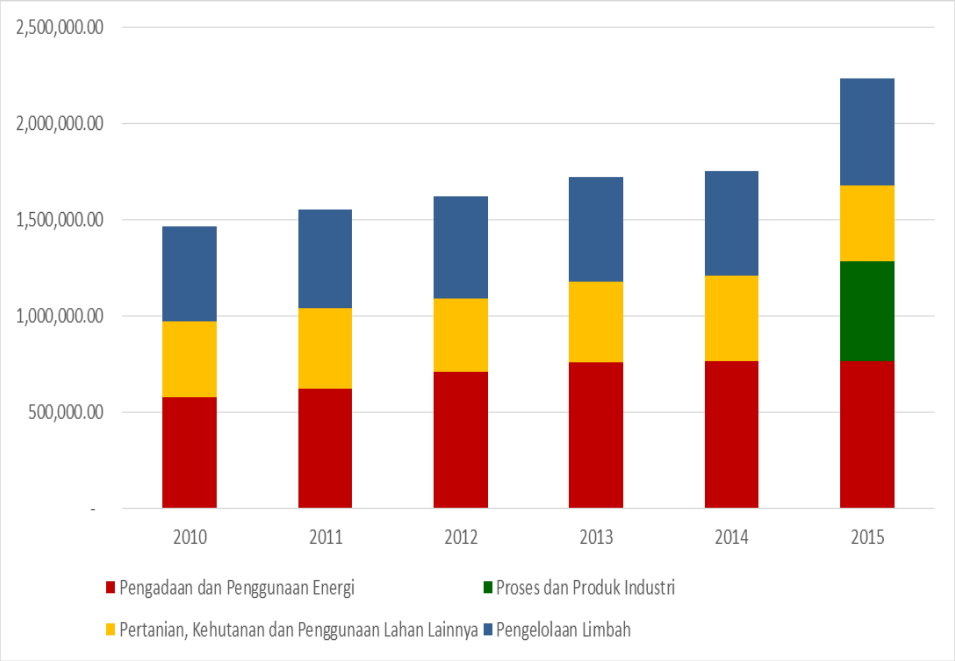
g. Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dihasilkan dari penggunaan energi untuk kegiatan transportasi, perubahan lahan, kegiatan pertanian, dan pengelolaan limbah. Pengelolaan GRK sangat penting dilakukan dalam rangka pengelolaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Berikut tabel emisi gas rumah kaca di Kabupaten Banyumas:

Tabel 2.7.
Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Banyumas

No	Kategori	Jumlah Emisi (ton CO2eq)	Persentase
1	1A3 Transportasi	568.804,99	25,44%
2	2A Industri Mineral	517.387,50	23,14%
3	3C Sumber Emisi Agregat	304.103,76	13,60%
4	4A Pembuangan Limbah Padat	233.914,49	10,46%
5	4C Insinerasi Dan Pembakaran Terbuka	189.404,42	8,47%
6	4D Pengolahan Limbah Cair Domestik	129.953,11	5,81%
7	1A4 Penggunaan Energi Lainnya	126.728,34	5,67%
8	1A2 Industri Pengolahan	71.934,41	3,22%
9	3A Ternak	53.923,40	2,41%
10	3B Lahan	34.504,49	1,54%
11	4B Pengolahan Biologi	4.343,23	0,19%
12	2D Produk Non-Energi dan Pelarut	765,47	0,03%
	Jumlah	**2.235.767,61**	**100,00%**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas, 2018



Gambar 2.4.
Emisi GRK Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2015
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas, 2018

Berdasarkan gambar tersebut dapat diidentifikasi beberapa hal, antara lain:

- Emisi terendah tahun 2010 sebesar 1.465.870,88 ton CO2e.
- Emisi tertinggi tahun 2015 sebesar 2.235.767,61 ton CO2e.
- Kenaikan emisi GRK tertinggi tahun 2014-2015 sebesar 27,55%.
- Kenaikan emisi GRK terendah tahun 2013-2014 sebesar 1,76%.
- Dalam kurun waktu 2010-2015, emisi GRK meningkat sebesar 45,90% atau rata-rata 9,18% per tahun.

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Karakteristik geografi wilayah tidak hanya membentuk potensi bagi pengembangan wilayah namun juga menjadi potensi bagi terjadinya bencana. Potensi bencana di Kabupaten Banyumas terdiri atas bencana tanah longsor, rawan bencana banjir, dan rawan bencana angin topan, bencana gunung berapi, bencana keakaran hutan dan lahan. Adapun wilayah rawan bencana di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Wilayah rawan bencana tanah longsor diidentifikasi berdasarkan tipologi wilayah dan tingkat kerawanan. Penentuan tipologi wilayah rawan longsor didasarkan pada kemiringan tanah. Penetapan tingkat kerawanan longsor ditinjau dari dua hal yaitu berdasar kondisi fisik alam dan aktivitas manusia. Wilayah Kabupaten Banyumas yang telah teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari 17 kecamatan dan 66 desa, sebagai berikut:

1) Kecamatan Pekuncen, yaitu di Desa Cibangkong, Glempang, Krajan, Kranggan, Petahunan, Tumiyang, Karangkemiri dan Semedo;

2) Kecamatan Gumelar, yaitu di Desa Samudra, Samudra Kulon, Gumelar, Kedungurang, Gancang, Paningkaban, Karangkemojing, Cihonje, Cilangkap, dan Telaga;
3) Kecamatan Lumbir, yaitu di Desa Dermaji, Kedunggede, Cidora, Cirahab, Lumbir, dan Parungkamal;
4) Kecamatan Wangon, yaitu Desa Pengadegan, Cikakak, Jurangbahas, Randegan, Rawaheng dan Windunegara;
5) Kecamatan Ajibarang : Desa Sawangan, Darmakradenan dan Tipar Kidul;
6) Kecamatan Cilongok, yaitu Desa Panusupan, Jatisaba dan Gununglurah;
7) Kecamatan Purwojati, yaitu Desa Kaliwangi, Klapasawit dan Kalitapen;
8) Kecamatan Banyumas, yaitu Desa Binangun dan Karangrau;
9) Kecamatan Somagede, yaitu Desa Kemawi, Kanding, Klinting dan Tanggeran;
10) Kecamatan Kemranjen, yaitu Desa Karangsalam, Karanggintung, Pageralang, Petarangan, Kebarongan dan Alasmalang;
11) Kecamatan Kebasen, yaitu Desa Tumiyang dan Kalisalak;
12) Kecamatan Patikraja, yaitu Desa Kedungrandu dan Karangendep;
13) Kecamatan Kedungbanteng, yaitu Desa Melung, Dawuhan Kulon dan Baseh;
14) Kecamatan Rawalo, yaitu Desa Tembaknegara dan Desa Tipar;
15) Kecamatan Sumpiuh, yaitu Desa Banjarpenapen, Ketanda dan Bogangin;
16) Kecamatan Jatilawang, yaitu Desa Jatilawang; dan
17) Kecamatan Tambak, yaitu Desa Watuagung.

b. Wilayah Rawan Bencana Banjir

Wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Banyumas meliputi Kecamatan Wangon, Jatilawang, Sumpiuh, Kemranjen, Tambak dan Kecamatan Banyumas. Genangan banjir lainnya ada di wilayah Perkotaan Purwokerto.

Kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen, dan Kecamatan Tambak dikarenakan secara geografis sebagian wilayah tersebut lebih rendah dari permukaan air laut.

c. Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Sokaraja, Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur dan Somagede.

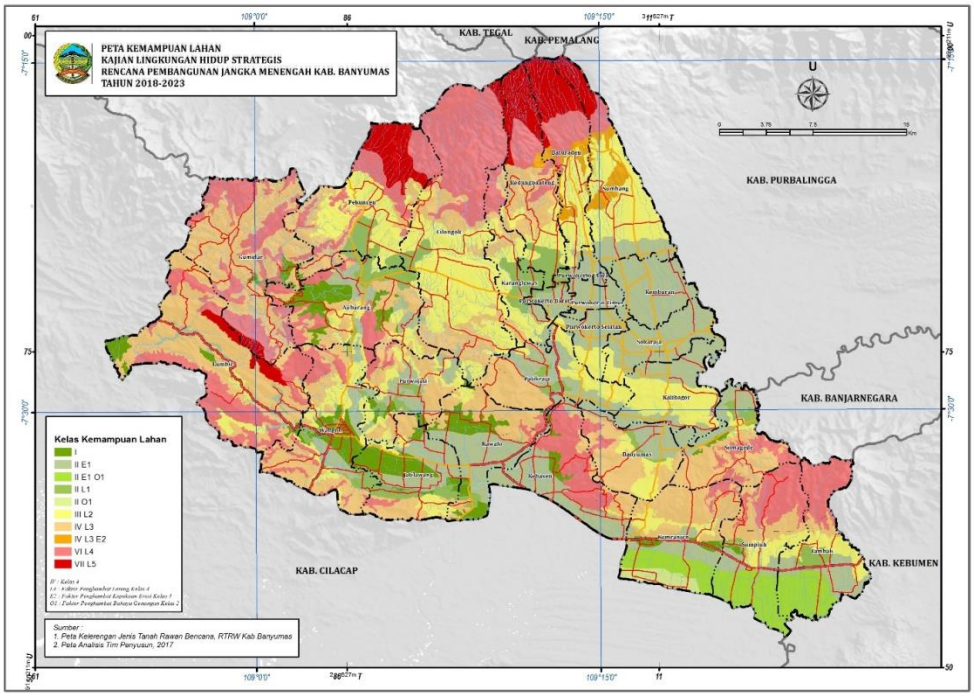
d. Wilayah Rawan Bencana Gunung Api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 18 Desa, yaitu:

a) Kecamatan Sumbang: Desa Kotayasa, Limpakuwus, Gandatapa dan Sikapat.
b) Kecamatan Baturraden: Desa Ketenger, Karangmangu, Karangsalam dan Kemutug Lor.
c) Kecamatan Karanglewas: Desa Sunyalangu.
d) Kecamatan Kedungbanteng: Desa Melung, Kutaliman, Windujaya, Kalisalak dan Baseh.
e) Kecamatan Cilongok: Desa Gununglurah, Sambirata, Sokawera dan Karangtengah.

e. Wilayah Rawan Bencana Kekeringan

Potensi bencana kekeringan di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain meliputi wilayah Kecamatan: Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, dan Pekuncen.



Gambar 2.5.
Peta Rawan Bencana Kabupaten Banyumas
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas, 2018

f. Kerentanan terhadap iklim

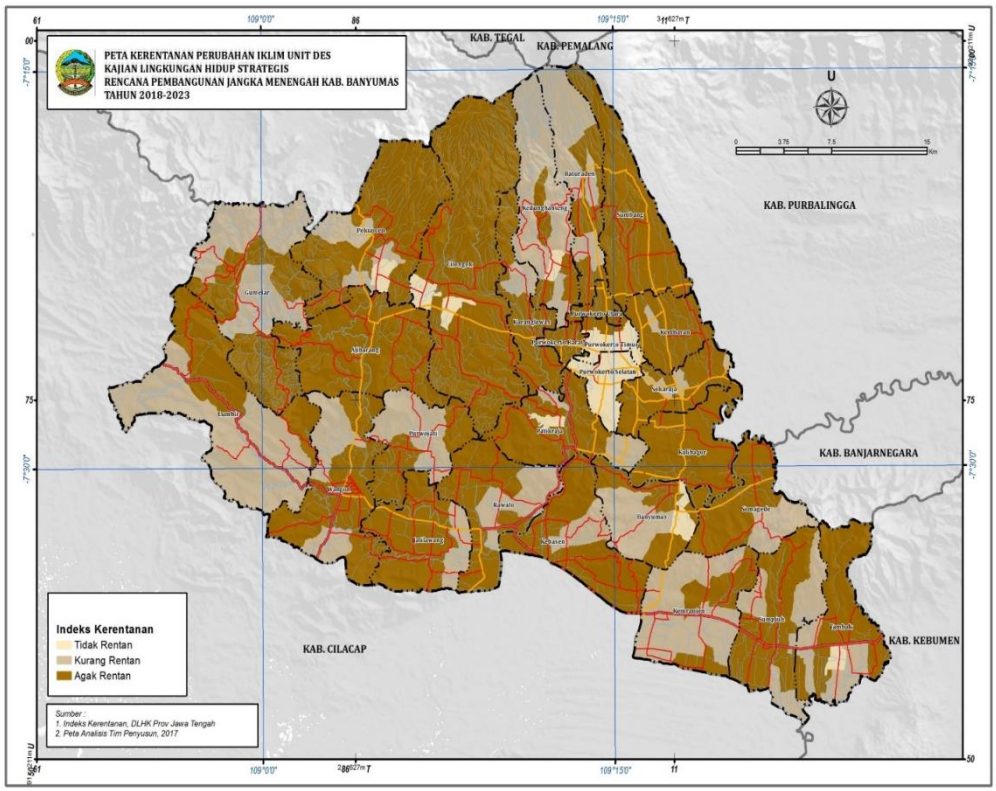
Karakteristik geografi wilayah berkorelasi terhadap iklim dan kerentanan bencana akibat perubahan iklim. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Banyumas:

Tabel 2.8.
Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim
di Kabupaten Banyumas Tahun 2018

Kategori	Desa	Persen (%)
Tidak Rentan	21	6
Kurang Rentan	85	26
Agak Rentan	225	68

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 225 desa berada pada kategori agak rentan, 85 desa berada pada kategori kurang rentan dan 21 desa berada pada kategori tidak rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori agak rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori rawan bencana lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.



Gambar 2.6.
Peta Kerentanan Iklim Kabupaten Banyumas
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas, 2018

2.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2017 sebesar 1.665.025 jiwa yang terdiri dari 824.717 laki-laki dan 833.209 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak Kecamatan Cilongok sebanyak 118.366 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 32.035 jiwa.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Laki-laki	802.316	809.984	817.383	824.717	831.816
2.	Perempuan	803.263	810.934	818.526	825.908	833.209
3.	Total	1.605.579	1.620.918	1.635.909	1.650.625	1.665.025
4.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,99	0,96	0,92	0,89	0,87

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2018

Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 1.665.025 jiwa, maka rata–rata kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah 1.254 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purwokerto Utara yaitu 7.326 jiwa/km2, dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Lumbir yaitu 433 jiwa/km2. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyumas masih terpusat di 4 kecamatan pada kawasan perkotaan Purwokerto yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kecamatan Purwokerto Timur.

Pemusatan penduduk di kawasan perkotaan perlu didukung dengan penyediaan permukiman dengan infrastruktur yang memadai untuk mencegah timbulnya permukiman liar dan permukiman kumuh. Di sisi lain peningkatan jumlah penduduk juga perlu dikendalikan karena keterbatasan daya dukung lingkungan kawasan perkotaan. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.10.
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Banyumas
Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km^2)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km^2)
1.	Lumbir	102,66	44.416	433
2.	Wangon	60,78	75.995	1.250
3.	Jatilawang	48,16	59.193	1.229
4.	Rawalo	49,64	47.445	956
5.	Kebasen	54,00	58.161	1.077
6.	Kemranjen	60,71	66.213	1.091
7.	Sumpluh	60,01	51.594	860
8.	Tambak	52,03	42.962	826
9.	Somagede	40,11	33.401	833
10.	Kalibagor	35,73	48.717	1.363
11.	Banyumas	38,09	46.759	1.228
12.	Patikraja	43,23	54.536	1.262
13.	Purwojati	37,86	32.035	846
14.	Ajibarang	66,5	95.690	1.439
15.	Gumelar	93,95	46.283	493

No.	Kecamatan	Luas wilayah (km²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km²)
16.	Pekuncen	92,7	66.430	717
17.	Cilongok	105,34	118.366	1.124
18.	Karanglewas	32,5	64.220	1.976
19.	Kedungbanteng	60,22	55.123	915
20.	Baturaden	45,53	52.211	1.147
21.	Sumbang	53,42	82.923	1.552
22.	Kembaran	25,92	81.897	3.160
23.	Sokaraja	29,92	85.552	2.859
24.	Purwokerto Selatan	13,75	77.445	5.632
25.	Purwokerto Barat	7,4	52.903	7.149
26.	Purwokerto Timur	8,42	58.544	6.953
27.	Purwokerto Utara	9,01	66.011	7.326
Jumlah Total		**1.327,59**	**1.665.025**	**1.254**

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2018

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah 49,80. Rasio ketergantungan menggambarkan banyaknya penduduk yang harus ditanggung penduduk usia kerja, rasio ketergantungan 49,80 menggambarkan bahwa 2 orang pekerja (penduduk usia produktif) menanggung 1 orang anak/lansia (penduduk non produktif).

Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki – Laki	Perempuan		
0-4	70.041	65.787	135.828	106,47
5–9	70.459	65.990	136.449	106,77
10–14	67.760	64.402	132.162	105,21
15-19	66.628	62.087	128.715	107,31
20-24	62.476	59.482	121.958	105,03
25-29	55.156	55.020	110.176	100,25
30-34	55.632	57.901	113.533	96,08
35-39	60.412	63.094	123.506	95,75
40-44	57.582	59.428	117.010	96,89
45-49	55.709	58.705	114.414	94,90
50-54	51.352	55.471	106.823	92,57
55-59	48.008	50.161	98.169	95,71
60-64	39.659	37.488	77.147	105,79
65-69	28.453	27.512	55.965	103,42
70-74	18.067	19.972	38.039	90,46
75+	24.422	30.709	55.131	79,53
Jumlah	831.816	833.209	1.665.025	99,83
0-14	208.260	136.788	345.048	106,16
15-64	552.614	558.837	1.111.451	98,89
65+	70.942	78.193	149.135	90,73
Angka Ketergantungan	50,52	49,09	49,80	

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2018

Berdasarkan proyeksi BPS, tahun 2020-2035 Indonesia akan memasuki era bonus demografi. Sejalan dengan proyeksi nasional tersebut rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas juga semakin kecil. Dengan rasio ketergantungan yang semakin kecil Kabupaten Banyumas akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi adalah dampak transisi demografi yang menurunkan proporsi umur penduduk muda dan meningkatkan proporsi penduduk usia kerja. Suatu wilayah mengalami bonus demografi jika penduduk usia produktifnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Hal ini disebut bonus karena tidak terjadi terus menerus melainkan hanya terjadi sekali dalam beratus-ratus tahun. Terjadinya bonus demografi akan menjadi peluang bagi pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan daya saing bangsa, berkembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara, pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan negara.

Bonus demografi dapat menjadi landasan pertumbuhan ekonomi, jika: (1) Suplai tenaga kerja yang besar meningkatkan pendapatan per kapita. Hal ini terjadi apabila ada kesempatan kerja yang produktif, dan bisa menabung; (2) Meningkatnya peranan perempuan, dengan jumlah anak sedikit memungkinkan perempuan memasuki pasar kerja, dan membantu peningkatan pendapatan; (2) Tabungan rumah tangga yang diinvestasikan secara produktif; (3) Modal manusia berkualitas.

Pemerintah menetapkan 4 prasyarat untuk dapat memanfaatkan peluang Bonus Demografi yaitu: penduduk harus berkualitas, peduduk produktif terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumahtangga, dan meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menindak lanjuti dengan peningkatan kualitas modal manusia, baik dari segi pendidikan, kesehatan, kecukupan gizi, kemampuan berkomunikasi, menguasai matematika dan teknologi serta aspek-aspek sosial-budaya lainnya, peningkatan lapangan kerja, dan kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai tahun 2030. Peningkatan kualitas manusia harus dimulai sekarang, karena kelompok umur 0-14 tahun akan menjadi angkatan kerja di masa datang. Perencanaan pembangunan tahunan maupun jangka menengah menjadi langkah strategis untuk menangkap peluang bonus demografi. Jika pemerintah daerah tidak bertindak untuk meningkakan kualitas pendidikan, meningkatkan kecukupan gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, dan mensinergikan program tersebut dalam perencanaan pembangunan maka rantai kemiskinan antar generasi berlanjut.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pembangunan. PDRB Kabupaten Banyumas periode Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Harga Berlaku Tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.12.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kategori Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.923.570,34	3.903.344,58	4.154.507,05	4.249.221,60	4.383.847,65
B	Pertambangan dan Penggalian	1.536.092,63	1.600.762,13	1.714.736,40	1.700.817,83	1.778.430,41
C	Industri Pengolahan	5.959.582,53	6.621.418,09	7.087.106,62	7.582.323,83	8.020.482,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31.169,42	32.795,03	31.830,71	35.872,59	37.435,88
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27.057,54	27.384,19	27.824,60	28.402,85	31.295,65
F	Konstruksi	3.401.804,88	3.526.715,48	3.739.023,76	4.160.014,82	4.563.243,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.919.741,72	5.087.139,81	5.267.271,25	5.501.759,40	5.746.184,79
H	Transportasi dan Pergudangan	1.046.028,69	1.130.987,74	1.203.063,06	1.280.498,64	1.360.426,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	899.305,15	978.307,73	1.064.039,79	1.163.709,71	1.264.217,67
J	Informasi dan Komunikasi	1.538.591,24	1.674.917,93	1.790.319,78	1.955.654,89	2.225.615,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	852.065,97	886.102,01	928.774,94	1.015.806,79	1.069.248,39
L	Real Estate	645.625,35	708.345,33	762.958,76	812.442,90	880.236,81
M,N	Jasa Perusahaan	77.519,37	81.881,35	89.818,27	96.142,12	103.068,55
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	923.773,27	936.828,98	1.013.086,86	1.026.711,75	1.021.214,69
P	Jasa Pendidikan	1.263.549,46	1.361.872,42	1.451.892,19	1.536.214,41	335.238,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	249.435,22	271.535,18	283.774,73	308.792,32	650.283,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	498.225,68	537.349,42	555.350,63	596.660,19	650.283,27
PDRB		**27.793.138,47**	**29.367.687,40**	**31.164.876,40**	**33.051.046,65**	**35.147.313,30**

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017.

Tabel 2.13.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.668.080,91	4.991.778,64	5.544.197,32	5.781.295,07	5.974.157,99
B	Pertambangan dan Penggalian	1.633.848,37	1.892.243,11	2.296.411,07	2.334.799,82	2.468.491,24
C	Industri Pengolahan	6.951.195,68	8.164.876,50	9.255.146,87	10.286.686,59	11.100.976,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29.006,75	30.567,73	31.225,44	38.579,13	43.912,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27.915,33	28.885,82	30.280,04	31.522,72	34.974,70
F	Konstruksi	3.811.031,23	4.228.131,51	4.674.249,11	5.258.224,17	5.900.335,42

Kategori	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.400.556,81	5.734.774,45	6.159.743,52	6.489.419,46	6.966.469,94
H	Transportasi dan Pergudangan	1.075.864,03	1.242.788,59	1.382.100,97	1.500.768,59	1.614.477,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	975.992,79	1.111.201,34	1.256.063,81	1.431.064,68	1.587.418,02
J	Informasi dan Komunikasi	1.447.287,52	1.544.328,88	1.626.604,46	1.769.627,28	2.123.124,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.019.971,00	1.108.157,74	1.218.363,38	1.370.744,42	1.505.691,82
L	Real Estate	660.194,57	763.107,62	851.097,64	918.643,59	1.015.690,04
M,N	Jasa Perusahaan	89.683,97	97.169,09	111.968,85	123.437,53	137.079,03
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.075.722,53	1.157.690,40	1.300.430,47	1.370.867,96	1.443.972,85
P	Jasa Pendidikan	1.671.446,69	1.875.673,84	2.034.066,86	2.174.242,29	2.411.068,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	298.954,02	339.649,88	370.498,81	404.315,47	448.149,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	532.565,56	612.791,60	656.340,74	732.701,73	810.018,89
PDRB		**31.369.317,74**	**34.923.374,71**	**38.798.789,35**	**42.016.940,50**	**45.585.979,73**

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2017

Selama tiga tahun terakhir sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Banyumas adalah sektor industri pengolahan, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Pada tahun 2017 sektor pertanian memberikan sumbangan sebesar 13,11 persen, sektor industri pengolahan sebesar 24,48 persen dan sektor perdagangan sebesar 15,88 persen. Sebagai sektor dengan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB sektor industri pengolahan telah menggeser sektor pertanian sebagai sektor andalan di Kabupaten Banyumas, di mana pada tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian adalah merupakan sektor andalan. Dilihat dari pertumbuhan sektor di Kabupaten Banyumas, dalam tiga tahun terakhir beberapa sektor terus tumbuh ditunjukan dengan kontribusi sektor tersebut yang cenderung naik, yaitu sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Perkembangan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14.
Perkembangan Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Banyumas
ADHB dan ADHK 2010 Menurut Kategori Tahun 2013–2017

Kategori	Uraian	ADHB (%)					ADHK (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,88	14,29	14,29	13,76	13,11	14,12	13,29	13,33	12,86	12,47
B	Pertambangan dan Penggalian	5,21	5,42	5,92	5,56	5,42	5,53	5,45	5,50	5,15	5,06
C	Industri Pengolahan	22,16	23,38	23,85	24,48	24,35	21,44	22,55	22,74	22,94	22,82
D	Peng. Listrik & Gas	0,09	0,09	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	12,15	12,11	12,05	12,51	12,94	12,24	12,01	12,00	12,59	12,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,22	16,42	15,88	15,44	15,28	17,70	17,32	16,90	16,65	16,35
H	Transportasi dan Pergudangan	3,43	3,56	3,56	3,57	3,54	3,76	3,85	3,86	3,87	3,87
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,11	3,18	3,24	3,41	3,48	3,24	3,33	3,41	3,52	3,60
J	Informasi dan Komunikasi	4,61	4,42	4,19	4,21	4,66	5,54	5,70	5,74	5,92	6,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	3,17	3,14	3,26	3,30	3,07	3,02	2,98	3,07	3,04
L	Real Estate	2,10	2,19	2,19	2,19	2,23	2,32	2,41	2,45	2,46	2,50
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,28	0,29	0,29	0,30	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	3,43	3,31	3,35	3,26	3,17	3,32	3,19	3,25	3,11	2,91
P	Jasa Pendidikan	5,33	5,37	5,24	5,17	5,19	4,55	4,64	4,66	4,65	0,95
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,95	0,97	0,95	0,96	0,98	0,90	0,92	0,91	0,93	1,85
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,70	1,75	1,69	1,74	1,78	1,79	1,83	1,78	1,81	1,85
PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017.

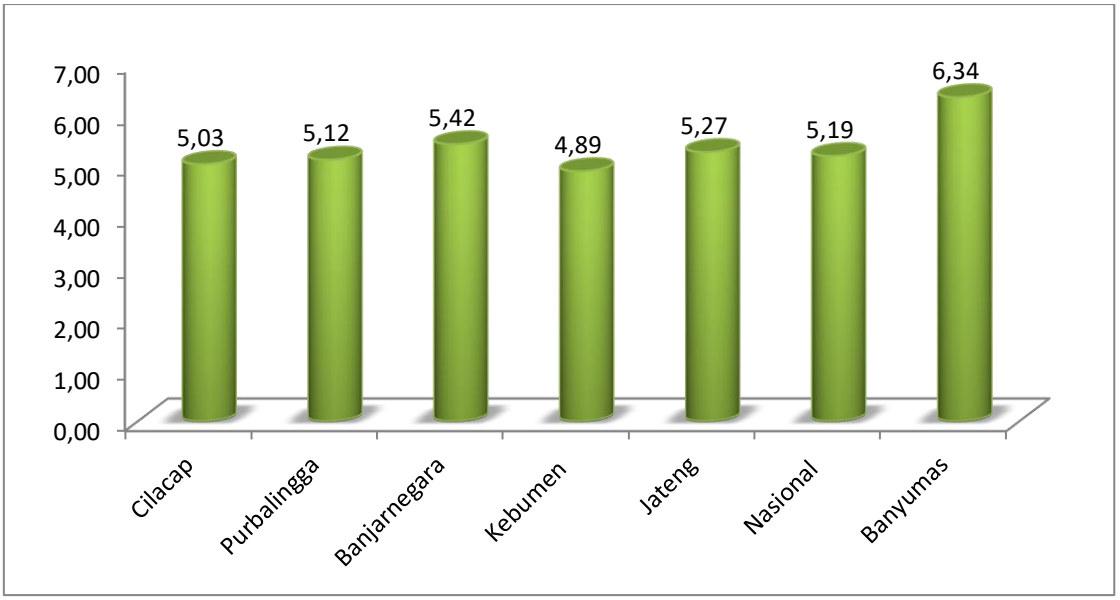
Peningkatan kontribusi berbagai sektor dalam PDRB Kabupaten Banyumas mengindikasikan pertumbuhan positif pada hampir seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2016 adalah pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,26 persen, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,37 persen, kemudian Informasi dan Komunikasi sebesar 9,23 persen. Pertumbuhan PDRB secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas ADHK 2010
Menurut Kategori Tahun 2013-2017

Kategori	Uraian	Tahun				
		2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,26	-0,52	5,84	2,85	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	6,49	4,21	2,12	4,04	4,56
C	Industri Pengolahan	11,54	11,11	8,63	5,42	5,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,24	5,22	2,07	7,16	4,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,96	1,21	1,61	2,08	10,18
F	Konstruksi	2,80	3,67	6,02	11,26	9,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,87	3,40	3,35	4,65	4,44
H	Transportasi dan Pergudangan	9,34	8,12	6,84	5,97	6,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,33	8,78	8,76	9,37	8,64
J	Informasi dan Komunikasi	7,03	8,86	6,89	9,23	13,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,93	3,99	4,82	9,37	5,26
L	Real Estate	11,31	9,71	7,71	6,49	8,34
M,N	Jasa Perusahaan	17,45	5,63	9,69	7,04	7,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,44	1,41	8,14	1,34	2,39
P	Jasa Pendidikan	9,98	7,78	6,61	5,81	7,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,75	8,86	4,51	8,82	8,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,02	7,85	3,35	7,44	8,99
PDRB		**6,97**	**5,67**	**6,12**	**6,05**	**6,34**

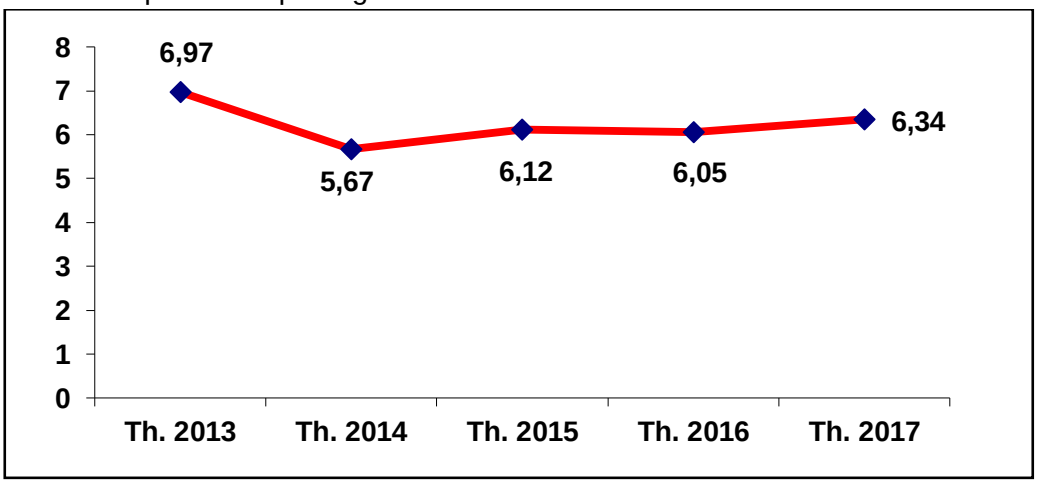
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tercermin dari pertumbuhan berbagai sektor PDRB yang menurut data BPS sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 6,34% (yoy), lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah, Nasional, dan bahkan dibandingkan dengan Kabupaten sekitar.



Gambar 2.7.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 dengan capaian pada tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Selama rentang waktu 5 tahun, ekonomi Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan fluktuatif dari 6,97% pada tahun 2013, turun menjadi menjadi 5,67% pada tahun 2014, naik menjadi 6,12% pada tahun 2015, menjadi 6,05% pada tahun 2016, dan menjadi 6,34% pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tahun 2013 s.d 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.8.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 (%)
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2013-2017

Ditinjau dari aspek pengeluaran, PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2017 didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga yakni sebesar 69,23%, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto hanya sebesar komponen Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB) sebesar 38,17%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan penurunan selama kurun waktu lima tahun dari sebesar 79,12% pada tahun 2015. Secara rinci data kontribusi PDRB Kabupaten Banyumas menurut pengeluaran selama kurun waktu empat tahun yakni mulai tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyumas
ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2017

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (%)	79,12	75,34	71,63	70,48	69,23
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR T (%)	1,21	1,28	1,15	1,15	1,15
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (%)	9,88	9,69	9,77	9,51	9,26
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	38,3	38,91	37,77	38,19	38,17
5	Perubahan Inventori (%)	5,46	2,44	0,85	0,37	0,35
6	Net Ekspor	-33,98	-27,65	-21,17	-19,70	-18,15
	PDRB Total	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017

PDRB per kapita Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan, Pada tahun 2013, PDRB per kapita sebesar Rp. 17,31 juta, meningkat menjadi Rp. 20,02 juta di tahun 2016.

Tabel 2.17.
PDRB Perkapita Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017

No	PDRB Perkapita	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Atas Dasar Harga Berlaku	19,538	21,547	23,717	25,455	27,379
2	Atas Dasar Harga Konstan 2010	17,310	18,120	19,050	20,023	21,109

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2013-2017

2.2.1.2. Laju Inflasi

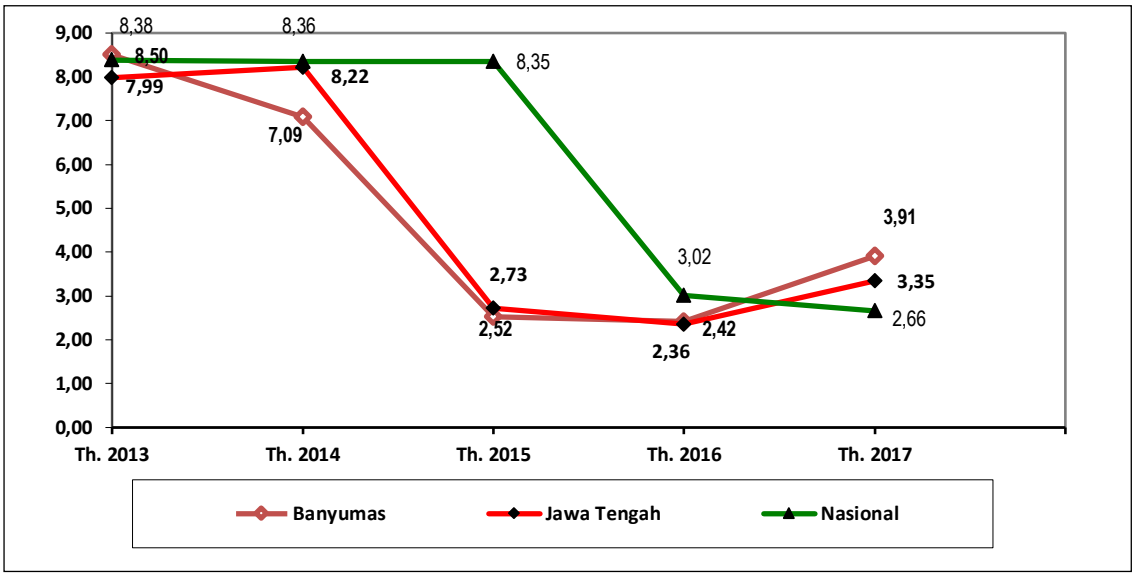
Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Laju inflasi di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukan perkembangan yang fluktuatif dengan trend mengalami penurunan dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Inflasi yang terjadi pada tahun 2017 di Kabupaten Banyumas 3,91% lebih tinggi dari Inflasi di Jawa Tengah sebesar 3,35% dan

lebih tinggi dari Inflasi Nasional sebesar 2,66%. Perbandingan laju inflasi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18.
Laju Inflasi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2013-2017

No.	Variabel	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kabupaten Banyumas	%	8,50	7,09	2,52	2,42	3,91
2.	Provinsi Jawa Tengah	%	7,99	8,22	2,73	2,36	3,71
3.	Nasional	%	8,38	8,36	3,35	3,02	2,66

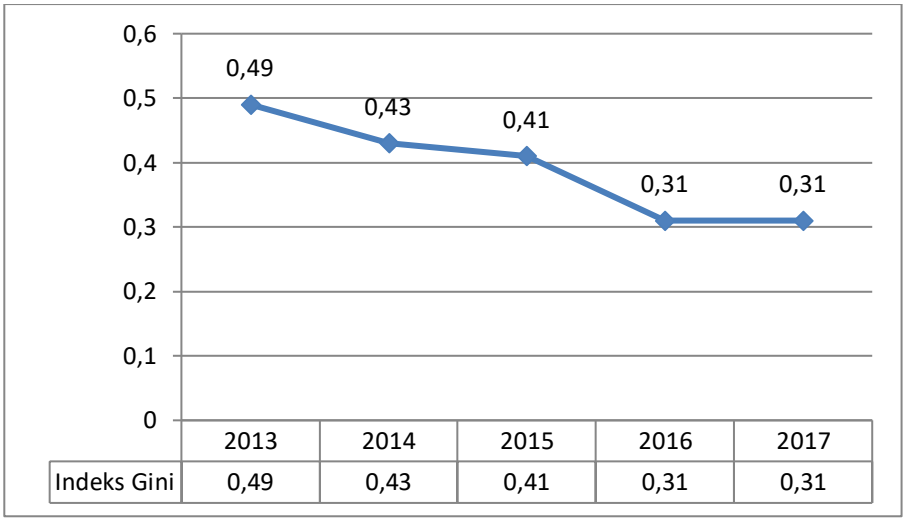
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2013-2017



Gambar 2.9.
Laju Inflasi Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2013–2017
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas 2013-2017

2.2.1.3. Indeks Gini

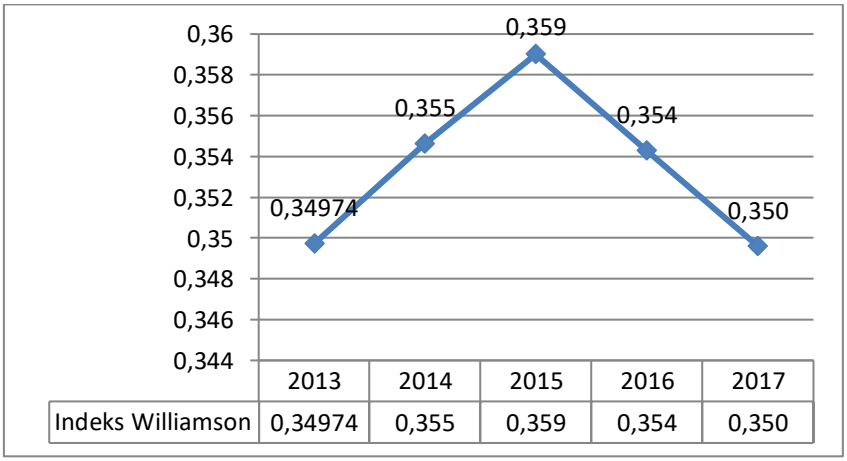
Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Perkembangan Indeks Gini di Banyumas dalam kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan angka yang cenderung membaik. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,49 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2017 sebesar 0,31. Perkembangan Indeks Gini tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.10.
Indeks Gini Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017
Sumber: Bappedalitbang dan BPS 2017

2.2.1.4. Indeks Williamson

Indek Williamson memberikan gambaran tentang kondisi dan keberhasilan pembangunan ditinjau dari aspek penyebaran hasil pembangunan. Angka Indeks Williamsom yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin kecil. Hasil perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Banyumas tahun 2013 mencapai 0,34974, tahun 2014 meningkat mencapai 0,35464 dan tahun 2015 meningkat sampai dengan 0,35901 dan tahun 2016 menurun mencapai 0,3543, dan menurun kembali di tahun 2017 sebesar 0,3496. Hal ini memberikan makna bahwa ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Banyumas cukup kecil dan pembangunan di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas cukup merata.



Gambar 2.11.
Indeks Williamson Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2016
Sumber: Bappedalitbang dan BPS 2017

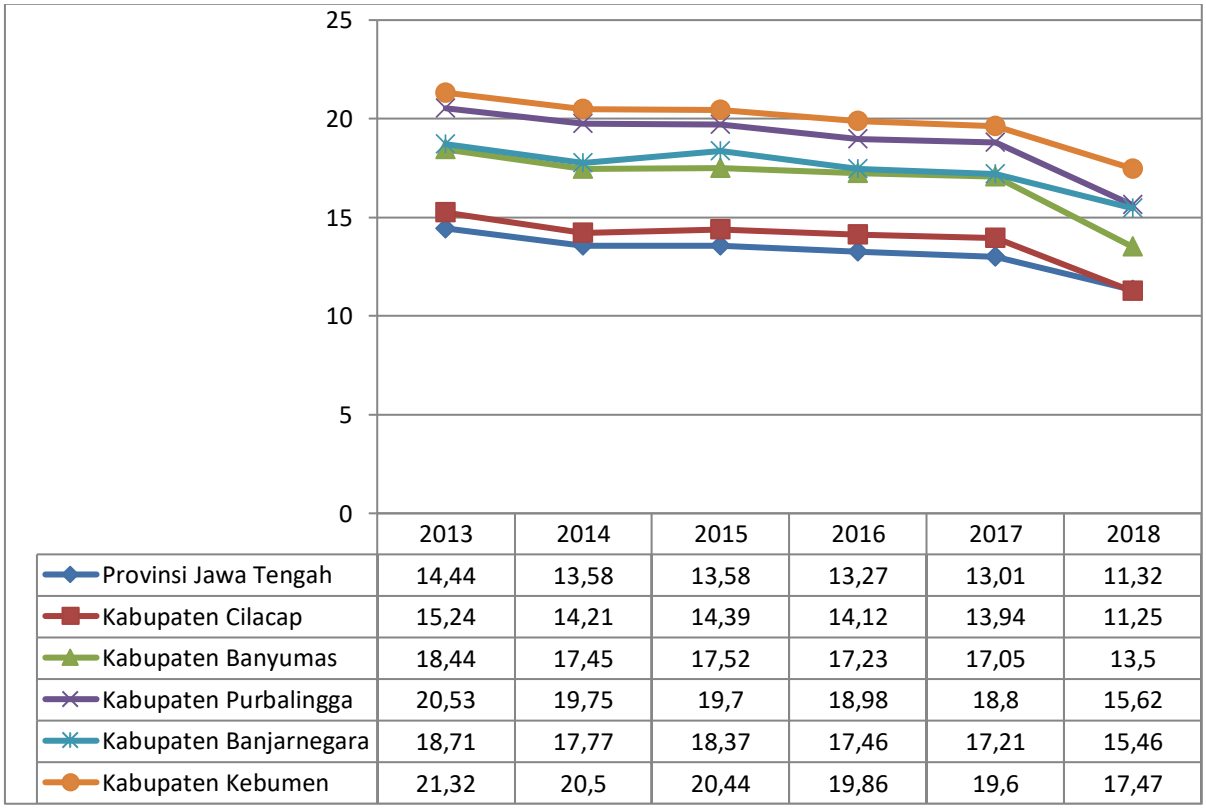
2.2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2013–2017 cenderung mengalami penurunan, meskipun jumlah absolutnya masih cukup besar. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebesar 17.05 %. Dalam lingkup regional wilayah Barlingmascakeb prosentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas Tahun 2017 menempati peringkat ke-4 tertinggi dari 5 kabupaten, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.19.
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Wilayah		Persentase Penduduk Miskin				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Provinsi Jawa Tengah	14.44	13.58	13.58	13.27	13.01	11.32
Kabupaten Cilacap	15.24	14.21	14.39	14.12	13.94	11.25
Kabupaten Banyumas	18.44	17.45	17.52	17.23	17.05	13.50
Kabupaten Purbalingga	20.53	19.75	19.70	18.98	18.8	15.62
Kabupaten Banjarnegara	18.71	17.77	18.37	17.46	17.21	15.46
Kabupaten Kebumen	21.32	20.50	20.44	19.86	19.6	17.47

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2018



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Provinsi Jawa Tengah	14,44	13,58	13,58	13,27	13,01	11,32
Kabupaten Cilacap	15,24	14,21	14,39	14,12	13,94	11,25
Kabupaten Banyumas	18,44	17,45	17,52	17,23	17,05	13,5
Kabupaten Purbalingga	20,53	19,75	19,7	18,98	18,8	15,62
Kabupaten Banjarnegara	18,71	17,77	18,37	17,46	17,21	15,46
Kabupaten Kebumen	21,32	20,5	20,44	19,86	19,6	17,47

Gambar 2.12.
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2018

Selanjutnya berdasarkan posisi relatifnya persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas pada Tahun 2017 masih berada di atas capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01 % dan Nasional sebesar 10,12 %. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan menjadi permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Namun cakupan IPM lebih sempit sebagai ukuran tingkat pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia hanya mampu mengukur sebagian aspek pembangunan manusia karena beberapa aspek sulit untuk diukur atau dikumpulkan datanya dan sulit untuk memadukan data dari berbagai aspek yang berbeda menjadi satu indeks komposit.

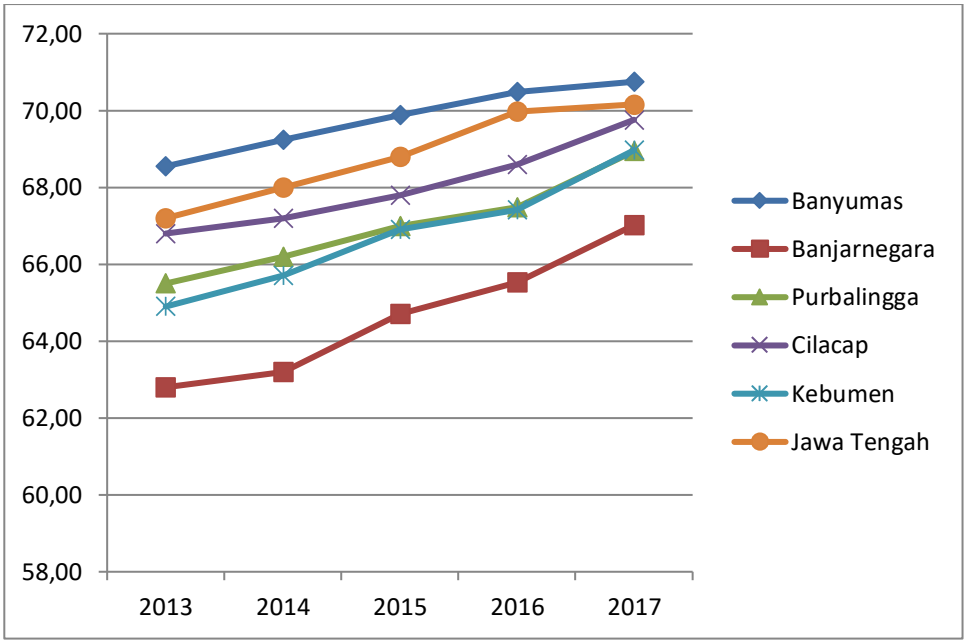
Pengukuran pembangunan manusia perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebesar 70,75 yang berada pada peringkat 16 di Jawa Tengah. Dengan memodifikasi klasifikasi pembangunan manusia menurut UNDP yang mengelompokkan tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah (0 ≤ IPM < 60), kategori menengah bawah (50 ≤ IPM < 66), kategori menengah atas (60 ≤ IPM < 70), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80) dan kategori sangat tinggi (80 < IPM ≤ 100), maka tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori tinggi. Tabel dan gambar di bawah ini menunjukan IPM Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitarnya tahun 2013-2017.

Tabel 2.20.
IPM Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitarnya
Tahun 2013-2017

Kab.	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan IPM				Peringkat IPM Tahun 2017	
						2013 - 2014	2014 - 2015	2015 - 2016	2016 - 2017	Jateng	Mas-barling Cakeb
Banyumas	68,55	69,25	69,89	70,49	70,75	1,02	0,93	0,86	0,37	16	1
Banjarnegara	62,8	63,2	64,7	65,52	67,02	0,50	2,50	1,22	2,28	33	5
Purbalingga	65,5	66,2	67,0	67,48	68,94	1,07	2,10	0,67	0,35	28	3
Cilacap	66,8	67,2	67,8	68,60	69,76	0,66	0,78	1,22	0,43	21	2
Kebumen	64,9	65,7	66,9	67,41	68,97	1,23	1,84	0,81	1,30	27	4
Jawa Tengah	67,2	68,0	68,8	69,98	70,16	1,12	1,04	0,71	0,77		

Sumber: BPS, 2018



Gambar 2.13.
Perbandingan IPM Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013-2017
Sumber: BPS, 2018

Angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah, serta paritas daya beli sebagai komponen IPM Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21.
Komponen IPM Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016 dan 2017

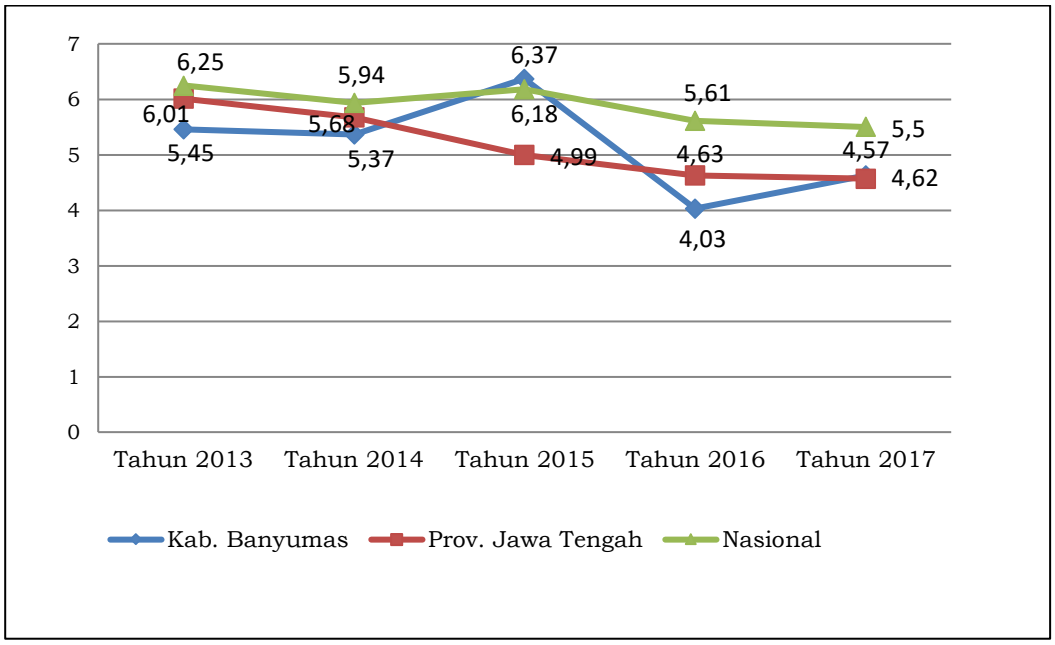
No.	Kabupaten	Angka Harapan Hidup (tahun)		Pendidikan				Pengeluaran Beli (000)	
				Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)			
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Banyumas	73,23	73,33	12,58	12,63	7,39	7,40	10554	10737
2	Banjarnegara	73,69	73,98	6,26	12,22	6,26	6,36	7930	8649
3	Purbalingga	72,86	74,03	6,86	12,46	6,86	6,94	8938	9757
4	Cilacap	73,11	73,41	6,90	13,14	6,90	6,91	9677	9757
5	Kebumen	72,87	74,00	7.05	13,93	7,05	7,09	8276	8429
	Jawa Tengah	74,02	74,05	7,15	12,51	7,15	7,16	10153	10247

Sumber: BPS - Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2017

2.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Selama kurun waktu lima tahun terakhir TPT Banyumas mengalami perkembangan fluktuatif, dengan kecenderungan lebih tinggi dibanding TPT Jawa Tengah dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Banyumas masih menjadi permasalahan pembangunan yang akan datang. Untuk menekan tingkat pengangguran tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengupayakan penciptaan berbagai lapangan kerja, mendorong pengembangan UMKM, inovasi daerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas pada tahun 2013 sebesar 5,45%, menurun menjadi 5,37 pada tahun 2014, meningkat pada tahun 2015 menjadi 6,37%, menurun kembali pada tahun 2016 menjadi 4,03% dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 4,62%.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.14.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)
Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2017

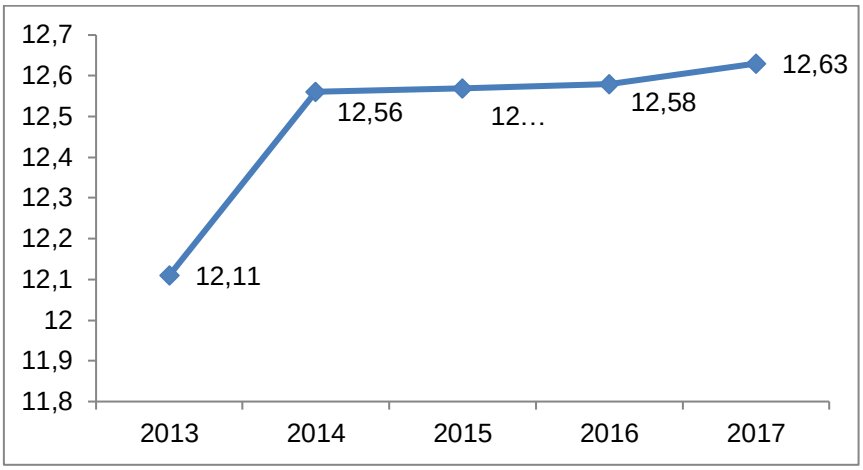
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Lama Sekolah

Angka melek huruf di Kabupaten Banyumas pada tahun 2013 telah mencapai 94,77%. Sejak Tahun 2014 Angka Melek Huruf dinilai kurang relevan dalam mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan secara utuh, karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu Angka Melek Huruf disebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Sebagai indikator pengganti untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan di suatu daerah digunakan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka harapan lama sekolah *(Expected Years of Schooling)* didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7

tahun keatas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



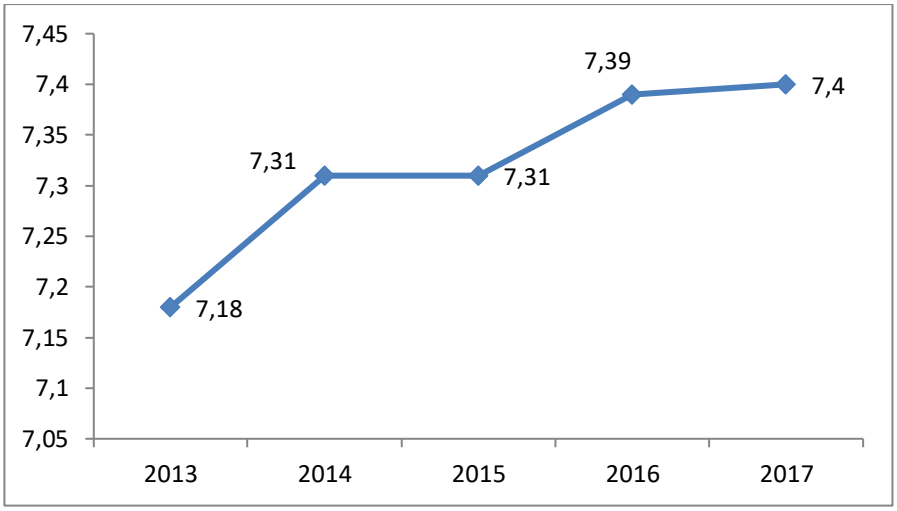
Gambar 2.15.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017 (tahun)

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2017

2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal atau rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Batasan ini dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah hingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya . dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

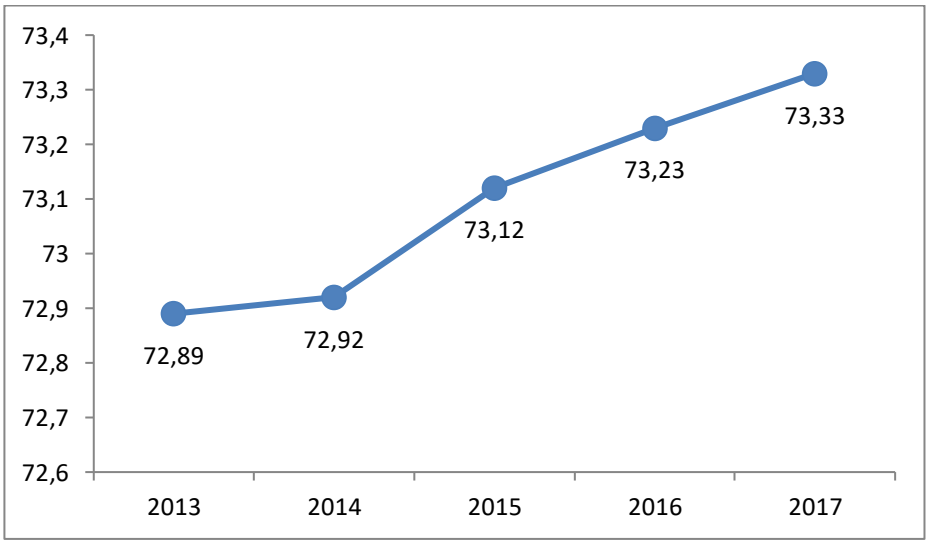
Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2013-2017 terus mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 yaitu 7,19 tahun lebih tinggi dibanding rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama yaitu 7,15 tahun. Namun demikian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas hingga tahun 2017 masih jauh dari lama sekolah dalam wajib belajar sembilan tahun Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2.16.
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017 (tahun)
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2017

2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup pada waktu lahir (*Expectation of Life*/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari hasil Susenas 2016 angka harapan hidup di Kabupaten Banyumas adalah 73,23 tahun, dengan angka harapan hidup perempuan 75,36 tahun lebih tinggi dibanding laki-laki 70,97 tahun. Hal ini sesuai dengan analisis piramida penduduk, di mana pada kelompok lanjut usia penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Semakin tinggi usia harapan hidup mencirikan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar berikut.

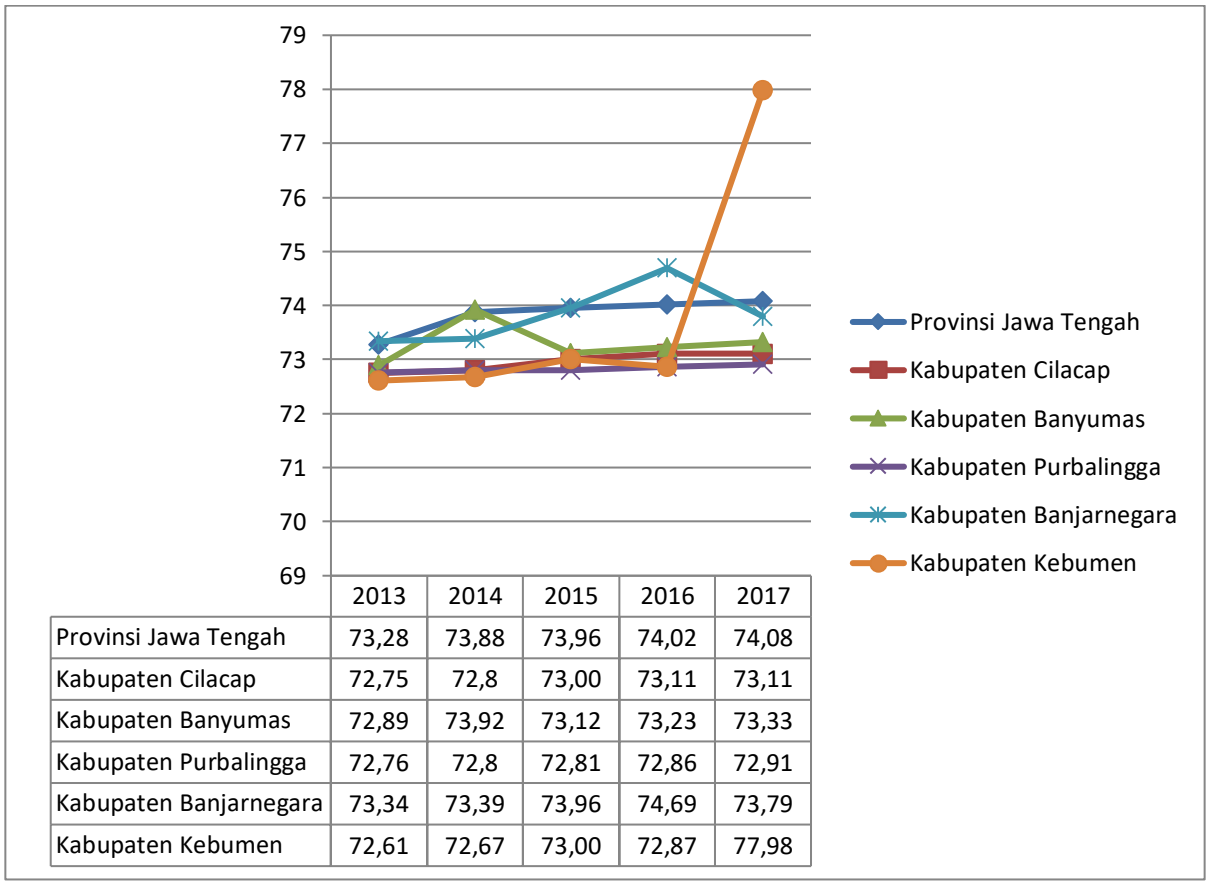


Gambar 2.17.
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Banyumas

Tahun 2013 – 2017

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2017

Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dan beberapa kabupaten terdekat sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

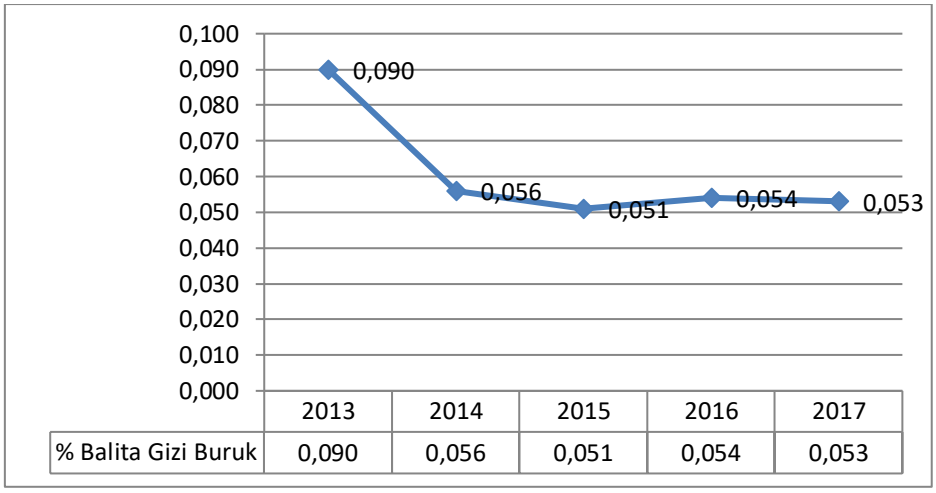


	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Tengah	73,28	73,88	73,96	74,02	74,08
Kabupaten Cilacap	72,75	72,8	73,00	73,11	73,11
Kabupaten Banyumas	72,89	73,92	73,12	73,23	73,33
Kabupaten Purbalingga	72,76	72,8	72,81	72,86	72,91
Kabupaten Banjarnegara	73,34	73,39	73,96	74,69	73,79
Kabupaten Kebumen	72,61	72,67	73,00	72,87	77,98

Gambar 2.18.
Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, dan beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2013-2017
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017

2.2.2.4. Prosentase Balita Gizi Buruk

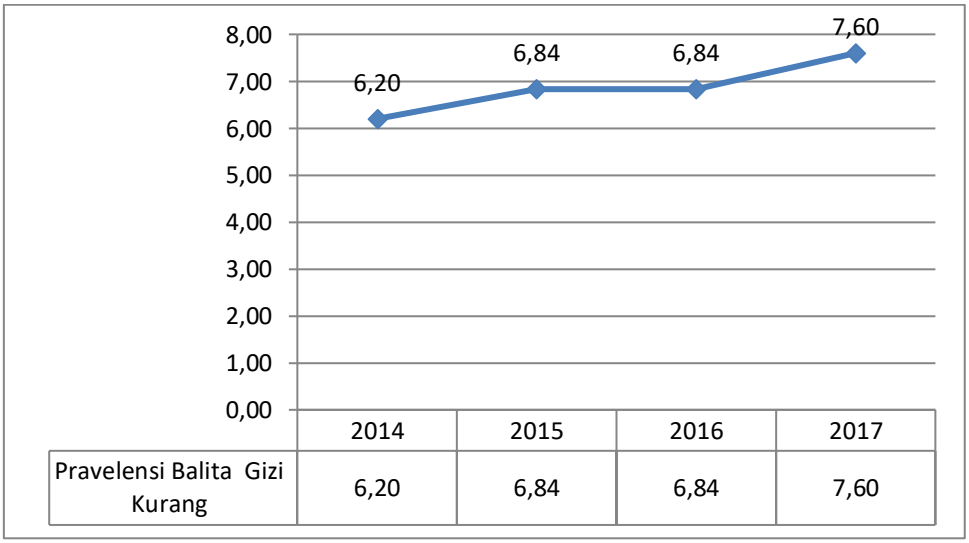
Selain intervensi gizi terhadap bayi, maka perhatian perlu diberikan pada Prosentase gizi buruk pada balita. Di Kabupaten Banyumas prosentase gizi buruk dari tahun 2013 – 2017 mengalami fluktuatif, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.19.
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2017

2.2.2.5. Pravelensi Balita Gizi Kurang

Gizi Kurang adalam ganguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Prevalensi Balita gizi kurang di Kabupaten Banyumas dari tahun 2014 –2017 mengalami fuktuatif sebagai mana gambar berikut ini



Gambar 2.20.
Capaian Indikator Prevalensi Gizi Kurang (%)
Kabupaten Banyumas Tahun 2014-2017
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupten Banyumas, 2017

2.2. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

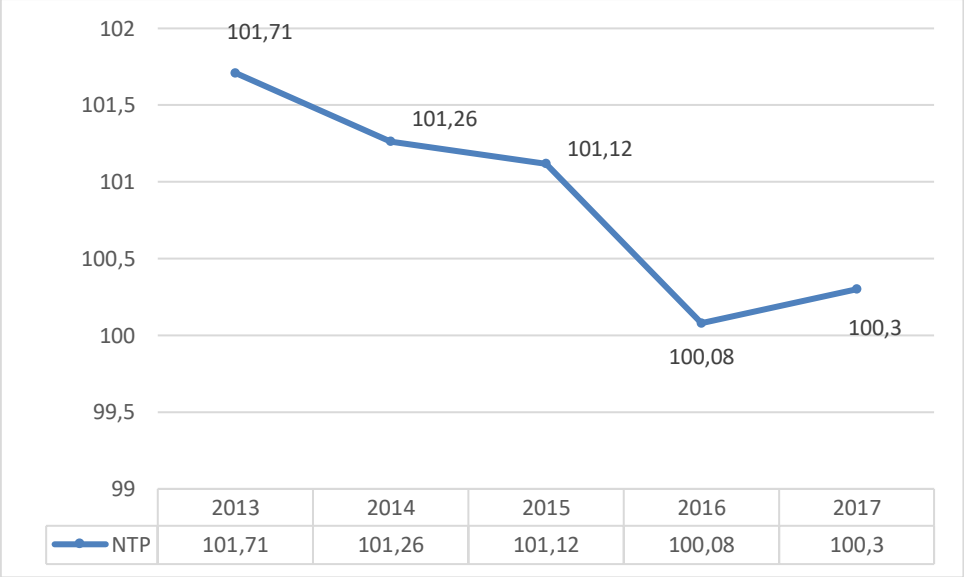
2.4.1.1. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka yang menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang/jasa yang dikonsumsi petani. Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dengan sendirinya pendapatan petani relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat sedangkan pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan petani. Hal ini menjadikan NTP salah satu indikator proksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Secara umum ada tiga macam pengertian NTP, yaitu:

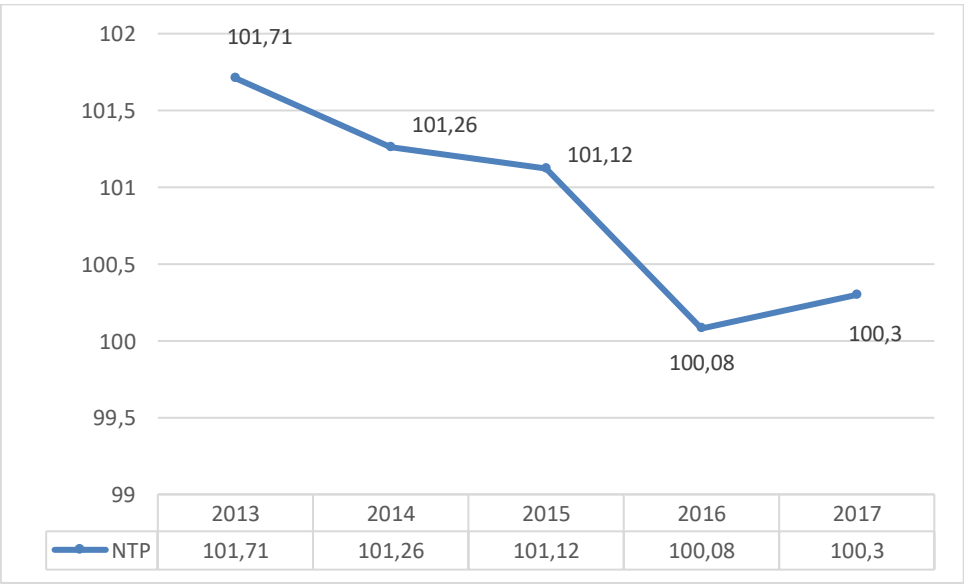
A. NTP > 100, berarti petani mengalami **surplus**. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani periode sebelumnya.
B. NTP = 100, berarti petani mengalami **impas**/*break even*. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani dapat dikatakan tidak mengalami perubahan.
C. NTP < 100, berarti petani mengalami **defisit**. Kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan petani serta biaya produksi. Sehingga dapat dikatakan tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya

Nilai tukar petani selama lima tahun dari tahun 2013 - 2017 cenderung mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 101,72 di tahun 2013 menjadi 100,3 pada tahun 2017. Penurunan nilai tukar petani ini mengindikasikan penurunan dalam nilai tukar hasil pertanian, atau penurunan tingkat harga pertanian relatif terhadap harga barang dan jasa lain mengakibatkan penurunan pendapatan riil petani. Penurunan NTP ini masih diatas 100 sehingga petani masih mengalami surplus, atau harga produksinya masih lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi (pendapatan petani masih lebih besar dari pengeluarannya). Namun demikian kecenderungan penurunan NTP perlu mendapat perhatian karena hal ini juga mengindikasikan penurunan kesejahteraan petani yang merupakan mayoritas penduduk Kabupaten Banyumas.



Gambar 2.21.
Nilai Tukar Petani Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017

Nilai tukar petani selama lima tahun dari tahun 2013 - 2017 cenderung mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 101,72 di tahun 2013 menjadi 100,3 pada tahun 2017. Penurunan nilai tukar petani ini mengindikasikan penurunan dalam nilai tukar hasil pertanian, atau penurunan tingkat harga pertanian relatif terhadap harga barang dan jasa lain mengakibatkan penurunan pendapatan riil petani. Penurunan NTP ini masih diatas 100 sehingga petani masih mengalami surplus, atau harga produksinya masih lebih besar dari kenaikan harga barang dan jasa konsumsi serta biaya produksi (pendapatan petani masih lebih besar dari pengeluarannya). Namun demikian kecenderungan penurunan NTP perlu mendapat perhatian karena hal ini juga mengindikasikan penurunan kesejahteraan petani yang merupakan mayoritas penduduk Kabupaten Banyumas.



Gambar 2.22.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017

2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat kesejahteraan penduduk. Untuk tahun 2017 persentase pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Banyumas lebih besar daripada pengeluaran untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan penduduk Banyumas mengalami fluktuasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.22.

Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan	52,86	48,54	55,31	52,04	49,75

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2017 & 2018

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Infrastruktur Jalan dan Irigasi

Kewenangan Kabupaten Banyumas terkait panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas sebesar 87,83% dari total panjang jalan yang ada di Kabupaten Banyumas sepanjang 1.716,886 km. Jalan kewenangan Nasional sebesar 10,24% dan sisanya merupakan jalan kewenangan Provinsi sebesar 1,93%.

Tabel 2.23.

Kondisi Infrastruktur Jalan Mendasarkan Kewenangannya di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Kewenangan Jalan	Kondisi Ruas Jalan						Total Panjang (km)
	Baik		Sedang		Rusak		
	km	%	km	%	km	%	Km
Nasional	60,966	34,67%	114,860	65,33%	0	0,00%	175,826
Provinsi	24,400	73,81%	8,660	26,19%	0	0,00%	33,060
Kabupaten	527,197	34,96%	315,926	20,95%	664,877	44,09%	1.508,000
Jumlah	612,563	35,68%	439,446	25,60%	664,877	38,73%	1.716,886

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018

Besarnya kondisi jalan rusak pada tahun 2017 akibat karena adanya proses alih status dari jalan kewenangan desa atau antar desa menjadi jalan kewenangan

kabupaten. Upaya peningkatan konektivitas antar wilayah, antara lain telah dilakukan pembangunan Jalan Gerilya Sudirman yang menghubungkan wilayah Selatan dan Wilayah Tengah Kota Purwoserto sekaligus untuk mengurangi tingkat kepadatan jalan yang sudah ada. Selain itu untuk peningkatan konektivitas antar wilayah, juga dilakukan pembangunan aksesibilitas jalan menuju jembatan Linggamas yang menghubungkan antara Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga. Peningkatan kondisi ruas jalan kabupaten yang mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain akses menuju kawasan wisata Baturraden dan kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga.

Tabel 2.24.
Kondisi Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas
Tahun 2017

Jaringan Irigasi	Kondisi Jaringan Irigasi				Total Panjang
	Baik		Rusak		
	m	%	m	%	m
Primer	275.000	58,26%	108.822	73,07%	383.822
Sekunder	197.000	41,74%	40.111	26,93%	237.111
Jumlah	472.000	100,00%	148.933	100,00%	620.933

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018

Kewenangan Kabupaten Banyumas terkait kondisi jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Banyumas sepanjang 620.933 m dengan rincian kondisi baik sebanyak 472 m dan kondisi jaringan irigasi rusak sebanyak 148.933 m.

Untuk mendukung pengembangan pertanian, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi, jaringan irigasi menjadi kegiatan prioritas pada tahun 2017. berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015, kewenangan pengelolaan daerah irigasi, Kabupaten Banyumas memiliki 573 daerah irigasi meliputi luas areal 23.716 Ha yang menjadi kewenangan Kabupaten Banyumas. Pembangunan infrastruktur irigasi Kabupaten Banyumas tahun 2017 telah meningkatkan luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 76,01%.

Sedangkan kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Kondisi Jaringan Irigasi Yang Menjadi Kewenangan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Kewenangan	Luas Areal (Ha)	Kondisi Fisik
Nasional	**6578**	
▪ Serayu	3.378	Rusak Ringan
▪ Tajum	3.200	Rusak Ringan
Provinsi	**6116,7**	
▪ Kalisapi	206	Rusak ringan

▪ Piasa	331	Rusak sedang
▪ Kebasen	486	Baik
▪ Pribadi / Keli jompo	3.7	Rusak Ringan
▪ Andongbang Junjungan	1.439	Rusak ringan
▪ Banjaran	1.200	Rusak ringan
▪ Kedunglimus Arca	1.288	Rusak Ringan
▪ Pandak	1.163	Rusak Ringan

Sumber : http://pusdataru.jatengprov.go.id/portal_data/kondisi_irigasi

2.4.2.2. Infrastruktur Perhubungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan SK Bupati Banyumas Nomor 480/324/2016 tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Wangon dan Terminal Penumpang Ajibarang sebagai Terminal Penumpang Tipe C, di Banyumas terdapat infrastruktur perhubungan darat yang terdiri dari 1 unit Terminal Tipe A dan 2 unit Terminal Tipe C. Pembangunan terminal khususnya Tipe C terus dilakukan untuk memberi pelayanan akses transportasi masyarakat yang ada di wilayah untuk melakukan aktivitasnya.

Sebagai daerah tempat jalur utama lintasan kereta api jalur Utara dengan jalur Selatan, di Kota Purwokerto terdapat 1 stasiun yaitu Stasiun Besar Purwokerto. Stasiun ini dilintasi kereta api dengan jalur Purwokerto ke Cirebon – Jakarta, Purwokerto – Tegal – Semarang, Purwokerto – Bandung – Jakarta, maupun Purwokerto – Jogja – Surabaya/Malang.

Selain infrastruktur Stasiun Besar Purwokerto dan stasiun-staiun kecil lainnya, jalur kereta api di wilayah yang melintasi Kabupaten Banyumas sedang dilakukan pembangunan rel ganda. Antara lain jalur Cirebon – Kroya yang pada Tahun 2017 sudah terealisasi sebesar 72,62%, dan jalur Kroya – Kutoarjo yang baru terealisasi sebesar 15,211%.

Tabel 2.26.
Fasilitas Infrastruktur Perhubungan di Kabupaten Banyumas Tahun 2017

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah	Lokasi
1	Perhubungan Darat		
	a. Jumlah Terminal Kelas A (unit)	1	Purwokerto
	b. Jumlah Terminal Kelas B (unit)	-	-
	c. Jumlah Terminal Kelas C (unit)	2	Wangon, Ajibarang
2	Perkeretaapian		
	Jumlah Stasiun	1	Purwokerto

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2018.

2.4.2.3. Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi menjadi satu bagian yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kepemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik antara pemerintah dan masyarakat bisa menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban dan pelayanan prima pemerintah terhadap warganya.

Dalam rangka memberikan berbagai informasi kepada masyarakat umum, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kerjasama dengan dengan berbagai media. Selain itu, kemudahan terhadap akses informasi juga dilakukan melalui update web site Kabupaten Banyumas (http:/www.banyumaskab.go.id), dialog interaktif, press

rilis, akses internet yang lancar, publikasi keliling, penyampaian aspirasi masyarakat melalui layanan SMS, layanan call centre, iklan layanan masyarakat, sosialisasi kegiatan Pemerintah Kabupaten, dan penyebaran informasi pembangunan melalui buku informasi dan media elektronik.

Tabel 2.27.
Fasilitas Infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah
1	Website milik pemerintah daerah	55
2	Jumlah jaringan komunikasi	8

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2018

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

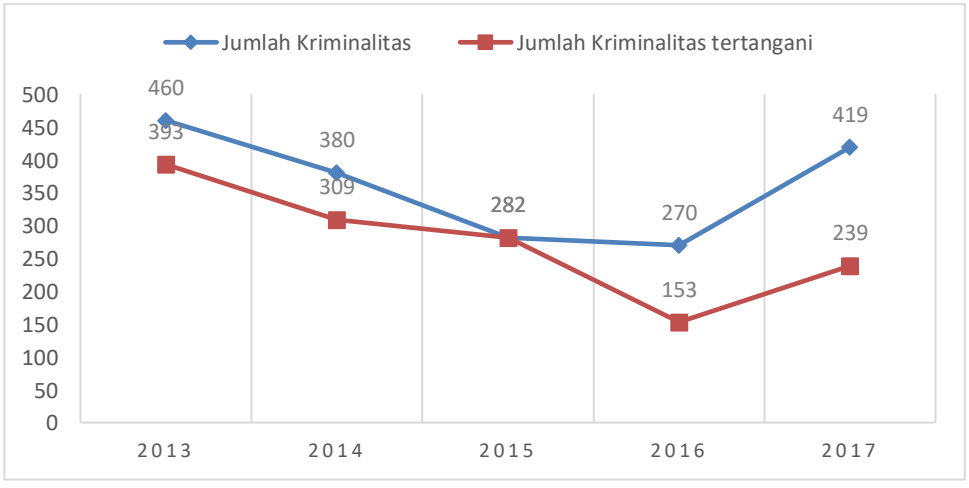
2.4.3.1. Angka Kriminalitas yang tertangani

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu aspek pendukung iklim berinvestasi. Keamanan wilayah tercermin dari Angka kriminalitas yaitu banyaknya perkara pidana yang masuk di Pengadilan. Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2012-2017 mengalami fluktuasi dengan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 467 kasus. Perkembangan jumlah kasus kriminalitas selama tahun 2012-2017 adalah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28.
Jumlah Kriminalitas Tahun 2013 – 2017

No.	Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kriminalitas	Kasus	465	380	506	521	599
2.	Jumlah Kriminalitas tertangani	Kasus	393	309	282	153	239
3	Angka Kriminalitas		2,87	2,34	1,72	1,64	2,54
4	Angka Kriminalitas yang tertangani		2,44	1,90	1,72	0,92	1,44

Sumber : Kantor Kesbang Kabupaten Banyumas Tahun 2017



Gambar 2.23.
Jumlah Kriminalitas Tahun 2012 – 2017
Sumber : Kantor Kesbang Kabupaten Banyumas Tahun 2017

2.4.3.2. Pelayanan Perijinan

Dalam rangka peningkatan realisasi investasi, Kabupaten Banyumas telah mengembangkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP). Sampai dengan tahun 2017 DPMPPTSP melayani dan memproses 41 jenis perizinan.

Proses pelayanan perizinan di DPMPPTSP Kabupaten Banyumas sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dari 1-10 hari pada tahun 2016 menjadi 1-7 hari pada tahun 2017. Saat ini seluruh daerah sedang menyederhanakan proses perizinan, dengan asumsi semakin sederhana proses, maka waktu pelayanan akan semakin cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu berupaya meningkatkan pelayanan perizinan melalui inovasi-inovasi, khususnya yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan prosedur. Upaya tersebut didukung dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik.

Mal Pelayanan Publik merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyediakan pelayanan mudah, murah dan cepat. Mal Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan layanan yang cepat dan aman, mencegah tindak korupsi, dan menghilangkan pungli. Dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik tersebut masyarakat dapat memperoleh layanan *one stop service* untuk semua perizinan, seperti perizinan perbankan, pajak kendaraan, hingga layanan lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara cepat.

Tabel 2.29.
Lama Perijinan dan Jumlah Jenis Retribusi di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Lama proses perizinan (hari)	14	14	1-10	1-10	1-7
2.	Jumlah jenis retribusi yang dilayani BPMMP (jenis)	4	4	4	4	3

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, 2017.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Tingkat pendidikan SI/S2/S3 sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas setiap tahunnya meningkat. Untuk tahun 2016 jumlah SDM yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 47.936 orang; S2 sebanyak 2.982 orang dan untuk S3 sebanyak 3.546 orang.

Tabel 2.30.
Rasio Lulusan S1, S2, S3 Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Lulusan :					
	S1	42.812	44.377	47.936	47.936	NA
	S2	2.883	2.982	3.203	3.203	NA
	S3	298	332	343	343	NA
	Jumlah lulusan S1/S2/S3	45.993	47.692	51.482	51.482	NA
	Jumlah Penduduk	1.605.579	1.620.918	1.635.909	1.650.625	NA
	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	0,028	0,029	0,031	0,031	NA

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017

2.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase Rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan Kabupaten Banyumas tahun 2017 mencapai 49,80% artinya bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 49 penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan penduduk ini lebih banyak disumbangkan oleh kelompok produktif (15–64 tahun) yang mencapai 66,75% dari total jumlah penduduk Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.31.
Rasio Ketergantungan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio ketergantungan	50,55	50,20	50,18	51,36	49,80

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas,2013 s.d 2017

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK Kabupaten Banyumas pada berbagai jenjang pendidikan tahun 2013-2017 cenderung meningkat, namun hanya capaian APK SMP/MTs/Paket B yang memenuhi target kinerja tahun 2017. Capaian APK PAUD/TK sebesar 77,23% masih lebih rendah dari target kinerja pada tahun tersebut sebesar 81,32%. Pada tingkat pendidikan dasar APK SD/MI/Paket A mencapai 101,91%, juga belum memenuhi target kinerja sebesar 109,26%, sedangkan APK SMP/MTs/Paket B mencapai 103,05% telah memenuhi target kinerja sebesar 98,56%. Capaian APK Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.32.
Capaian Angka Partisipasi Kasar untuk PAUD/TK, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja (%)				
		2013	2104	2015	2016	2017
1	APK PAUD/TK	74,90	75,80	75,90	76,05	77,23
2	APK SD/MI/Paket A	106,03	101,47	101,78	101,81	101,91
3	APK SMP/MTs/Paket B	96,26	97,93	101,84	102,53	103,05

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas Tahun 2016 dan Dindik Tahun 2017

Angka partisipasi kasar SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2017 melebihi 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

2.3.1.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM SD/MI/Paket A Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat yaitu sebesar 91,16 mencapai 92,67 pada tahun 2016 namun menurun menjadi 92,57%di tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah SD di Kabupaten Banyumas hampir semuanya bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. APM SMP/MTs/Paket B Kabupaten Banyumas cenderung meningkat dari tahun 2013 sebesar 70,73% menjadi 76,23% di tahun 2017. Capaian APM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas tersebut belum memenuhi target kinerja tahun 2017 yaitu 94,31% unttuk APM SD/MI dan 81,60% untuk APM SMP/MTs/Paket B.

Capaian angka partisipasi murni Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 dapat di lihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.33
Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

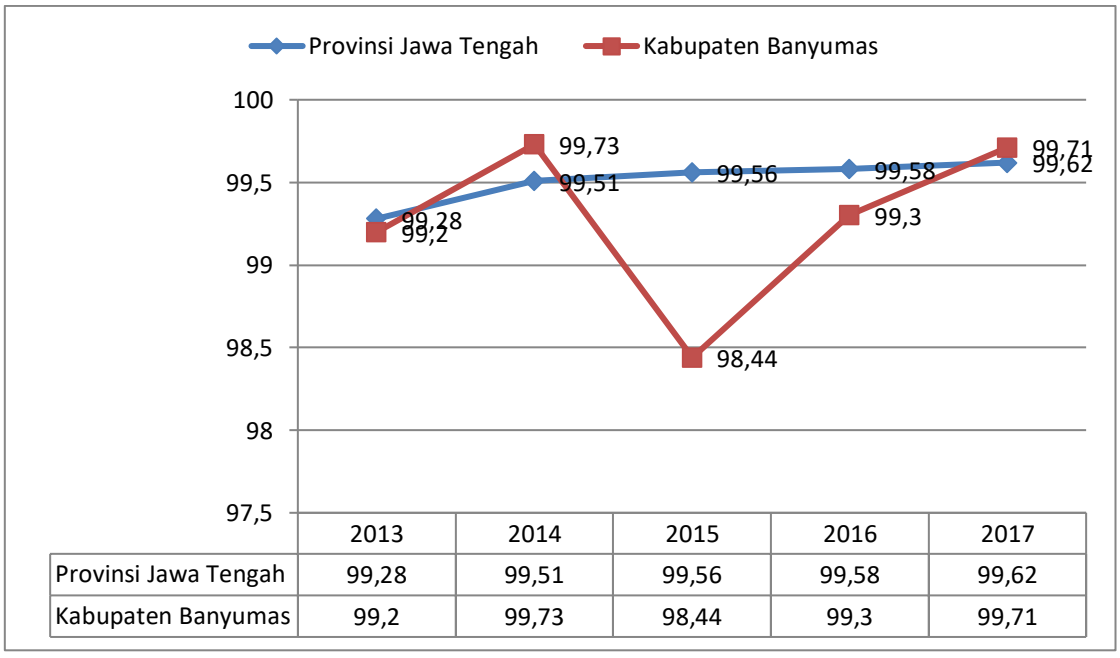
No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2104	2015	2016	2017
1	APM SD/MI/Paket A (%)	91,16	91,18	91,70	92,67	92,57
2	APM SMP/MTs/Paket B (%)	70,73	71,00	72,87	75,83	76,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas

2.3.1.1.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

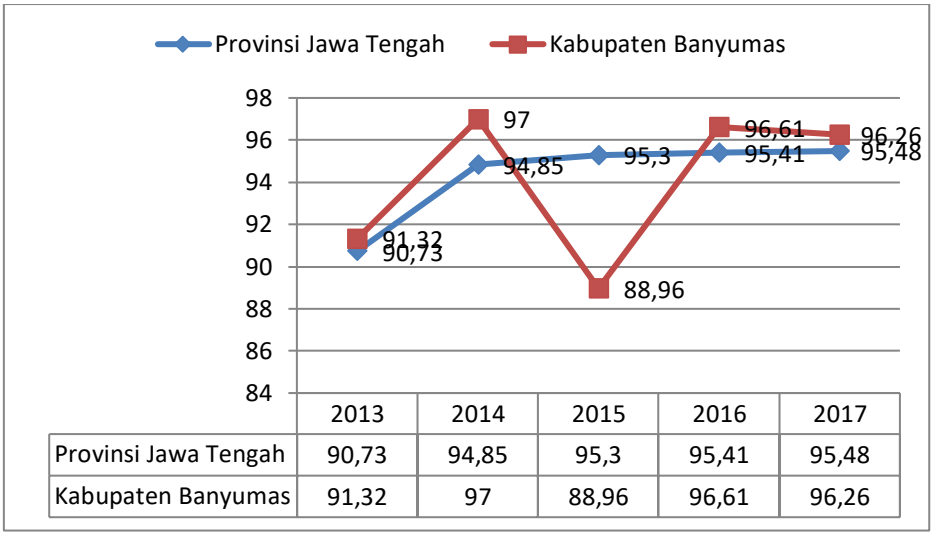
Angka partisipasi sekolah mengindikasikan seberapa besar akses (keterjangkauan) dari penduduk usia sekolah dapat menikmati pendidikan formal di sekolah. Sebagai gambaran APS pada kelompok umur yang lebih tua akan cenderung menurun. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.

Capaian APS pendidikan kelompok umur 7-12 tahun Kabupaten Banyumas cenderung meningkat. Pada tahun 2017 APS pendidikan kelompok umur 7-12 tahun Kabupaten Banyumas adalah 99,71% dan untuk Jawa Tengah sebesar 99,62%. Sedangkan APS pendidikan kelompok umur 13-15 tahun Kabupaten Banyumas sebesar 96,26% lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 95,48 %. Perbandingan APS Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam grafik berikut ini:



	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Tengah	99,28	99,51	99,56	99,58	99,62
Kabupaten Banyumas	99,2	99,73	98,44	99,3	99,71

Gambar 2.24.
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kelompok Umur 7-12 Tahun Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 (%)
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas , 2017



	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Tengah	90,73	94,85	95,3	95,41	95,48
Kabupaten Banyumas	91,32	97	88,96	96,61	96,26

Gambar 2.25.
Angka Partisipasi Sekolah Pendidik Kelompok Umur 13-15 Tahun
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 (%)
Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017

2.3.1.1.4. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah (APS) pada akhir 2017 pada semua jenjang sangat rendah, yaitu sebesar 0,0004% untuk jenjang SD/MI, dan sebesar 0,0020% untuk jenjang SMP/MTs. Angka putus sekolah perlu diupayakan untuk terus turun sampai dengan 0%, dengan demikian secara absolut tidak ada anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Perkembangan kondisi Angka Putus Sekolah Tahun 2013-2017 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Capaian Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan
SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,0007	0,0006	0,0007	0,0003	0,0004
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,0024	0,0013	0,0026	0,0015	0,0020

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banyumas, 2017

2.3.1.1.5. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Banyumas tahun 2017 telah memenuhi target yaitu 100% untuk angka kelulusan SD/MI dan 93,73% SMP/MTs. Capaian indikator angka Kelulusan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.
Capaian Indikator Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan
SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Kelulusan SD/MI (%)	95,76	96,75	97,04	100,00	100,00
2	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	98,01	99,19	97,67	99,99	99,99

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Banyumas, 2017

2.3.1.1.6. Angka Melanjutkan

Persentase lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya selama kurun waktu 2013-2017 untuk SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100%, hal ini menunjukan bahwa seluruh lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari 89,97% di tahun 2013 dan 92,47% di tahun 2017. Capaian indikator angka melanjutkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2017 belum memenuhi target kinerja sebesar 95,08%.

Tabel 2.36
Capaian Indikator Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan
SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2104	2105	2016	2017
1	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	89,97	98,05	92,19	94,93	92,47

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banyumas, 2017

2.3.1.1.7. Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Baik

Ketersediaan sarana prasarana sekolah digambarkan dengan indikator persentase satuan pendidikan/ ruang kelas kondisi bangunan untuk jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yaitu persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik dan persentase ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik. Perkembangan kondisi ruang kelas selama kurun waktu 2013-2017 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian Indikator Sekolah pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kondisi Baik
di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi Baik (%)	65,90	72,75	78,46	78.67	81,68
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs Kondisi Baik (%)	93,36	87.81	97,51	97.57	97,79

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2017

Capaian indikator persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2017 telah melampaui target kinerja tahun berkenaan sebesar 72,89%, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs persentase ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan sebesar 99%.

2.3.1.1.8. Rasio Guru terhadap Murid

Untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Banyumas selain ketersediaan fasilitas pendidikan hal penting lainnya adalah peran guru. Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Banyumas pada semua jenjang pendidikan cukup baik. Namun demikian dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun pada sampai dengan tahun 2018 perlu menjadi perhatian agar jumlah guru tetap memadai untuk pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan kondisi Rasio guru terhadap murid selama kurun waktu 2013-2017 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Capaian Indikator Rasio Guru terhadap Murid Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI					
	Murid	144.452	170.404	170.183	170.332	172.209
	Guru	8.010	9.608	9.589	9.799	9.169
	Rasio Murid Guru (%)	18	18	18	17	19
2.	SMP/MTs					
	Murid	61.201	78.812	79.949	79.462	79.225
	Guru	3.288	4.287	4.343	4.390	4.198
	Rasio Murid Guru (%)	19	18	18	18	19

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2018

2.3.1.1.9. Kualitas Pendidikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru di Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2013-2017. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2017 pada jenjang pendidikan TK/PAUD sebesar 51,77%, sedang pada jenjang SD/SMP sebesar 94,48%. Walaupun kualifikasi guru TK/PAUD cenderung meningkat tampaknya masih sulit untuk bisa mencapai 100%, sebab masih ada guru yang belum memiliki motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Secara rinci perkembangan indikator kualitas pendidikan guru terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Capaian Indikator Kualitas Pendidikan Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jenjang Pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Capaian Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Prosentase Pendidik PAUD/TK yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D.IV (%)	23,42	29,51	29,51	48,19	51,77
2.	Prosentase Pendidik SD/MI yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/ D.IV (%)	70,68	71,14	82,61	94,31	94,48
3.	Prosentase Pendidik SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/ D.IV (%)	73,94	88,82	90,41	96,40	96,11

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, 2017

Target capaian indikator kualitas pendidikan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV pada tahun 2017 adalah 85,48% tanpa membedakan jenjang pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs target kinerja indikator kualitas guru telah terpenuhi. Sebaliknya kualitas guru untuk jenjang pendidikan usia dini masih perlu ditingkatkan karena berdasarkan capaian indikatornya masih sedikit pendidik PAUD/TK yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D.IV.

2.3.1.2. Kesehatan

2.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan gambaran kurangnya asupan gizi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki . Angka kematian bayi di Kabupaten Banyumas di tahun 2013 s.d. tahun 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 angka kematian bayi sebesar 12,38 dengan 348 kasus, dan pada tahun 2017 angka kematian bayi sebesar 8,43 dengan 218 kasus. Angka kematian bayi pada tahun 2017 masih belum mencapai target penurunan angka kematian bayi menjadi 7,20 per 1.000 kelahiran hidup.

Kondisi AKB di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Angka Kematian Bayi Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Tahun	Capaian	
		Per 1.000 kh	Kasus
1	2013	12,34	348
2	2014	8,96	260
3	2015	8,43	243
4	2016	8,49	239
5	2017	8,43	218

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2017

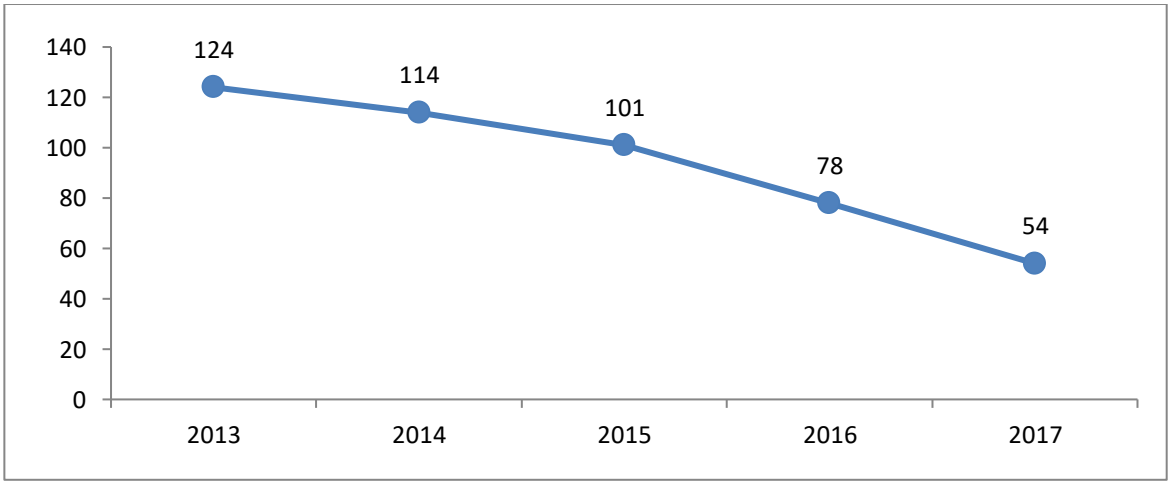
2.3.1.2.3. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan bidang kesehatan merupakan komponen penting untuk mendorong produktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila kondisi kesehatan manusia terjaga, maka dapat memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, di mana sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian kesakitan upaya yang dilakukan adalah promotif dan preventif.

Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas yang dipengaruhi oleh status gizi ibu keadaan sosial ekonomi, keadaan yang kurang baik menjelang kehamilan kejadian bebagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal daan obstetri. Terjadinya angka kematian ibu menujukan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetri yang rendah pula.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu tahun 2017 (54/100.000 kh) menurun dibandingkan tahun 2013 (124/100.000 kh). Namun demikian upaya penurunan AKI tetap menjadi perhatian, dikarenakan beberapa kasus kematian ibu hamil semestinya masih dapat dicegah antara lain pada kasus perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Angka kematian ibu di Kabupaten Banyumas tahun 2013 s.d. 2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.26.
Angka Kematian Ibu Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2017

Kematian ibu juga dipengaruhi baik oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik (90 %)

yang dikenal dengan Trias Klasik seperti perdarahan, infeksi dan preeklamsi, atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran dan selama nifas yang tidak tertangani dengan baik dan tepat waktu.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan pemeriksaan ibu hamil (Ante Natal Care), pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten serta pelayanan nifas.

Penilaian terhadap pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 (Kunjungan Pertama pada Trimester 1) dan K4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 (%)	96,4	100,6	95,7	97,6	100
2	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil K4 (%)	91,9	95,8	89,4	91,2	100

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2017

2.3.1.2.4. Prevalensi HIV/AIDs dari Total Populasi

Hal lain yang masih perlu perhatian pada upaya pembangunan kesehatan yaitu masih cukup tingginya angka kematian dan kesakitan, meskipun dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Untuk mengetahui perkembangan angka kesakitan salah satunya ditunjukkan melalui kondisi penyakit baik menular maupun tidak menular. Tabel di bawah ini menggambarkan kondisi penyakit menular dalam kurun waktu 2013-2017.

Tabel 2.42.
Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	CR TB (%)	HIV / AIDS	
					Kasus HIV	Kasus AIDS
2013	27,7	0,74	69,05	92,7	215	101
2014	10,5	1,9	70,05	98,96	202	107
2015	13,6	0,4	71,58	94	251	125
2016	49	1,6	70,02	96	287	163
2017*	49	1,6	70,1	96	231	125

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2017

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Kabupaten Banyumas adalah : TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah *Dengue* (DBD). Angka kesakitan DBD cederung terus mengalami peningkatan. Untuk itu upaya pencegahan penyakit menular harus ditingkatkan. Kasus HIV/AIDS pada tahun 2017 mengalami penurunan, namun demikian HIV/AIDS masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius, dikarenakan masih rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan

narkoba, kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Kondisi penyakit tidak menular di Kabupaten Banyumas ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Kondisi Penyakit Tidak Menular Kabupaten Banyumas Tahun 2014–2017

Tahun	Jenis PTM (Prevalensi)	
	Diabetes Milletus	Hipertensi
2014	NA	NA
2015	1,4	7,6
2016	1,4	7,7
2017*	2,9	12,5

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2017

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular antara lain kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, dan konsumsi alkohol. Peningkatan PTM tidak saja menimbulkan dampak ekonomi tapi juga mengakibatkan penurunan produktifas karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, dan Kanker. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan hanya sekitar 30% cakupan pemeriksaan PTM oleh tenaga kesehatan dan biasanya datang ke pelayanan kesehatan dalam stadium yang lanjut, dan selebihnya tidak menyadari jika dirinya menderita PTM

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini yang dilakukan melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas guna meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga dengan mekanisme bantuan keuangan desa. Beberapa kecamatan di Kabupaten Banyumas yang telah menjadi Kecamatan ODF adalah Kecamatan Somagede, Lumbir, Gumelar, Wangon, Tambak dan Sumpiuh.

Berbagai informasi di atas menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Banyumas. Selain itu pembangunan kinerja pembangunan urusan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, (Perawat, Bidan, Nutrision) cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/Kelurahan universal child immunization, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas. Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.44.
Tabel Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017
pada Aspek Pelayanan Umum

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio posyandu per satuan balita :	19,98	19,83	19,69	19,64	20,29
2.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas pembantu (per satuan penduduk)	0,06	0,06	0,06	0,58	0,67
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Rasio dokter	0,1	0,35	0,1	0,1	0,14
5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,78	0,35	0,35	0,35	0,35
10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70,04	100	70	56,16	100
11.	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100
13.	Cakupan kunjungan bayi	97,62	98,2	100	100	100
14.	Cakupan puskesmas	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
15.	Cakupan puskesmas pembantu	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
16.	Persentase puskesmas terakreditasi	-	-	-	74,35	94,87
17.	Persentase RSUD terakreditasi	100	100	100	100	100

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2017

2.3.1.2.5. Prevalensi Balita Stunting

Gizi buruk merupakan salah satu penyebab terjadinya stunting. Kasus stunting di Kabupaten Banyumas masih cukup tinggi sehingga Kabupaten Banyumas menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan stunting di tingkat nasional dan provinsi.

Pada tahun 2017 kasus stunting mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari pemantauan kondisi gizi pada balita usia 0-59 bulan. Kondisi tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat dan aman yang antara lain ditunjukkan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi serta pola asuh orang tua terhadap balita.

Tabel 2.45.
Persentase Kasus Stunting Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	% Stunting
		Balita 0-59 bulan
1	2013	NA
2	2014	NA
3	2015	NA
4	2016	20
5	2017	24,5

Sumber: RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan dengan pemberian ASI eksklusif. Pada tahun 2015 dan 2016 sempat terjadi penurunan, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 , penurunan ASI eksklusif dikarenakan kurangnya pemahaman inisiasi menyusui dini dan pentingnya ASI eksklusif pada ibu melahirkan terhadap

Tabel 2.29 menunjukkan kondisi pemenuhan ASI Ekslusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Tabel 2.46.
Cakupan Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif (%)
Tahun 2013-2017

Tahun	Cakupan (%) ASI
2013	55,8
2014	57,2
2015	50,4
2016	50,2
2017	51,9

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, 2017

Pemberian ASI Ekslusif dan asupan gizi seimbang pada balita merupakan salah satu upaya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja makro urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Persentase kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yaitu dari sebesar 50,977% menjadi 60,443%, Sedangkan pada tahun 2016 kinerja panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 30,28% dan mengalami kenaikan lagi menjadi 34,96% di tahun 2017. Hal ini didasarkan pada penambahan ruas jalan kabupaten sesuai dengan SK Bupati Banyumas Nomor 620/302 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan di Kabupaten Banyumas sebagai Ruas-Ruas Jalan Kabupaten. Berdasarkan SK tersebut panjang jaringan jalan Kabupaten Banyumas mulai tahun 2016 menjadi 1.508 km dari sebelumnya 804,784 km. Sebagian besar penambahan ruas jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan antar desa yang kondisinya sebagian besar rusak.

Selanjutnya kinerja sub urusan sumber daya air di Kabupaten Banyumas terus meningkat. Hal ini ditunjukan dengan persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 51,11% pada tahun 2013, 55,88% pada tahun 2014, 59,56% pada tahun 2015, 69,76% pada tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 76,01%. Guna mencukupi kebutuhan air untuk areal pertanian seluas 23.716 Ha terdapat jaringan irigasi sepanjang 620,933 km.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk air minum dan irigasi Kabupaten Banyumas memiliki potensi sumber daya air berupa mata air sebanyak 383 buah, dan air permukaan/air sungai. Kabupaten Banyumas termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Tipar, Ijo dan Cimeneng. Selain itu di Kabupaten Banyumas terdapat 13 buah embung, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air, khususnya di daerah-daerah rawan kekeringan.

Perkembangan kondisi jalan dan jaringan irigasi di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.47.
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Kabupaten	804,784	804,784	804,784	1.508	1.508
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	50,977	59,421	60,443	30,28	34,96
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	26,705	15,064	15,388	21,42	20,95
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	22,318	25,515	24,169	48,30	44,09
2	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten	620.933	620.933	620.933	620.933	620.933
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	51,12	55,88	59,59	62,80	76,02
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%)	48.88	44.12	40.41	37.2	23.98
	- Rusak ringan	27,22	24,0	23,82	22,7	15,34
	- Rusak Sedang	10,91	10,33	9,06	7,77	3,41
	- Rusak berat	10,75	9,79	7,53	6,73	5,23

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, 2018

Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan bidang urusan pekerjaan umum beberapa hal menjadi perhatian di Kabupaten Banyumas yaitu, pengingkatan jalan yang rusak berat, perbaikan jalan menjadi baik sehingga akan meningkatkan kemantaban kondisi jalan, serta perbaikan bangunan irigasi yang rusak dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian.

Kabupaten Banyumas hanya memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 sebagai landasan pengaturan pemanfaatan ruang di Kabupaten Banyumas. RTRW tersebut belum memadai sebagai perangkat perijinan, sehingga sering menghambat proses perijinan investasi.

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, berdampak terhadap peningkatan permukiman, meliputi rumah dan perumahan, peningkatan kebutuhan

pelayanan air minum dan sanitasi. Berdasarkan Data BPS Tahun 2015 menunjukkan bahwa angka *backlog* kepemilikan di Kabupaten Banyumas sejumlah 21.384 unit. Di samping permasalahan ketersediaan perumahan Kabupaten Banyumas juga menghadapi permasalahan banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, berdampak terhadap peningkatan permukiman, meliputi rumah dan perumahan, peningkatan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi. Berdasarkan Data BPS Tahun 2015 menunjukkan bahwa angka *backlog* kepemilikan di Kabupaten Banyumas sejumlah 21.384 unit. Di samping permasalahan ketersediaan perumahan Kabupaten Banyumas juga menghadapi permasalahan banyaknya rumah tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh.

Kinerja indikator persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 adalah sebesar 6,34%, persentase luasan kawasan kumuh tersebut masih lebih tinggi dari target *universal access* sebesar 0%.

Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas sebanyak 116,977 unit yang lokasinya tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas, sedangkan persentase rumah layak huni pada tahun 2017 adalah sebesar 88,70%, terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yaitu sebesar 86,70%, 87,26%, 88,08% dan 88,12%. Dari sisi pelayanan air bersih dan sanitasi cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih meningkat namun capaiannya baru mencapai sebesar 70,54% pada tahun 2017. Cakupan rumah tangga bersanitasi juga mengalami peningkatan, namun sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 75,33%. Cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi tersebut masih lebih rendah dari target universal access sebesar 100% cakupan akses air bersih dan 100% cakupan akses sanitasi pada tahun 2019. Selengkapnya perkembangan kinerja urusan perumahan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.
Perkembangan Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahun 2013 -2017

No.	Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	225.000	277.920	303.139	311.596	322.466
2.	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih (%)	55,08	63,05	67,97	68,91	70,54
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	39,39	55,55	66,72	67,96	75,33
4.	Persentase Lingkungan Pemukiman kumuh perkotaan (%)	6,98	6,85	6,71	6,52	6,34
5.	Persentase rumah layak huni (%)	86,70	87,26	88,08	88,12	88,70

Sumber : Dinperkim Kabupaten Banyumas, 2018

Secara umum terdapat gap yang cukup besar antara target indikator kinerja terkait pembangunan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh dalam RPJMD Kabupaten

Banyumas dengan target *universal access* 100-0-100 RPJMN 2015-2019, dikarenakan target dalam RPJMD Kabupaten Banyumas telah disusun lebih dahulu dan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Lebih lanjut pembangunan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh tidak hanya untuk memenuhi target *universal access* tetapi juga untuk memenuhi target tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG's.

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja makro Ketentraman Ketertiban Umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio Linmas per 10.000 penduduk, penegakan PERDA, cakupan patroli petugas Satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Banyumas, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Banyumas, cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Banyumas, tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), , dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Tabel 2.49.
Kinerja Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2013 – 2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	%	1,18	1,18	1,4	1,4	1,4
2.	Cakupan petugas Linmas	%	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
3.	Penegakan PERDA	%	70	75	100	85	90
4.	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	%	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
5.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	%	100	100	100	100	100
6.	Tingkat Respon Time Kebakaran	%	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83
7.	Cakupan Bencana Kebakaran	%	53	53	53	53	53

Data sementara Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2017

Situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat relatif kondusif, bisa dilihat dari jumlah selesai kasus tindak pidana yang menunjukkan kecenderungan menurun namun masih termasuk kategori tinggi. Jumlah penyelesaian Kasus Tindak Pidana (Kasus) Tahun 2013 sebanyak 400 dengan kasus 465 kasus (86,02%) . Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas yang bekerjasama dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian sangat optimal dalam menekan kasus-kasus tindak pidana. Namun di tahun 2015 s.d. tahun 2017 Jumlah tindak pidana *(crime total) Angka kriminalitas* mengalami kenaikan, hal ini disebabkan kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban.

Terkait dengan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat mengalami fluktuatif dari tahun 2013 sebanyak 43 kali dan tahun 2015 naik menjadi 61 kali namun tahun 2015 turun menjadi 54 kali dan tahun 2017 turun kembali menjadi 47 kali.

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dan kegiatan Kegiatan pembinaan politik daerah tahun 2013 – 2018 mengalami fluktuatif.

Lebih jelas terkait dengan capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah tindak pidana *(crime total) Angka kriminalitas* (kasus)	465	380	506	521	599
2.	Jumlah Selesai Kasus Tindak Pidana (Kasus)	400	310	341	311	377
3.	Jumlah unjuk rasa (kali)	43	45	61	54	47
4.	Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu (orang)	1.315.267	1.315.267	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu
5.	Jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya pada pemilu.	919.119	968.266	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu
6.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	8	4	1	7	10
7.	Kegiatan pembinaan politik daerah	27	11	1	11	2
8.	Jumlah LSM Yang Aktif	56	29	43	74	113

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, 2017

Kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas terkait Peningkatan Mitigasi bencana, meliputi : Sosialisasi kebencanaan pada masyarakat; Penayangan iklan layanan kebencanaan melalui media elektronik, radio, website; Pemasangan EWS dan rambu evakuasi; Latihan dan simulasi kebencanaan; Penyusunan dokumen rekontijensi banjir, longsor, erupsi gunung berapi; Kerjasama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Daerah/Kabupaten pada daerah perbatasan. Terkait dengan penanganan darurat bencana dilakukan melalui pelayanan penanganan darurat dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Penanganan pasca bencana dilakukan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana dan pemulihan kembali dampak bencana/pasca bencana. Dalam rangka peningkatan pelayanan, Badan Penanggulangan bencana menjalin kerjasama antar pemangku kepentingan dan stakeholder dalam penanggulangan bencana, penyediaan kebutuhan peralatan yang memadai dan kompetensi sumber daya manusia penanggulangan bencana.

Selama kurun waktu tahun 2013-2017 seluruh bencana yang terjadi dapat tertangani dengan baik dengan capaian 100%. Jumlah titik rawan bencana yang terpantau dan ditangani berkisar antara 5-6 titik.

Tabel 2.51.
Kinerja BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Prosentase Bencana yang ditangani dengan baik (%)	100	100	100	100	100
2.	Jumlah titik rawan bencana yang terpantau dan ditangani (titik)	5	6	6	5	6

Sumber: BPBD Kabupaten Banyumas, 2017

Kabupaten Banyumas memiliki potensi bencana antara lain gunung berapi, tanah longsor, dan puting beliung. Berdasarkan analisis kajian lingkungan hidup startegis RPJMD Kabupten Banyumas tahun 2018-2023, 50,71% luas wilayah Kabupaten Banyumas berada pada jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana kelas rendah, dan 51,53% luas wilayah berada pada jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir bencana kelas rendah. Dari analisis tersebut diketahui kerentanan desa-desa di Kabupaten Banyumas terhadap perubahan iklim yaitu: bahwa 6 desa pada kategori tidak rentan, 85 desa kurang rentan, dan 225 agak rentan. Hal ini memberikan gambaran resiko bencana di wilayah Kabupaten Banyumas, Kondisi wilayah yang rawan bencana tersebut belum didukung dengan ketersediaan dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB).

2.3.1.6. Sosial

Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Banyumas digambarkan dengan beberapa indikator terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain: Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Cacat, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang diharapkan jumlahnya terus menurun dengan berbagai upaya pembangunan. Perkembangan jumlah PMKS Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Perkembangan Jumlah PMKS di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No	Jumlah PMKS	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Anak Balita Terlantar	orang	425	425	221	221	244
2	Anak terlantar	orang	1.100	880	895	895	1030
3	Anak nakal	orang	105	31	29	29	57
4	Anak jalanan	orang	95	97	93	93	61
5	Anak cacat	orang	2.230	1346	1310	1310	1252
6	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	orang	4.817	2797	2686	2686	3389

No	Jumlah PMKS	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
7	Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan	orang	12	-	5	5	4
8	Lanjut Usia terlantar	orang	4.010	2524	2623	2623	3974
9	Penyandang Cacat	orang	7.407	5098	5116	5116	5288
10	Tuna Susila	orang	194	220	220	220	238
11	Pengemis	orang	219	142	140	140	139
12	Gelandangan	orang	260	19	20	20	20
13	Korban Penyalahgunaan NAPZA	orang	240	30	29	29	17
14	Korban Bencana Alam	orang	1.728	135	148	148	204
15	Komunitas Adat Terpencil	KK	2	2	2	2	1
16	Pemulung	orang	81	387	389	389	464
17	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	orang	10	4	4	4	3
18	Korban Trafficking	orang	0	7	6	6	0

Sumber : Dinsospermades Kabupaten Banyumas, 2017

Secara umum jumlah PMKS berfluktuatif, tidak ada PMKS yang menurun secara signifikan. Hal ini memang tidak mudah karena banyaknya PMKS seringkali berkorelasi dengan permasalahan lainnya dan bersifat komplek. Peran masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penanganan PMKS ditunjukan dengan bertambahnya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, yang hingga tahun 2017 meningkat menjadi 23 panti.

Tabel 2.53
Kinerja Penanganan PMKS dan Korban Bencana
di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	15	15	15	15	15	23
2	Rumah Singgah (swasta)	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinsospermades Kabupaten Banyumas, 2017

Kedepan penanganan kasus penyandang masalah sosial tetap menjadi prioritas, sebab berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Kualitas angkatan kerja Kabupaten Banyumas tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja. Tabel 2.13. menunjukan Penduduk Banyumas usia 15 tahun ke atas tahun 2017 yang termasuk angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan. Jumlah angkatan kerja terbanyak adalah lulusan SD sebanyak 401.466 orang (48,76%), urut kedua SMTP sebanyak 150.988 orang (18,34%) dan ketiga SMTA Kejuruan sebanyak 110.663 orang (13,44%).

Tabel 2.54.
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Maksimum SD	434.145	418.216	376.192	397.204	401.466
SMTP	153.776	164.518	133.634	149.076	150.988
SMTA Umum	64.919	70.669	62.308	66.489	72.994
SMTA Kejuruan	64.797	76.309	100.858	88.584	110.663
Diploma	15.599	14.554	21.659	18.107	22.140
Universitas	31.980	35.538	45.861	40.700	65.028
Jumlah	**765.216**	**779.804**	**740.512**	**760.158**	**823.279**

Sumber : BPS, Sakernas Agustus Tahun 2013-2017

Angkatan kerja di kabupaten Banyumas dengan mayoritas tingkat pendidikan SD menjadi tantangan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan tersebut akan sangat terbatas lapangan pekerjaan yang tersedia.

Kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55.
Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah angkatan kerja	Orang	765.216	779.804	740.512	781.896	823.279
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		0,58	0,20	0,11	0,48	5
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63,95	64,27	60,17	62,68	65,19
4.	Keselamatan dan perlindungan (tenaga kerja yang memperoleh perlindungan sosial)	%	23,49	32,61	33,45	24,35	NA
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.45	5.37	6.37	NA	4.62
	Perkotaan	%	5.08	5.10	5.39	NA	5.12
	Perdesaan	%	5.89	5.69	7.56	NA	4.01
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Jenis Kelamin:						
	Laki-Laki	%	4.96	5.63	6.57	NA	4.49
	Perempuan	%	6.38	4.91	6.02	NA	4.83

Sumber : Dinakerkop dan UKM Kab. Banyumas, BPS Sakernas diolah Pusdatinaker

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui dari besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 sebesar 87,62 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 91,94. IDG Kabupaten Banyumas sebesar 67,32 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 75,10 Nilai IPG yang masih rendah disebabkan antara lain rata-rata melek huruf/harapan lama sekolah rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Banyumas lebih rendah dari pada laki-laki. Beberapa permasalahan masih dihadapi dalam peningkatan IDG, antara lain rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga).

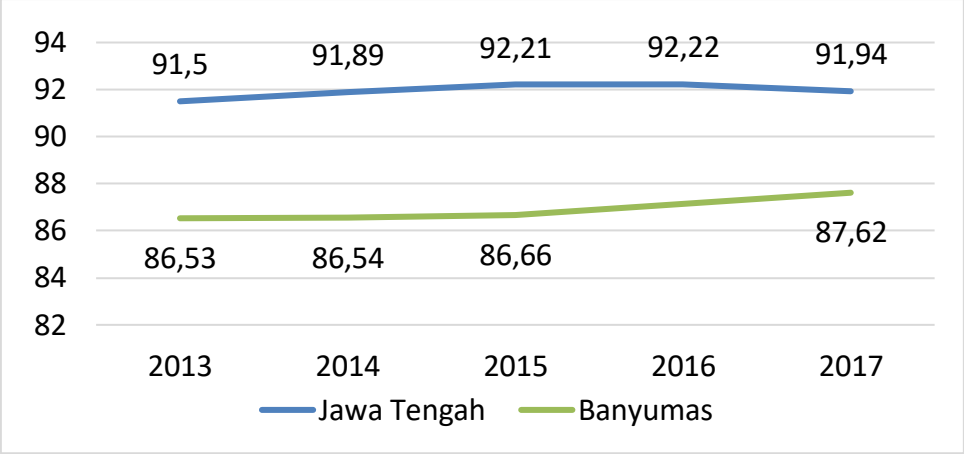
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2013 – 2017 selalu mengalami peningkatan dari 86,53 di tahun 2013 mencapai 87,62 pada tahun 2017. IPG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-3 pada lingkup eks karisidenan Banyumas. Dimana masih berada di bawah angka IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,94 pada tahun 2017. Berikut merupakan perbandingan IPG Kabupaten Banyumas dengan kabupaten/kota sekitar.

Tabel 2.56.
IPG Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2013-2017

Kabupaten se eks Karesidenan Banyumas/Regencies in Banyumas Residencies	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	2013	2014	2015	2016	2017	Peringkat ex Karesidenan Banyumas
Jawa Tengah	91.5	91.89	92.21	92,22	91.94	
Kabupaten Cilacap	85.83	86.16	86.04	N/A	86.14	4
Kabupaten Banyumas	86.53	86.54	86.66	N/A	87.62	3
Kabupaten Purbalingga	89.12	90.12	90.74	N/A	92.31	2
Kabupaten Banjarnegara	92.51	94.97	94.98	N/A	95.02	1

Sumber : BPS, Tahun 2013-2017

Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.27.
Perbandingan IPG Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2017
Sumber : BPS, Tahun 2013-2017

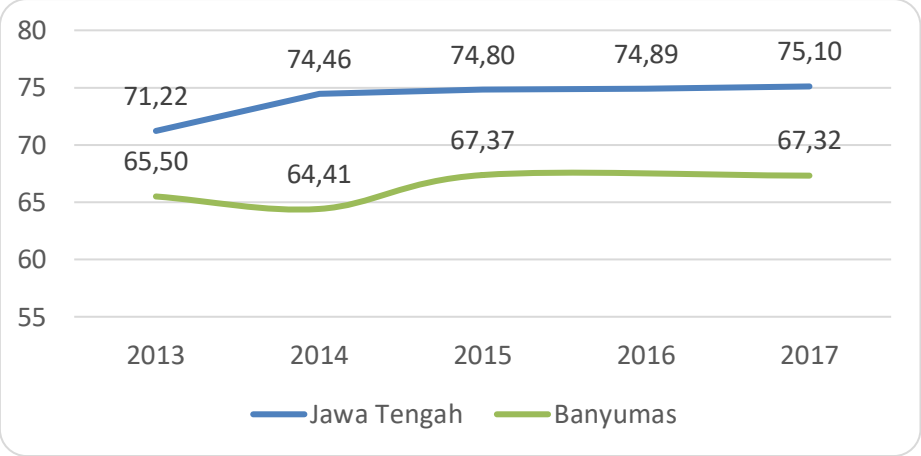
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG mempunyai kegunaan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan. IDG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2013 –2017 mengalami fluktuasi dari 66,5 di tahun 2013 menjadi 64,41 pada tahun 2014. Kemudian meningkat menjadi 67,32 pada tahun 2017. Bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitardi Jawa Tengah, IDG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-2 dari 4 kabupaten. Berikut perbandingan IDG Kabupaten Banyumas dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.57.
Perbandingan IDG Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2017

Kabupaten se eks Karesidenan Banyumas/Regencies in Banyumas Residencies	Indeks Pemberdayaan Gender/*(Gender Empowerment Index)*				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jawa Tengah	71.22	74.46	74.8	74.89	75.10
Kabupaten Cilacap	56.58	63.23	63.53	N/A	62.52
Kabupaten Banyumas	65.5	64.41	67.37	N/A	67.32
Kabupaten Purbalingga	68.66	71.03	72.08	N/A	73.11
Kabupaten Banjarnegara	61.03	67.78	65.72	N/A	66.44

Sumber : BPS Nasional Tahun 2013-2017

Bila dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas masih jauh dibawah Provinsi Jawa Tengah.Capaian IDG Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas dapat digambarkan pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.28.
Capaian IDG Jawa Tengah dengan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 – 2017
Sumber : BPS, Tahun 2013-2017

Berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, di Kabupaten Banyumas banyak terjadi kasus KDRT, dengan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pada tahun 2017 jumlah KDRT dan anak korban kekerasan sebanyak 71 orang. Korban kekerasan di Kabupaten Banyumas telah diupayakan seoptimal mungkin penanganannya setidaknya terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten sebanyak 27 unit. Penanganan pengaduan maupun penanganan kesehatan terhadap korban kekerasan juga sudah optimal, cakupan layanan rehabilitasi sosial telah mencapai 100%, jumlah *focal point gender* SKPD yang terbentuk sudah mencapai 28 unit dan partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2017 telah mencapai 63,3%, sedangkan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (ASN PEMDA) sebesar 48,83%.

Gambaran kondisi dan capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Banyumas secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja PP dan PA Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100
2.	Jumlah anak korban kekerasan(Anak)	53	44	70	72	71
3.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu %)	100	100	100	100	100

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/Adan PPT/PKT diRS(%)	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu. (unit)	100	100	100	100	100
6.	Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)	27	27	27	27	27
7.	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)	18	18	18	18	18

Sumber : DPPKB3A Kabupaten Banyumas, 2017

Adapun capaian indikator RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 urusanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	44	44	48,81	48,81	48,83
2	Rasio KDRT	0,0056	0,0037	0,037	0,0041	0,0019
3	Partisipasi angkatan kerjaperempuan (%)	43,38	46,30	42,57	46,72	63,59
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase perempuan di lembaga legislatif (%)	18	18	18	18	18
6	Rasio kekerasan terhadap anak	-	47	42	75	29

Sumber : DPPKB3A Kabupaten Banyumas, 2017

2.3.2.3. Pangan

Kawasan pertanian di Kabupaten Banyumas mencakup Kawasan pertanian lahan basah kurang lebih 32.310 Ha dan Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 13.623 Ha. Kawasan lahan basah terdapat di wilayah Kecamatan Kemranjen,

Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Patikraja, dan Kecamatan Wangon. Sementara itu kawasan lahan kering terdapat di Wilayah Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Baturaden, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Rawalo, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, dan Kecamatan Tambak.

Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat sebagai produksi daerah dengan mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan stok ditambah impor dan Kabupaten Banyumas telah melakukan regulasi ketahanan pangan.Berdasarkan analisis neraca bahan pangan, ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kap/hari) di Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan.

Penguatan cadangan pangan di Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2013-2015 telah mencapai 60%, meningkat pada tahun 2016 mencapai 65% dan pada tahun 2017 meningkat kembali mencapai 70%. Untuk ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal pada tahun 2013-2015 mencapai 90% meningkat pada tahun 2016-2017 menjadi 95%. Stabilitas harga dan pasokan pangan kurun waktu tahun 2013-2015 mencapai 90% meningkat pada tahun 2016 mencapai 92% dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 95%. Skor pangan harapan kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan tahun 2013 mencapai 89,80%, tahun 2014-2016 mencapai 90% dan pada tahun 2017 menjadi 90,01%. Untuk pengawasan dan pembinaan pangan pada tahun 2013 sebesar 55%, pada tahun 2014-2015 mencapai 70%, menurun pada tahun 2016 mencapai 67% dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 70%.

Dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan di Kabupaten Banyumas dikembangkan desa mandiri pangan di desa tersebut dikembangkan pula lumbung pangan masyarakat, sehingga penangan daerah rawan pangan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan pada tahun 2013 mencapai 59%, meningkat pada tahun 2014-2015 mencapai 60% dan pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 62%. Capaian kinerja ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

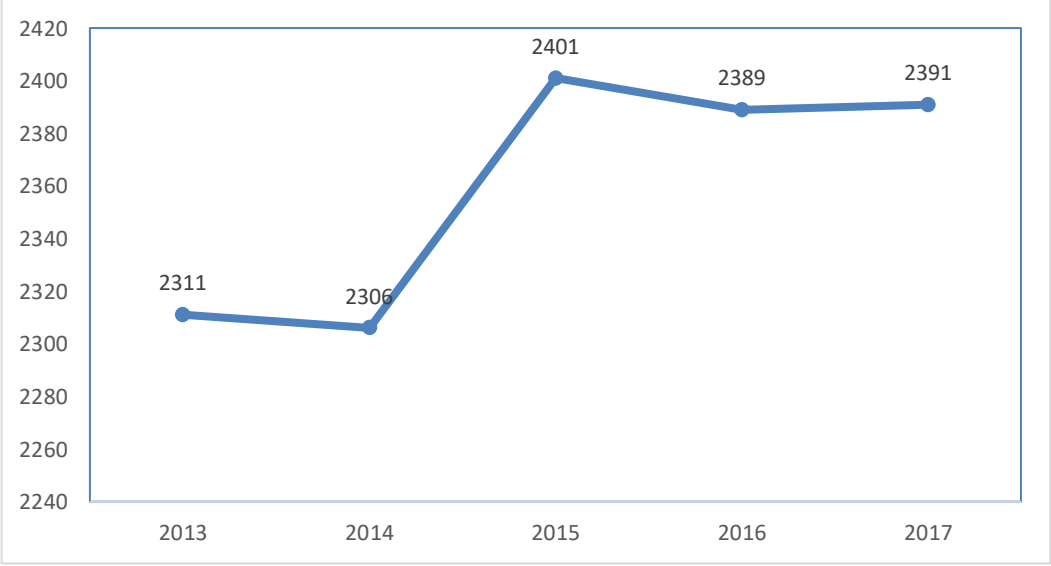
Tabel 2.60.
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)	85,00	86,00	87,00	89,00	91,00
2.	Penguatan cadangan pangan (%)	60,00	60,00	60,00	65,00	70,00
3.	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal (%)	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00
4.	Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)	90,00	90,00	90,00	92,00	95,00

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
5.	Skor pola pangan harapan (%)	89,80	90,00	90,00	90,00	90,01
6.	Pengawasan dan pembinaan pangan (%)	55,00	70,00	70,00	67,00	70,00
7.	Penanganan daerah rawan pangan (%)	59,00	60,00	60,00	62,00	62,00

Sumber: Dinas Pertanian dan KP Kab.Banyumas, 2017.

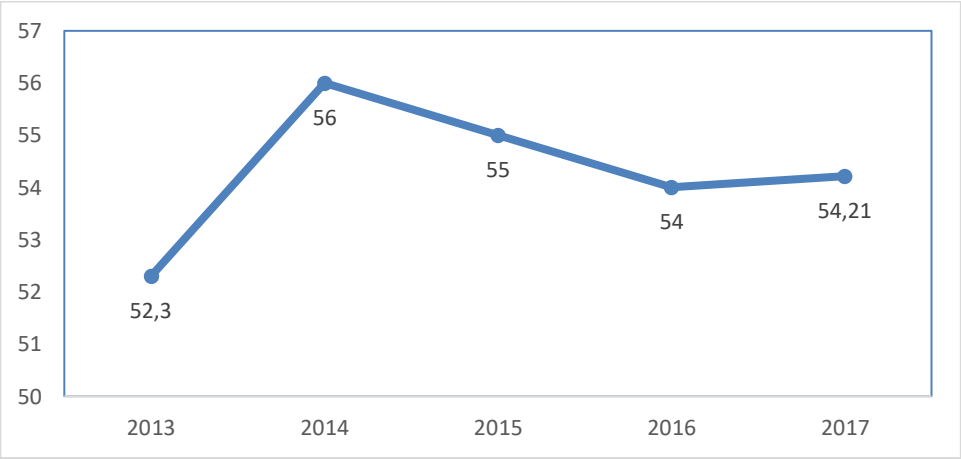
Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat sebagai produksi daerah dengan mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan stok ditambah impor dan Kabupaten Banyumas telah melakukan regulasi ketahanan pangan.Berdasarkan analisis neraca bahan pangan, ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari) di Kabupaten Banyumas kurun waktu 2013-2016 terjadi fluktuatif. Tahun 2013 ketersediaan energi per kapita senilai 2.311,00 kkal/kap/hari, tahun 2014 menurun menjadi 2.306,00 kkal/kap/hari, dan tahun 2015 meningkat menjadi 2.401,00 kkal/kap/hari. Tahun 2016menurun menjadi 2.389,00 kkal/kap/hari dan meningkat kembali tahun 2017 sebesar 2.391 kkal/kap/hari.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan energi di Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari standar yang ditetapkan dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004 yaitu ketersediaan energi senilai 2.200 kkal/kap/hari.



Gambar 2.29.
Ketersediaan Energi per Kapita (kkal/kap/hari) Tahun 2013 - 2017
Sumber : Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kab.Banyumas, 2016 dan Dinas Pertanian dan KP, 2018.

Ketersediaan protein per kapita kurun waktu 2013-2016 terjadi fluktuatif pula. Tahun 2013 ketersediaan protein per kapita senilai 52.30 gram/kap/hari, dan tahun 2014 meningkat kembali menjadi 56,00 gram/kap/hari. Tahun 2015 tercatat menurun menjadi 55,00 gram/kap/hari, dan tahun 2016 menjadi 54,00 gram/kap/hari. Pada tahun 2017 ketersediaan protein per kapita meningkat menjadi 54,21 gram/kap/hari. Namun

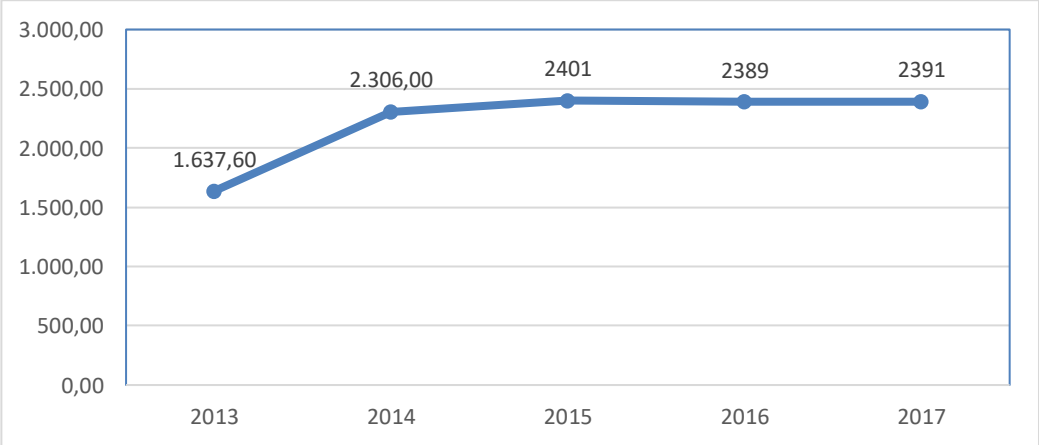
demikian, ketersediaan protein per kapita Kabupaten Banyumas masih lebih rendah dibandingkan standar yang ditetapkan dalam WKNPG VIII tahun 2004 yaitu ketersediaan protein senilai 57 gram/kap/hari.



Gambar 2.30.
Ketersediaan Protein per Kapita (gram/kap/hari)
Tahun 2013 – 2017

Sumber : *Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kab.Banyumas, 2016 dan Dinas Pertanian dan KP, 2018.*

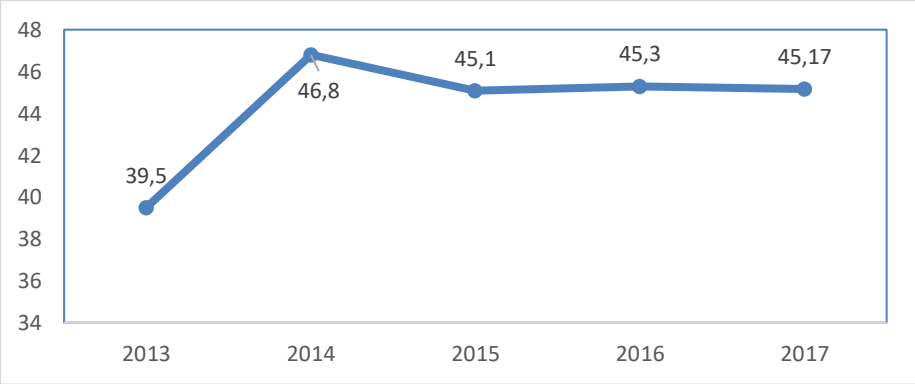
Konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2013-2016 mengalami peningkatan. Konsumsi protein tahun 2013senilai 39,50 gram/kap/hari. Tahun 2014 meningkat menjadi 46,80 gram/kap/hari. Tahun 2015 menurun menjadi 45,10 gram/kap/hari, dan tahun 2016 menjadi 45,30 gram/kap/hari menurun kembali menjadi 45,17 gram/kap/hari pada tahun 2017. Capaian tersebut masih di bawah standar Permen Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia yaitu sebesar 57,00 gram/kap/hari.



Gambar 2.31.
Konsumsi Energi per Kapita (kkal/kap/hari) Tahun 2013 – 2017

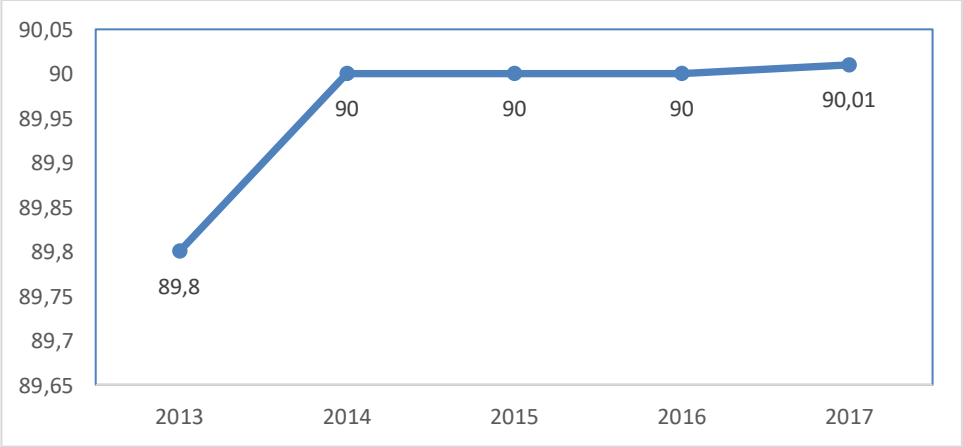
Sumber : Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kab.Banyumas, 2016 dan Dinas Pertanian dan KP, 2018.

Konsumsi protein per kapita penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2013-2016 mengalami peningkatan. Konsumsi protein tahun 2013 senilai 39,50 gram/kap/hari. Tahun 2014 meningkat menjadi 46,80 gram/kap/hari. Tahun 2015 menurun menjadi 45,10 gram/kap/hari, dan tahun 2016 menjadi 45,30 gram/kap/hari menurun kembali menjadi 45,17 gram/kap/hari pada tahun 2017. Capaian tersebut masih di bawah standar Permen Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi Bangsa Indonesia yaitu sebesar 57,00 gram/kap/hari.



Gambar 2.32.
Konsumsi Protein per Kapita (gram/kap/hari) Tahun 2013 – 2017
Sumber : *Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kab.Banyumas, 2016 dan Dinas Pertaniandan KP, 2017.*

Keragaman konsumsi pangan dapat dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang didasarkan pada sumbangan energi dari sembilan kelompok pangan utama yaitu antara lain padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani serta sayur dan buah. Konsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di Kabupaten Banyumas belum optimal.Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Banyumas kurun waktu 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2013 senilai 89,8 meningkat mencapai 90,01 pada tahun 2017. Jenis bahan pangan yang perlu ditingkatkan adalah jenis pangan umbi-umbian, buah, sayur dan pangan hewani.



Gambar 2.33.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2013 – 2017

Sumber : *Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kab.Banyumas, 2016 dan Dinas Pertanian dan KP, 2018.*

2.3.2.4. Pertanahan

Kinerja makro urusan Pertanahan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi. Pensertifikatan tanah sangat penting untuk menunjukkan kepemilikan tanah. Besarnya persentase luas lahan bersertifikat dapat dilihat dari luas lahan bersertifikat dibandingkan dengan luas lahan yang seharusnya bersertifikat. Pada Tahun 2016 di Kabupaten Banyumas luas lahan yang bersertifikat seluas 108.941,69 ha, dan lahan belum bersertifikat seluas 23,818 ha, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini baru mencapai sebesar 82,44%. Berkaitan dengan konflik-konflik pertanahan dalam kurun waktu lima tahun (2012-2016) di Kabupaten Banyumas tidak terjadi kasus sengketa tanah.

Terkait dengan perizinan lokasi, penyelesaian izin lokasi diperoleh dari jumlah Izin Lokasi dibandingkan dengan Permohonan Izin Lokasi. Pada tahun 2016 di Kabupaten Banyumas terdapat Permohonan Izin Lokasi sebanyak 3 izin sedangkan yang diterbitkan sebanyak 3 izin, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 100%. Perkembangan capaian kinerja pembangunan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61.
Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan
Kabupaten Banyumas Tahun 2012-2016

No.	Bidang Urusan/Indikator		Capaian kinerja Setiap Tahun			
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persertifikatan tanah					
	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	76,93	81,68	82,06	82,44	82,44
2.	Izin Lokasi					
	Jumlah Permohonan Ijin Lokasi	4	2	16	3	3
	Penyelesaian ijin lokasi	4	2	16	3	3
	Prosentase ijin lokasi	100	100	100	100	100

*Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas .(*angka sementara) tambah data tahun 2017*

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu Penegakan hukum lingkungan (%), Pelayanan pencegahan pencemaran air (%), pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%),rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, persentase penanganan sampah (%), dan persentase Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB (%). Selain itu pelaksanaan kewenangan lingkungan hidup juga harus memperhatikan target-target yang ada dalam *Sustainable Developmnt Goals* (SDGs).

Untuk sektor persampahan, berdasarkan target akhir RPJMD rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk sampai dengan 2017 sebesar 6,3 telah memenuhi target akhir RPJMD tahun 2018 sebesar 0,56, demikian juga dengan

persentase penanganan sampah sampai dengan 2017 (54%) telah memenuhi target akhir RPJMD tahun 2018 sebesar 14,69. Namun demikian cakupan penanganan sampah di Kabupaten Banyumas masih terpusat pada kawasan perkotaan, sehingga jika dilihat jangkauan pelayanan sampah di tingkat seluruh kabupaten menjadi kecil karena hanya kawasan perkotaan saja yang terlayani dengan luasan yang relatif kecil dibandingkan dengan total wilayah pedesaan.

Kabupaten Banyumas hanya memiliki 2 TPA yang telah melebihi kapasitas daya tampungnya. Dengan perkembangan penduduk sampah di Kabupaten Banyumas akan terus meningkat pengelolaan sampah memerlukan strategi penanganan yang tepat dan cepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat sampah.

Kinerja makro urusan lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas ditampilkan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.62.
Kinerja Urusan Lingkungan di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	92,5	100	100	100	100
2.	Pelayanan Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	47,5	100	100	100	100
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	20	36	36	42	44
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%).	100	100	100	100	100
5.	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100
6.	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan AMDAL, UKL-UPL, SPPL (Dokumen)	825	1.096	1.452	1.739	1.507
7.	Cakupan penghijauan wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan atau lahan kritis (Ha)	125,85	75	60	68	NA
8.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa (%)	20	36	40	42	44
9.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,52	0,52	0,55	0,55	6,3
10.	Persentase penanganan sampah (%)	13,25	13,25	13,78	14,07	54
11.	Persentase Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)	9,92	10,77	11,83	12,50	13,00

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2017

Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan masyarakat meningkatkan beban terhadap daya dukung lingkungan. Ancaman pencemaran lingkungan di Kabupaten Banyumas semakin meningkat, dengan penambahan jumlah

kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan. Daya dukung air di Kabupaten Banyumas berdasarakan analisis KLHS RPJMD Kabupaten Banymas tahun 2018-2023 berada pada 1,21 kategori sedang dan cenderung turun karena peningkatan kebutuhan penduduk, pertanian dan industri. Beberapa sungai yang melintas kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas memiliki kandungan minyak dan lemak, colifecal dan coliform melebihi ambang batas, yang diduga kontribusi pencemarannya dari buangan sampah dan masukan limbah rumah tangga serta kotoran makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Sungai Serayu yang melintas di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat indikasi pencemaran dari kegiatan pertanian terutama pestisida yang diindikasikan dengan klorin bebas yang melebih ambang batas baku mutu.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dihasilkan dari penggunaan energi untuk kegiatan transportasi, perubahan lahan, kegiatan pertanian, dan pengelolaan limbah. Pengelolaan GRK sangat penting dilakukan dalam rangka pengelolaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Emisi gas rumah kaca yang terbesar di wilayah Kabupaten Banyumas dihasilkan dari limbah cair domestik mencapai 130 ribu ton CO2e atau 5,81% dari total emisi.

Hal lain yang menjadi indikator dalam penilaian kinerja makro urusan lingkungan hidup yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH merupakan salah satu elemen ruang di dalam kawasan perkotaan yang dibutuhkan bagi berbagai kepentingan. Secara ekologis RTH berfungsi sebagai pembentuk iklim mikro perkotaan dan secara sosiologis berfungsi bagi interaksi dan rekreasi penduduk perkotaan. Selain fungsi ekologis dan sosiologis tersebut RTH merupakan salah satu elemen dalam perancangan perkotaan yang memiliki nilai keindahan dan pembentuk kawasan perkotaan itu sendiri.

Untuk wilayah perkotaan di Kabupaten Banyumas prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan. Namun demikian prosentasenya masih di bawah ketentuan Undang–Undang Penataan Ruang yang mengamanatkan prosentase RTH perkotaan sebesar 30%, terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk keberlanjutan fungsi wilayah perkotaan di Kabupaten Banyumas karena fungsi ekologi dan sosial RTH sangat dibutuhkan oleh wilayah perkotaan.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran penting, dikarenakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil terkait dan menjadi akses kepada pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian tuntutan dan harapan masyarakat akan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil semakin besar.

Kinerja pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Banyumas belum terwujud secara optimal meskipun terdapat kecenderungan untuk terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja pelayanan KTP, KK maupun akte kelahiran yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan KTP pada tahun 2017 telah mencapai 81,55% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 1.551.071 orang. Dan sudah melebihi target kinerja akhir tahun RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 sebesar 82,76%.

Pada tahun 2017 prosentase penduduk yang memiliki akte sebesar 84,00%. Angka tersebut menunjukan target kinerja pelayanan akte kelahiran pada tahun 2017 sebesar 89,01% telah tercapai. Namun demikian pelayanan akte kelahiran masih perlu ditingkatkan karena meskipun pelayanan tersebut gratis bagi sebagian masyarakat

terutama yang jauh dari ibu kota Kabupaten memiliki akte kelahiran memerlukan biaya tinggi. Upaya pelayanan akte kelahiran dengan sistem jemput bola masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga tahun 2013-2017 menunjukan peningkatan. Hingga tahun 2017 prosentase kepemilikan KK telah mencapai 95,37% dari total jumlah KK sebanyak 666.970. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Banyumas mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Sementara itu untuk pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Banyumas baru dimulai pada tahun 2012. Namun demikian masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Selengkapnya perkembangan pelaksanaan Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK dan SDM di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63.
Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk yang wajib KTP	1.466.810	1.493.040	1.503.425	1.527.297	1.551.071
	Persentase Kepemilikian KTP bagi wajib KTP (%)	78,09	78,52	79,23	80,02	81,55
2.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	56,00	73,10	84,04	86,60	89,01
3.	Jumlah Tempat Perekaman Data Kependudukan Kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)	27 Kec	27 Kec	27 Kec	27 Kec	27 Kec
4.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
5.	Jumlah Keluarga (KK)	622.151	633.989	643.923	655.515	666.970
6.	Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%)	92,81	93,55	94,29	94,85	95,37

Sumber : Dinpendukcapil Kab. Banyumas, 2017

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja makro urusan pemberdayaan masyarakat desa antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, LPM berprestasi, PKK aktif, posyandu aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, dan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Jumlah LSM selama tahun 2013-2018 menunjukkan peningkatan, tahun 2013 sebanyak 56 LSM, menjadi 113 pada tahun 2017.

Tabel 2.64.
Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		36,94	37,21	37,43	37,41	100
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		113,6	135,36	111,4	111,4	54
3.	Jumlah LSM	Unit	56	29	29	29	113
4.	LPM Berprestasi	Unit	0,9063	0,3021	0,3021	0,3021	1,81
5.	PKK aktif	Unit	68,29	67,15	67,15	67,02	100
6.	Posyandu aktif	Unit	100	100	100	100	100
7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Ribuan Rupiah	6.160.000	16.960.000	16.967.000	16.967.000	16.967.000
8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Program	4	4	4	4	4

Sumber :Dinsospermades Kabupaten Banyumas, 2017

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2017 meliputi rasio akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, prosentase cakupan peserta KB aktif, jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan rata-rata jumlah anak per keluarga. Di samping indikator tersebut terdapat indikator lain untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Capaian kinerja indikator-indikator tersebut pada tahun 2017 ditunjukan oleh tabel berikut:

Tabel 2.65.
Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,25	2,25	2,17	2,17	2,30
2.	Rasio Aseptor KB	74,24	73,2	73,22	78,02	75,59
3.	Jumlah peserta KB aktif	250.867	248.138	233.125	253.095	254.357
4.	Cakupan peserta KB aktif (%)	74,24	73,2	73,22	78,02	78,59
5.	Jumlah peserta KB baru	56.318	48.208	45.018	41.186	41.100
6.	*Unmeetneed* KB	46,24	49.625	37.386	32.439	33.662
7.	Persentase *Drop Out* (DO) KB	17,48	17,03	21,98	10,1	14,87
8.	Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)	83,49	74,72	44,92	40,71	42,03
9.	Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang)	2,75	2,8	2,69	2,09	2,20
10.	Rasio PPKBD dengan Desa/Kelurahan (orang)	1	1	1	1	1
11.	Persentase keluarga Pra Sejahtera (%)	23,35	22,5	20,89	20,68	20,50
12.	Persentase keluarga Pra Sejahtera I (%)	19,6	19,77	17,95	18,43	18,20
13.	Cakupan PUS dengan Istri usia dibawah 20 tahun (%)	1,21	1,72	1,72	1,72	1,21
14.	Jumlah PIK	54	50	56	63	63
15.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	80,35	83,3	58,04	79,05	79,81

Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Banyumas, 2017

Berdasarkan tabel tersebut cakupan PUS yang telah menjadi peserta KB aktif pada tahun 2017 sebesar 78,59 % mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 0,57 %. Jumlah peserta KB aktif pada tahun 2017 sebesar 254.357 orang naik 1.262dari tahun 2017.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keluarga Berencana telah disiapkan petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menentukan rasio PLKB dengan kelurahan/desa adalah 1:2 artinya 1 PLKB melayani 2 desa. Rasio PLKB dengan desa/Kelurahan di tahun 2017 adalah 2,76 artinya 1 PLKB mendampingi 2–3 Desa/kelurahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PLKB di Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan target SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

2.3.2.9. Perhubungan

Pembangunan bidang perhubungan ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang perhubungan. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas merupakan upaya mendukung permukiman yang layak dan berkelanjutan, mendorong produktiitas daerah dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kecelakaan lalu lintas.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang urusan perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan pencapaian sasaran pembangunan perhubungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang perkembangannya dari tahun 2013-2017 ditunjukan tabel berikut:

Tabel 2.66.
Jumlah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah sarana dan prasarana lalu lintas (unit) :					
	• Rambu Lalu Lintas (unit)	2.427	3.114	3.968	4.290	4.766
	• Rambu pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) (unit)	289	351	401	421	441
	• Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)	51	56	56	58	61
	• Warning Lamp (unit)	95	125	118	149	155
	• Marka Jalan (m2)	10.557	15.540	15.540	29.970	38.932

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2018

Jumlah sarana prasarana perhubungan terus bertambah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, namun demikian jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan riil sarana prasarana perhubungan di lapangan, apalagi dengan penambahan panjang jalan kabupaten. Kebutuhan sarana prasarana perhubungan yang ideal sesuai dengan kondisi panjang jalan saat ini meliputi rambu lalulintas sebanyak 10.276 unit, rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) sebanyak 1.685 unit, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) sebanyak 84 unit, Warning Lamp sebanyak 311 unit, dan Marka Jalan sepanjang 59.940 m2.

Jumlah penumpang angkutan umum, baik Bus AKAP, Bus AKDP, Mikrobus, maupun Angkota/angkudes semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan, semakin meningkatnya infrastruktur jalan, kemudahan kepemilikan kendaraan dan banyaknya pilihan moda transportasi termasuk transportasi online. Fenomena perkembangan transportasi online perlu diantisipasi pemerintah Kabupaten Banyumas agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat seperti yang terjadi di daerah lain.

Dalam aspek kelaikan kendaraan, Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki 1 (satu) tempat pengujian kendaraan bermotor dengan status akreditasi C yang memiliki sistem layanan pengujian secara elektronik dan sudah terintegrasi dengan Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Kementerian Perhubungan.

Jumlah ini tidak memadai apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang wajib diuji di wilayah Kabupaten Banyumas. Angkutan umum yang melakukan uji KIR di Kabupaten Banyumas mengalami perubahan kenaikan jumlah untuk jenis mobil penumpang umum, bus, mobil barang, maupun mobil gandengan.

Tabel 2.67.
Jumlah penumpang Angkutan Umum, Trayek, dan Uji KIR di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penumpang angkutan umum (orang)					
	Bus AKAP	2.921.580	1.669.650	1.629.635	2.802.568	2.688.073
	Bus AKDP	3.654.201	2.059.964	2.055.961	1.393.122	1.380.106
	Mikrobus	4.501.250	3.007.140	3.002.143	2.240.150	2.170.452
	Angkota/Angkudes	1.834.560	1.208.571	1.200.572	1.185.413	1.303.104
2	Jumlah trayek angkutan umum (unit)					
	AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)	675	589	589	570	570
	AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)	47	52	52	70	70
	AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi)	54	85	85	90	90
	AJAP (Antar Jemput antar Provinsi)	6	16	16	16	16
	Angkutan Kota	344	344	344	344	344
	Angkutan Desa	506	506	506	506	506
	Taksi	120	120	120	170	170
3	Rasio ijin trayek	0,044	0,044	0,001	0,056	0,064
4	Jumlah angkutan wisata (unit)	54	102	102	104	104
5	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	11.212/ 12.658	11.764/ 13.229	11.479/ 13.452	13.486/ 13.326	13.199
6	Jumlah Uji KIR angkutan umum :					
	Mobil penumpang umum	237/ 246	245/ 247	250	167/ 261	321/ 184
	Mobil Bus	3.206/ 3.348	3.213/ 3.373	3.310	1.770/ 3.201	3.217/ 1.757
	Mobil Barang	2.442/ 21.487	3.699/ 22.594	3.699/ 23.100	11.428/ 22.981	22.719/ 24.405
	Mobil Gandengan	225/ 235	227/247	243	63/ 209	186/ 52

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2018

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Media massa sebagai salah satu alat penyebaran informasi kepada masyarakat luas juga banyak beredar di wilayah Kabupaten Banyumas. Dengan jumlah penduduk cukup besar, Kabupaten Banyumas merupakan pasar yang sangat baik bagi perkembangan media massa. Media massa di Kabupaten Banyumas terdiri atas media cetak dan elektronik yang masing-masing ada yang berskala nasional dan lokal. Perkembangan media masa surat kabar di Kabupaten banyumas tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 stabil, jumlah surat kabar nasional sebanyak 19 surat kabar dan surat kabar lokal sebanyak 5 surat kabar.

Teknologi komunikasi dan informatika merupakan teknologi dengan umur teknologi yang pendek karena perubahan dan perkembangnya yang pesat. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informatika menyebabkan beberapa indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika menjadi kurang relevan. Jumlah warnet terhadap penduduk pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara umum mengalami penurunan dari 141 warnet menjadi 135 warnet. Demikian pula media komunikasi wartel sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 secara umum juga mengalami penurunan dari sebanyak 20 wartel menjadi 17 wartel. Hal ini disebabkan makin meningkatnya layanan internet rumah dan handphone yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam penggunaannya.

Tabel 2.68.
Kinerja Makro Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah jaringan komunikasi (unit)	8	8	8	8	8
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	20 141	17 135	17 135	17 135	17 135
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal (unit)	195	195	195	195	195
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (stasiun)	141	141	141	141	142
5	Jumlah TV Nasional (stasiun)	7	7	7	7	13
6	Web site milik pemerintah daerah (unit)	21	21	86	88	55

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2018

Tabel di atas merupakan indikator kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyumas periode tahun 2013-2018 dengan angka capaian yang cukup baik, meskipun pada indikator website milik pemerintah daerah angkanya menurun. Hal ini terjadi karena adanya perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang semula berjumlah 88 unit kerja pada Tahun 2016 menjadi 55 Unit Kerja pada Tahun 2017.

Sedangkan untuk RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi dan Informatika adalah Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,

dinyatakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan unsur-unsur meliputi : tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan audit TIK.

Untuk mendukung penerapan SPBE dibutuhkan infrastruktur komunikasi dan informatika berupa jaringan fiber optic yang terhubung dengan seluruh perangkat daerah. Fiber optic ini merupakan tekhnologi komunikasi dan informatika yang memiliki kualitas koneksi dan keamanan yang baik, namun demikian penggunaan fiber optic di Kabupaten Banyumas baru menjangkau lima perangkat daerah yaitu Dinas komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan data pemerintah hingga 2017, Indonesia memiliki 26,8 juta anggota koperasi dan 152.282 unit koperasi. Meskipun mengalami pertumbuhan, kualitas keaktifan koperasi perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Persentase koperasi yang sehat dan yang tidak sehat relatif berimbang, hal ini menunjukan pentingnya pengembangan koperasi. Peremajaan kembali koperasi dalam komitmen menjadi penting dalam memaknai koperasi sebagai salah satu instrumen untuk memberdayakan diri sendiri dan untuk kepentingan bersama, sehingga terwujud kedaulatan ekonomi.

Kondisi koperasi di Kabupaten Banyumas tidak lebih baik dibanding kondisi koperasi dalam lingkup nasional. dalam kurun waktu tahun 2013-2017 tidak ada peningkatan jumlah koperasi yang signifikan, persentase koperasi aktif berfluktuasi, dengan persentase koperasi kategori tidak sehat lebih besar dari persentase koperasi kategori sehat.

Secara jelas perkembangan kinerja urusan koperasi di kabupaten banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.
Kinerja Makro Koperasi Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Koperasi	Unit	522	527	537	544	546
2.	Persentase koperasi aktif	%	75,48	75,90	76,72	77,02	75,82
3.	Koperasi Kategori Sehat	%	51,24	34,16	35,38	32,54	29,12
4.	Koperasi Kategori tidak Sehat	%	48,76	65,84	64,62	67,46	70,88

Sumber : Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 2018.

Peran dan perkembangan koperasi berkaitan erat dengan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. Pemberdayaan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemberdayaan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia *(pro poor)*. Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan

UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*).

Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari tumbuhnya unit UMKM dan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM. Rata-rata setiap unit usaha mempekerjakan 1-3 orang pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas, terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal dan perekonomian daerah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas masih terkendala dalam hal perijinan usaha dan permodalan, ketrampilan manajemen dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha. Keterbatasan tersebut menjadikan perkembangan omset usaha dan keuntungan yang diperoleh sebagian besar UMKM masih kecil.

Usaha mikro, kecil dan menengah juga menghadapi tantangan dalam peningkatan mutu dan pemasaran produk. Dukungan pemerintah dalam peningkatan UMKM di Kabupaten Banyumas masih sangat diperlukan. Perkembangan UMKM dan jumlah tenaga kerja terserap di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70.
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)	581.642	66.533	66.605	66.689	66.689
2.	Jumlah tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (orang)	876.668	95.719	95.835	95.955	95.955
3.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memiliki ijin usaha (unit)	6.475	6.580	6.656	6.720	6.720
4.	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh fasilitas permodalan usaha (orang)	6.556	7.184	7.184	7.184	7.184
5.	Jumlah UMKM Bersertifikat Halal (unit)	6	6	5	4	6

Sumber : Dinakerkop dan UKM Kabupaten Banyumas, 2017.

Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2013 mengacu pada kriteria jumlah UMKM yang didalamnya termasuk petani, sedangkan data jumlah UMKM pada tahun 2014-2017 sesuai dengan ketentuan tidak memasukan mata pencaharian petani. Dengan demikian data jumlah UMKM pada tahun 2014-2017 menurun tajam dari data UMKM tahun 2013.

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal di daerah menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran. Keberadaan penanam modal (investor) dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas. Jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Banyumas kurun waktu 2013 – 2017 mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Nilai investasi di Kabupaten Banyumas kurun waktu 2013-2017 juga mengalami perkembangan fluktuatif. Sejalan dengan nilai investasi yang fluktuatif, serapan tenaga kerja mengalami perkembangan fluktuatif setiap tahunnya. Secara umum perkembangan urusan penanaman modal di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2017 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini ditunjukan oleh capaian target kinerja indikator jumlah investor, jumlah nilai investasi dan rasio daya serap tenaga kerja. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banyumas mentargetkan jumlah investor di Kabupaten Banyumas sebanyak 590 investor dan jumlah investasi sebesar Rp. 245.000.00,00, serta rasio daya serap tenaga kerja 12. Target tersebut terpenuhi dengan jumlah investor sebanyak 613 nilai investasi sebesar Rp. 583.401.950.000,00, dan rasio daya serap tenaga kerja 12.

Capaian kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.71.
Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2013-2017

No.	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah investor (PMDN/ PMA)	611	927	1.123	753	613
2.	Jumlah investasi (Rp)	589.016.435.717	360.321.440.329	609.535.145.592	455.696.150.000	583.401.950.000
3.	Jumlah tenaga kerja terserap (orang)	7.304	8.461	13.518	12.683	7.782
4.	Rasio daya serap tenaga kerja	12	9,13	12,04	16,84	12

Sumber : DPMPPTSP Kabupaten Banyumas, 2017.

Berdasarkan tabel 2.71 terlihat bahwa kinerja makro urusan penanaman modal mengalami perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Data tersebut tersebut menunjukan bahwa kondisi investasi yang masuk ke Kabupaten Banyumas kurang stabil. Oleh karena itu diperlukan upaya yang cukup serius dari Pemerintah Daerah untuk mendatangkan para investor.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Tahun 2018 dengan menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Melalui Mal pelayanan Publik tersebut diharapkan

proses penyelenggaraan perizinan akan lebih sederhana, mudah, murah, transparan dan terintegrasi.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Kondisi pembangunan urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2013-2017 menunjukkan kinerja yang cukup baik. organisasi kepemudaan terdiri dari dari organisasi kesiswaan (OSIS), organisasi mahasiswa (BEM), organisasi KNPI dan organisasi kepramukaan. Seluruh organisasi kepemudaan tersebut telah mendapat pembinaan dari pemerintah.

Pembangunan di bidang olahraga di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang cukup dan menggembirakan. Organisasi olahraga di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2017, tercatat sebanyak 202 organisasi. Fasilitas olahraga berupa lapangan olahraga di Kabupaten Banyumas cukup tersedia, hingga tahun 2017 jumlah lapangan olahraga tercatat sebanyak 657 lapangan. Seiring dengan banyaknya kompetisi/pertandingan berbagai macam jenis olah raga seperti sepak bola, footsall, batminton, sepatu roda, pada tahun 2017 jumlah klub olah raga bertambah menjadi 800 klub, yang tersebar di 27 kecamatan. Jumlah gedung olah raga juga terus bertambah, pada tahun 2017 terdapat 63 unit gedung olah raga yang tersebar di 27 kecamatan. Perkembangan jumlah organisasi pemuda, organisasi olahraga, jumlah lapangan olahraga, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga di Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.72.
Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga dan Lapangan Olahraga Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian kinerja setiap tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah organisasi pemuda	unit	115	115	116	143	143
	Organisasi kesiswaan (OSIS)	unit	304	304	304	304	304
	Organisasi Mahasiswa (BEM)	unit	10	10	11	11	11
	Organisasi KNPI	unit	1	1	1	1	1
	Organisasi kepramukaan	gudep	2.606	2.606	2.606	2.060	2.060
2.	Jumlah organisasi pemuda yang telah dibina						
	Organisasi kesiswaan (OSIS)	unit	304	304	304	304	304
	Organisasi mahasiswa (BEM)	unit	10	10	11	11	11
	Organisasi KNPI	unit	1	1	1	1	1
	Organisasi kepramukaan	gudep	2.606	2.606	2.606	2.606	2.606
3.	Jumlah organisasi olahraga	organisasi	202	202	202	202	202
4.	Jumlah lapangan olahraga	lapangan	540	540	657	657	657
5.	Jumlah klub olahraga	Klub/	515	202	600	656	800

No.	Indikator	Satuan	Capaian kinerja setiap tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
		klpk					
6.	Jumlah gedung olahraga	unit	51	51	60	60	63

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2017.

Prestasi kepemudaan dan olahraga Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 berfluktuasi untuk tingkat provinsi, tingkat nasional, maupun tingkat internasional. Prestasi kepemudaan dan olahraga Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 ditunjkan dalam table berikut:

Tabel 2.73.
Prestasi Kepemudaan dan Prestasi Olahraga
di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Capaian kinerja setiap tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Peningkatan Prestasi Kepemudaan						
	Tingkat Provinsi	Prestasi	3	4	9	6	10
	Tingkat Nasional	Prestasi	3	2	4	3	3
	Tingkat Internasional	Prestasi	1	1	1	2	0
2.	Peningkatan Prestasi Olahraga						
	Tingkat Provinsi	Emas	90	90	112	109	71
	Tingkat Nasional	Emas	37	37	22	1	27
	Tingkat Internasional	Emas	5	5	0	0	38
	Peringkat Popda Tk SD						
	Peringkat Popda Tk SMP						
	Peringkat Popda Tk SMA						
	Peringkat PORPOV			3			

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2017.

2.3.2.14. Statistik

Urusan statistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai peningkatan pelayanan statistik. Adapun penyusunan data statistik yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banyumas adalah stastistik sektoral, sedangkan data statistik dasar dan khusus disediakan oleh Badan Pusat Ststistik (BPS) Kabupaten Banyumas yakni meliputi Kabupaten Banyumas Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kebutuhan akan data statistik senantiasa dilakukan *update* setiap tahunnya, guna memenuhi informasi statistik yang lebih transparan dan murah. Data ini telah dipublikasikan melalui website Pemerintah Kabupaten Banyumas *(www.banyumaskab.go.id),* namun untuk data sektoral yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai saat ini belum sepenuhnya terpublikasikan dengan baik di website Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Adapun kinerja makro urusan statistik dapat dilihat dari beberapa indikator sebagaimana terlihat pada tabel 2.73. Dokumen-dokumen kinerja makro urusan statistik dimaksud harus dipublikasikan kepada masyarakat.

Tabel 2.74
Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dokumen ”Kabupaten Dalam Angka”	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Dokumen ”PDRB Kabupaten”	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Dokumen “Nilai Tukar Petani”	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Dokumen “Kecamatan Dalam Angka”	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Dokumen Indek Gini Ratio	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2017

2.3.2.15. Persandian

Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 urusan persandian masih menjadi satu urusan dengan otonomi daerah/pemerintahan umum/keuangan/kepegawaian dan persandian. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang persandian menjadi urusan tersendiri karena memegang peran yang penting dalam upaya pengamanan informasi pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, dimana masyarakat dapat mengakses segala jenis informasi termasuk data dan informasi dari pemerintah sehingga diperlukan pengamanan data pemerintah. Perkembangan ini belum diantisipasi Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan peraturan perundang-undangan (Perda/Perbup) yang mengatur implementasi keamanan informasi untuk seluruh perangkat daerah. Program dan kegiatan terkait pengamanan informasi baru dapat dilaksanakan tahun 2018 melalui pegamanan sistem informasi dan data centre.

2.3.2.16. Kebudayaan

Sebagai tonggak penunjang berdirinya kebudayaan nasional di Indonesia, kebudayaan daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan terkait eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang muncul antara lain semakin melunturnya nilai-nilai serta penghargaan terhadap kebudayaan daerah itu sendiri. Salah satu faktor yang menyebabkan semakin lunturnya minat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal adalah minimnya usaha pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah, serta menguatnya gempuran budaya asing yang masuk melalui saluran teknologi informasi yang semakin bebas dan cepat. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengantisipasi permasalahan tersebut dengan melakukan beberapa program kegiatan yang mengarah kepada pembinaan, pelestarian dan juga pembangunan sarana prasarana penyelenggaraan kebudayaan lokal beserta dengan unsur yang terbentuk di dalamnya.

Dalam rangka melestarikan kesenian dan kebudayaan dilakukan dengan penyelenggaran festival seni dan budaya yang rutin digelar setiap tahun. Penyelenggaran festival seni dan budaya antara lain menampilkan pagelaran kesenian

buncis karawitan, calung dan macapat, serta beberapa kebudayaan lain seperti wayang kulit, lengger dan kesenian kenthongan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat cukup signifikan, namun kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Tema maupun isi setiap festival perlu dipertajam, sehingga jelas perbedaan antara masing-masing festival. Pemasaran untuk setiap event tersebut juga perlu dikoordinasi dengan lebih baik lagi, sehingga benar-benar mampu menarik wisatawan seluas-luasnya.

Dukungan pemerintah dalam rangka memberikan ruang untuk mengekpresikan bentuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan pembangunan dan penyediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Dalam rangka menjaga serta melestarikan beberapa benda bersejarah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya. Hingga tahun 2016 tercatat 59 benda bersejarah, berupa benda, situs dan kawasan cagar budaya telah mendapatkan tindakan pelestarian/konservasi.

Pembinaan terhadap unsur kebudayaan dan seni juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Hingga tahun 2017 jumlah kelompok group kesenian di Kabupaten Banyumas tercatat sebanyak 1.633 kelompok. Jumlah kelompok group kesenian yang mendapat pembinaan diupayakan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebanyak 157 kelompok group kesenian telah mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Peningkatan porsi pembinaan penting sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk kesenian, pembinaan juga penting untuk merawat komitmen dan semangat para pelaku seni.

Capaian indikator pembangunan bidang kebudayaan pada tahun 2013- 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 - 2017

No.	Bidang.Urusan/ Indikator	Capaian kinerja setiap tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	7	9	9	5	24
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	3	3	5	6	6
3.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	59	59	59	59	59
4.	Jumlah group kesenian (kelompok)	1.469	1.490	1.633	1.633	1.633
5.	Jumlah group kesenian yang telah dibina (kelompok)	117	135	135	157	157
6.	Jumlah seniman (orang)					
	● Penari	1.457	1.501	1.529	1.529	1.529
	● Pemain teater	244	249	900	900	900
	● Pelukis	5	10	112	112	112
	● Pemusik	3.636	3.705	5.983	5.983	5.983

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2018.

2.3.2.17. Perpustakaan

Sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu pengetahuan, perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan bangsa agar

tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 telah memiliki 1 unit perpustakaan daerah, 3 unit perpustakaan keliling, 4 unit perpustakaan rumah ibadah, dan perpustakaan sekolah sebanyak 815 unit. Selain perpustakaan terdapat pula taman bacaan masyarakat sebanyak 44 unit dan perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 14 unit.

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah terus meningkat dari tahun 2013-2017. pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan daerah mencapai 473.967 orang pengunjung. Jumlah koleksi buku perpustakaan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah tahun 2013 sebanyak 48.309 buku, meningkat menjadi 59.313 pada tahun 2017.

Dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah selain penambahan koleksi buku, juga dilakukan penambahan fasilitas berupa internet gratis, serta fasilitas Wi fi/Hot Spot secara gratis/free acces. Selain itu Perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas akan menggunakan sistem otomasi dalam hal layanan pencarian katalog buku. Capaian indikator Urusan Perpustakaan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76.
Kinerja Makro Urusan Perpustakaan Tahun 2013-2017

No.	Kondisi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah perpustakaan (unit)	991	996	1.190	1.190	926
	Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
	Perpustakaan keliling	2	3	3	3	3
	Perpustakaan Sekolah	815	815	1.073	1073	815
	Perpustakaan Desa	85	89	52	52	45
	Perpustakaan Rumah ibadah	4	4	4	4	4
	Taman Bacaan Masyarakat	71	71	44	44	44
	Perpustakaan Perguruan Tinggi	13	13	13	13	14
2.	Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah	1.961	2.915	6.775	10.507	13.598
3.	Jumlah peminjam buku perpustakaan pertahun (orang)	27.654	39.650	40.017	69.341	48.230
4.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (orang)	42,742	57.621	75.777	102.716	473.967
5.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	48.309	50.083	51.755	55.334	59.313

Sumber : Dinas Perpusarda Kabupaten Banyumas, 2017

2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dan perlu adanya penyeragaman dan penyamaan persepsi dari masing-masing institusi dalam menyusun dan mengorganisir kearsipan, untuk menunjang tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Perbup Nomor 190 Tahun 2005 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Perbup Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun pedoman penataan dan klasifikasi arsip sebagai acuan seluruh perangkat daerah dalam

menyelenggarakan kearsipan. Selanjutnya pada tahun tahun 2009 diterapkan Sistem Pengelolaan Arsip secara baku sesuai dengan pedoman sebanyak organisasi perangkat daerah dan UPTD serta Arsip di Pemerintahan Desa. Dukungan sumberdaya manusia yang memadai dan kompeten di bidang pengelolaan kearsipan diharapkan penyelenggaraan kearsipan akan optimal. Untuk peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan selama periode tahun 2013-2017 telah dilaksanakan Bintek Pengelolaan Kearsipan, yang jumlah kegiatannya bertambah setiap tahun. Sampai dengan tahun 2017, telah dilaksanakan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 6 kali yaitu 5 kali fasilitasi dan 1 kali bintek.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengorganisasian data dan arsip, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah memiliki inisiatif dengan melakukan penarikan arsip dari instansi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keterlambatan dan resiko hilang dari arsip-arsip yang ada. Mulai tahun 2009 arsip yang ditarik dari beberapa institusi pemerintahan bertambah secara gradual setiap tahun. Akan tetapi tahun 2014 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Perkembangan kinerja pembangunan kearsipan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77.
Kinerja Makro Urusan Kearsipan Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pengelolaan arsip secara baku	%	80	68	82,40	90	96,55
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kali kegiatan	NA	NA	NA	NA	6
3.	Penarikan arsip dari instansi pemda	Berkas	254	278	338	388	388
4.	Jumlah tenaga arsiparis	Orang	1	1	2	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas, 2017

Dinas Arsip dan perpustakaan daerah melakukan penilaian pengelolaan arsip secara baku mengacu pada 6 (enam) Indikator yaitu :Pencatatan surat; Penataan berkas; Pengelolaan arsip in aktif; Penyusutan; Pemenuhan Sarpas dan SDM. Kinerja pengelolaan arsip secara baku menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 sebesar 80% menjadi sebesar 96,55 % pada tahun 2017, dari sebanyak 28 perangkat daerah di Kabupaten Banyumas. Penilaian Pengelolaan arsip secara baku tersebut atas dasar 3 (tiga) variabel terdiri dari pencatatan surat, pemenuhan sarpas dan Penyusutan.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Banyumas terdiri dari perikanan tangkap yang berasal dari perairan sungai (perairan umum) dan perikanan budidaya. Luas lahan perikanan tangkap di Kabupaten Banyumas tahun 2017 adalah 1.293 ha dan luas perikanan budidaya pada tahun 2017 adalah 424,50 ha. Luas lahan perikanan yang ada, sangat berpengaruh terhadap jumlah produksi dan nilai produksinya. Produksi perikanan di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2013-2017 terus meningkat. pada tahun 2013 produksi perikanan di Kabupaten Banyumas mencapai 8.524,10 ton,

meningkat menjadi 10.859,15 ton pada tahun 2016 dan meningkat kembali menjadi 11.010,09 ton pada tahun 2017.

Konsumsi ikan (kg/Kpt/th.) mengalami peningkatan selama periode tahun 2013-2017, pada tahun 2013 mencapai 13,55 kg/Kpt/th. Meningkat pada tahun 2016 menjadi 13,78 kg/Kpt/th. Meningkat kembali menjadi 13,85 kg/Kp/th. Pada tahun 2017. Namun demikian capaian ini jauh dari pola konsumsi harapan sebesar 31,40 kg/kapita/tahun. Potensi perikanan Kabupaten Banyumas yang bertumpu pada perikanan budidaya ini menjadikan tingkat konsumsi ikan rendah karena penduduk agak kesulitan memperoleh ikan dengan harga yang terjangkau.

Banyaknya ikan yang ditebar diperairan umum selama kurun waktu 2013-2017 juga terus meningkat, pada tahun 2013 ikan yang ditebar diperairan umum sebanyak 352.000 ekor, pada tahun 2016 jmlah tersebut ditingkatkan menjadi 408.000 ekor dan ditingkatkan kembali sebanyak 756.460 ekor pada tahun 2017.

Perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Banyumas, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78.
Capaian Kinerja Perikanan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	1. Produksi perikanan (ton)	8.524,10	9.138,60	10.710	10.859,15	11.001
	2. Konsumsi Ikan (kg/Kpt/th.)	13,55	13,68	13,75	13,78	13,85
	3. Penebaran Ikan di perairan umum (ekor/th.)	352.000	216.100	332.500	408.000	756.460
	4. Produksi olahan hasil perikanan (ton)	0	0	0	0	170,2
	5. Jumlah Usaha Pengolahan Ikan (Unit)	152	154	158	162	165
	6. Cakupan Bina kelompok Pembudidaya Ikan (Kelompok)	425	471	502	522	530

Sumber : Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2017.

Produksi perikanan yang dihasilkan di Kabupaten Banyumas sebagian diolah di unit-unit usaha yang dimiliki masyarakat. Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 ada sebanyak 192 unit usaha.

Dalam upaya peningkatan produksi perikanan sekaligus mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, dilakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2017 sebanyak 522 kelompok.

2.3.3.2. Pariwisata

Kinerja makro urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dari kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, dan umumnya mudah dijangkau karena didukung sarana dan prasarana yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa obyek wisata yang belum tergarap secara optimal dan membutuhkan investasi untuk pengembangannya. Obyek wisata tersebut antara lain Wisata Kalibacin, Curug Ceheng, dan Nirwana Manggala. Di samping obyek wisata tersebut Kabupaten Banyumas juga memiliki berbagai potensi pariwisata yang belum dikembangkan antara lain: wisata edukasi geologi di Kawasan Wisata Baturraden, wisata alam air terjun di beberapa kecamatan, wisata budaya dan heritage di Kawasan Kota Lama Banyumas, wisata alam Sungai Serayu.

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dalam kurun waktu tahun 2013-2017 jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan fluktuatif, dengan kunjungan obyek wisata terbanyak pada obyek wisata Baturraden.

Dilihat dari lamanya waktu berkunjung, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara hanya satu hari, tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2013-2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan, sehingga dapat lebih lama membelanjakan uangnya di Kabupaten Banyumas.

Infrastruktur pendukung pariwisata seperti perhotelan sudah cukup memadai di Kabupaten Banyumas. Wisatawan tidak akan kesulitan dalam menemukan akomodasi karena beragamnya jenis hotel yang tersedia. Perkembangan jumlah wisatawan, lama tinggal dan hotel di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79.
Jumlah Kunjungan Wisata, Lama Tinggal Wisatawan dan Pengeluaran Belanja Wisatawan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan wisata	orang	1.462.908	1.954.873	1.784.378	2.013.992	2.111.865
	a. wisatawan nusantara	orang	1.461.263	1.953.248	1.784.018	2.013.544	2.111.367
	b. wisatawan mancanegara	orang	1.645	1.625	360	448	498
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	hari	1	1	1	1	1
3.	Rata-rata lama tinggal	hari	1	1	1	1	1

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
	wisatawan mancanegara						
4.	Hotel - Hotel bintang - Hotel non bintang	 buah buah	 9 164	 9 164	 9 164	 10 172	 4 211

Sumber : Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2017.

Semua indikator pada tabel di atas menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, kecuali indikator lama tinggal wisatawan (dalam negeri dan mancanegara) yang tidak meningkat dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang menjelaskan fenomena tersebut. *Pertama*, minimnya informasi destinasi wisata di Kabupaten Banyumas, atau meskipun ada tetapi hanya sebatas memberi informasi, belum memasarkan. *Kedua,* belum adanya paket-paket wisata yang terintegrasi di setiap kawasan wisata, misalnya dari apa produk atau destinasi unggulannya, estimasi durasi waktu kunjungan dan perjalannya, moda transportasi yang melayani, dan sebagainya. *Ketiga*, masih kurangnya alternatif produk wisata jadi yang layak jual. Sejauh ini pariwisata di Kabupaten Banyumas masih bertumpu pada wisata alam. Potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan *heritage* belum tergarap maksimal, karena minimnya pembinaan sebagaimana nampak pada pembahasan pada aspek kebudayaan.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mendukung pencapaian indikator urusan pariwisata melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2018 baru mencapai 6 (enam) desa dari 301 desa yang ada. Pengembangan desa wisata sangat potensial untuk meningkatkan jumlah kunjungan wsatawan yang akan berdampak terhadap peningkatan keejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa.

2.3.3.3. Pertanian

Produktivitas pertanian di Kabupaten Banyumas yang terdiri atas padi atau bahan pangan utama (padi sawah, padi gogo, jagung dan kedelai), produksi hortikultura (durian, pisang dan cabe merah), dan tanaman perkebunan (cengkeh, kelapa dalam dan kelapa deres) dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Capaian indikator Urusan Pertanian tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80.
Capaian Indikator, Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)					
	- Padi (Ton)	398.192	317.515	374.393	368.285	375.000
	- Jagung (ton)	18.986	14.219	21.747	18.151	13.006
	- Kedelai (ton)	851	1.868	1.628	712	1.562
2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar :					
	- Padi sawah (ton/ha)	5,99	4.98	5.75	5.75	5,57
	- Padi gogo (ton/ha)	4,25	4.88	4.97	4.97	4,38
	- Jagung (ton/ha)	6,00	6.10	5.75	5.75	5,92
	- Kedelai (ton/ha)	1,28	1.33	1.35	1.35	1,53
3.	Produksi Hortikultura:					
	- Durian (kuintal)	13.107	21.032	17.795	30.948	48.624
	- Pisang (kuintal)	164.463	86.970	121.625	280.213	205.108
	- Cabe Merah (kuintal)	3.121	2.301	2.316	4.632	15.700
3.	Produksi Tanaman Perkebunan :					
	- Cengkeh (ton)	232,95	414,55	213,56	304,28	310,41
	- Kelapa Dalam (ton)	13.192,41	13.303,27	12.822,59	12.727,41	13.283,89
	- Kelapa Deres (ton)	52.164,56	49.568,52	52.648,92	43.938,68	54.730,5
	- Cakupan bina kelompok tani (%)	36,14	42,78	41,81	54,58	74,00

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2017 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas,2013-2017.

Komoditas peternakan utama di Kabupaten Banyumas meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba, selama kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan fluktuatif. Produksi daging di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu yang sama terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan juga terjadi pada produksi susu yang terdiri dari: susu sapi perah dan kambing, produksi telur yang berasal dari ayam ras, ayam buras dan itik.

Sementara angka kesakitan ternak dan angka kematian ternak yang terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas selama kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Perkembangan populasi ternak, produksi hasil ternak, angka kesakitan dan kematian ternak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81.
Populasi Ternak, Produksi Hasil Ternak, Angka Kesakitan dan Kematian Ternak
Kabupaten Banyumas Tahun 2012-2017

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Populasi Ternak Utama					
	Sapi Potong	14.845	12.347	13.316	12.805	13.460
	Sapi Perah	2.213	2.250	2.570	3.172	2.366
	Kerbau	1.590	1.531	1.375	1.260	1.248
	Kambing	208.763	213.983	218.798	227.124	161.282
	Domba	21.332	21.354	21.365	22.213	13.234
	Ayam Ras Petelur	1.432.110	1.460.752	1.570.988	1.577.825	1.413.592
	Ayam Ras Pedaging	6.064.838	7.065.168	9.869.010	10.054.844	7.868.549
	Ayam Buras / Kampung	1.213.740	1.250.152	1.287.657	1.320.970	1.545.064
	Itik	166.494	174.819	181.375	186.357	249.385
2.	Produksi Daging (ton)	15.008,912	15.081,487	18.520,642	19.255,100	19.471,48
	Sapi	0	3.415,129	3.362,250	3.739,1	2.891,818
	Kerbau	1,433	2,225	1,163	4,3	2,710
	Kambing	1.402,050	1.307,925	1.643,196	1.733,2	1.379,288
	Domba	109,970	109,70	114,938	103,2	103,013
	Babi	96,492	112,332	95,436	87,8	86,064
	Ayam Buras / Kampung	1.401,870	1.443,910	1.487,245	1.525,7	1.189,699
	Ayam Pedaging	7.193,930	8.401,812	11.517,146	11.754,6	13.407,404
	Itik	274,715	288,454	299,268	307,2	411,485
3.	Produksi Susu (liter) :	2.930.678	3.000.699	4.687.722	5.272.222	5.594.690
	Sapi Perah	2.868.678	2.935.699	4.612.722	5.192.222	5.520.183
	Kambing	62.000	65.000	75.000	80.000	74.507
4.	Produksi Telur (ton)	15.901,753	16.383,623	17.666,609	17.764,600	16.910,415
	Ayam Ras	13.774,096	14.052,608	15.253,9	15.286,8	13.725,655
	Ayam Buras	644,548	732,677	757,646	777,3	909,100
	Itik	1.483,109	1.598,338	1.655,063	1.700,5	2.275,5
5.	Angka Kesakitan Ternak (Morbiditas)					
	Ternak Besar (%)	15,50	16,52	14,52	14,52	14,50
	Ternak Kecil (%)	19,50	3,52	1,43	1,43	1,41
	Ternak Unggas (%)	1,90	0,65	0,55	0,53	0,51

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
6.	Angka Kematian Ternak (Mortalitas)					
	Ternak besar (%)	5.0	3,2	2,2	2,1	2,0
	Ternak Kecil (%)	6,5	5,7	4,6	4,5	4,3
	Ternak Unggas (%)	1,7	0,37	0,25	0,25	0,23

Sumber : Dinkannak Kabupaten Banyumas, 2018.

2.3.3.4. Perdagangan

Kinerja makro urusan Perdagangan antara lain bisa dilihat dari indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, Nilai Ekspor Perdagangan, Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal, dan jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang tersedia. Sektor perdagangan memiliki fungsi strategis dalam perekonomian daerah, merupakan salah satu penyumbang terbesar PDB Kabupaten Banyumas, terutama dari pengembangan perdagangan lokal dan regional, perdagangan skala kecil dan menengah. Kegiatan perdagangan di Kabupaten Banyumas telah mampu meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Kinerja urusan perdagangan selama kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah berupaya meningkatkan ekspor gula kelapa organik. Adapun komoditas utama ekspor dari Kabupaten Banyumas adalah kayu olahan dan minyak atsiri dengan tujuan Negara USA, Perancis dan negara-negara Eropa, Jepang dan Korea. Selain untuk ekspor, minyak atsiri juga dikonsumsi dalam negeri meskipun jumlahnya mungkin kecil. Berkembangnya produk kosmetik, parfum dan peralatan kecantikan dalam negeri akan memacu pertumbuhan pemakaian minyak atsiri. Pasar atsiri internasional yang masih terbuka luas, dengan permintaan rata-rata 1.500 ton/tahun dengan kecenderungan yang selalu meningkat, berpotensi mendorong sektor perdagangan ke depan lebih positif. Namun demikian, hal ini masih terkendala dengan keterbatasan produksi, disamping hambatan yang bersifat teknis, kelembagaan klaster minyak atsiri di Kabupaten Banyumas juga tidak berkembang. Artinya, meskipun ada para pelaku dalam bisnis tersebut, tetapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri, serta tidak terbentuk pola bisnis yang terorganisir dengan berbagai bisnis yang berkaitan.

Perkembangan sarana dan prasarana perdagangan, terutama pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2013–2017 menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Perkembangan ini memberikan implikasi pada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah, terutama digerakan oleh meningkatnya kebutuhan barang dan jasa dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya perkembangan capaian indikator Urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.82.
Perkembangan Capaian Indikator Urusan Perdagangan
di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) (%)	17,22	16,42	15,88	15,44	15,28
2.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	2058	400	400	140	1.118
3	Nilai Ekspor Perdagangan (US$)	19.500.000	21.229.327	24.181.103,47	25.762.423,11	22.691.050
4	Jumlah pasar modern (minimarket/ supermarket/ swalayan) (unit)	99	99	99	99	99
5	Jumlah pasar tradisional (unit)	27	27	26	26	26
6	Persentase pasar tradisional yang layak (%)	20 %	20 %	30,7%	38,4%	42,3%
7	Persentase lokasi PKL yang tertata (%)	1,06 %	2,13%	4,26%	6,38%	11,70%

Sumber : Dinperindag Kabupaten Banyumas, 2017.

Perkembangan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Banyumas menunjukan perkembangan yang positif. Jumlah pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2017 sebanyak 26 unit. Dibangunnya pasar tradisional yaitu dalam rangka menampung perdagangan eceran dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari, untuk itu perlu mendapatkan fasilitasi pengembangan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Jumlah pasar modern di Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 ada sebanyak 99 unit. Pasar modern ini tersebar di pusat-pusat perkembangan perekonomian dan sepanjang jalur utama perekonomian daerah, terutama Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya.

2.3.3.5. Perindustrian

Kinerja makro urusan Industri antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, pertumbuhan industri, serta cakupan bina kelompok pengrajin. Pertumbuhan industri di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan yang baik. Berkembangnya industri memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangannya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.

Tumbuhnya industri juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selama kurun waktu 2013-2017, industri kecil di Kabupaten Banyumas terus

meningkat, dari sebanyak 41.861 unit pada tahun 2013 menjadi 42.447 unit pada tahun 2017. Sejalan dengan perkembangan tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh industri kecil pada tahun 2013 sebanyak 85.213 orang terus meningkat menjadi 97.065 orang pada tahun 2017. Kondisi ini mencerminkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Banyumas semakin membaik. Gambaran perkembangan jumlah industri dan tingkat penyerapan tenaga kerja terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Perkembangan Capaian Indikator Urusan Perindustrian
di Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	22,16	23,38	23,85	24,48	24,35
2.	Pertumbuhan Industri	41.942	41.956	42.166	42.320	42.530
3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	523	732	745	745	750
4.	Jumlah Unit Industri					
	a.Industri besar (unit)	4	4	5	6	6
	b.Industri menengah (unit)	77	77	77	77	77
	c. Industri kecil (unit)	41.861	41.875	42.084	42.237	42.447
5.	Jumlah tenaga kerja yang terserap pada unit industri					
	a.Industri besar (orang)	1.075	1.275	1.590	1.890	1.890
	b. Industri menengah (orang)	3.949	5.949	5.949	5.949	5.949
	c. Industri kecil (orang)	85.213	91.865	92.500	93.489	97.065

Sumber : Dinperindag Kab. Banyumas, 2017.

Perkembangan industri kecil perlu mendapatkan perhatian dalam pembinaan industri, karena meskipun berskala kecil, sektor industri kecil terbukti besar perannya dalam menopang perekonomian Kabupaten Banyumas.

2.3.3.6. Transmigrasi

Kinerja makro urusan ketransmigrasian antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah pendaftar (KK) dan jumlah transmigrasi yang berangkat (KK). Pemerintah Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun terakhir 2013–2017 telah memberangkatkan transmigran sebanyak 31 KK ke beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Pemberangkatan transmigran paling banyak terjadi pada tahun 2013 yaitu 22 KK dari pendaftar sebanyak 25 KK. Pada tahun 2017 dari jumlah pendaftar sebanyak 55 KK yang dapat diberangkatkan hanya sebanyak 5 KK.

Tabel 2.84
Kondisi Makro Urusan ketransmigrasian Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Kondisi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pendaftar (KK)	25	48	0	0	55
2.	Jumlah transmigrasi yang berangkat (KK)	22	4	0	0	5

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, 2017.

2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Fungsi Administrasi Pemerintahan

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diukur dengan indeks reformasi birokrasi oleh KemenPan RB, terhadap dua komponen pelaksanaan reformasi birokrasi. Kedua komponen tersebut yaitu:

a. Komponen Pengungkit, terdiri dari: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan tata laksana, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik.
b. Komponen Hasil, terdiri dari: Nilai Akuntabilitas Kinerja, Survey Internal Integritas Organisasi, Survey Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, Survey Eksternal Pelayanan Publik.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas tahun 2017 menunjukan hasil baik atau "**B**", dengan nilai ***63,79.*** Kabupaten Banyumas menjadi salah satu diantara empat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memperoleh predikat B, selain Kota Semarang, Kabupaten Kudus dan Kota Surakarta, dan menjadi terbaik diantara Kabupaten se wilayah eks Karsidenan Banyumas. Namun demikian masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Road map reformasi birokrasi yang belum dijabarkan kedalam rencana kerja sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal;
2. Belum optimalnya sistem penataan peraturan perundang-undangan terkait identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. Evaluasi kelembagaan yang belum fokus pada kinerja yang akan dihasilkan;
4. Peta bisnis proses (cascading kinerja) belum dibuat mulai dari level instansi hingga unit kerja sehingga belum dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja;
5. Implementasi pelayanan publik khususnya di OPD pelayanan dalam hal standar layanan, inovasi dalam pelayanan publik, pemberian reward/punishment terhadap pemberi layanan dan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat belum berjalan baik.

Indikator untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) dari KemanPan dan RB. Hasil peniaian SAKIP Kabupaten Banyumas menunjukan tren positif (naik) setiap tahunnya yaitu pada tahun 2013 masuk dalam kategori C, kemudian meningkat menjadi CC pada tahun 2015 dan

kategori B pada tahun 2016, sedangkan evaluasi SAKIP tahun 2017 yang dilakukan tahun 2018 ditargetkan mendapat kategori BB.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikatornya Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dari Kemendagri. Hasil penilaian EKPPD Kabupaten Banyumas secara umum menurun, yaitu pada tahun 2013 memperoleh nilai 3,2067 kemudian menurun pada tahun 2014 (3,1393) dan tahun 2015 (3,0599), dan naik lagi pada tahun 2016 menjadi 3,2102.

Dalam hal Kualitas Pelayanan Publik terdapat peningkatan kualitas kinerja unit layanan publik dan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, meskipun belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada indikator mutu pelayanan pada unit-unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap standar pelayanan publik menurut Ombudsman, dari tahun ketahun hasilnya terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.85.
Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	42,26 / Kategori C	48,06 / Kategori C	53,65 / Kategori CC	60,22 / Kategori B	Belum dilakukan penilaian
2.	Nilai Evalusi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,2067	3,1393	3,0599	3,2102	Belum dilakukan penilaian
3.	Indeks Kepuasan masyarakat	N/A	N/A	79,00/ Mutu Pelayanan B	78,04 / Mutu Pelayanan B	79,24/ Mutu Pelayanan B
4	Nilai kepatuhan Pemerintah daerah terhadap standar pelayanan Publik	N/A	N/A	31,56 Zona Merah	56, 48 Zona Kuning	63,56 Zona Kuning

Sumber : Setda Kabupaten Banyumas, 2018

Berdasarkan beberapa indikator diatas dapat digambarkan bahwa pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas menunjukan peningkatan sehingga diharapkan mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 Tahap II dan III terdapat sasaran pokok terkait pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas menjadi wilayah Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pemekaran daerah merupakan bagian dari penataan daerah yang dilaksanakan dalam rangka desentralisasi. Penataan Daerah dapat berupa Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta

memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas merupakan kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran pokok ke 3 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banyumas Yang Maju Dan Berdaya Saing.

Pemekaran Kabupaten Banyumas yang diusulkan adalah membagi Kabupaten Banyumas menjadi dua daerah yaitu Kota Purwokerto dan Kabupaten Banyumas. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait jumlah minimal kecamatan untuk cakupan wilayah pembentukan kota yaitu minimal 4 kecamatan. Dengan demikian pembentukan Kota Purwokerto meliputi empat kecamatan Purwokerto (Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kecamatan Purwokerto Selatan) telah memenuhi syarat minimal.

Sedangkan dari sisi ekonomi, perkembangan yang terjadi di Kabupaten Banyumas meliputi: 1) tersedianya 90 pasar umum baik yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas, maupun yang dikelola oleh Desa tersebar di 27 kecamatan sebagian besar di luar kota Purwokerto dan 522 Koperasi yang terdiri dari KUD dan Non KUD tersebar di 27 kecamatan sebagian besar di luar kota Purwokerto, dimana sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat; 2) tumbuhnya pusat kuliner di luar kota Purwokerto seperti Tambak, Sumpiuh, Ajibarang, Sokarja, Baturaden dll; 3) tumbuhnya IKM di luar kota Purwokerto yang cukup berkembang seperti industri kecil gula merah antara lain di Kecamatan Cilongok, Kemranjen, dan Wangon, batik di Kecamatan Sokaraja dan Banyumas; serta 4) lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana setiap Desa mendapatkan alokasi dana cukup besar setiap tahunnya, yang digunakan untuk pemerataan pembangunan baik fisik, ekonomi dan pemkesos, sebagai menyeimbang perkembangan di empat kecamatan Purwokerto.

2.3.4.2. Fungsi Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas merupakan organisasi perangkat daerah yang menunjang/memberikan fasilitasi kepada anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017, ada tiga indikator kinerja Sekretariat DPRD, yaitu:

1. Tersedianya RKT pada setiap Alat Kelengkapan DPRD
2. Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)
3. Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD

Kinerja Sekretariat DPRD belum menggunakan indikator di atas pada pelaksanaan pembangunan tahun 2017. Dengan demikian capaian indikator tersedianya RKT pada setiap Alat Kelengkapan DPRD belum dapat di sajikan. Penyusunan RKT oleh Sekretariat harus melibatkan Alat Kelengkapan DPRD. Selanjutnya untuk program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) sudah tersusun dan terintegrasi.

Tabel 2.86
Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya RKT pada setiap Alat Kelengkapan DPRD	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Setwan Kabupaten Banyumas, 2017

2.3.4.3. Pengawasan

Jumlah temuan pengawasan terus mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 1.437 menjadi 494 pada tahun 2017. Dari 494 temuan tersebut 306 temuan pengawasan telah selesai ditindaklanjuti, dan 88 temuan pengawasan dalam proses tindak lanjut. Jumlah pengaduan masyarakat terkait pengawasan pada tahun 2017 sebanyak 9 kasus, dan kesemuanya telah ditindaklanjuti. Secara rinci capaian kinerja di bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87.
Capaian Kinerja Pengawasan di Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah temuan pengawasan (temuan)	1.437	625	638	562	494
2.	Jumlah temuan pengawasan yang telah selesai ditindaklanjuti (temuan)	758	518	436	476	306
3.	Jumlah temuan pengawasan yang dalam proses tindak lanjut (temuan)	390	107	176	86	88
4.	Jumlah temuan pengawasan belum ditindaklanjuti (temuan)	289	0	0	0	0
5.	Jumlah rekomendasi	1.437	625	638	562	494

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian kinerja Setiap Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
6.	Jumlah rekomendasi selesai ditindaklanjuti	758	518	436	476	306
7.	Jumlah rekomendasi dalam proses tindaklanjut	390	107	202	86	88
8.	Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti	289	0	0	0	0
9.	Jumlah pengaduan masyarakat (kasus)	25	28	12	5	9
10.	Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti (kasus)	25	26	5	5	9
11	Level kapabilitas APIP	2	2	2	2	2
12	Nilai Maturitas SPIP	2	2	2	2	3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Banyumas, 2016

2.3.4.4. Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyumas sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP yang dimaksud adalah bahwa laporan keuangan telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, selain itu juga pemerintah Kabupaten Banyumas dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Opini tersebut menunjukan kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyumas terus membaik.

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88.
Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	15,13%	18,8%	18,92%	18,16%	17,64%
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase SILPA	17,47%	15,36%	18,24%	13,43%	11,94%
5	Persentase Program/Kegiatan yang tidak terlaksana	0	0	0	12,64%	12,5%
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	48,14%	46,02%	42,5%	37,25%	34,18%
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	13,80%	16,94	18,00%	20,09%	15,34%
8	Perbandingan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	38,11% : 61,89%	40,96% : 59,04%	35,81% : 64,19%	34,86% : 65,14%	27,04% : 72,96%
9	Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: BKD Kabupaten Banyumas, 2017

Dari tabel tersebut diatas bahwa capaian persentase PAD terhadap Pendapatan dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sebesar 15,13% menjadi 17,64% pada tahun 2017. Capaian persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2017 bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 18,16% mengalami penurunan. Hal disebabkan pendapatan transfer dari pusat mengalami peningkatan yang menyebabkan capaian pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 17,64%. Secara umum kemampuan keuangan daerah belum mampu sepenuhnya mendukung pembiayaan pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas.

Persentase SILPA terhadap APBD cenderung tetap dari tahun 2013-2016 mengalami perkembangan yang menurun, yaitu pada tahun 2013 sebesar 17,47% menjadi 11,94% pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan serapan belanja daerah di Kabupaten Banyumas semakin baik. Capaian indikator persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2013-2015 sebesar 0%, sedangkan pada tahun 2016-2017 terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu sekitar 12,5%.

Capaian persentase Belanja Pendidikan (20%) dari tahun 2013-2017 rata-rata mencapai 40%, hal ini melebihi target Kabupaten/Nasional sebesar 20%. Namun bila dilihat alokasi per tahunnya dalam kurun waktu tersebut persentase belanja pendidikan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya alokasi anggaran untuk pendidikan mengalami pengurangan sehubungan pengalihan guru SMA/SMK menjadi kewenangan provinsi.

Persentase Belanja Kesehatan (10%) dari tahun 2013-2017 juga melebihi target sebesar 10%, rata-rata belanja kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 adalah sekitar 18%. Belanja kesehatan Kabupaten Banyumas juga mengalami penurunan disebabkan pengurangan alokasi anggaran untuk kesehatan sejalan dengan penurunan Dana Alokasi Khusus Provinsi.

Proporsi belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2017 rata-rata lebih dari 60%. Belanja tidak langsung yang terlalu besar berarti belanja pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat semakin kecil. Meskipun dalam belanja tidak langsung terdapat komponen belanja bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial kepada masyarakat, proporsi belanja tidak langsung yang terlalu bisa menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas kurang memihak kepada masyarakatnya.

2.3.4.5. Perencanaan

Kondisi kinerja pada urusan perencanaan pembangunan diindikasikan dengan tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas setiap tahun.

Table 2.89.
Kinerja Makro Urusan Perencanaan Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	1	1	1	1

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	1	1	1	1
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP	1	1	1	1	1
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	86,70	86,70	85,10	86,70	81,38

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2017.

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Banyumas menunjukan kinerja yang baik. Sebagian besar indikator yaitu 3 indikator telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. 1 Indikator belum tercapai dari target RPJMD. Terget yang belum tercapai adalah Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, dimana target RPJMD adalah 100 %.

Realisasi indikator Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD di tahun 2017 menurun dibandingkan dengan tahun 2016 dikarenakan adanya penyesuaian program dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah karena perubahan struktur organisasi dan tata kerja sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

2.3.4.6. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

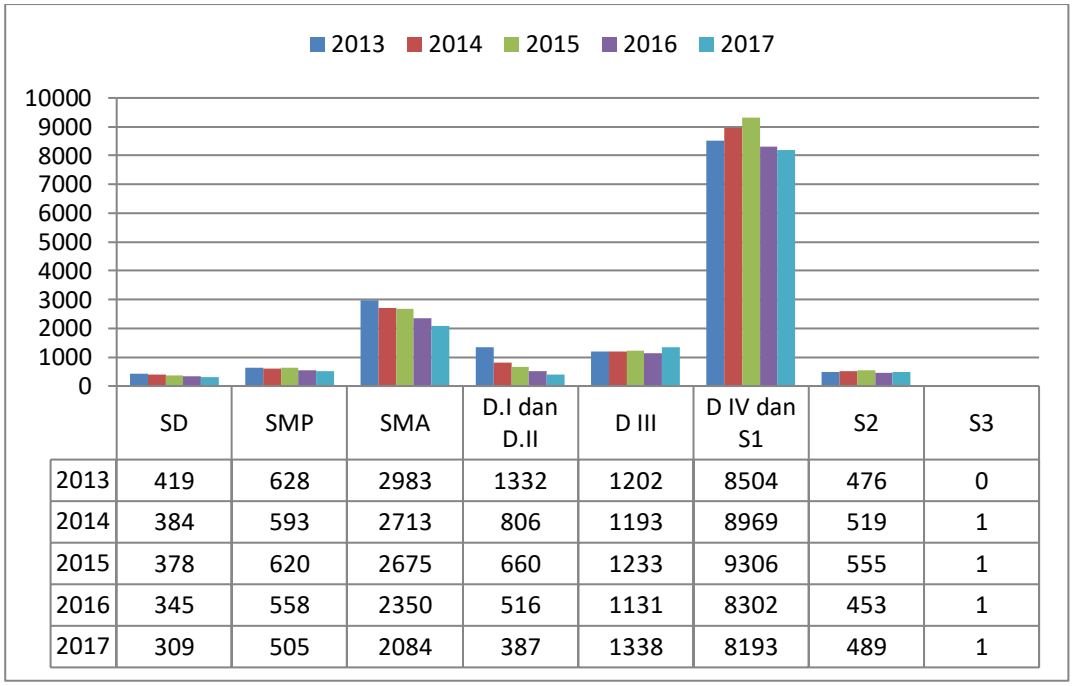
Aparatur sipil negara (ASN) merupakan aset bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Jumah ASN di Kabupaten Banyumas dari tahun 2013-2017 cenderung menurun dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan tidak adanya penambahan pegawai dengan kebijakan moratorium ASN. Dalam kurun waktu tersebut hanya tahun 2015 ada penambahan ASN sebanyak 250 orang. Perkembangan jumlah ASN di Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.90
Jumlah ASN Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah ASN	15.537	15.178	15.428	13.656	13.306

Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas, 2017

Berdasarkan tingkat pendidikan lebih dari 60% ASN di Kabupaten Banyumas telah memiliki jenjang pendidikan D IV, S1, S2, dan S3. Jumlah ASN Kabupaten Banyumas menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut:



	SD	SMP	SMA	D.I dan D.II	D III	D IV dan S1	S2	S3
2013	419	628	2983	1332	1202	8504	476	0
2014	384	593	2713	806	1193	8969	519	1
2015	378	620	2675	660	1233	9306	555	1
2016	345	558	2350	516	1131	8302	453	1
2017	309	505	2084	387	1338	8193	489	1

Gambar 2.34.
Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017
Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas, 2017

Pada tahun 2017 aparatur sipil negara di Kabupaten Banyumas dengan tingkat pendidikan D IV dan S1 merupakan jumlah terbanyak yaitu 8.193 orang (61,66%). Urutan kedua adalah ASN dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2.084 orang (15,66%), dan urutan ke tiga adalah ASN dengan tingkat pendidikan D.III sebanyak 1.338 orang (10,56%).

Untuk memenuhi standar kompetensi aparatur sipil negara harus terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada negara dan masyarakat. Pendidikan dan latihan adalah upaya untuk pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, yaitu melalui diklat pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan struktural. ASN Kabupaten Banyumas yang telah mengikuti diklat dan lulus, serta memiliki seritifikasi kompetensi tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat

No.	Indikator	Capaian kinerja setiap tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	ASN yang telah mengikuti diklat	342	611	983	371	573
2.	ASN yang telah lulus diklat	342	611	983	371	572

Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas

Untuk tingkat golongan ASN Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.92
Tingkat Golongan PNS Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah PNS Daerah menurut golongan	15.537	15.178	13.656	13.565	13306
	• Golongan I	768	666	479	479	403
	• Golongan II	3.459	3.130	2.488	2.488	3.130
	• Golongan III	5.279	5.373	5.665	5.665	5.373
	• Golongan IV	6.031	6.009	5024	5.024	6.009

Sumber : BKDD Kabupaten Banyumas, 2017.

Berdasarkan klasifikasi golongan kepangkatan ASN Kabupaten Banyumas selalu mengalami perubahan dari tahun 2013-2017 dikarenakan karena kenaikan pangkat regular, pilihan atau penyesuain pendidikan dan untuk ASN di Kabupaten Banyumas sampai tahun 2017 yang paling banyak adalah golongan IV sebanyak 6.009 orang (45,16%) sedangkan urutan kedua adalah golongan III sebanyak 5.373 orang (40,38%) dan urutan ketiga adalah golongan II sebanyak 3.130 orang (23,52%) dan yang terakhir golongan I sebanyak 403 orang (3,02%)

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gejolak perekonomian global merupakan isu yang selalu menjadi perhatian berbagai kalangan karena dampaknya terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Beberapa kalangan meyakini bahwa gejolak perekonomian dunia akan berdampak negatif atau menekan pertumbuhan negara-negara berkembang termasuk Indonesia paling tidak sampai tahun 2019. Kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat (*The Federal Reserve*) dan perang dagang antara Amerika Serikat-Tiongkok yang dimulai sejak Juli 2018 ketika Amerika Serikat mengenakan tarif terhadap ratusan produk impor asal Tiongkok memberi dampak negatif terhadap perekonomian dunia, khususnya terhadap negara-negara dengan fundamental ekonomi yang rentan seperti Venezuela dan Argentina.

Dinamika perekonomian dunia tentu saja akan mempengaruhi indikator-indikator kunci perekonomian nasional, salah satunya adalah tingkat pertumbuhan ekonominya sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan. Pemerintah Indoensia melalui Menteri Keuangan merumuskan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil yang bisa saling mendukung. Salah satu wujud bauran kebijakan adalah ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya atau BI 7-Days Repo Rate 50 basis poin menjadi 5,25 persen kemudian sekaligus melakukan relaksasi dari sisi kebijakan untuk kreditnya. Sementara BI melakukan hal tersebut, Kementerian Keuangan dalam hal fiskalnya memberi berbagai bentuk insentif pajak untuk menggenjot investasi. Melalui bauran kebijakan yang dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait, diharapkan mampu meredam dampak negatif dari dinamika perekonomian dunia.

Perekonomian Kabupaten Banyumas selalu mengalami pertumbuhan mulai dari 2013 sampai 2017. Selama rentang waktu 5 (lima) tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas berfluktuasi secara positif dari 6,97% pada tahun 2013 menjadi 6,34% pada tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,23%. Sementara itu, nilai PDRB Kabupaten Banyumas selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan secara positif. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2013 sebesar Rp.27.793.138,47 menjadi Rp.35.147.313,30 pada tahun 2017.

Perkembangan distribusi dan kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2013-2017 menunjukkan pertumbuhan sektor yang stabil pada sektor industri pengolahan, dengan kontribusi sebesar 22,8% atau 8,02 Trilyun pada tahun 2017. Perdagangan besar dan eceran menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 16,3% atau 5,74 Trilyun, sementara sektor konstruksi menyumbang sebesar 13,0% atau 4,56 Trilyun. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 12,5% atau 4,38 Trilyun. Meskipun sektor pertanian kontribusinya meningkat dari tahun 2013-2017,

namun laju pertumbuhannya relatif lebih lambat dibanding sektor-sektor lain yang tumbuh lebih cepat seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan eceran dan sektor konstruksi.

PDRB Kabupaten Banyumas jika dilihat dari sisi pengeluaran pada tahun 2017 menunjukkan lebih besarnya pengeluaran untuk kelompok bukan makanan sebesar Rp.1.896.743,95, dengan pengeluaran terbesar sebesar 36,35% untuk perumahan, aneka barang dan jasa sebesar 24,06%, barang tahan lama sebesar 12,95%, dan pakaian sebesar 06,08%. Sementara itu pengeluaran terbesar untuk kelompok makanan, adalah untuk rokok sebesar 22,12%, serta untuk makanan dan minuman jadi dengan persentase yang sama yaitu sebesar 22,12%.

Berdasarkan deskripsi tersebut diatas, nampak bahwa perekonomian Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan yang cukup mengesankan (6,17%) jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB kabupaten sekitar selama kurun waktu 2013-2017 seperti Kabupaten Purbalingga (5,21%), Kab. Cilacap (3,33%), Kab. Banjarnegara (5,38%), dan Kab. Kebumen (5,23) %. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Kab. Banyumas merupakan tempat yang menarik bagi berbagai macam aktivitas ekonomi, terutama yang berkaitan dengan sektor olahan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu (Tahun 2013-2017)

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila rencana penyelenggaraan program pembangunan daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah *(money follow programs).* Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dengan berpedoman pada asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya dalam peraturan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.037.636.075.236,00**	**2.308.424.398.455,40**	**2.654.284.992.375,00**	**2.852.968.390.191,00**	**3.221.258.052.894,00**	**12,17**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**308.349.434.319,00**	**435.597.688.642,40**	**502.281.349.460,00**	**541.418.386.912,00**	**619.701.627.380,00**	**19,71**
	Pajak Daerah	111.290.149.783,00	110.189.330.128,00	129.678.372.181,00	147.356.151.979,00	199.612.331.442,00	16,45
	Retribusi Daerah	35.193.668.496,00	43.892.027.090,00	26.470.056.948,00	27.310.275.004,00	27.692.039.849,00	(2,60)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.578.804.726,00	11.775.017.338,00	14.832.112.349,00	12.416.229.932,00	13.539.482.265,00	7,51
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.286.811.314,00	269.741.314.086,40	331.300.807.982,00	354.335.729.997,00	378.857.773.824,00	28,75
1.2.	**Dana Perimbangan**	**1.271.384.113.125,00**	**1.358.535.407.338,00**	**1.411.687.077.480,00**	**1.869.097.347.790,00**	**1.868.367.395.431,00**	**10,78**
	Dana Bagi Hasil Pajak	58.503.432.693,00	49.415.131.936,00	44.432.333.666,00	56.257.843.675,00	43.062.875.449,00	(5,61)
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.278.012.432,00	1.890.143.402,00	1.894.147.814,00	1.446.041.539,00	1.972.231.283,00	(14,24)
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.127.939.938.000,00	1.224.710.992.000,00	1.277.833.796.000,00	1.398.539.653.000,00	1.373.971.809.000,00	5,15
	Dana Alokai Khusus (DAK)	78.662.730.000,00	82.519.140.000,00	87.526.800.000,00	412.853.809.576,00	449.360.479.699,00	97,88
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**457.902.527.792,00**	**514.291.302.475,00**	**740.316.565.435,00**	**442.452.655.489,00**	**733.189.030.083,00**	**20,43**
	Pendapatan Hibah	-	1.778.000.000,00	4.894.218.600,00	14.075.240.800,00	175.521.251.417,00	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	97.969.873.634,00	142.753.771.000,00	125.802.279.275,00	177.064.939.689,00	209.940.449.382,00	23,29
	Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus dan Dana Desa	315.634.526.000,00	320.319.844.000,00	496.021.079.000,00	205.450.575.000,00	309.594.476.000,00	12,11
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	44.298.128.158,00	49.439.687.475,00	113.598.988.560,00	45.861.900.000,00	38.132.853.284,00	16,22
2.	**BELANJA DAERAH**	**2.018.052.963.730,00**	**2.285.326.471.224,00**	**2.531.669.334.010,00**	**2.902.853.581.862,00**	**3.200.686.516.259,00**	**12,24**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**1.271.593.369.847,00**	**1.376.391.926.843,00**	**1.625.731.001.715,00**	**1.890.938.588.827,00**	**1.903.445.528.755,00**	10,83
	Belanja Pegawai	1.120.636.538.714,00	1.231.988.194.236,00	1.309.726.768.518,00	1.365.106.607.402,00	1.231.069.947.011,00	2,66
	Belanja Hibah	78.211.037.942,00	62.570.682.375,00	7.729.198.948,00	24.841.610.000,00	53.337.723.000,00	57,12
	Belanja Bantuan Sosial	3.619.410.000,00	9.313.247.652,00	5.367.740.000,00	13.284.296.561,00	11.665.700.000,00	62,56
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	8.083.710.180,00	9.690.500.766,00	14.770.426.281,00	36,15
	Belanja Bantuan Keuangan	68.769.737.191,00	72.503.957.986,00	294.798.509.136,00	477.296.873.350,00	591.135.041.239,00	99,45
	Belanja Tidak Terduga	356.646.000,00	15.844.594,00	25.074.933,00	718.700.748,00	1.466.691.224,00	708,25
2.2.	**Belanja Langsung**	**746.459.593.883,00**	**908.934.544.381,00**	**905.938.332.295,00**	**1.011.914.993.035,00**	**1.297.240.987.504,00**	**15,33**
	Belanja Pegawai	60.940.982.524,00	66.576.486.282,00	7.062.568.850,00	7.336.198.580,00	6.824.336.900,00	(20,81)
	Belanja Barang dan Jasa	372.329.636.302,00	482.193.159.458,00	536.131.009.822,00	603.745.929.879,00	817.931.180.314,00	22,20
	Belanja Modal	313.188.975.057,00	360.164.898.641,00	362.744.753.623,00	400.832.864.576,00	472.485.470.290,00	11,02
SURPLUS (DEFISIT)		**19.583.111.506,00**	**23.097.927.231,40**	**122.615.658.365,00**	**(49.885.191.671,00)**	**20.571.536.635,00**	**41,72**

3.	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**354.397.165.262,00**	**352.480.276.768,00**	**351.088.203.999,40**	**461.705.862.364,40**	**389.736.670.693,40**	**3,75**
	Penggunaan SILPA	331.470.960.480,00	352.480.276.768,00	351.088.203.999,40	461.705.862.364,40	389.736.670.693,40	5,47
	Pencairan Dana Cadangan	22.926.204.782,00	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**21.500.000.000,00**	**24.490.000.000,00**	**11.998.000.000,00**	**22.084.000.000,00**	**27.992.500.000,00**	**18,43**
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	23.000.000.000,00	11.998.000.000,00	22.084.000.000,00	25.734.000.000,00	16,94
	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.490.000.000,00	-	-	-	-
	Pengeluaran Investasi Non Permainen	-	-	-	-	2.258.500.000,00	-
PEMBIAYAAN NETTO		**332.897.165.262,00**	**327.990.276.768,00**	**339.090.203.999,40**	**439.621.862.364,40**	**361.744.170.693,40**	**3,46**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		**352.480.276.768,00**	**351.088.203.999,40**	**461.705.862.364,40**	**389.736.670.693,40**	**382.315.707.328,40**	**3,41**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

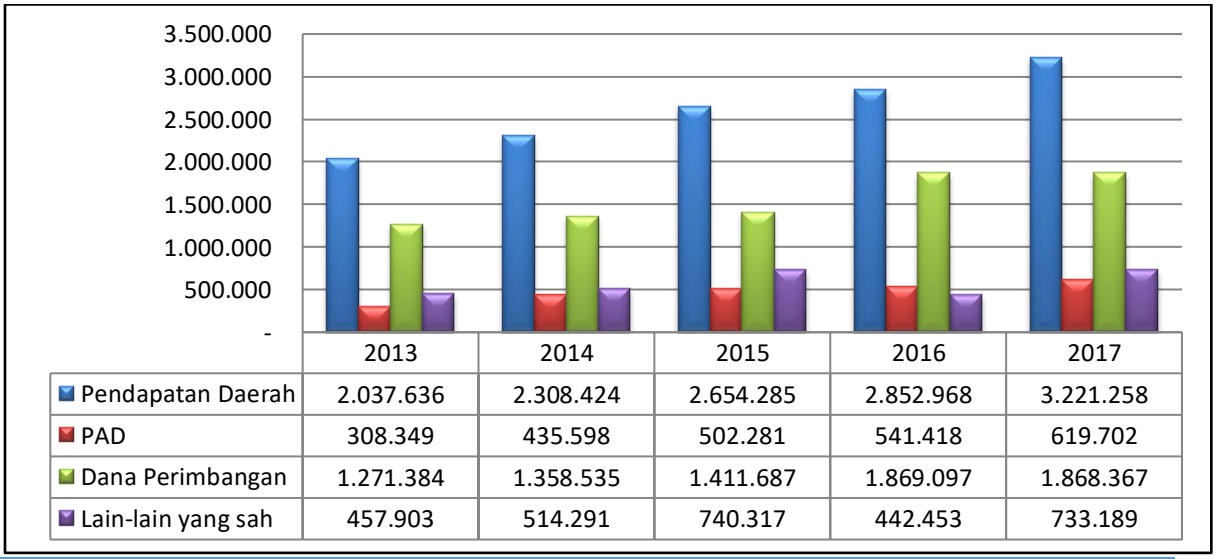
3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus dan Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pada tabel 3.1. dapat dilihat bahwa Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rata-rata mengalami peningkatan 12,17% per tahun tetapi tidak merata pada setiap komponen pembentukannya. Selama kurun waktu tersebut secara proporsional Pendapatan Asli Daerah (PAD) menempati proporsi terendah (rata-rata 18,23%), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (rata-rata 22,18%) dan Dana Perimbangan (rata-rata 59,59%). Sampai dengan tahun 2018 Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan meningkat sebesar 1,23% dari tahun 2017. Meskipun komposisi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan daerah semakin meningkat, namun kemandirian daerah masih ketergantungan terhadap dana perimbangan yang cukup tinggi. Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas agar tidak ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan yaitu dengan meningkatan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada diagram 3.1. di bawah ini.



	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Daerah	2.037.636	2.308.424	2.654.285	2.852.968	3.221.258
PAD	308.349	435.598	502.281	541.418	619.702
Dana Perimbangan	1.271.384	1.358.535	1.411.687	1.869.097	1.868.367
Lain-lain yang sah	457.903	514.291	740.317	442.453	733.189

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

Gambar 3.1.
Trend dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)

a. Pendapatan Asli Daerah

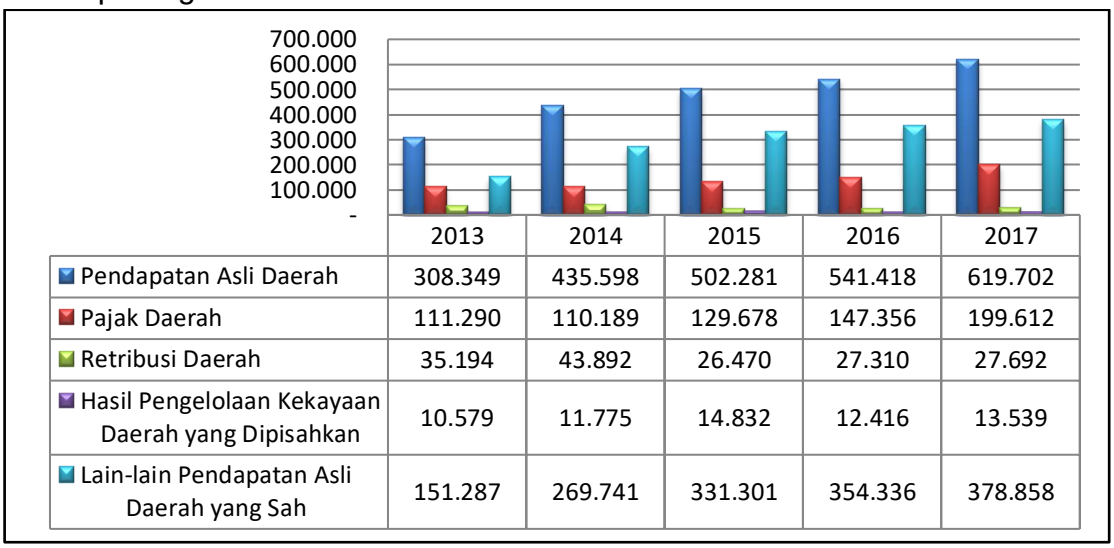
Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu :

1) Pajak Daerah
   Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyumas, meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumbi dan Bangunan (PBB).
2) Retribusi Daerah
   Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Retribusi Daerah yang menjadi pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyumas, meliputi : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu.
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   Penerimaan PAD yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari hasil penyertaan modal pemerintah Kabupaten Banyumas berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank, yaitu : BPR BKK Purwokerto Utara, BKK Purwokerto Selatan, Bank BPD Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Air Minum dan PT. Banyumas Investama Jaya.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
   Penerimaan PAD yang berasal dari lain-lain PAD yang sah yaitu : Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Rugi Daerah, Denda Atas Keterlambatan atas Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitasi Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan BLUD, Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

Sumber utama PAD berasal dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar dengan kontribusi rata-rata selama kurun waktu 2013-2017 sebesar 60,71% diikuti Pajak Daerah sebesar 29,33%; Retribusi Daerah sebesar 7,25%; dan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 2,71%. Namun demikian, pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah sebagai sumber PAD dalam kurun waktu tersebut, cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2018, kontribusi Lain-lain PAD yang Sah sebesar 59,61%; Pajak Daerah sebesar 31,74%, Retribusi Daerah sebesar 4,73% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 3,93%.

Perkembangan data realisasi PAD Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada gambar 3.2. berikut :



	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah	308.349	435.598	502.281	541.418	619.702
Pajak Daerah	111.290	110.189	129.678	147.356	199.612
Retribusi Daerah	35.194	43.892	26.470	27.310	27.692
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.579	11.775	14.832	12.416	13.539
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	151.287	269.741	331.301	354.336	378.858

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

Gambar 3.2.
Trend dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)

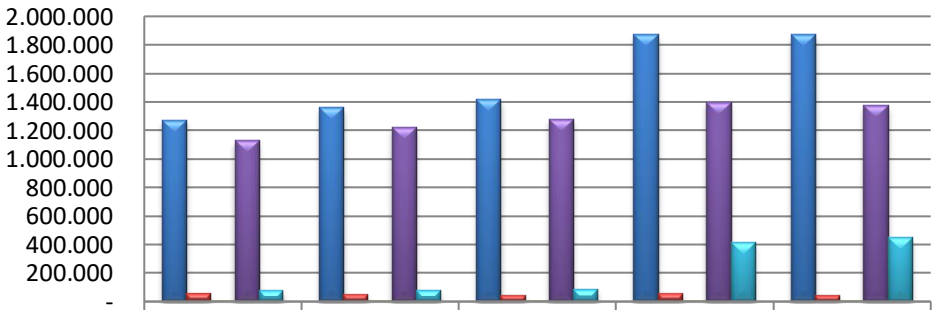
b. Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.
2) Dana Alokasi Umum Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus Dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Selama kurun waktu 2013-2017, sumber utama Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan kontribusi rata-rata sebesar 12,92% diikuti Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 83,55%, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar 0,19% dan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar 3,34%. Tahun 2016 DAK mengalami peningkatan signifikan dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, mendasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto PP 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014. Proporsi sumber Dana Perimbangan dalam APBD Perubahan Tahun 2018 terdiri dari DAK sebesar 25,56%; DAU sebesar 71,64%; dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 2,80%. Perkembangan Data realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada Gambar 3.3. berikut :



	2013	2014	2015	2016	2017
Dana Perimbangan	1.271.384	1.358.535	1.411.687	1.869.097	1.868.367
Dana Bagi Hasil Pajak	58.503	49.415	44.432	56.258	43.063
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.278	1.890	1.894	1.446	1.972
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.127.940	1.224.711	1.277.834	1.398.540	1.373.972
Dana Alokai Khusus (DAK)	78.663	82.519	87.527	412.854	449.360

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

Gambar 3.3.
Trend dan Proporsi Dana Perimbangan Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017
(Dalam Juta Rupiah)

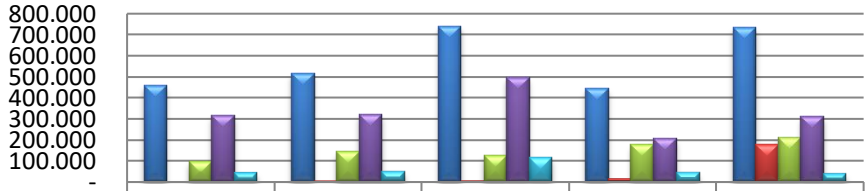
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan hibah diataranya pendapatan hibah dari pemerintah, pendapatan hibah dari Badan/Lembaga swasta/organisasi, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemda Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak

dari Kab./Kota, Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kab/Kota. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Penyesuaian untuk tambahan penghasilan, dana BOS dan Dana Insentif Daerah (DID).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari Pendapatan Hibah dengan kontribusi rata-rata selama kurun waktu 2013-2017 sebesar 7,03% diikuti Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 26,96%; Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus dan Dana Desa sebesar 57,38%; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 10,04%.

Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana data selengkapnya pada Gambar 3.4. berikut :



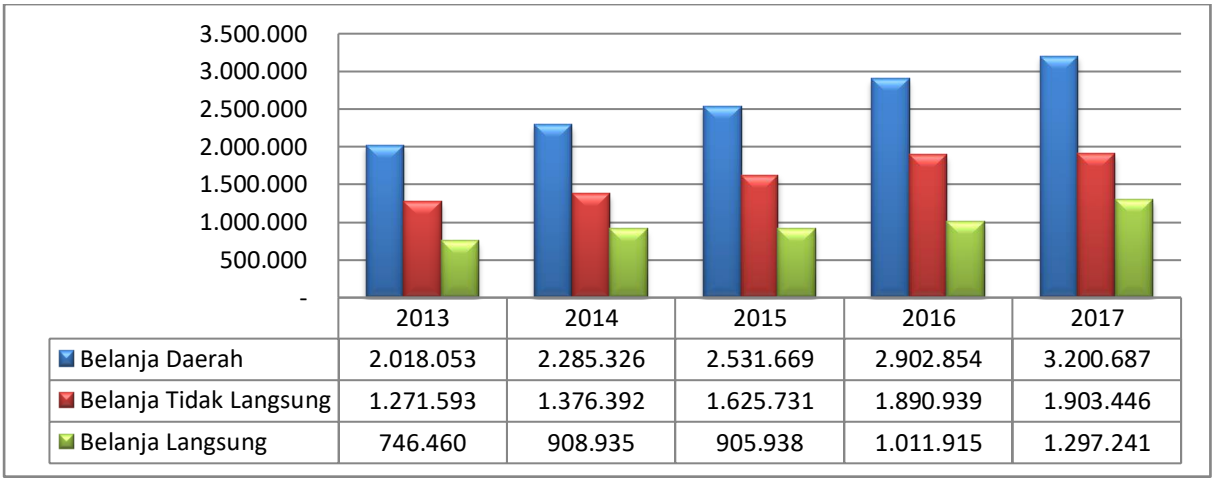
	2013	2014	2015	2016	2017
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	457.903	514.291	740.317	442.453	733.189
Pendapatan Hibah	-	1.778	4.894	14.075	175.521
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	97.970	142.754	125.802	177.065	209.940
Dana Penyesuaian, Otonomi Khusus dan Dana Desa	315.635	320.320	496.021	205.451	309.594
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	44.298	49.440	113.599	45.862	38.133

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

Gambar 3.4.
Trend dan Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selama kurun waktu lima tahun dari 2013-2017, Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 12,24% per tahun, dengan rincian Belanja Langsung meningkat rata-rata 15,33% per tahun dan Belanja Tidak Langsung meningkat rata-rata 10,83% per tahun. Gambaran realisasi belanja pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana gambar 3.5. sebagai berikut.



	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Daerah	2.018.053	2.285.326	2.531.669	2.902.854	3.200.687
Belanja Tidak Langsung	1.271.593	1.376.392	1.625.731	1.890.939	1.903.446
Belanja Langsung	746.460	908.935	905.938	1.011.915	1.297.241

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

Gambar 3.5.
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017
(Dalam Juta Rupiah)

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari :

1) Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2) Belanja Hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Belanja bantuan sosial juga digunakan untuk mendukung capaian hasta krida, antara lain pemberian beasiswa, bantuan kepada marbot masjid dan tempat ibadah lainnya, serta 1 desa 3 sarjana.
4) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
5) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dar pemerintah daerah kepada

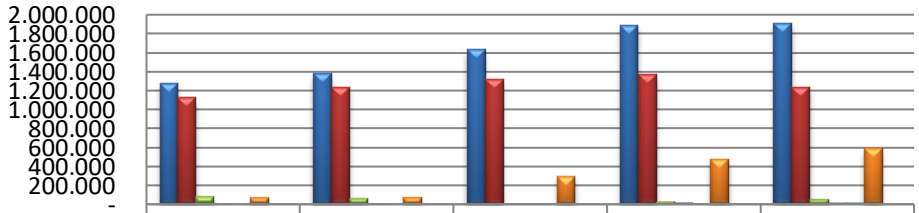
pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundangundangan yang terkait.

Bantuan keuangan desa juga digunakan untuk mendukung hasta krida, antara lain revitalisasi pasar desa.

6) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,83%. Pertumbuhan tertinggi pada komponen belanja bantuan tidak terduga sebesar 708,25% diikuti belanja bantuan keuangan sebesar 99,45%, belanja bantuan sosial sebesar 62,56%, belanja hibah sebesar 57,12%, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar 36,15% dan belanja pegawai sebesar 2,66%. Peningkatan signifikan belanja tidak terduga pada tahun 2017 dikarenakan adanya pembayaran kekurangan tagihan penerangan jalan umum (LPJU) dan kebutuhan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Gumelar.

Untuk mengetahui rincian belanja daerah tidak langsung dapat dilihat pada gambar 3.6. berikut :



	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Tidak Langsung	1.271.593	1.376.392	1.625.731	1.890.939	1.903.446
Belanja Pegawai	1.120.637	1.231.988	1.309.727	1.365.107	1.231.070
Belanja Hibah	78.211	62.571	7.729	24.842	53.338
Belanja Bantuan Sosial	3.619	9.313	5.368	13.284	11.666
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	8.084	9.691	14.770
Belanja Bantuan Keuangan	68.770	72.504	294.799	477.297	591.135
Belanja Tidak Terduga	357	16	25	719	1.467

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

Gambar 3.6.
Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017
(Dalam Juta Rupiah)

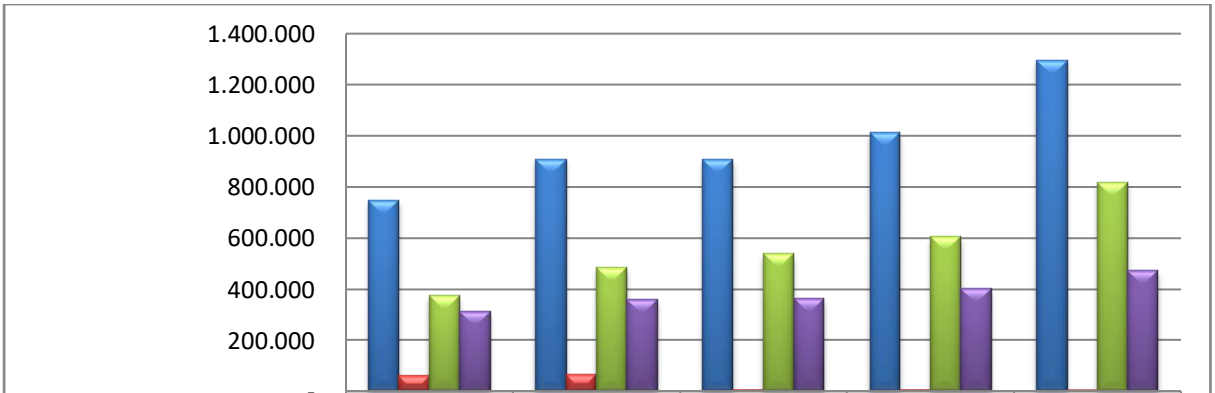
b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdir idari jenis belanja :

1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Proporsi Belanja langsung Pemerintah Kabupaten Banyumas kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif yang semula 36,99% pada tahun 2013 naik menjadi 39,77% pada tahun 2016, menurun menjadi 35,75% pada tahun 2015, menurun kembali menjadi 34,86% pada tahun 2016 dan naik menjadi 40,53% pada tahun 2017.

Untuk mengetahui rincian belanja langsung daerah dapat dilihat pada gambar 3.7. berikut.



	2013	2014	2015	2016	2017
Belanja Langsung	746.460	908.935	905.938	1.011.915	1.297.241
Belanja Pegawai	60.941	66.576	7.063	7.336	6.824
Belanja Barang dan Jasa	372.330	482.193	536.131	603.746	817.931
Belanja Modal	313.189	360.165	362.745	400.833	472.485

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

Gambar 3.7.
Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017
(Dalam Juta Rupiah)

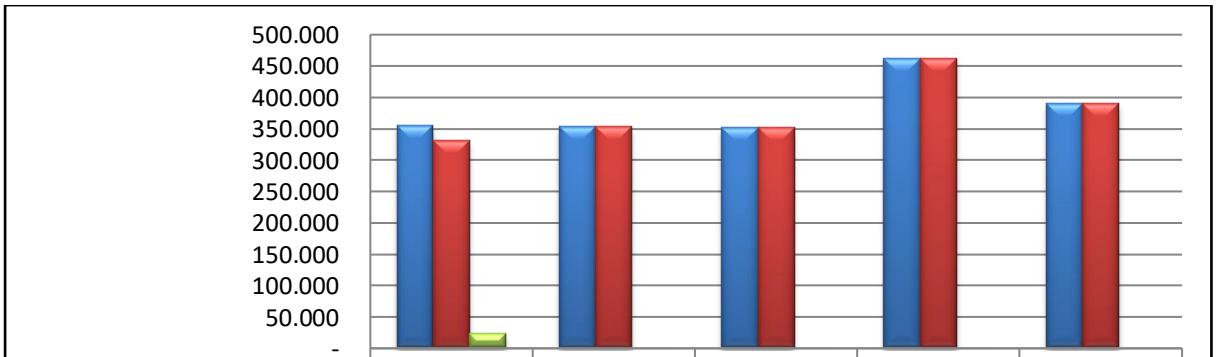
3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan Dana Cadangan.

Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2013-2017 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 3.8. berikut.



	2013	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Pembiayaan	354.397	352.480	351.088	461.706	389.737
Penggunaan SILPA	331.471	352.480	351.088	461.706	389.737
Pencairan Dana Cadangan	22.926	-	-	-	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

Gambar 3.8.
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)

b. Pengeluaran Pembiayaan

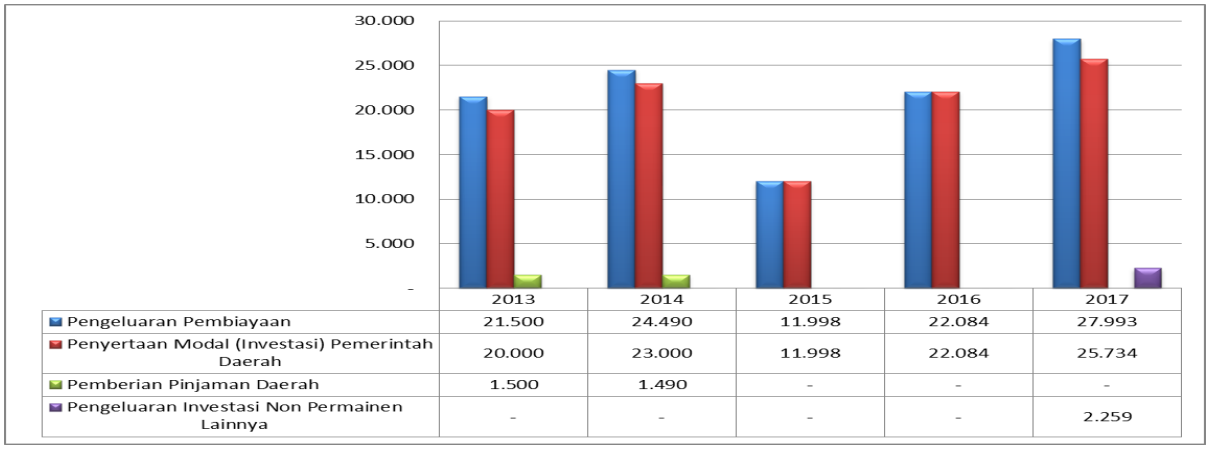
Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) dan Pembentukan Dana Cadangan. Selama kurun waktu Tahun 2013-2017, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan, dan pengembangan usaha. Peningkatan modal yang disetor pada BUMD dalam kurun waktu tahun 2013-2017 diikuti dengan kenaikan Deviden, namun tidak secara signifikan. Tahun 2017 persentase deviden terhadap modal yang disetorkan sebesar 5,49% cenderung menurun dari tahun 2013 sebesar 8,53%, sehingga perlu upaya dalam meningkatkan kinerja BUMD. Persentase deviden terhadap modal ditunjukkan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2.
Persentase Deviden Terhadap Modal pada BUMD
Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

Uraian	Modal yang Disetor dan Deviden									
	Tahun									
	2013		2014		2015		2016		2017	
BUMD	Modal disetor (Rp. Juta)	Deviden (Rp. Juta)	Modal disetor (Rp. Juta)	Deviden (Rp. Juta)	Modal disetor (Rp. Juta)	Deviden (Rp. Juta)	Modal disetor (Rp. Juta)	Deviden (Rp. Juta)	Modal disetor (Rp. Juta)	Deviden (Rp. Juta)
Total	124.058,65	10.578,80	155.851,44	11.775,02	173.125,76	14.832,11	208.009,31	12.416,23	246.575,31	13.539,48
(%)	8,53		7,56		8,57		5,97		5,49	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) kepada PD. BPR-BKK, PDAM dan Bank Jateng dan pembiayaan investasi non kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Untuk mengetahui realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar 3.9. berikut.



	2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Pembiayaan	21.500	24.490	11.998	22.084	27.993
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000	23.000	11.998	22.084	25.734
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500	1.490	-	-	-
Pengeluaran Investasi Non Permainen Lainnya	-	-	-	-	2.259

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab. Banyumas Tahun 2013-2017.

Gambar 3.9.
Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)

3.1.1.3. Analisis Fiskal Daerah

Analisis fiskal merupakan analisis yang menggunakan indikator rasio sederhana untuk memotret kondisi "kesehatan fiskal" Pemerintah Daerah. Analisis fiskal pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017, sebagai berikut :

1. Kemandirian Keuangan Daerah

a. Input Based

Secara teori, kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat direpresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik sumber daya alam (SDA) maupun pajak. Komponen PAD sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah termasuk di dalamnya pendapatan dari laba BUMD. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini disebut dengan *money follows* program. Di dalam penghitungan DBH sendiri baik DBH sumber daya alam (SDA) maupun DBH perpajakan, peran pemerintah pusat hanya bersifat akuntansi pembukuan untuk kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing daerah sesuai dengan mekanisme alokasi persentase yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, meski peran pemerintah daerah relatif kecil namun strategi pengembangan juga wajib diciptakan oleh masing-masing daerah tersebut.

b. Output Based

PDRB Kabupaten Banyumas 2017 ditinjau dari pengeluaran, didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah

tangga dihitung dari pendapatan seluruh penduduk Banyumas, baik yang bersumber dari gaji, upah, atau yang berusaha dan mendapatkan untung. Selain itu juga berasal dari transfer, baik transfer pemerintah (pensiunan), maupun transfer dari rumah tangga lain (dari anak yang bekerja di luar negeri atau tempat lain). Sebagian besar konsumsi rumah tangga berasal dari penduduk yang bekerja di sektor non pemerintah. Di sisi lain perlu untuk memacu komponen pengeluaran pada konsumsi pemerintah utamanya pada belanja infrastruktur dan sarana pendukung perekonomian wilayah yang mampu mendorong pergerakan pada sektor riil dan meningkatkan konsumsi lembaga swasta dari sisi pembiayaan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017, terlihat dominasi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 79,12% di tahun 2013 dan menurun setiap tahunnya menjadi 69,23% hingga tahun 2017. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas relatif masih didominasi oleh belanja konsumsi rumah tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah konsumsi pemerintah yang berkisar 9% dari tahun 2013-2017. Aspek pembentukan investasi daerah melalui PMTB, relatif tetap di kisaran 38% dari tahun 2013-2017.

Tabel 3.3.
Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	79,12	75,34	71,63	70,48	69,23
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,21	1,28	1,15	1,15	1,15
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,88	9,69	9,77	9,51	9,26
4.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	38,30	38,91	37,77	38,19	38,17
5.	Perubahan Inventori	5,46	2,44	0,85	0,37	0,35
6.	Ekspor	(33,98)	(27,65)	(21,17)	(19,70)	(18,15)
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

2. Ruang Fiskal Daerah

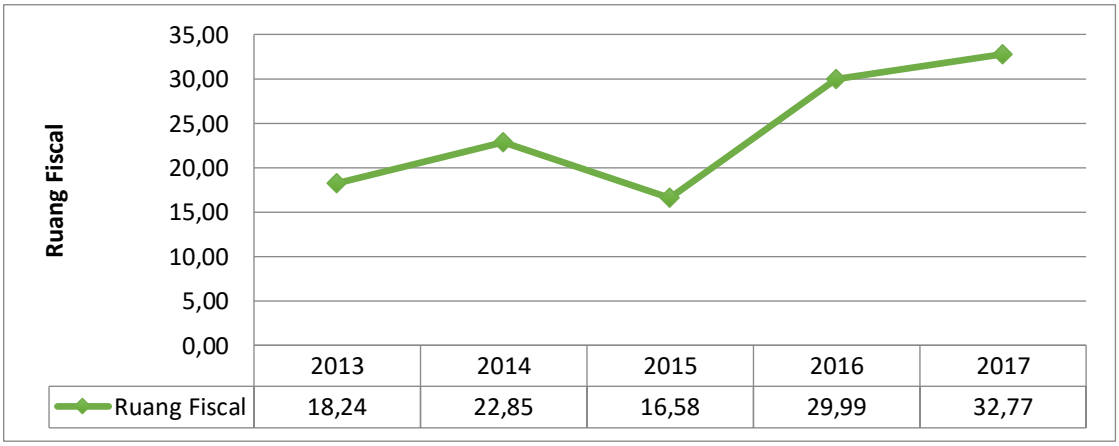
Ruang fikal *(fiscal space)* secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Banyumas. Pada tahun 2013-2017 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kabupaten Banyumas fluktuatif yaitu

pada tahun 2013 sebesar 18,24%, mencapai puncaknya pada tahun 2017 sebesar 32,77%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 3 komponen utama yaitu peningkatan pendapatan hibah, dana alokasi khusus dan peningkatan dana otonomi khusus/dana darurat pada tahun 2017. Sehubungan itu kedepan perlu lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan Banyumas. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Kabupaten Banyuma tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4. berikut :

Tabel 3.4.
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus / Dana Darurat	Belanja Pegawai	Selisih	Ruang Fiscal (%)
2013	2.037.636.075.236	-	78.662.730.000	315.634.526.000	1.271.593.369.847	371.745.449.389	18,24
2014	2.308.424.398.455	1.778.000.000	82.519.140.000	320.319.844.000	1.376.391.926.843	527.415.487.612	22,85
2015	2.654.284.992.375	4.894.218.600	87.526.800.000	496.021.079.000	1.625.731.001.715	440.111.893.060	16,58
2016	2.852.968.390.191	14.075.240.800	412.853.809.576	205.450.575.000	1.365.106.607.402	855.482.157.413	29,99
2017	3.221.258.052.894	175.521.251.417	449.360.479.699	309.594.476.000	1.231.069.947.011	1.055.711.898.767	32,77

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.



Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Gambar 3.10.
Pendapatan Daerah Perkapita Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

3. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

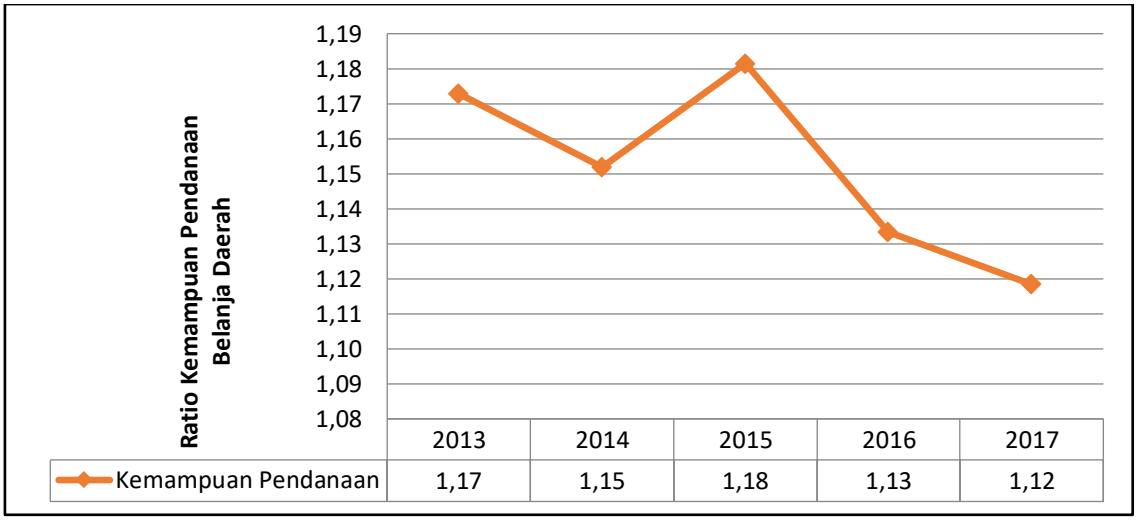
Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan

mendanai belanja daerah semakin besar pula. kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah mengalami fluktuatif pada tahun sejak tahun 2013 sebesar 1,17 pada tahun 2014 menurun sebesar 1,15 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 1,18 dan pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 1,03 kemudian pada tahun 2017 menurun kembali menjadi sebesar 1,12. Kondisi kemampuan mendanai belanja daerah masih berkisar 1 dengan kecenderungan mengalami penurunan sampai dengan 1,12 pada pada tahun 2017, maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi pinjaman daerah/obligasi ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan kedepan. Kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2018 pada tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah (%)
1	2	3	4	5	6 (2+3)	7 (4+5)	8 (6/7)
2013	2.037.636.075.236	354.397.165.262	2.018.052.963.730	21.500.000.000	2.392.033.240.498	2.039.552.963.730	1,17
2014	2.308.424.398.455	352.480.276.768	2.285.326.471.224	24.490.000.000	2.660.904.675.223	2.309.816.471.224	1,15
2015	2.654.284.992.375	351.088.203.999	2.531.669.334.010	11.998.000.000	3.005.373.196.374	2.543.667.334.010	1,18
2016	2.852.968.390.191	461.705.862.364	2.902.853.581.862	22.084.000.000	3.314.674.252.555	2.924.937.581.862	1,13
2017	3.221.258.052.894	389.736.670.693	3.200.686.516.259	27.992.500.000	3.610.994.723.587	3.228.679.016.259	1,12

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.



Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Gambar 3.11.
Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

4. Belanja Modal

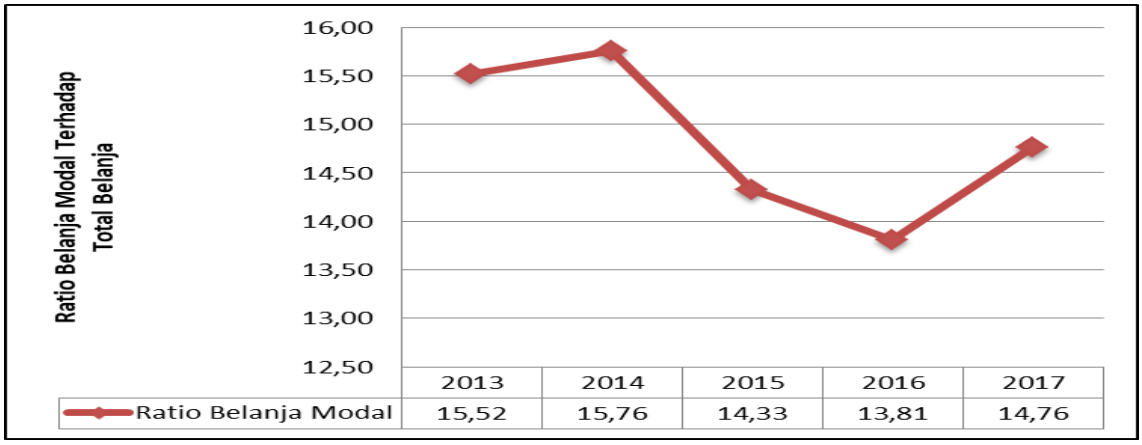
Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan angka fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dari sebesar 15,52% pada tahun 2013 menjadi sebesar 14,76%, seperti terlihat pada Tabel 3.6 . Kondisi ini menunjukkan bahwa ada penurunan pembangunan fisik di Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.6.
Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Ratio Belanja Modal Terhadap Total Belanja (%)
2013	313.188.975.057,00	2.018.052.963.730,00	15,52
2014	360.164.898.641,00	2.285.326.471.224,00	15,76
2015	362.744.753.623,00	2.531.669.334.010,00	14,33
2016	400.832.864.576,00	2.902.853.581.862,00	13,81
2017	472.485.470.290,00	3.200.686.516.259,00	14,76

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.



Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Gambar 3.12.
Rasio Belanja Modal Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

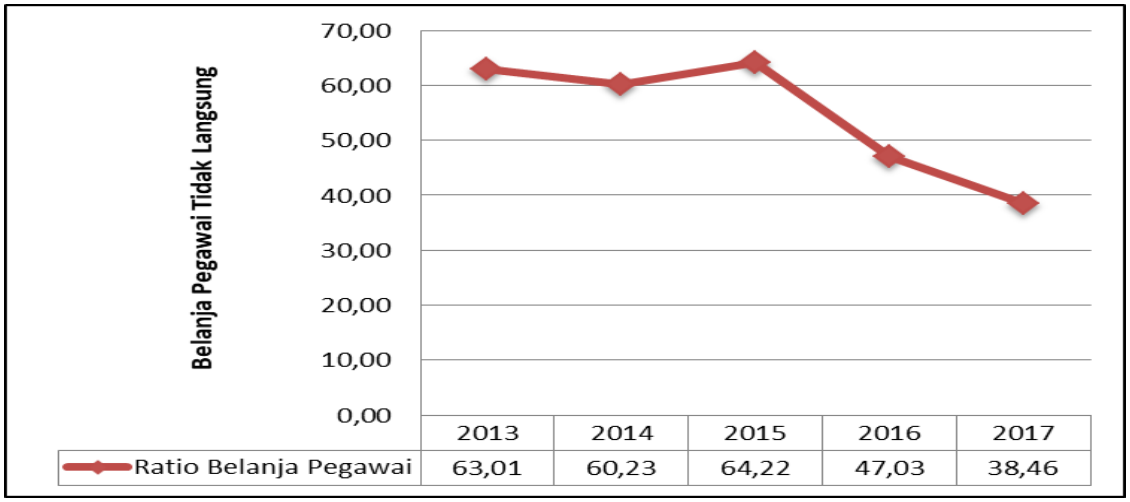
5. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap terhadap total belanja daerah menunjukkan angka penurunan, dari sebesar 63,01% pada tahun 2013 menjadi sebesar 38,46%, seperti terlihat pada Tabel 3.7. Penurunan belanja pegawai tidak langsung dipengaruhi oleh adanya pelimpahan guru SMA/MA/SMK yang dulunya menjadi kewenangan kabupaten, sekarang menjadi kewenangan Provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada penurunan belanja untuk gaji dan tunjangan pegawai di Kabupaten Banyumas.

Tabel 3.7.
Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Terhadap Total Belanja (%)
2013	1.271.593.369.847,00	2.018.052.963.730,00	63,01
2014	1.376.391.926.843,00	2.285.326.471.224,00	60,23
2015	1.625.731.001.715,00	2.531.669.334.010,00	64,22
2016	1.365.106.607.402,00	2.902.853.581.862,00	47,03
2017	1.231.069.947.011,00	3.200.686.516.259,00	38,46

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.



Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Gambar 3.13.
Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

6. Tax Ratio

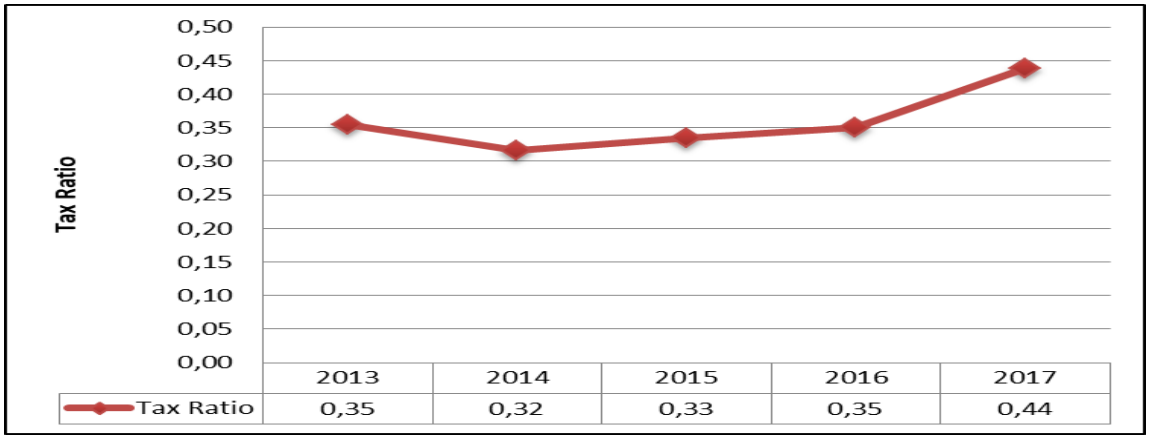
Tax Ratio Kabupaten Banyumas berfluktuasi dari tahun ke tahun, yang semula pada tahun 2013 sebesar 0,35%, dan mengalami trend penurunan pada tahun 2014 sebesar 0,32% dan tahun 2015 sebesar 0,33%. Pada tahun 2016 kembali pada rasio yang sama yaitu 0,35% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 0,44%. Indikasi penyebab rendahnya angka *Tax Ratio* daerah diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang masih perlu ditingkatkan.

Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya *tax ratio* bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan *ability to pay,* di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. Tax burden terkait pula dengan keadilan.

Tabel 3.8.
Tax Ratio Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

Tahun	Y Pajak	PDRB	Tax Ratio
2013	111.290.149.783	31.369.317.740.000	0,35
2014	110.189.330.128	34.923.374.710.000	0,32
2015	129.678.372.181	38.798.789.350.000	0,33
2016	147.356.151.979	42.016.940.500.000	0,35
2017	199.612.331.442	45.585.979.730.000	0,44

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.



Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Gambar 3.14.
***Tax Ratio* Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017**

3.1.2. Neraca Daerah

Adapun perkembangan kondisi neraca daerah selama kurun waktu 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel 3.9. berikut :

Tabel 3.9.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2013-2017
Kabupaten Banyumas

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	**ASET**						
1.1.	**ASET LANCAR**	**437.419.965.153,41**	**427.191.336.823,56**	**557.129.109.691,72**	**497.361.930.629,86**	**480.266.308.100,03**	**3,48**
1.1.1.	Kas	353.183.383.735,00	358.027.399.212,40	470.581.818.992,40	398.675.479.688,40	383.054.327.899,40	3,40
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	Piutang	58.666.510.358,12	45.400.206.697,39	59.008.574.831,59	66.192.101.864,69	62.635.247.775,86	3,54
	Piutang Pendapatan	90.301.937.535,00	84.928.158.598,70	98.987.819.437,90	122.522.035.870,22	121.786.731.317,22	8,44
	Piutang Lain-lain	1.434.108.102,70	-	-	-	-	-
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(33.069.535.279,58)	(39.527.951.901,31)	(39.979.244.606,31)	(56.329.934.005,53)	(59.151.483.541,36)	16,64
1.1.4.	Beban Dibayar di Muka	-	134.605.227,00	59.949.500,00	10.000.000,00	37.024.767,00	-
1.1.5.	Persediaan	25.570.071.060,29	23.629.125.686,77	27.478.766.367,73	32.484.349.076,77	34.539.707.657,77	8,31
1.2.	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**130.091.231.313,32**	**162.811.522.801,02**	**179.792.110.408,02**	**214.646.152.155,02**	**255.365.693.134,17**	**18,48**
1.2.1.	Investasi Non Permanen	6.032.579.188,00	6.960.080.414,70	6.666.347.480,70	6.636.842.673,70	8.790.378.320,85	10,79
	Dana Bergulir	7.360.313.631,00	8.850.313.631,00	8.850.313.631,00	8.850.313.631,00	11.108.813.631,00	11,44
	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1.327.734.443,00)	(1.890.233.216,30)	(2.183.966.150,30)	(2.213.470.957,30)	(2.318.435.310,15)	16,00
1.2.2.	Investasi Permanen	124.058.652.125,32	155.851.442.386,32	173.125.762.927,32	208.009.309.481,32	246.575.314.813,32	18,85
1.3.	**ASET TETAP**	**5.020.755.216.205,83**	**3.872.585.335.374,66**	**4.138.447.362.928,62**	**4.272.597.175.495,92**	**4.584.300.038.851,92**	**(1,37)**
1.3.1.	Tanah	2.313.347.121.804,00	2.321.406.492.842,00	2.323.163.475.322,00	2.334.569.556.143,00	2.380.053.882.103,00	0,72
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	470.906.264.545,69	551.770.846.488,69	662.604.385.203,65	701.438.053.913,45	829.487.321.107,45	15,34
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.040.502.727.829,56	1.187.362.372.960,56	1.295.772.289.398,56	1.292.414.298.767,56	1.436.733.903.153,56	8,54
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	1.079.414.695.442,00	1.239.253.172.324,00	1.400.150.486.270,00	1.560.706.689.442,00	1.755.817.176.064,00	12,94
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	91.997.206.993,58	105.743.601.320,36	109.802.864.734,36	101.790.062.138,36	103.571.579.201,36	3,31
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	24.587.199.591,00	3.277.421.273,00	13.356.486.920,00	12.622.707.788,00	8.778.565.923,00	46,23
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-	(1.536.228.571.833,95)	(1.666.402.624.919,95)	(1.730.944.192.696,45)	(1.930.142.388.700,45)	-

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.4.	**DANA CADANGAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4.1.	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.5.	**ASET LAINNYA**	**130.268.952.560,07**	**111.942.294.774,74**	**120.924.532.152,00**	**143.608.723.415,00**	**143.845.341.931,00**	**3,22**
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	111.200.000,00	111.200.000,00	-
1.3.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	116.409.008.465,00	109.073.514.465,00	117.951.191.565,00	117.951.191.565,00	117.951.191.565,00	0,46
1.3.4.	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	428.282.284,00	-
1.3.5.	Aset Lain-lain	13.859.944.095,07	28.609.339.571,24	14.437.634.436,00	32.044.340.740,00	31.725.812.972,00	-
1.3.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	(25.740.559.261,50)	(11.464.293.849,00)	(6.498.008.890,00)	(6.371.144.890,00)	-
	JUMLAH ASET	**5.718.535.365.232,63**	**4.574.530.489.773,98**	**4.996.293.115.180,36**	**5.128.213.981.695,80**	**5.463.777.382.017,12**	**(0,40)**
2.	**KEWAJIBAN**						
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**57.996.124.052,00**	**59.006.734.595,82**	**64.083.283.251,34**	**39.369.582.708,34**	**40.163.426.452,34**	**(6,55)**
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	126.399.944,00	93.639.077,00	194.941.165,00	257.360.504,00	292.620.830,00	32,00
	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
	Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
2.2.2.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	10.500.000.000,00	5.000.000.000,00	-
2.2.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	24.834.033,00	464.313.377,84	1.290.240.326,34	1.459.484.647,34	1.322.204.363,34	487,81
2.2.4.	Utang Beban	57.844.890.075,00	18.471.891.832,98	21.600.171.649,00	27.152.737.557,00	33.548.601.259,00	(0,47)
2.2.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya		39.976.890.308,00	40.997.930.111,00	-	-	-
2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**-**	**-**	**-**	**11.000.000.000,00**	**6.500.000.000,00**	**-**
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	-	-	-	11.000.000.000,00	6.500.000.000,00	-
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	**57.996.124.052,00**	**59.006.734.595,82**	**64.083.283.251,34**	**50.369.582.708,34**	**46.663.426.452,34**	**(4,60)**
3.	**EKUITAS**						
3.1.	**EKUITAS DANA LANCAR**	**379.423.841.101,41**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	352.480.276.768,00	-	-	-	-	-
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	58.666.510.358,12	-	-	-	-	-
3.1.3	Cadangan untuk Persediaan	25.570.071.060,29	-	-	-	-	-
3.1.4	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(57.869.724.108,00)	-	-	-	-	-
3.1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	576.707.023,00	-	-	-	-	-

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.2.	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**5.281.115.400.079,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.2.1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	130.091.231.313,32					-
3.2.2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5.020.755.216.205,83	-	-	-	-	-
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk ana Cadangan)	130.268.952.560,07	-	-	-	-	-
3.2.4.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
3.3.	**EKUITAS DANA CADANGAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.3.1.	Diinvestasikan dalam dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH EKUITAS	**5.660.539.241.180,63**	**4.515.523.755.178,16**	**4.932.209.831.929,02**	**5.077.844.398.987,00**	**5.417.113.955.564,78**	**(0,34)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**5.718.535.365.232,63**	**4.574.530.489.773,98**	**4.996.293.115.180,36**	**5.128.213.981.695,34**	**5.463.777.382.017,12**	**(0,40)**

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2017 dijelaskan sebagai berikut :

1) Rasio Lancar (*current ratio*) menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio lancar kondisinya fluktuatif, dengan tren yang meningkat secara konsisten dari tahun 2013 hingga tahun 2016, dan mengalami penurunan sebesar 0,67 persen pada tahun 2017. Rasio lancar selama 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek Pemkab Banyumas yang cukup baik karena kebijakan pinjaman daerah yang hati-hati. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel 3.10. berikut.

Tabel 3.10.
Ratio Lancar Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Rasio Lancar	Aktiva Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Persentase (%)
1.	Tahun 2013	437.419.965.153,41	57.996.124.052,00	7,54
2.	Tahun 2014	427.191.336.823,56	59.006.734.595,82	7,24
3.	Tahun 2015	557.129.109.691,72	64.083.283.251,34	8,69
4.	Tahun 2016	497.361.930.629,86	39.369.582.708,34	12,63
5.	Tahun 2017	480.266.308.100,03	40.163.426.452,34	11,96

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Demikian pula yang diukur menggunakan Rasio Cair (*Rasio Quick*), menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Namun demikian, tiap tahunnya memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek baik. Rasio Cair menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya dalam kondisi baik karena berada diatas angka 1. Idealnya, rasio lancar berada pada angka 1:1 atau minimal 0,8:1 karena apabila kurang dari itu, pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan Untuk mengetahui rincian *rasio quick* daerah dapat dilihat pada tabel 3.11. berikut :

Tabel 3.11.
Ratio Quick Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Rasio Quick	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Persentase (%)
1.	Tahun 2013	437.419.965.153,41	25.570.071.060,29	57.996.124.052,00	7,10
2.	Tahun 2014	427.191.336.823,56	23.629.125.686,77	59.006.734.595,82	6,84
3.	Tahun 2015	557.129.109.691,72	27.478.766.367,73	64.083.283.251,34	8,27
4.	Tahun 2016	497.361.930.629,86	32.484.349.076,77	39.369.582.708,34	11,81
5.	Tahun 2017	480.266.308.100,03	34.539.707.657,77	40.163.426.452,34	11,10

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

2) Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas :

a. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (*Debt Ratio*), menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. *Debt ratio* juga menunjukan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan adalah rendah Besar. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada tahun 2017 sebesar 0,01, hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil. Rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2013-2017 berada pada tingkat yang stabil yaitu sebesar 0,01. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada resiko yang kecil serta pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil. Untuk mengetahui rincian ratio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel 3.12. berikut.

Tabel 3.12.
Ratio Hutang Terhadap Aset Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Rasio Hutang Terhadap Aset	Total Kewajiban	Total Aset	Persentase (%)
1.	Tahun 2013	57.996.124.052,00	5.718.535.365.232,63	0,01
2.	Tahun 2014	59.006.734.595,82	4.574.530.489.773,98	0,01
3.	Tahun 2015	64.083.283.251,34	4.996.293.115.180,36	0,01
4.	Tahun 2016	50.369.582.708,34	5.128.213.981.695,80	0,01
5.	Tahun 2017	46.663.426.452,34	5.463.777.382.017,12	0,01

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

b. Rasio Hutang Terhadap Modal, menunjukan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2013-2017 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu pada besaran angka yang sama yaitu 0,01. Kecenderungan rasio hutang terhadap modal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan di Kabupaten Banyumas sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan sendiri, bukan berasal dari pinjaman kreditor/donatur/ pihak ketiga.

Tabel 3.13.
Ratio Hutang Terhadap Modal *(Equitas)* Kabupaten Banyumas
Tahun 2013-2017

No.	Rasio Hutang Terhadap Modal	Total Kewajiban	Total Modal *(Ekuitas)*	Persentase (%)
1.	Tahun 2013	57.996.124.052,00	5.660.539.241.180,63	0,01
2.	Tahun 2014	59.006.734.595,82	4.515.523.755.178,16	0,01
3.	Tahun 2015	64.083.283.251,34	4.932.209.831.929,02	0,01
4.	Tahun 2016	50.369.582.708,34	5.077.844.398.987,00	0,01
5.	Tahun 2017	46.663.426.452,34	5.417.113.955.564,78	0,01

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan ini bermuatan tentang proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan, adapun secara terinci dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja Daerah Kabupaten Banyumas selama kurun waktu lima tahun (2013 – 2017) cenderung mengalami peningkatan, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Secara proporsional, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah termasuk hibah dana BOS, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan bagi hasil kepada pemerintah desa.

Dari realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2013 – 2017 menunjukkan terjadi kenaikan. Di lihat dari proporsi belanja aparatur terhadap belanja daerah selama kurun waktu 2013 – 2017, terjadi penurunan dari

58,43% pada tahun 2013 menjadi 41,66% pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Banyumas semakin baik. Realisasi dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama Tahun 2013 – 2017 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.14. berikut :

Tabel 3.14.

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2014 (Rp.)	Tahun 2015 (Rp.)	Tahun 2016 (Rp.)	Tahun 2017 (Rp.)
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**1.120.636.538.714,00**	**1.231.988.194.236,00**	**1.309.726.768.518,00**	**1.365.106.607.402,00**	**1.231.069.947.011,00**
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	823.939.646.588,00	860.387.233.019,00	920.688.901.885,00	961.581.102.598,00	857.581.116.453,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan	287.751.748.945,00	361.412.204.157,00	376.094.420.749,00	391.384.850.190,00	358.490.199.660,00
3.	Belanja Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.367.400.000,00	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	5.719.800.000,00
4.	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	4.577.743.181,00	3.953.549.000,00	7.931.750.000,00	6.178.750.000,00	8.282.500.000,00
5.	Belanja Insentif Pemungutan Restribusi Daerah	0,00	1.855.208.060,00	631.695.884,00	1.581.904.614,00	996.330.898,00
B.	**Belanja Langsung**	**71.102.635.861,00**	**80.882.193.747,00**	**78.698.626.020,00**	**87.187.709.308,00**	**114.121.835.391,00**
1.	Belanja Honorarium PNS	12.737.787.000,00	14.088.747.350,00	14.126.818.750,00	13.540.751.250,00	13.905.438.730,00
2.	Belanja Uang Lembur	6.145.545.300,00	7.148.051.570,00	5.635.871.350,00	5.281.591.080,00	4.783.638.150,00
2.	Belanja Uang Makan	1.055.616.700,00	1.119.180.000,00	1.426.697.500,00	2.054.607.500,00	2.040.698.750,00
3.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	616.800.000,00	586.000.000,00	379.500.000,00	266.000.000,00	0,00
4.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.837.851.500,00	4.433.555.200,00	3.184.106.900,00	2.644.673.000,00	2.721.828.584,00
5.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	339.650.400,00	343.662.020,00	59.814.000,00	789.479.000,00	6.421.787.500,00
6.	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	12.503.270.820,00	12.848.004.774,00	13.141.221.038,00	16.830.533.941,00	22.489.353.628,00
7.	Belanja Pakaian Dinas dan	417.026.000,00	1.612.917.300,00	279.463.250,00	338.933.800,00	523.781.000,00
8.	Belanja Pakaian Kerja	625.262.500,00	638.163.000,00	680.551.175,00	814.563.815,00	1.377.379.750,00
9.	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.484.543.683,00	659.426.200,00	614.587.000,00	612.070.500,00	534.825.500,00
10.	Belanja Perjalanan Dinas	29.338.541.958,00	37.404.486.333,00	39.169.995.057,00	44.014.505.422,00	59.323.103.799,00
11.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**1.191.739.174.575,00**	**1.312.870.387.983,00**	**1.388.425.394.538,00**	**1.452.294.316.710,00**	**1.345.191.782.402,00**

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Tabel 3.15.

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banyumas Thun 2013-2017

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	2013	1.191.739.174.575,00	2.039.552.963.730,00	58,43
2.	2014	1.312.870.387.983,00	2.309.816.471.224,00	56,84
3.	2015	1.388.425.394.538,00	2.543.667.334.010,00	54,58
4.	2016	1.452.294.316.710,00	2.924.937.581.862,00	49,65
5.	2017	1.345.191.782.402,00	3.228.679.016.259,00	41,66

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada analisis ini dapat kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2013 mengalami defisit sebesar 0,09%, menurun tahun 2014 sebesar 0,16%, untuk tahun 2015 surplus sebesar 4,17% dan sedangkan tahun 2016 dan 2017 secara berturut-turut mengalami defisit kembali sebesar 2,52% dan 0,23%. Adapun kondisi defisit yang terjadi pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016 dan tahun 2017 ditutup dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dana talangan pengadaan pangan dan dana bergulir. Untuk melihat kondisi defisit riil anggaran secara terinci dapat dilihat pada tabel 3.16. berikut.

Tabel 3.16.

Defisit Riil Anggaran dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013		2014		2015		Thun 2016		2017	
		(Rp.)	Proposi (%)	(Rp.)	Proposi (%)	(Rp.)	Proposi (%)	(Rp.)	Proposi (%)	(Rp.)	Proposi (%)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.037.636.075.236,00	100	2.308.424.398.455,40	100,00	2.654.284.992.375,00	100,00	2.852.968.390.191,00	100,00	3.221.258.052.894,00	100,00
	Dikurangi realisasi :										
	Belanja Daerah	2.018.052.963.730,00	99,04	2.285.326.471.224,00	99,00	2.531.669.334.010,00	95,38	2.902.853.581.862,00	101,75	3.200.686.516.259,00	99,36
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.500.000.000,00	1,06	24.490.000.000,00	1,06	11.998.000.000,00	0,45	22.084.000.000,00	0,77	27.992.500.000,00	0,87
A.	**Defisit riil**	**(1.916.888.494,00)**	**(0,09)**	**(1.392.072.768,60)**	**(0,06)**	**110.617.658.365,00**	**4,17**	**(71.969.191.671,00)**	**(2,52)**	**(7.420.963.365,00)**	**(0,23)**
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :										
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	331.470.960.480,00	93,53	352.480.276.768,00	100	351.088.203.999,40	100	461.705.862.364,40	100	389.736.670.693,00	100
2.	Pencairan dana cadangan	22.926.204.782,00	6,47	-		-		-		-	
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-		-		-		-		-	
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-		-		-		-		-	
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-		-		-		-		-	
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-		-		-		-		-	
B.	**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**354.397.165.262,00**	**100**	**352.480.276.768,00**	**100**	**351.088.203.999,40**	**100**	**461.705.862.364,40**	**100**	**389.736.670.693,00**	**100**
A+B	**Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan**	**352.480.276.768,00**	**100**	**351.088.203.999,40**	**100**	**461.705.862.364,40**	**100**	**389.736.670.693,40**	**100**	**382.315.707.328,00**	**100**

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Tabel 3.17.

Realisasi Sisaa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA
	Jumlah SILPA	352.480.276.768,00	-	351.088.203.999,40	-	461.705.862.364,40	-	389.736.670.693,40	-	382.315.707.328,40	-
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	38.462.609.396,00	10,91	57.682.839.313,40	16,43	50.722.161.892,00	10,99	45.936.309.936,00	12	48.668.459.384,00	12,73
2.	Pelampuan Penerimaan Dana Perimbangan	(469.874.467)	-0,133	(19.895.884.026)	-5,667	(38.653.110.020,00)	-8,372	(193.128.175.210,00)	-49,55	(51.315.842.569,00)	-13,42
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	19.962.512.232,00	5,66	14.702.103.341,00	4,19	(8.613.004.565,00)	-1,865	(9.801.559.511,00)	-2,515	(2.283.535.406,00)	-0,597
4.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	289.443.006.797	82,12	294.946.808.357	84,01	445.364.618.682,00	96,46	529.829.207.994,00	136	375.924.636.379,00	98,33
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		-		-		-		-		-
6.	Kegiatan lanjutan		-		-		-		-		-

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja (Tahun 2018 – 2023)

Keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu dalam merencanakan pendapatan daerah harus maksimal tetapi tidak membebani masyarakat dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Mengingat keuangan daerah sebagai komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tergambarkan dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah guna mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang dirumuskan untuk periode 2018-2023. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan. Untuk menghasikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu : (i) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapitadan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, seperti perkiraan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah. Beberapa kondisi yang mempengaruhi pendapatan daerah secara langsung adalah pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, regulasi, iklim usaha yang kondusif, keamanan dan stabilitas sosial politik, serta kebijakan pemerintah daerah. Dengan asumsi semua kondisi tersebut di atas berada pada tingkat yang optimum dan tidak ada perubahan regulasi atau regulasi baru yang bersifat kontraproduktif dengan kelancaran pengelolaan pendapatan

daerah, maka dipredikasi pendapatan daerah akan terus meningkat secara signifikan sebagaimana dalam tabel 3.18. berikut ini :

Tabel 3.18.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2023
Kabupaten Banyumas

No.	Uraian	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.260.721.459.593,00**	**3.427.963.727.000,00**	**3.712.866.081.605,85**	**3.929.531.519.552,22**	**4.147.045.119.660,90**	**4.365.440.808.418,36**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**630.770.637.593,00**	**636.507.460.000,00**	**715.379.486.239,63**	**759.312.694.076,42**	**803.245.901.913,21**	**847.179.109.750,00**
	Pajak Daerah	200.200.000.000,00	208.900.000.000,00	212.181.051.591,32	225.211.610.082,16	238.242.168.572,99	251.272.727.063,83
	Retribusi Daerah	29.810.420.000,00	32.166.937.000,00	32.166.513.904,06	34.141.938.371,66	36.117.362.839,25	38.092.787.306,85
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.766.697.323,00	13.808.380.000,00	15.424.572.198,27	16.371.832.986,73	17.319.093.775,18	18.266.354.563,64
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	375.993.520.270,00	381.632.143.000,00	455.607.348.545,97	483.587.312.635,88	511.567.276.725,78	539.547.240.815,69
1.2.	**Dana Perimbangan**	**1.917.837.364.000,00**	**2.003.428.820.000,00**	**2.119.765.795.474,36**	**2.238.595.039.733,70**	**2.358.272.446.155,34**	**2.478.831.941.225,77**
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	53.757.057.000,00	42.249.967.000,00	60.925.001.793,32	64.666.555.496,95	68.408.109.200,58	72.149.662.904,22
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.373.971.809.000,00	1.442.330.354.000,00	1.528.739.442.244,24	1.622.623.078.742,48	1.716.506.715.240,72	1.810.390.351.738,95
	Dana Alokai Khusus (DAK)	490.108.498.000,00	518.848.499.000,00	530.101.351.436,80	551.305.405.494,27	573.357.621.714,04	596.291.926.582,61
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**712.113.458.000,00**	**788.027.447.000,00**	**877.720.799.891,87**	**931.623.785.742,11**	**985.526.771.592,35**	**1.039.429.757.442,58**
	Pendapatan Hibah	174.178.284.000,00	187.037.320.000,00	194.712.553.898,69	206.670.329.126,26	218.628.104.353,82	230.585.879.581,39
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	195.417.737.000,00	195.417.737.000,00	262.429.129.572,00	278.545.545.703,13	294.661.961.834,27	310.778.377.965,40
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	12.391.390.000,00	44.828.869.000,00	47.843.656.100,82	50.781.852.299,59	53.720.048.498,37	56.658.244.697,14
	Dana Desa	330.126.047.000,00	360.743.521.000,00	372.735.460.320,36	395.626.058.613,12	418.516.656.905,89	441.407.255.198,65

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

3.3.1.1. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD Kabupaten Banyumas.

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah perlu mengedepankan sumber-sumber pembiayaan yang potensinya besar untuk menjadi fokus program dan kegiatan. Struktur APBD Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pajak daerah memberi kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banyumas perlu memberi perhatian yang besar terhadap sumber pendapatan daerah ini.

Beberapa strategi yang perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan khususnya pajak sejauh ini telah dilakukan, namun masih diperlukan adanya penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan.
2. Pengembangan teknologi informasi secara kontinyu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan semakin memudahkan wajib pajak dalam mengisi dan membayar pajak.
3. Sinergitas antar OPD dalam melaksanakan intensifikasi melalui penegakan regulasi.
4. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi.
5. Perlunya pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, termasuk di dalamnya adalah melakukan *profiling* wajib pajak.
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
8. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
9. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah
10. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan
11. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

3.3.1.2. Belanja Daerah pada Tahun 2018-2023

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistimatis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun kedepan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Komponen Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung diprediksikan meningkat meskipun dalam kerangka pertumbuhan nol (*zero growth*). Kenaikan gaji tahun 2019 dan tambahan penghasilan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banyumas No.36 Tahun 2018 menjadi faktor yang cukup signifikan dalam menyedot dana APBD. Sementara itu, komponen Belanja Pegawai pada Belanja Langsung meskipun meningkat tetapi peningkatan tersebut hanya memperhitungkan efek inflasi saja karena adanya pembatasan belanja honorarium kegiatan. Belanja Bantuan Keuangan pada tahun diprediksi stagnan pada kisaran Rp. 300.000.000.000,00 menyesuaikan dengan kebijakan Pemkab Banyumas. Belanja Modal diprediksikan meningkat secara signifikan dan peningkatannya lebih besar dibanding komponen belanja lainnya karena untuk merealisasikan Hasta Krida khususnya dalam rangka pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan. Berikut ini pada tabel 3.19. adalah proyeksi belanja langsung dan tidak langsung.

Tabel 3.19.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2023
Kabupaten Banyumas

No.	Uraian	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**BELANJA DAERAH**	**3,592,046,246,921.00**	**3,751,363,727,000.00**	**3,971,645,264,240.60**	**4,132,646,692,616.54**	**4,320,496,283,154.78**	**4,509,227,962,341.82**
1.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**2,063,088,818,640.00**	**2,166,926,329,400.00**	**2,189,811,703,554.09**	**2,319,371,210,136.04**	**2,449,144,418,717.98**	**2,579,141,714,879.93**
	Belanja Pegawai	1,368,233,406,671.00	1,429,877,319,800.00	1,767,819,880,852.21	1,890,883,082,280.37	2,013,946,283,708.52	2,137,009,485,136.68
	Belanja Hibah	71,543,413,500.00	48,398,270,000.00	73,500,000,000.00	77,175,000,000.00	81,033,750,000.00	85,085,437,500.00
	Belanja Bantuan Sosial	20,178,550,000.00	17,030,750,000.00	18,720,000,000.00	19,468,800,000.00	20,247,552,000.00	21,057,454,080.00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	23,001,042,000.00	24,106,693,700.00	25,240,170,401.28	26,997,213,756.10	28,754,257,110.92	30,511,300,465.74
	Belanja Bantuan Keuangan	576,132,406,469.00	639,513,295,900.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00	300,000,000,000.00
	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000.00	8,000,000,000.00	4,531,652,300.60	4,847,114,099.57	5,162,575,898.54	5,478,037,697.52
1.2.	**Belanja Langsung**	**1,528,957,428,281.00**	**1,584,437,397,600.00**	**1,781,833,560,686.50**	**1,813,275,482,480.50**	**1,871,351,864,436.80**	**1,930,086,247,461.88**
	Belanja Pegawai	29,468,019,200.00	28,936,669,004.00	11,895,587,289.08	12,723,674,511.38	13,551,761,733.68	14,379,848,955.98
	Belanja Barang dan Jasa	915,749,823,558.00	980,227,548,386.00	981,418,947,884.36	1,038,032,019,937.03	1,095,279,552,151.24	1,145,145,504,850.08
	Belanja Modal	583,739,585,523.00	575,273,180,210.00	788,519,025,513.07	762,519,788,032.09	762,520,550,551.88	770,560,893,655.82
SURPLUS (DEFISIT)		**(331,324,787,328.00)**	**(323,400,000,000.00)**	**(258,779,182,634.74)**	**(203,115,173,064.31)**	**(173,451,163,493.89)**	**(143,787,153,923.46)**
2.	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
2.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**382,315,707,328.00**	**360,000,000,000.00**	**301,264,531,206.17**	**256,876,239,492.89**	**238,487,947,779.60**	**220,099,656,066.31**
	Penggunaan SILPA	382,315,707,328.00	360,000,000,000.00	301,264,531,206.17	256,876,239,492.89	238,487,947,779.60	220,099,656,066.31
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
2.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**50,990,920,000.00**	**36,600,000,000.00**	**42,485,348,571.43**	**53,761,066,428.57**	**65,036,784,285.71**	**76,312,502,142.86**
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	48,490,920,000.00	34,100,000,000.00	39,744,423,415.88	50,292,692,875.86	60,840,962,335.83	71,389,231,795.80
	Pembayaran Pokok Hutang						
	Pemberian Pinjaman Daerah	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,740,925,155.55	3,468,373,552.72	4,195,821,949.89	4,923,270,347.06
	Pengeluaran Investasi Non Permainen						
PEMBIAYAAN NETTO		**331,324,787,328.00**	**323,400,000,000.00**	**258,779,182,634.74**	**203,115,173,064.31**	**173,451,163,493.89**	**143,787,153,923.46**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2023 diarahkan untuk :

1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Banyumas.
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
4. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan
6. Mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
7. Memenuhi alokasi prosentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru; fungsi kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2018-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas. Kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan melalui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada tabel 3.20. berikut.

Tabel 3.20.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kabupaten Banyumas

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
1.	Pendapatan	3,427,963,727,000	3,712,866,081,606	3,929,531,519,552	4,147,045,119,661	4,365,440,808,418
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	360,000,000,000	301,264,531,206	256,876,239,493	238,487,947,780	220,099,656,066
4.	Penerimaan Obligasi Daerah	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	**3,787,963,727,000**	**4,014,130,612,812**	**4,186,407,759,045**	**4,385,533,067,441**	**4,585,540,464,485**
	Dikurangi :					
1.	Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji Pegawai)	1,429,877,319,800	1,767,819,880,852	1,890,883,082,280	2,013,946,283,709	2,137,009,485,137
2.	Pengeluaran Pembiayaan	36,600,000,000	42,485,348,571	53,761,066,429	65,036,784,286	76,312,502,143
	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah	**2,321,486,407,200**	**2,203,825,383,388**	**2,241,763,610,336**	**2,306,549,999,446**	**2,372,218,477,205**

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Proyeksi kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah pada tabel di atas selanjutnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.21. berikut.

Tabel 3.21.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019 (Rp.)	Tahun 2020 (Rp.)	Tahun 2021 (Rp.)	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023 (Rp.)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**2,321,486,407,200**	**2,203,825,383,388**	**2,241,763,610,336**	**2,306,549,999,446**	**2,372,218,477,205**
1.	**Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I**	**737,049,009,600**	**421,991,822,702**	**428,488,127,856**	**435,198,135,009**	**442,132,229,743**
	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi Misi KDH dan Prioritas Pembangunan Daerah					
	- Hibah	48,398,270,000	73,500,000,000	77,175,000,000	81,033,750,000	85,085,437,500
	- Bantuan Sosial	17,030,750,000	18,720,000,000	19,468,800,000	20,247,552,000	21,057,454,080
	- Bantuan Keuangan	639,513,295,900	300,000,000,000	300,000,000,000	300,000,000,000	300,000,000,000
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24,106,693,700	25,240,170,401	26,997,213,756	28,754,257,111	30,511,300,466
	- Belanja Tidak Terduga	8,000,000,000	4,531,652,301	4,847,114,100	5,162,575,899	5,478,037,698
2.	**Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II**	**1,584,437,397,600**	**1,781,833,560,687**	**1,813,275,482,481**	**1,871,351,864,437**	**1,930,086,247,462**
	- Belanja Pegawai	28,936,669,004	11,895,587,289	12,723,674,511	13,551,761,734	14,379,848,956
	- Belanja Barang dan Jasa	980,227,548,386	981,418,947,884	1,038,032,019,937	1,095,279,552,151	1,145,145,504,850
	- Belanja Modal	575,273,180,210	788,519,025,513	762,519,788,032	762,520,550,552	770,560,893,656
	Surplus Anggaran Riil / Berimbang	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : Hasil Analisis Bappedalitbang Kab. Banyumas, 2018.

Mendasarkan kerangka pendanaan tersebut akan dilaksanakan berbagai program dalam rangka mengatasi permasalahan dan untuk pencapaian target indikator pembangunan Kabupaten Banyumas selama lima tahun ke depan melalui

dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, serta dukungan dan pendampingan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari Lembaga Donor, kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan belanja daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 diproyeksikan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan belanja tidak langsung terjadi akibat pertumbuhan belanja pegawai, dengan catatan tidak ada kebijakan peningkatan gaji pegawai yang sangat signifikan dari pemerintah pusat. Untuk belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dialokasikan tetap, sedangkan belanja bagi hasil kepada pemdes diproyeksikan meningkat sesuai dengan perolehan pajak daerah. Belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan diproyeksikan mengalami peningkatan setelah memperhitungkan alokasi belanja tidak langsung. Kebijakan dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Banyumas sebagai berikut.

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung untuk program prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan sisanya dialokasikan untuk belanja tidak langsung diluar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
2. Belanja tidak langsung diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa, belanja tidak terduga, dan sisanya untuk belanja bantuan keuangan kepada propinsi/Kab/Kota dan pemerintahan desa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
3. Belanja Langsung diarahkan untuk pencapaian visi dan misi RPJMD Banyumas, kemudian baru dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pengalokasian anggaran pada urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada unsur pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncakanakan terutama berasal dari penerimaan SILPA tahun lalu diharapkan semakin menurun karena penyerapan anggaran optimal. Kebijakan berkaitan pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas yaitu untuk Penyertaan modal pemerintah daerah didasarkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur modal serta memperkuat share permodalan pada BUMD. Untuk memperkuat permodalan UMKM dan IKM Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pemberian pinjaman daerah setiap tahun.

Struktur APBD memungkinkan adanya kebijakan surplus/defisit anggaran. Sejalan dengan optimisme yang semakin menguat atas perkembangan perekonomian daerah di masa depan, probabilitas dibutuhkannya pembiayaan yang semakin besar yang ditujukan untuk berinvestasi maupun untuk membangun layanan publik juga semakin besar. Implikasi kebijakan membuka peluang terjadinya struktur APBD defisit dan hal ini merupakan konsekuensi logis kebijakan Pemerintah kabupaten Banyumas yang ekspansif dan memang diperlukan. Kebijakan defisit itu sendiri sesungguhnya

bukan sesuatu yang buruk sebagaimana dikemukakan oleh Peraih Nobel Ekonomi, *William Vickrey* dengan menyatakan bahwa " kita tidak bisa lepas dari keadaan ekonomi yang lesu selama kita terus menerus terobsesi dengan ideologi yang tidak rasional tentang mengurangi defisit anggaran". Pemkab Banyumas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk kepentingan jangka pendek, langkah tersebut mungkin berdampak positif, namun potensi kerugiannya di masa depan sulit untuk dapat dikalkulasi.

Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah harus mulai mempertimbangkan instrumen-instrumen pembiayaan, khususnya untuk investasi yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten Banyumas. Salah satu instrumen yang layak dipertimbangkan adalah utang daerah, yang sudah diatur dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah di antaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman Daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD.

Mengacu pada dasar hukum diperbolehkannya hutang pemerintah daerah yang nantinya akan dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhannya dan sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, langkah strategis yaitu dengan melakukan hutang sebagai sumber alternatif pendanaan APDB keperluan investasi atau untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial menjadi langkah yang dapat dipertimbangkan. Adapun kewajiban yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait pengambilan langkah hutang untuk membiayai APBD yaitu seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan; Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut.

Hutang yang dapat diambil Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu hutang jangka panjang, dimana dana yang diperoleh pemerintah melalui pengadaan hutang daerah yaitu pinjaman jangka panjang yang akan digunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan. Pinjaman jangka panjang guna investasi ini didukung oleh peraturan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Guna melakukan perhitungan yang lebih menyakinkan terkait kemampuan Kabupaten Banyumas membayar hutang yaitu dapat dihitung menggunakan perbandingan antara proyeksi tahunan jumlah PAD, Dana Bagi Hasil dan DAU setelah dikurangi Belanja Wajib dan dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok pinjaman jangka panjang, bunga dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahun selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik.

$$DSCR = \frac{(PAD + (DBH - DBHDR) + DAU) - BW}{(P + B + BL)} \geq 2{,}5$$

Besarnya DSCR ditentukan minimal 2,5 yang berarti setiap 1 rupiah hutang yang berupa angsuran pokok, buga dan biaya lain dilunasi dengan pendapatan daerah sebesar 2,5 rupiah. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) merupakan rasio ambang batas pinjaman daerah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penghitungan DSCR ini menjadi pertimbangan awal ketika Pemerintah Kabupaten Banyumas dihadapkan pada pilihan untuk menggali pembiayaan yang berasal dari hutang.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap* antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Secara garis besar permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat dirumuskan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas berikut ini:

1. **Pendidikan**
   - Angka harapan lama sekolah masih rendah
   - Angka rata-rata lama sekolah masih rendah
   - Angka partisipasi murni SMP masih rendah.
   - Kondisi baik ruang kelas SD/MI belum terpenuhi
   - Belum terpenuhinya kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS
   - Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD
2. **Kesehatan**
   - Belum terpenuhinya sarana, prasarana dan sumber daya kesehatan
   - Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan kecenderungan peningkatan angka kesakitan pada penyakit tidak menular
   - Angka Kematian Ibu masih tinggi
   - Angka stunting masih tinggi
   - Masih adanya kematian balita
   - Rasio tenaga kesehatan belum memadai
3. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
   - Masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi baik
   - Masih terdapat kerusakan pada irigasi kabupaten
   - Belum memadainya rencana tata ruang sebagai perangkat perijinan investasi
4. **Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman**
   - Masih rendahnya cakupan akses pelayanan air minum aman, layak dan berkelanjutan.
   - Masih rendahnya cakupan akses pelayanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
   - Berkembangnya lingkungan permukiman kumuh perkotaan
   - Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni
   - Masih rendahnya fasilitas IPLT daerah
5. **Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
   - Belum optimalnya penegakan perda
   - Belum optimalnya penanganan kebakaran.
   - Peningkatan tindak pidana kriminalitas

- Belum optimalnya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu
- Meningkatnya risiko bencana
- Perlunya menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi diskriminasi melalui indeks kebebasan sipil
- Perlunya pengembangan kebijakan yang tidak diskriminatif menurut hukum HAM
- Belum adanya dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)

6. **Sosial**
   - Tingginya jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
   - Masih tingginya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
   - Hak dasar bagi penyandang disabilitas yang miskin dan rentan belum terpenuhi melalui jaminan sosial

7. **Tenaga Kerja**
   - Masih rendahnya kualitas tenaga kerja Kabupaten Banyumas
   - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih rendah.
   - Masih rendahnya kepesertaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan
   - Masih adanya pengangguran terbuka.
   - Perlunya meningkatkan kompetensi ketrampilan teknik, kejuruan, kewirausahaan bagi tenaga kerja

8. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
   - Kesetaraan gender masih kurang, ditunjukkan dengan IPG dan IDG yang masih rendah
   - Kekerasan terhadan perempuan dan anak korban kekerasan masih tinggi
   - Masih kurangnya pencapaian kabupaten layak anak.
   - Perlunya pengembangan kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan
   - Masih rendahnya proporsi keterwakilan perempuan dalam DPRD

9. **Pangan**
   - Konsumsi protein perkapita penduduk Kab. Banyumas masih dibawah standar angka kecukupan gizi nasional
   - Masih terdapat Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Banyumas
   - Masih belum optimalnya capaian pola pangan harapan.

10. **Pertanahan**
    - Masih terdapat lahan yang belum bersertifikat

11. **Lingkungan Hidup**
    - Prosentase penangangan sampah masih rendah
    - RTH perkotaan belum memenuhi syarat 30% luas wilayah perkotaan
    - Meningkatnya potensi pencemaran lingkungan
    - Masih kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
    - Menurunnya daya dukung air.

- Masih rendahnya indeks kualitas air sebagai sumber air baku
- Perlunya menurunkan tingkat pencemaran di beberapa sungai di wilayah Kabupaten Banyumas
- Perlunya peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada desa yang berada pada kategori cukup rentan.
- Perlunya penurunan Emisi GRK
- Belum adanya pengaturan dan penanganan limbah B3
- Pengurangan kerentanan terhadap perubahan iklim.
- Perlunya upaya keberlanjutan keanekaragaman hayati
- Perlunya meningkatkan kontribusi bauran energi terbarukan

12. **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
    - Persentase kepemilikan akte kelahiran belum mencapai 100%
    - Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP belum mencapai 100%
    - Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
13. **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
    - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
14. **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
    - Rata-rata jumlah anak perkeluarga masih lebih dari 2
    - Masih rendahnya cakupan masyarakat dalam Bina Keluarga Balita ber-KB
15. **Perhubungan**
    - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana lalu lintas di Kabupaten Banyumas
16. **Komunikasi dan Informatika**
    - Masih terbatasnya infrastruktur komunikasi dan informatika
17. **Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
    - Masih banyaknya koperasi yang tidak sehat
    - Masih rendahnya UMKM yang bersertifikat halal.
    - Akses permodalan bagi UMKM masih kurang
18. **Penanaman Modal**
    - Belum optimalnya investor yang menanamkan modal di Kab.Banyumas
19. **Kepemudaan dan Olahraga**
    - Belum optimalnya prestasi olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional
20. **Persandian**
    - Belum terstandarnya keamanan data dan informasi yang dimiliki oeleh Pemerintah Kabupaten Banyumas
21. **Kebudayaan**
    - Belum optimalnya pelestarian kebudayaan daerah
22. **Perpustakaan**
    - Masih rendahnya minat baca masyarakat

23. **Kearsipan**
    - Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah
    - Kurangnya tenaga arsiparis untuk menunjang pengelolaan arsip

24. **Kelautan dan Perikanan**
    - Belum optimalnya produksi perikanan.
    - Masih rendahnya produksi olahan hasil perikanan.
    - Konsumsi ikan masyarakat Banyumas masih jauh dari angka Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

25. **Pariwisata**
    - Rata-rata lama tinggal wisatawan masih rendah
    - Belum optimalnya pengembangan desa wisata.
    - Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD akibat masih kecilnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara

26. **Pertanian**
    - Produktivitas komoditas pertanian belum maksimal
    - Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
    - Penurunan luas lahan pertanian mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan
    - Daya dukung lahan untuk pangan mayoritas pada kelas rendah (86.965,08 ha atau 62,60% luas wilayah)
    - Populasi ternak besar (Sapi Potong, Kerbau, dan Sapi Perah) perkembangannya sangat lambat
    - Menurunnya populasi ayam ras potong dan ayam ras petelur

27. **Perdagangan**
    - Nilai ekspor komoditas perdagangan belum optimal
    - Belum optimalnya kualitas pasar.
    - Masih adanya lokasi PKL yang belum tertata

28. **Perindustrian**
    - Kurangnya keterampilan dan kompetensi pelaku industri kecil dan menengah dalam hal peningkatan produktivitas industri.
    - Belum optimalnya pengembangan industri kreatif
    - Perlunya meningkatkan serapan tenaga kerja lokal pada sektor industri

29. **Transmigrasi**
    - Minat masyarakat untuk bertransmigrasi rendah, dan terbatasnya kuota transmigran

30. **Administrasi Pemerintahan**
    - Belum optimalnya Indeks reformasi birokrasi

31. **Keuangan**
    - Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

- Persentase PAD terhadap pendapatan masih rendah, Rasio penerimaan pajak terhadap PAD yang perlu ditingkatkan

32. **Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
    - Belum optimalnya kompetensi pegawai
    - Masih kurangnya kompetensi aparatur sipil negara dan belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan *merrit system*.
33. **Pengawasan**
    - Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
    - Belum optimalnya Kapabilitas APIP
    - Belum semua OPD menerapkan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
34. **Perencanaan Pembangunan**
    - Belum optimalnya kualitas rencana pembangunan daerah
35. **Penelitian dan Pengembangan**
    - Kurangnya penelitian dan pengembangan guna menunjang inovasi dan pengembangan IPTEK, serta perbaikan kebijakan pembangunan daerah.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan.

Karakteristik isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang telah mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, dapat melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif, Pemerintah Daerah mampu meraih peluang-peluang penting, serta mampu mengantisipasi ancaman yang tidak dikenali.

Sumber informasi bagi perumusan isu strategis bisa diperoleh dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain), kebijakan skala regional, nasional, dan internasional yang berkorelasi atau mempengaruhi tujuan dan sasaran pembangunan. Informasi tersebut merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan data atau informasi menjadi isu strategis sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan;

2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Penentuan isu strategis pembangunan daerah dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu global, nasional, maupun regional yang teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	Isu Strategis RPJPD 2005-2025	Isu Strategis KLHS RPJMD 2018-2023
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan 11. Kota dan Permukiman 12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 13. Perubahan iklim 14. Sumberdaya kelautan 15. Ekosistem daratan 16. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 17. Kemitraan global	1. Stabilitas politik dan keamanan 2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien 3. Pemberantasan korupsi 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Percepatan pemerataan dan keadilan 6. Keberlanjutan pembangunan 7. Peningkatan kualitas SDM 8. Kesenjangan antar wilayah 9. Percepatan pembangunan kelautan	1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam 5. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	1. Sosial budaya dan kehidupan beragama 2. Ekonomi 3. Sarana dan prasarana 4. Tata pemerintahan, politik dan hukum 5. Ketertiban dan keamanan 6. Pertanahan dan penataan ruang 7. Sumber daya air dan lingkungan hidup 8. Ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Kemiskinan 2. Akses terhadap infrastruktur permukiman (air minum dan sanitasi), perumahan, dan energi 3. Pendidikan 4. Kesehatan 5. Kualitas SDM 6. Ketahanan pangan 7. Kesetaraan gender dan jaminan sosial 8. Pengangguran 9. Akses penduduk terhadap teknologi dan informasi 10. Tata kelola pemerintahan 11. Rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan 12. Resiko bencana dan keretanan terhadap perubahan iklim 13. Penurunan lahan pertanian mengancam produksi pangan pokok dan daya dukung pangan 14. Penurunan daya dukung lingkungan

Isu strategis nasional merupakan gambaran makro dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam lingkup kabupaten apa yang menjadi isu nasional belum tentu menjadi isu daerah dikarenakan kondisi dan potensi wilayah yang berbeda-beda, seperti isu percepatan pembangunan kelautan yang tidak relevan dengn kondisi wilayah Kabupaten Banyumas yang tidak memiliki laut. Isu startegis nasional lainnya yang tidak menjadi isu strategis daerah adalah isu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian tidak semua isu strategis nasional memiliki keterkaitan dengan isu strategis daerah.

Dengan mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan daerah isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Banyumas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan. Pentingnya pembangunan manusia untuk peningkatan sumber daya manusia telah menjadi kesadaran bersama karena dengan persaingan yang semakin terbuka hanya sumber daya manusia yang kualitas yang bisa bersaing.

Peluang bonus demografi hanya bisa diraih dengan peningkatan sumber daya manusia, banyaknya penduduk usia produktif yang berkualitas akan mampu bersaing dan mandiri, serta mampu bekerja dan menabung untuk meningkatkan investasi. Sebaliknya meningkatnya usia produktif namun tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia hanya akan menjadi beban dan melahirkan lingkaran kemiskinan berikutnya.

Kualitas sumber daya manusia akan menentukan masa depan masyarakat dan Kabupaten Banyumas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi syarat utama untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, sehingga hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat berkelanjutan.

2. Ketersediaan Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur akan mendorong pengembangan wilayah dengan meningkatkan produktivitas wilayah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan masyarakat, membuka peluang bagi pengembangan potensi wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto–Kroya, reaktivasi jalur kereta api antara Purwokerto Wonosobo; dan rencana pembangunan Jalan Tol Pejagan–Pemalang, serta rencana pengembangan Bandara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga akan mempermudah akses ke wilayah Kabupaten Banyumas. Hal ini akan membuka peluang bagi pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluang tersebut hanya bisa diraih jika pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyumas terhubung dengan proyek strategis tersebut.

Kualitas infrastruktur irigasi di Kabupaten Banyumas terus mengalami peningkatan. Namun demikian kinerjanya perlu dioptimalkan untuk mencukupi kebutuhan air untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama produksi padi sebagai sumber pangan utama. Sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional yang menentukan kedaulatan negara dan bangsa.

. Penyediaan infrastruktur dasar air minum, sanitasi, dan perumahan merupakan pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi penduduk di

wilayahnya. Cakupan pelayanan infrastruktur dasar di Kabupaten Banyumas belum menjangkau seluruh penduduk. Untuk itu diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna memberikan akses menyeluruh air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni bagi peduduk Kabupaten Banyumas. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar menjadi semakin penting karena merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Pengembangan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Kabupaten Banyumas memiliki berbagai potensi daerah yang dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa sumber daya alam, penduduk sebagai sumber tenaga kerja, sumber daya buatan yang berupa sarana dan prasarana fisik, maupun sumber daya sosial yang berupa kelembagaan dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Pengembangan seluruh potensi atau sumber daya tersebut dapat menciptakan berbagai peluang usaha untuk dapat meningkatkan laju perekonomian masyarakat, dan diharapkan akan menimbulkan dampak ikutan (*multiplier effect*) yang luas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mampu mengindentifikasi seluruh potensinya dalam upaya untuk mengembangkannya secara optimal, terarah, terencana dan berkelanjutan agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah akan menyebakan ketergantungan Pemerintah Kabupaten Banyumas kepada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan daerah karena keterbatasan pendapatan daerah, lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan berbagai permasalahan lainnya.

4. Kemiskinan dan Pengangguran

Angka kemiskinan Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Pada Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Banyumas adalah 17,52%. Sedangkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tegah sebesar 13,58%, dan angka kemiskinan Nasional sebesar 11,22%. Permasalahan kemiskinan tidak lepas dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Dari sisi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, dapat dijelaskan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Banyumas kurun waktu 2012-2013 menunjukkan trend menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 3,42 menjadi 3,24. Sedangkan Indeks Keparahan Kemisinan (P2) turun dari 0,91 menjadi 0,83. Menurunnya angka P1 dan P2 ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin kecil.

Kemiskinan merupakan akar berbagai permasalahan pembangunan. tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu permasalahan yang disebabkan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan perlu terus dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring

kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

5. Produktivitas Pertanian

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Banyumas belum mampu meningkat secara signifikan, salah satu penyebabnya adalah ketersediaan, penggunaan dan keterjangkauan sarana pendukung oleh petani belum optimal. Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu terus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis, dengan dukungan kebijakan dan ketersediaan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang lengkap.

Hasil analisis KLHS menunjukan bahwa daya dukung pangan utama (padi) di Kabupaten Banyumas masih cukup baik. Namun pemerintah perlu melihat adanya tantangan penurunan produktivitas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian. Di sisi lain berdasarkan analisis KLHS jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Banyumas sebagian besar pada kelas rendah. Jasa ekosistem penyedia pangan tersebut meliputi bahan pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan, serta hasil peternakan Selain faktor lahan pemerintah juga perlu memperhatikan pemeliharan infrastruktur sebagai faktor yang mendukung produksi pertaian, akses dan distribusi sarana produksi pertanian serta pemasaran.

Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan mampu menjadi pelopor kedaulatan Kedaulatan Pangan, yaitu secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Kemandirian pangan dan Ketahanan Pangan menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan. Kedaulata pangan hanya bisa dicapai jika prodktivitas pertanian dapat dioptimalkan.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan isu utama dalam pembangunan berkelanjutan, meskipun dimensi pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait lingkungan, sebagaimana 4 pilar tujuan pembangunan berkelajutan yang meliputi pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan dan hukum dan tata kelola. Hal ini menggambarkan bahwa keberlanjutan pembangunan bahkan keberlanjutan hidup manusia bergantung pada keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 daya dukung lingkungan di Kabupaten Banyumas dalam kategori sedang menuju baik meliputi daya dukung pangan, daya dukung fungsi lindung dan daya dukung lahan terbangun dengan beberapa pengecualian di Kecamatan Purwokerto Timur. Daya dukung air di Kabupaten Banyumas cenderung menurun dengan perkembangan penduduk dan pengembangan wilayah telah mengakibatkan penurunan daya dukung air, sehingga tanpa upaya tambahan untuk mempertahankan daya dukung air bagi kehidupan Kabupaten Banyumas diproyeksikan mengalami defisit air pada tahun 2030.

Sementara itu kinerja layanan atau jasa ekosistem di Kabupaten Banyumas menunjukan bahwa mayoritas luasan jasa ekosistem penyedia bahan pangan, jasa ekosistem pengaturan tata air dan banjir, dan jasa ekosistem perlindungan pencegahan bencana berada pada kelas rendah. Perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatannya akan meningkatkan timbulan sampah dan emisi GRK yang mencemari lingkungan.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus memperhatikan daya dukung lingkungan.

Proses produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia juga harus diupayakan agar meminimalkan emisi GRK dan limbah, bahkan jika memungkinkan dilakukan sistem produksi terpadu tanpa limbah *(Zero waste).* Sementara pengelolaan sampah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia diupayakan terus dikurangi mulai dari sumbernya.

7. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di suatu daerah. Tanpa tata kelola yang baik, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan komitmen bersama mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan staf yang paling rendah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping komitmen, kualitas sumber daya aparatur juga memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga mampu memanfaatkan kemajuan di bidang tekhnologi khususnya tekhnologi informasi serta mampu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) juga menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun demikian infrastruktur pendukung penerapan e-government tersebut sampai saat ini belum optimal.

Tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal dengan penggunaan anggaran yang makin efektif dan efisien pembangunan dan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan infrastruktur daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah berkaitan dengan pemekaran wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJP Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025. Pemekaran wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai arah kebijakan pembangunan pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 khususnya periode RPJMD ketiga yang mengamanatkan untuk dilakukan pengusulan pembentukan Kota Purwokerto, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan melakukan beberapa upaya agar dapat memenuhi persyaratan baik secara admninitrasi maupun secara teknis untuk pengusulan pembentukan Kota Purwokerto.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.6. Visi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu

"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. **Maju**

   Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatian keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

2. **Adil-Makmur**

   Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

3. **Mandiri**

   Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Misi

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. **Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik**

   Misi ini merupakan pelaksanaan dari hasta krida pertama yaitu Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah untuk mewujudkan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall pelayanan publik; dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. **Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan**

   Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida kedua yaitu pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan 92 paket beasiswa, program wajib belajar, peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, dan program 1 desa 3 sarjana. Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**

   Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida ketiga yaitu pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton, dan penerapan safety belt penderes, durian, dll. Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. **Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

   Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida keempat yaitu Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan untuk mewujudkan produksi padi 500.000 ton/tahun. Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. **Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

   Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida kelima yaitu Memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, menciptakan 3.000 enterpreneur muda, investasi berbasis padat karya, dan membangun kawasan industri. Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan**

   Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida keenam yaitu pembangunan infrastruktur merata dan memadai untuk mewujudkan peningkatan anggaran irigasi, peningkatan jalan hotmix 570 km, dan membangun pasar desa. Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.
7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal**

   Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida ketujuh yaitu menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM. Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
8. **Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.**

   Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida kedelapan yaitu gerakan memakmurkan pesantren dan masjid untuk mewujudkan bantuan untuk Marbot masjid, KBS untuk santri pesantren, serta KBS, KBP dan tunjangan makan untuk yatim piatu. Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.7. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mengarahkan pencapaian visi Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, maka berdasarkan misi yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1
Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.	SKPD
1	Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi													
				Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN		82.80	82.79	83.1	83.4	83.6	83.6	83.7	83.7	Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN.	BKDD
															Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN.	BKDD
															Program Pengembangan Kompetensi ASN.	BKDD
															Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN.	BKDD
				Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah	Indeks Persepsi Korupsi		NA	3.38	3.45	3.50	3.55	3.65	3.75	3.75	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah.	INSPEKTORAT
				Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		70.95	60.22	72	74	76	78	80	80	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan.	BAPPEDA LITBANG
															Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan.	Semua Kecamatan
															Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa.	DINSOSPERMASDES
															Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.	DINARPUSDA
															Program Informasi dan Layanan Hukum.	SETDA
															Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi.	BAPPEDA LITBANG
															Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian.	SETDA
															Program Sosial Keagamaan.	SETDA
															Program Layanan Pimpinan dan	SETWAN
															Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	SETDA
															Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah.	BAPPEDA LITBANG
															Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah .	BAPPEDA LITBANG
															Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial.	BAPPEDA LITBANG
															Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah.	SETDA
															Program Peningkatan Pelayanan	SETDA
															Program Pelayanan Keprotokolan.	SETDA
															Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	SETDA
															Program Peningkatan Pendapatan Daerah.	BKD
															Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.	BKD

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.	SKPD
															Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	SETDA
															Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa.	SETDA
															Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	SETDA
															Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan .	SETDA
															Program Fasilitasi Persidangan dan Fungsi Penyusunan Produk Hukum.	SETWAN
															Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD.	SETWAN
															Program Peningkatan Fasilitasi Produk Hukum.	SETWAN
															Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat.	SETWAN
															Program Kesra.	SETDA
															Program Fasilitasi Aspirasi.	SETWAN
															Program Peningkatan Fasilitasi Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD.	SETWAN
															Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	BAPPEDA LITBANG
															Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan.	SETDA
															Program Pembinaan Keagamaan.	SETDA
					Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah.	BKD
															Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah.	BKD
															Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keuangan Daerah.	BKD
															Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah.	BKD
															Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran.	BKD
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2.63	NA	2.80	2.90	3.20	3.30	3.50	3.50	Program Peningkatan Keamanan Informasi.	DINKOMINFO
															Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.	DINKOMINFO
															Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik.	DINKOMINFO
															Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika.	DINKOMINFO
															Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.	DINKOMINFO
															Program Pengembangan E Government.	DINKOMINFO
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Mal Pelayanan		NA	NA	79	80	81	82	83	83	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.	DPMPPTSP

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.	SKPD
					Publik=MPP)										Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil.	DINDUKCAPIL
															Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan.	DINDUKCAPIL
															Program Pengelolaan Informasi Adminduk.	DINDUKCAPIL
															Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan.	DINDUKCAPIL
															Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan.	DPMPPTSP
2	Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)													
				Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.45	7.40	7.50	7.55	7.60	7.65	7.70	7.70	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.	DINDIK
					Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.78	12.63	12.93	13.08	13.23	13.38	13.53	13.53	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat.	DINDIK
															Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.	DINDIK
															Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	DINDIK
															Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat.	DINDIK
															Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan.	DINDIK
															Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan.	DINARPUSDA
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.43	73.33	73.53	73.63	73.73	73.83	73.93	73.93	Program Pelayanan Kesehatan.	DINKES
															Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit .	DINKES
															Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata.	DINKES
															Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.	DINKES
															Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD.	RSUD AJIBARANG
															Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan.	DINKES
															Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya.	DINKES
															Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.	DINKES
					Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup		67.87	54.16	67.80	67.50	67.25	67.00	66.50	66.50	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.	DINKES
															Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	DINKES
															Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat.	DINKES

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.	SKPD
					Prevalensi Gizi Buruk	%	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata.	RSUD BANYUMAS
															Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD.	RSUD BANYUMAS
															Program Perbaikan Gizi Masyarakat.	DINKES
															Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat.	DINKES
		Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan	Persentase penduduk miskin													
				Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase penurunan penduduk miskin	%	3.55	0.4	0.99	0.98	0.99	0.99	0.99	4.94	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil.	DINSOSPERMASDES
															Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial.	DINSOSPERMASDES
															Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	DINSOSPERMASDES
				Meningkatnya penanganan bencana	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	%	25.0	NA	40.0	42.3	50.0	60.0	66.7	66.7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.	BPBD
															Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.	BPBD
			Indeks Gini													
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		NA	67.32	67.45	67.50	67.55	67.57	67.60	67.60	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender .	DPPKBP3A
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)		NA	87.62	87.63	87.64	87.65	87.66	87.67	87.67	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	DPPKBP3A
					Nilai Kabupaten Layak Anak		514	426	550	600	650	700	750	750	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.	DPPKBP3A
			Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)													
				Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indeks Desa Membangun		0.663	0.660	0.668	0.674	0.681	0.688	0.694	0.694	Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa .	DINSOSPERMASDES
															Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.	DINSOSPERMASDES
															Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.	DINSOSPERMASDES
															Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.	DINSOSPERMASDES
															Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	DINSOSPERMASDES
															Program Peningkatan Partisispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.	DINSOSPERMASDES
			PDRB per kapita													
				Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	NA	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82	Program Pelayanan Keluarga Berencana.	DPPKBP3A
															Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB.	DPPKBP3A
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan	Persentase Pertumbuhan PDRB													
				Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri	%	5.80	5.78	5.81	5.82	5.83	5.85	5.86	5.86	Penataan Struktur Industri.	DINPERINDAG

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.	SKPD
	berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian		pengolahan, perdagangan dan jasa	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor	%	4.45	4.44	4.47	4.48	4.49	4.51	4.52	4.52	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur .	DINPERINDAG
															Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I.	DINPERINDAG
															Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.	DINPERINDAG
															Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat.	DINPERINDAG
															Program Penigkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan.	DINPERINDAG
															Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II.	DINPERINDAG
															Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian.	DINPERINDAG
															Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.	DINPERINDAG
			Nilai Tukar Petani (NTP)													
				Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	%	3.28	3.17	3.36	3.58	3.72	3.85	4.03	4.03	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan.	DINKANNAK
															Program Pengembangan Budidaya Perikanan.	DINKANNAK
															Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian.	DINPERTAN KP
															Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar.	DINKANNAK
															Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.	DINKANNAK
															Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.	DINKANNAK
															Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian.	DINPERTAN KP
															Program Penyediaan Benih Pertanian.	DINPERTAN KP
															Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.	DINPERTAN KP
															Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan.	DINKANNAK
															Prpgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan.	DINKANNAK
															Program Penyediaan Daging Ternak ASUH.	DINKANNAK
															Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.	DINKANNAK
															Program Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kelembagaan Petani.	DINPERTAN KP
															Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.	DINPERTAN KP
															Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan.	DINPERTAN KP

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.	SKPD
															Program Perlindungan Tanaman.	DINPERTAN KP
															Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian.	DINPERTAN KP
															Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT.	DINKANNAK
															Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.	DINKANNAK
4	Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	Indeks Ketahanan Pangan													
				Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	94	90	94	95	96	96	97	97	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan.	DINPERTAN KP
					Persentase Penguatan cadangan pangan	%	NA	70	75	80	82	84	86	86	Program Penguatan Cadangan Pangan.	DINPERTAN KP
5	Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah													
				Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya	Nilai investasi di kawasan industri	Milyar Rupiah	NA	NA	0	0	0	100	100	200	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	DPMPPTSP
															Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.	DPMPPTSP
															Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	DPMPPTSP
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)													
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	99.980	99.979	99.981	99.982	99.983	99.984	99.985	99.985	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	DINPERKIM
															Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.	DINPERKIM
					Indeks Kualitas Air (IKA)		34.67	46.94	54.20	54.40	54.60	54.80	55.00	55.00	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas.	DLH
															Program Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan .	DLH
															Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpiuh.	DLH
															Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wanggon.	DLH
															Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto.	DLH
															Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup.	DLH
															Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	DLH
															Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA / TPST.	DLH
															Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.	DLH
															Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.	DLH
															Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	DLH
															Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran.	DLH

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.	SKPD
															Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	DLH
															Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajibarang.	DLH
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	70.88	NA	79.86	80.01	82.25	82.41	82.56	82.56	Program Pengembangan Kawasan Permukiman.	DINPERKIM
															Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	DPU
															Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan.	DPU
															Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan.	DINPERKIM
															Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan.	DPU
															Program Peningkatan Perencanaan Teknis .	DPU
															Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.	DPU
															Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung.	DPU
															Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan.	DPU
															Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	DPU
															Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan.	DPU
															Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan.	DPU
															Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.	DPU
															Program Pembinaan Jasa Konstruksi.	DPU
															Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong.	DPU
															Program Pengembangan dan Pengelolaan Drainase.	DPU
															Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.	DINHUB
															Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.	DINHUB
															Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.	DINHUB
															Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan.	DINHUB
															Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	DINHUB
															Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan.	DPU

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir	Program.	SKPD
															Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.	DINHUB
															Program Pengembangan Perumahan.	DINPERKIM
															Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.	DINPERKIM
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	Persentase pertumbuhan desa wisata	%	35.71	NA	57.14	64.29	78.57	85.71	100.00	100.00	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.	DINPORABUDPAR
															Program Pengelolaan Lokawisata Baturaden.	DINPORABUDPAR
															Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.	DINPORABUDPAR
			Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK	Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM	%	1.05	0.34	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	DINAKERKOP UKP
															Program Kajian Strategis Daerah.	BAPPEDA LITBANG
															Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.	DINAKERKOP UKP
															Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.	DINAKERKOP UKP
															Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.	DINPERINDAG
															Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.	DINPORABUDPAR
															Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.	DINPERINDAG
															Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.	DINAKERKOP UKP
															Program Pengembangan Sistem Inovasi, Kreativitas dan Litbang .	BAPPEDA LITBANG
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya kesempatan berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65.70	65.19	66.09	66.49	66.89	67.30	67.71	67.71	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.	DINAKERKOP UKP
															Program Peningkatan Kesempatan kerja.	DINAKERKOP UKP
															Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.	DINAKERKOP UKP
															Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.	DINAKERKOP UKP
															Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	DINAKERKOP UKP
															Program Pengembangan dan Penempatan Transmigrasi.	DINAKERKOP UKP
8	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam	Persentase penurunan konflik sosial	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran	Persentase penurunan konflik sosial	%	78	NA	64	56	44	33	21	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan.	DINPORABUDPAR

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1.6 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rumusan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Rumusan Strategi dan Keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
Misi 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat				
1	Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik	**1**	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	• Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan. • Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi.
		2	**Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah**	• Meningkatkan sistem pengendalian kebijakan daerah, pengawasan, dan pencegahan KKN di lingkungan pemerintah
		3	**Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan**	• Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada sub komponen: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan upaya pemekaran wilayah • Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan pelibatan aktif masyarakat dan tenaga ahli dalam proses perencanaan dan penganggaran. • Meningkatkan kualitas, sinergitas dan keterpaduan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah menggunakan e-planning dan e-budgeting.
				• Meningkatkan kualitas SDM pengelola kearsipan, dan mendorong seluruh perangkat daerah dalam pengelolaan arsip secara baku dengan menyediakan SDM terlatih dan sarana dan prasarana kearsipan yang memadai. • Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam hal perencanaan, pertanggungjawaban maupun pelaporan. • Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis elektronik terpadu	• Meningkatkan penerapan standar pelayanan, dan meningkatkan kompetensi petugas dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perijinan. • Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan secara terpadu, dan dengan penerapan standar pelayanan • Mengembangan sistem jaringan komunikasi dan informatika • Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi government
Misi 2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan				
1	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	**1**	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	• Mendorong partisipasi seluruh anak usia sekolah untuk bersekolah dengan penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu dan optimalisasi pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah. • Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar sesuai standar nasional. • Meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar dengan mendorong akreditasi sekolah • Meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan sesuai kebutuhan, terutama ruang kelas, perpustakaan, laboratorium. • Memberikan bantuan pendidikan untuk penyelesaian program sarjana • Meningkatkan promosi minat baca dan peningkatan layanan perpustakaan dengan pemenuhan standar nasional.
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	• Meningkatkan status gizi masyarakat serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular • Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, meningkatkan kompetensi petugas kesehatan, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.
2	**Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan**	**1**	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran responsif gender dan anak. • Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan standar
		2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat miskin	• Meningkatkan perlindungan bagi penduduk miskin, dan mendorong penumbuhan usaha ekonomi produktif penduduk miskin.
			melalui pemberdayaan masyarakat dan desa	• Meningkatkan pengembangan kewirausahaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial non produktif
		3	Meningkatnya penanganan bencana	• Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.
		4	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	• Mengoptimalkan kualitas pelayanan dan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.
Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan				

Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	**1**	Meningkatnya produksi pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan perlindungan kepada petani	• Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, dan penerapan teknologi budidaya pertanian, • Meningkatkan penyediaan sarana produksi budidaya, optimalisasi pembenihan ikan, serta meningkatkan keterampilan pembudidaya ikan dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) komoditas unggulan perikanan • Meningkatkan penyediaan sarana produksi, pengendalian OPT, penerapan teknologi budidaya pertanian komoditas unggulan pertanian • Mengembangkan usaha agribisnis hasil pertanian dan hasil peternakan agar memiliki nilai tambah ekonomi. • Meningkatkan pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, dan pembinaan terhadap petani penderes agar menerapkan standar keselamatan. • Meningkatkan jumlah pelaku ekspor gula kelapa • Meningkatkan kualitas dan jumlah produk gula kelapa sesuai standar ekspor • Meningkatkan keselamatan petani penderes dengan *safety belt*
		2	Meningkatnya pertumbuhan industri pengolahan, perdagangan dan jasa	• Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk • Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama perdagangan. • Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Misi 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan				
1	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis	1	Meningkatnya inovasi produk dan tata kelola hasil tanaman pangan dan agrobisnis untuk ketersediaan pangan utama	• Meningkatkan produksi padi dengan penyediaan saprodi, penggunaan teknologi pertanian, dan pembinaan kelompok tani secara berkelanjutan. • Mendorong sinergi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dalam penyediaan bahan pangan.
				• Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga/pelaku usaha distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok. • Meningkatkan penganekaragaman pangan dengan memanfaatkan lahan untuk penyediaan bahan pangan lokal. • Meningkatkan dan mengoptimalkan jaringan irigasi serta penerapan teknologi tepat guna sektor pertanian • Memfasilitasi penyediaan lumbung pangan dan jalan usaha tani • Membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian
Misi 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan				
1	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja	1	Pembangunan kawasan industri dengan meningkatkan investasi padat karya	• Mengembangkan kawasan peruntukan industri Meningkatkan minat investasi dengan mendorong pemenuhan infrastruktur penunjang investasi, khususnya kawasan industri • Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi. • Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK), dan menjalin kemitraan dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK).

Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
		2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan	• Meningkatkan penyediaan rencana tata ruang berupa RDTR dan RTBL serta mengintensifkan pengendalian dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana peruntukannya. • Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kawasan peruntukan industry dan kawasan industri • Mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup • Mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau
Misi 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan				
1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	• Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan kegiatan ekonomi masyarakat • Mengembangkan sistem jaringan air limbah dan drainase • Meningkatkan penanganan sampah perkotaan dan pedesaan terpadu • Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan sesuai fungsi jalan • Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah dengan membangun terminal penumpang • Meningkatkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air • Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan serta penataan saluran drainase, revitalisasi jaringan irigasi dan embung. • Membangun pusat kantor pemerintahan terpadu • Meningkatkan penataan lingkungan permukiman kumuh, dan penyediaan sarana sanitasi dan air minum. • Meningkatkan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga kurang mampu • Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM dan manajemen transportasi umum yang terintegrasi. • Meningkatkan dukungan pembiayaan infrastruktur jalan dan irigasi dari dana di luar APBD kabupaten • Melakukan penyusunan regulasi untuk pembiyaan infrastruktur melalui anggaran desa
Misi 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal				
1	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.	**1**	Meningkatnya Industri Pariwisata yang terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	• Mengembangkan destinasi wisata yang memiliki keunikan/kekhasan, memberdayakan pelaku jasa wisata profesional dalam pengembangan paket wisata, dan memberdayakan kelompok sadar wisata. • Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata. • Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mendorong pengembangan industri kreatif pada usaha yang pertumbuhannya masih rendah • Menumbuhkembangkan usaha kreatif pemula (start up), dan mendorong pemasaran produk ekonomi kreatif di tingkat nasional maupun global

Misi / Tujuan		Sasaran		Strategi
				• Meningkatkan kuantitas dan kapabilitas kelompok sadar wisata desa • Mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
		2	Meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM melalui pemanfaatan IPTEK	• Mengembangkan ketrampilan pelaku UMKM, IKM, koperasi dan pengembangan pasar desa dan usaha ekonomi perdesaan berbasis potensi sumberdaya lokal • Meningkatkan promosi, jumlah pelatihan, akses permodalan, dan akses pemasaran untuk wirausaha muda. • Meningkatkan sinergi dan kerjasama antara lembaga perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan industri dan UMKM • Melakukan penyusunan rencana induk kelitbangan (RIK)
Misi 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius				
1	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	1	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara	• Mewujudkan Gerakan Memakmurkan Pesantren, Masjid serta tempat-tempat ibadah lainnya dengan memberikan bantuan untuk marbot masjid dan penjaga tempat ibadah lainnya serta layanan kesehatan untuk santri pesantren • Meningkatkan pemberian bantuan layanan kesehatan dan pendidikan, tunjangan makan untuk anak yatim/yatim piatu dan berkebutuhan khusus/Difabel
				• Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. • Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat • Meningkatkan penegakan Perda/ Perbup dengan mengoptimalkan pelaksanaan patroli dan operasi yustisi dengan melibatkan lembaga terkait. • Meningkatkan pembinaan organisasi pemuda dan pengembangan prestasi dan karakter pemuda. • Meningkatkan prestasi olahraga dengan meningkatkan kompetensi pelatih dan pembinaan atlet, serta membudayakan olahraga pada masyarakat
		2	Meningkatnya kelestarian kebudayaan daerah	• Melestarikan seni dan budaya dengan memfasilitasi aktualitasi nilai adat dan tradisi masyarakat, serta memfasilitasi pementasan seni budaya. • Meningkatkan pelestarian/revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya.

1.7Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2019 hingga

tahun 2023. Pada masing-masing tema/fokus disusun prioritas pembangunan yang akan ditangani.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
Tema: Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, serta Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Tema: Pengembagan Usaha Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal, dan Penguatan Kemandirian Pangan	Tema: Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Tema: Penguatan Daya Saing Menuju Daerah yang Maju dan Mandiri	Tema: Perwujudan Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Adil-Makmur
1. Penataan birokrasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan pemerintah daerah yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat. 2. Peningkatan akses, kualitas anak didik, pendidik dan tenaga pendidikan, serta peningkatan kualitas sarpras pendidikan pada disemua jenjang pendidikan formal dan non formal. 3. Peningkatan derajat kesehatan dengan fokus pada penurunan angka kematian dan angka kesakitan, peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan, dan peningkatan upaya paradigma sehat	1. Pembangunan kawasan industri berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan nilai investasi daerah 2. Pengembangan kapasitas koperasi, UMKM, IKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan berbasis potensi sumberdaya lokal. 3. Peningkatan tenaga kerja terampil, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja. 4. Pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan. 5. Peningkatan pengembangan industri pengolahan, usaha perdagangan dan jasa. 6. Peningkatan kemandirian, mutu dan keamanan pangan.	1. Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan sarana prasarana pemerintahan terpadu 2. Penanganan lingkungan permukiman kumuh, dan pemenuhan akses air bersih, dan sanitasi. 3. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, telekomunikasi dan informatika. 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 5. Pengembangan model dan optimalisasi program-program penanggulangan kemiskinan 6. Pengembangan desa wisata dan desa mandiri pangan	1. Pengembangan smart goverment dalam perbaikan kualitas pelayanan publik 2. Pengembangan smart economy dengan menguatkan pemanfaatan teknologi pada usaha ekonomi kreatif dan usaha ekonomi produktif di sektor perdagangan, industri, UMKM, pariwisata. 3. Pengembangan smart living dengan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lingkungan, transportasi, pemadam kebakaran dan penanganan bencana. 4. Penguatan smart people dengan peningkatan kompetensi SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi. 5. Pemantapan infrastruktur dasar dan penunjang untuk menunjang investasi.	1. Optimalisasi program pengentasan kemiskinan berbasis sumberdaya lokal. 2. Optimalisasi peran litbang dan inovasi dalam pengembangan produk unggulan daerah, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. 3. Pemerataan pembangunan antara wilayah, baik infrastruktur dasar maupun penunjang. 4. Optimalisasi perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan dan anak. 5. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat baik sektor pertanian maupun sektor non pertanian. 6. Penguatan upaya memakmurkan pondok pesantren, masjid dan rumah ibadah lainnya.

1Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Banyumas disusun dengan mendasarkan pada program unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas Periode 2018-2023. Secara ringkas daftar program pembangunan daerah yang akan mendukung masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3
Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati dan Program Pembangunan Daerah

Misi	Penjabaran Hasta Krida	Rincian Penjabaran Hasta Krida	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas
9. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik	1. Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah	• Pengembangan Lapak Publik Untuk mendukung Mall Pelayanan Publik	➢ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah ➢ Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ➢ Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan	10. Pendidikan dan Kesehatan	• Mewujudkan 92 Paket Beasiswa • Program Wajib Belajar • Program 1 Desa 1 Sarjana • Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan	➢ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat, ➢ Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat ➢ Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan ➢ Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

Misi	Penjabaran Hasta Krida	Rincian Penjabaran Hasta Krida	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas
11. Meningakatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	3. Pengembangan Agrobisnis Unggulan	• Peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton • Penerapan teknologi safety belt penderes, durian dll	➢ Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri ➢ Program Pengembangan Produksi Tanaman Perkebunan
12. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan	4. Banyumas Pelopor Kedaulatan Pangan	• Produksi padi 500.000 ton/tahun	➢ Program Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
13. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan	5. Memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja	• Menciptakan 3.000 enterprener muda • Investasi berbasis padat karya • Membangun kawasan industri	➢ Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ➢ Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ➢ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi ➢ Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah ➢ Program Peningkatan Investasi di Kawasan Industri ➢ Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ➢ Program Peningkatan Kesempatan kerja.
14. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai	6. Pembangunan Infrastruktur merata dan memadai	• Peningkatan anggaran irigasi • Peningkatan jalan hotmix 570 km	➢ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Misi	Penjabaran Hasta Krida	Rincian Penjabaran Hasta Krida	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Banyumas
sebagai daya ungkit pembangunan			➢ Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan
15. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal	7. Menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif	• Pengembangan desa wisata • Pengembangan UMKM • Membangun pasar desa	➢ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ➢ Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan ➢ Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ➢ Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ➢ Program Pengembangan Sistem Inovasi dan Kreativitas
16. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.	8. Gerakan memakmurkan pesantren dan masjid	• Bantuan untuk marbot masjid • KBS untuk santri pesantren • KBS, KBP dan tunjangan makan untuk yatim piatu	➢ Program Sosial Keagamaan ➢ Program Pembinaan Keagamaan ➢ Program Pelayanan, Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dicantumkan seluruh program baik yang bersifat strategis maupun operasional dan kinerjanya menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target kinerja. Program strategis (Program pembangunan daerah) menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan, sedangkan program operasional murni menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Seluruh program yang tercantuk akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penganggaran program perangkat daerah memperhatikan kerangka pendanaan pembangunan, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2023

No.	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.	**BELANJA DAERAH**	**3.500.652.000.000,00**	**3.945.645.264.240,60**	**4.132.646.692.616,54**	**4.320.496.283.154,78**	**4.509.227.962.341,82**
2.1.	**Belanja Tidak Langsung**	**2.100.393.000.000,00**	**2.189.811.703.554,09**	**2.319.371.210.136,04**	**2.449.144.418.717,98**	**2.579.141.714.879,93**
	Belanja Pegawai	1.486.114.000.000,00	1.767.819.880.852,21	1.890.883.082.280,37	2.013.946.283.708,52	2.137.009.485.136,68
	Belanja Hibah	70.000.000.000,00	73.500.000.000,00	77.175.000.000,00	81.033.750.000,00	85.085.437.500,00
	Belanja Bantuan Sosial	18.000.000.000,00	18.720.000.000,00	19.468.800.000,00	20.247.552.000,00	21.057.454.080,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.279.000.000,00	25.240.170.401,28	26.997.213.756,10	28.754.257.110,92	30.511.300.465,74
	Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000.000,00	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.531.652.300,60	4.847.114.099,57	5.162.575.898,54	5.478.037.697,52
2.2.	**Belanja Langsung**	**1.400.259.000.000,00**	**1.755.833.560.686,50**	**1.813.275.482.480,50**	**1.871.351.864.436,80**	**1.930.086.247.461,88**
	Belanja Pegawai	10.500.000.000,00	11.895.587.289,08	12.723.674.511,38	13.551.761.733,68	14.379.848.955,98
	Belanja Barang dan Jasa	835.740.000.000,00	981.418.947.884,36	1.038.032.019.937,03	1.095.279.552.151,24	1.145.145.504.850,08
	Belanja Modal	554.019.000.000,00	762.519.025.513,07	762.519.788.032,09	762.520.550.551,88	770.560.893.655,82

Berdasarkan kerangka pendanaan diatas, selanjutnya dijabarkan program prioritas masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.2.

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Banyumas

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode	
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023					
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			-18	-19
			DINAS PENDIDIKAN																		
1	1	0	**Pendidikan**						91,875,000,000		123,250,000,000		127,538,000,000		131,606,500,000		135,091,000,000				609,360,500,000
1	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2,320,000,000		2,907,000,000		3,000,000,000		3,096,000,000		3,193,000,000				14,516,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			100	0
1	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						725,000,000		908,000,000		938,000,000		967,500,000		998,000,000				4,536,500,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			100	0
1	1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat						8,000,000,000		10,250,000,000		10,500,000,000		10,750,000,000		11,000,000,000				50,500,000,000
				APK PAUD/RA/ Sederajat	%			77.50	0	77.75	0	78.00	0	78.25	0	78.50	0			78.50	0
				Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	%			16.00	0	18.00	0	20.00	0	23.00	0	25.00	0			25.00	0
				Rasio Guru terhadap murid PAUD				19.03	0	18.00	0	17.00	0	16.00	0	15.00	0			15.00	0
				Rasio guru terhadap murid SD				23.50	0	23.20	0	22.80	0	22.40	0	22.00	0			22.00	0
				Rasio guru terhadap murid SMP				32.40	0	32.30	0	32.20	0	32.10	0	32.00	0			32.00	0
				Persentase siswa PAUD yang mendapat 6 enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap semester	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			100	0
				Persentase siswa PAUD yang mendapat 1 (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru tiap semester	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			100	0
				Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			100	0
				Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0			100	0
1	1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Dasar dan Sederajat						30,000,000,000		44,000,000,000		46,000,000,000		48,000,000,000		50,000,000,000				218,000,000,000
				APK SD/MI/Paket A	%			103.59	0	103.59	0	103.59	0	103.59	0	103.00	0			103.00	0
				APM SD/MI/paket A	%			93.50	0	93.60	0	93.70	0	93.75	0	93.80	0			93.80	0
				Angka Kelulusan (AL) SD / MI / Paket A	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0			100.00	0
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/ Paket B	%			104.48	0	104.48	0	104.48	0	104.48	0	104.48	0			104.48	0
				Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A	%			0.0008	0	0.0006	0	0.0005	0	0.0003	0	0.0003	0			0.0003	0
				Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%			86.00	0	86.50	0	87.00	0	87.50	0	88.00	0			88.00	0
				Angka rata-rata Nilai UASBN SD	%			70.00	0	72.00	0	74.00	0	76.00	0	78.00	0			78.00	0
				Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0			100.00	0
				Prosentase peningkatan Siswa SD Berprestasi	%			10	0	9	0	8	0	8	0	7	0			67	0
				Prosentase peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi	%			14	0	13	0	11	0	10	0	9	0			100	0
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD					0		0		0		0		0				0
				Rasio Guru terhadap murid SD					0		0		0		0		0				0
				Persentase penerima beasiswa SD (akademis dan non akademis)	%				0		0		0		0		0				0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	1	17	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat						20,000,000,000		25,500,000,000		26,000,000,000		27,000,000,000		27,500,000,000		126,000,000,000
				APK SMP/MTs/Paket B	%			103.32	0	103.32	0	103.32	0	103.32	0	103.32	0	103.32	0
				APM SMP/MTs/Paket B	%			79.50	0	79.60	0	79.65	0	79.70	0	79.80	0	79.80	0
				Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs / Paket B (13-15 tahun)	%			79.50	0	79.60	0	79.65	0	79.70	0	79.80	0	79.80	0
				Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs / Paket B	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP / MTs/ Paket B ke SMA/SMK/MA/ Paket B	%			96.30	0	96.40	0	96.60	0	96.80	0	97.00	0	97.00	0
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs / Paket B	%			0.0027	0	0.0025	0	0.0023	0	0.0021	0	0.0020	0	0.0020	0
				Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%			88.50	0	89.00	0	89.50	0	90.00	0	90.50	0	90.50	0
				Angka rata-rata Nilai UN SMP	%			57.00	0	59.00	0	61.00	0	63.00	0	65.00	0	65.00	0
				Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi	%			94.00	0	95.00	0	96.00	0	97.00	0	100.00	0	100.00	0
				Prosentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi	%			14.29	0	12.5	0	2.22	0	2.17	0	2.13	0	51.43	0
				Prosentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi	%			17	0	14	0	13	0	11	0	10	0	100	0
				Rasio Guru terhadap murid SMP					0		0		0		0		0		0
				Persentase penerima beasiswa SMP	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persetase siswa pendidikan menengah yang mendapat 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	1	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						25,000,000,000		32,325,000,000		33,500,000,000		34,000,000,000		34,410,000,000		159,235,000,000
				Persentase pendidik PAUD/RA berkualifikasi pendidikan minimal S1/DIV	%			54.00	0	56.00	0	58.00	0	60.00	0	62.00	0	62.00	0
				Persentase pendidik SD/MI berkualifikasi pendidikan minimal S1/DIV	%			96.00	0	97.00	0	98.00	0	99.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase pendidik SMP/MTs berkualifikasi pendidikan minimal S1/DIV	%			97.00	0	98.50	0	99.00	0	99.50	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase pendidik PAUD/RA bersertifikat pendidik	%			24.00	0	26.00	0	28.00	0	30.00	0	32.00	0	32.00	0
				Persentase pendidik SD/MI bersertifikat pendidik	%			65.00	0	70.00	0	75.00	0	80.00	0	85.00	0	85.00	0
				Persentase Pendidik SMP/MTs Bersertifikat Pendidik	%			70.00	0	75.00	0	80.00	0	85.00	0	90.00	0	90.00	0
				Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/Dikmas Berprestasi	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Persentase pendidik PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pendidik PAUD memiliki sertifikat profesi guru PAUD	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki sertifikat pendidik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pendidik SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pendidik SD memiliki sertifikat pendidik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal S1/DIV	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki sertifikat pendidik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentas pendidik SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal S1/DIV	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Pesentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki sertifikat pendidik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase satuan pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang lainnya	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki jasah minimal S1/DIV	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kepala satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S1/DIV	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki tenaga penunjang lainnya	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal SMA/sederajat	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	1	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan						3,480,000,000		4,360,000,000		4,500,000,000		4,643,000,000		4,790,000,000		21,773,000,000
				Tingkat capaian nilai LKJIP				82	0	83	0	84	0	85	0	86	0	86	0
1	1	23	Program Peningkatan Koordinasi Pendidikan Kecamatan						2,350,000,000		3,000,000,000		3,100,000,000		3,150,000,000		3,200,000,000		14,800,000,000
				Tingkat capaian koordinasi Koordinator Pendidikan Kecamatan	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			DINAS KESEHATAN																
1	2	0	**Kesehatan**						353,778,000,000		430,196,859,000		448,138,000,000		466,592,600,000		484,227,000,000		2,182,932,459,000
1	2	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,320,000,000		1,700,000,000		1,800,000,000		1,900,000,000		2,000,000,000		8,720,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	2	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						87,000,000		105,000,000		112,500,000		116,000,000		120,000,000		540,500,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	2	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						4,874,000,000		6,107,500,000		6,303,000,000		6,504,600,000		6,708,000,000		30,497,100,000
				Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%			80.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%			65.00	0	65.00	0	75.00	0	85.00	0	95.00	0	95.00	0
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar	%			85.00	0	85.00	0	86.00	0	90.00	0	95.00	0	95.00	0
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%			65.00	0	65.00	0	75.00	0	85.00	0	95.00	0	95.00	0
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						17,000,000,000		22,000,000,000		23,000,000,000		24,000,000,000		25,000,000,000		111,000,000,000
				Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan 100%	%			80.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0
				Persentase Puskemas dengan capaian SPM 100 %	%				0		0		0		0		0		0
1	2	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat						638,000,000		800,000,000		825,000,000		850,000,000		880,000,000		3,993,000,000
				Persentase Kecamatan yang mencapai Rumah Tangga sehat 76,5%	%			80.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0
				Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	%			60.00	0	70.00	0	80.00	0	90.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga	%			20.00	0	22.50	0	25.00	0	30.00	0	35.00	0	35.00	0
				Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi Pendidikan sehat 10 %	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa 10% untuk Bidang Kesehatan	%			5.00	0	10.00	0	15.00	0	20.00	0	30.00	0	30.00	0
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Rasio posyandu per satuan balita					0		0		0		0		0		0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%				0		0		0		0		0		0
1	2	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						3,360,000,000		4,210,000,000		4,345,000,000		4,484,000,000		4,624,000,000		21,023,000,000
				Prevalensi gizi kurang	%			7,8	0	7.70	0	7,6	0	7,5	0	7,4	0	7,4	0
				Prevalensi balita stunting	%			18.00	0	17.00	0	16.00	0	15.00	0	14.00	0	14.00	0
				Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%				0		0		0		0		0		0
				Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 kkal per kapita per hari)	%				0		0		0		0		0		0
				Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1.400 kkal per kapita per hari	%				0		0		0		0		0		0
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 2 thn/baduta	%				0		0		0		0		0		0
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bln yang mendapatkan ASI eksklusif	%				0		0		0		0		0		0
				Prevalensi mallnutrisi ((berat badan per tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 thn, berdasarkan tipe))	%				0		0		0		0		0		0
1	2	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit						5,000,000,000		6,265,000,000		6,465,000,000		6,672,000,000		6,880,000,000		31,282,000,000
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO	%			70.00	0	75.00	0	75.00	0	80.00	0	80.00	0	80.00	0
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Tingkat kematian akibat malaria	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Angka Kejadian Malaria (API : kasus per 1000 penduduk)	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase orang usia 15 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Non AFP rate per 100.000 penduduk	Rasio			> 2	0	> 2	0	> 2	0	> 2	0	> 2	0	> 2	0
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	%				0		0		0		0		0		0
				Non Polio AFP Rate per 100.000 penduduk	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase anak usia 1 thn yang diimunisasi campak	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	%				0		0		0		0		0		0
				Tingkat prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk)					0		0		0		0		0		0
				Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%				0		0		0		0		0		0
				Proporsi kasus Tubercolusis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%				0		0		0		0		0		0
				Penderita diare yang ditangani	%				0		0		0		0		0		0
				Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%				0		0		0		0		0		0
				Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat	%				0		0		0		0		0		0
				Penggunaan kondom pada hubungan sex beresiko terakhir	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B	%				0		0		0		0		0		0
				Jumlah orang terkena filariasis	Orang				0		0		0		0		0		0
				Jumlah orang terkena kusta	Orang				0		0		0		0		0		0
				Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)					0		0		0		0		0		0
				Prevalensi tekanan darah tinggi	%				0		0		0		0		0		0
				Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase merokok pada penduduk umur lebih dari atau sama dengan 15 tahun	%				0		0		0		0		0		0
				Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk					0		0		0		0		0		0
				Cakupan pengobatan semua kasus TBC (% Case Detection Rate / CDR) yang diobati	%			89	0	97	0	97	0	97	0	97	0	97	0
				Angka (notifikasi semua kasus TBC yang diobati (Case Notification Rate/ CNR) per seratus ribu penduduk				249	0	252	0	252	0	252	0	252	0	252	0
				Persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV	%			60	0	65	0	70	0	75	0	75	0	75	0
				Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%				0		0		0		0		0		0
				Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per 100.000 penduduk)					0		0		0		0		0		0
				Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi	%				0		0		0		0		0		0
				Case Fatality Rate DBD (%)	%				0		0		0		0		0		0
1	2	25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya						30,000,000,000		32,500,000,000		35,000,000,000		37,500,000,000		40,000,000,000		175,000,000,000
				Cakupan Puskesmas	%			148.00	0	151.00	0	151.00	0	151.00	0	151.00	0	151.00	0
				Cakupan Puskesmas Pembantu	%			11.78	0	11.78	0	11.78	0	11.78	0	11.78	0	11.78	0
				Persentase kelengkapan prasarana puskesmas	%			55.00	0	60.00	0	65.00	0	70.00	0	75.00	0	75.00	0
				Persentase kelengkapan alat kesehatan puskesmas	%			35.00	0	40.00	0	45.00	0	50.00	0	55.00	0	55.00	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Rasio Puskesmas persatuan penduduk	KM				0		0		0		0		0		0
1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata						27,300,000,000		32,750,000,000		34,000,000,000		35,000,000,000		35,975,000,000		165,025,000,000
				Rasio rumah sakit per satuan penduduk				0,011	0	0,011	0	0,011	0	0,011	0	0,011	0	0,011	0
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar	%			50	0	55	0	60	0	65	0	70	0	70	0
1	2	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak						8,000,000,000		10,250,000,000		10,500,000,000		10,750,000,000		11,000,000,000		50,500,000,000
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Cakupan pelayanan balita sesuai standar	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Cakupan kunjungan bayi	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan kunjugan ibu hamil K4	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan pelayanan nifas	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan pelayanan anak balita	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan pelayanan ibu hamil K1	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Angka Kematian Neonatal					0		0		0		0		0		0
				Angka Kelangsungan Hidup bayi					0		0		0		0		0		0
				Angka Kematian Bayi					0		0		0		0		0		0
				Angka kematian balita					0		0		0		0		0		0
1	2	33	Program Pengembangan Hygiene Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat						300,000,000		360,000,000		375,000,000		390,000,000		400,000,000		1,825,000,000
				Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	%			46.00	0	66.00	0	77.00	0	92.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat	%			43.00	0	53.00	0	64.00	0	75.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase puskesmas melaksanakan STBM	%				0		0		0		0		0		0
1	2	34	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan						203,000,000		254,359,000		262,500,000		271,000,000		280,000,000		1,270,859,000
				Rasio dokter per satuan penduduk	%			0.55	0	0.55	0	0.55	0	0.55	0	0.55	0	0.55	0
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%			0.38	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0
1	2	35	Program Pelayanan Kesehatan						110,000,000,000		120,000,000,000		130,000,000,000		140,000,000,000		150,000,000,000		650,000,000,000
				Persentase Fasyankes primer yang memberikan pelayanan sesuai standar	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN	%			95.00	0	95.00	0	95.00	0	95.00	0	95.00	0	95.00	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada pondok pesantren	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Rasio Puskesmas Per satuan penduduk				0,02	0	0,02	0	0,02	0	0,02	0	0,02	0	0,02	0
				Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%				0		0		0		0		0		0
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk					0		0		0		0		0		0
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%				0		0		0		0		0		0
				Indeks kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan					0		0		0		0		0		0
				Persentase Puskesmas Terakreditasi	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Jaminan Kesehatan Nasional	%				0		0		0		0		0		0
1	2	36	Program Manajemen dan Kebijakan kesehatan						116,000,000		145,000,000		150,000,000		155,000,000		160,000,000		726,000,000
				Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase SIK Fasyankes yang terintegrasi	%			32.82	0	35.11	0	35.11	0	35.11	0	35.11	0	35.11	0
1	2	37	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD						145,580,000,000		192,750,000,000		195,000,000,000		198,000,000,000		200,200,000,000		931,530,000,000
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				75	0	76	0	78	0	80	0	85	0	85	0
				Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Rumah Sakit	%			77,27	0	77,27	0	81,82	0	81,82	0	86,36	0	86,36	0
				Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Bagian Administrasi					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Keuangan					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Medis					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perawatan					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Penunjang					0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Administrasi	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bagian Keuangan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Medis	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perawatan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Penunjang	%				0		0		0		0		0		0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Administrasi dan Keuangan	%				0		0		0		0		0		0
				Nilai Evaluasi SAKIP					0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti di Bidang Pelayanan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase pencapaian SPM Penunjang	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti dibidang penunjang	%				0		0		0		0		0		0
			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS (BLUD)																
1	2	0	**Kesehatan**						172,880,000,000		225,500,000,000		229,000,000,000		233,000,000,000		236,175,000,000		1,096,555,000,000
1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata						27,300,000,000		32,750,000,000		34,000,000,000		35,000,000,000		35,975,000,000		165,025,000,000
				Rasio rumah sakit per satuan penduduk				0,011	0	0,011	0	0,011	0	0,011	0	0,011	0	0,011	0
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar	%			50	0	55	0	60	0	65	0	70	0	70	0
1	2	37	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD						145,580,000,000		192,750,000,000		195,000,000,000		198,000,000,000		200,200,000,000		931,530,000,000
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				75	0	76	0	78	0	80	0	85	0	85	0
				Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Rumah Sakit	%			77,27	0	77,27	0	81,82	0	81,82	0	86,36	0	86,36	0
				Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Bagian Administrasi					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Keuangan					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Medis					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perawatan					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Penunjang					0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Administrasi	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bagian Keuangan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Medis	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perawatan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Penunjang	%				0		0		0		0		0		0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Administrasi dan Keuangan	%				0		0		0		0		0		0
				Nilai Evaluasi SAKIP					0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti di Bidang Pelayanan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase pencapaian SPM Penunjang	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti dibidang penunjang	%				0		0		0		0		0		0
			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG																
1	2	0	**Kesehatan**						172,880,000,000		225,500,000,000		229,000,000,000		233,000,000,000		236,175,000,000		1,096,555,000,000
1	2	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata						27,300,000,000		32,750,000,000		34,000,000,000		35,000,000,000		35,975,000,000		165,025,000,000
				Rasio rumah sakit per satuan penduduk				0,011	0	0,011	0	0,011	0	0,011	0	0,011	0	0,011	0
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar	%			50	0	55	0	60	0	65	0	70	0	70	0
1	2	37	Program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD						145,580,000,000		192,750,000,000		195,000,000,000		198,000,000,000		200,200,000,000		931,530,000,000
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				75	0	76	0	78	0	80	0	85	0	85	0
				Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM Rumah Sakit	%			77,27	0	77,27	0	81,82	0	81,82	0	86,36	0	86,36	0
				Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Bagian Administrasi					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Keuangan					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Medis					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perawatan					0		0		0		0		0		0
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Penunjang					0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Administrasi	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal SPM Bagian Keuangan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Medis	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perawatan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Penunjang	%				0		0		0		0		0		0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian Administrasi dan Keuangan	%				0		0		0		0		0		0
				Nilai Evaluasi SAKIP					0		0		0		0		0		0
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti di Bidang Pelayanan	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase pencapaian SPM Penunjang	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti dibidang penunjang	%				0		0		0		0		0		0
			DINAS PEKERJAAN UMUM																
1	3	0	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						537,537,299,900		706,568,459,889		712,244,487,249		720,668,952,913		727,324,943,567		3,404,344,143,518
1	3	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						5,000,000,000		6,050,000,000		6,250,000,000		6,500,000,000		6,750,000,000		30,550,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	3	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						350,000,000		425,000,000		450,000,000		475,000,000		500,000,000		2,200,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	3	15	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan						351,728,799,900		469,072,379,889		417,025,995,889		415,954,961,829		414,941,500,363		2,068,723,637,870
				Persentase panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya	%			17.34	0	34.75	0	52.12	0	69.5	0	86.87	0	86.87	0
				Persentase panjang jalan yang terbangun	%			0.020	0	0.030	0	0.050	0	0.070	0	0.080	0	0.080	0
				Persentase peningkatan jalan hotmix	%			20.00	0	20.00	0	20.00	0	20.00	0	20.00	0	100.00	0
				Persentasenya terbangunnya akses jalan menuju Kawasan Industri	%			-	0	-	0	50.00	0	50.00	0	-	0	100.00	0
1	3	17	Program Pembangunan Turap / Talud / Brojong						2,000,000,000		2,250,000,000		2,500,000,000		2,750,000,000		3,000,000,000		12,500,000,000
				Persentase Panjang bangunan pengaman di daerah kritis di badan sungai	%			0.63	0	0.74	0	0.85	0	0.96	0	1.07	0	1.07	0
1	3	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan						27,750,000,000		37,000,000,000		37,250,000,000		37,500,000,000		37,750,000,000		177,250,000,000
				Persentase panjang jalan yang dipelihara	%			46.48	0	51.48	0	56.48	0	61.48	0	66.48	0	66.48	0
				Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	%			56.52	0	56.55	0	56.58	0	56.61	0	56.64	0	56.64	0
1	3	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya						102,500,000,000		120,042,000,000		173,000,000,000		184,000,000,000		195,000,000,000		774,542,000,000
				Persentase luas irigasi kabupaten yang dilakukan rehabilitasi	%			19.56	0	19.56	0	19.56	0	19.56	0	21.77	0	100.00	0
				Persentase ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Rasio jaringan irigasi				37.69	0	37.69	0	37.69	0	37.69	0	37.69	0	37.69	0
1	3	25	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku						1,100,000,000		1,300,000,000		1,350,000,000		1,400,000,000		1,450,000,000		6,600,000,000
				Persentase jumlah embung dalam kondisi baik	%			78.95	0	84.21	0	89.47	0	94.74	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
1	3	26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya						60,000,000		72,600,000		75,000,000		78,000,000		80,000,000		365,600,000
				Persentase jumlah kelompok masyarakat peduli sungai yang aktif	%			52.94	0	64.71	0	76.47	0	88.24	0	100	0	100	0
1	3	31	Program Pembinaan Jasa Konstruksi						449,500,000		563,000,000		581,000,000		600,000,000		620,000,000		2,813,500,000
				Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina / Persentase Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina.	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	3	32	Program Pembangunan dan Penggantian Jembatan						7,500,000,000		10,750,000,000		11,000,000,000		11,253,000,000		11,500,000,000		52,003,000,000
				Persentase penambahan jumlah jembatan	%			99.35	0	99.46	0	99.57	0	99.78	0	100	0	100	0
1	3	33	Program Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan						7,250,000,000		9,250,000,000		9,500,000,000		9,825,000,000		10,000,000,000		45,825,000,000
				Persentase jembatan kabupaten yang dipelihara	%			78.21	0	79.21	0	80.31	0	81.09	0	82.49	0	83.59	0
1	3	34	Program Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan						1,500,000,000		1,850,000,000		1,875,000,000		1,950,000,000		2,000,000,000		9,175,000,000
				Persentase penambahan panjang trotoar dan drainase	%			97.43	0	98.07	0	98.72	0	99.36	0	100	0	100	0
1	3	35	Program Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan / Jembatan						1,160,000,000		1,453,480,000		1,499,991,360		1,547,991,084		1,596,443,204		7,257,905,648
				Persentase panjang drainase kondisi baik	%			67.64	0	68.97	0	70.29	0	71.62	0	72.94	0	72.94	0
1	3	36	Program Peningkatan Pengelolaan Bangunan Gedung						319,000,000		400,000,000		412,500,000		425,000,000		440,000,000		1,996,500,000
				Persentase bangunan pemerintah yang ber-IMB	%			50	0	70	0	85	0	95	0	100	0	100	0
1	3	37	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung						28,000,000,000		45,000,000,000		48,350,000,000		45,250,000,000		40,500,000,000		207,100,000,000
				Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah yang tertangani	%			63.7	0	66.7	0	69.7	0	72.7	0	75.7	0	75.7	0
1	3	38	Program Peningkatan Perencanaan Teknis						870,000,000		1,090,000,000		1,125,000,000		1,160,000,000		1,197,000,000		5,442,000,000
				Persentase kegiatan strategis yang dilengkapi perencanaan teknis	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	3	39	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						0		0		0		0		0		0
1	3	39							0		0		0		0		0		0
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	3	0	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						0		0		0		0		0		0
1	3	39	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang						0		0		0		0		0		0
1	3	39							0		0		0		0		0		0
1	4	0	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						31,090,000,000		38,460,000,000		39,625,000,000		40,790,000,000		41,955,000,000		191,920,000,000
1	4	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,100,000,000		1,350,000,000		1,400,000,000		1,450,000,000		1,500,000,000		6,800,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	4	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						90,000,000		110,000,000		115,000,000		120,000,000		125,000,000		560,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	4	15	Program Pengembangan Perumahan						4,400,000,000		5,200,000,000		5,300,000,000		5,400,000,000		5,500,000,000		25,800,000,000
				Rasio rumah layak huni				76.56	0	78.34	0	80.16	0	82.03	0	83.95	0	83.95	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%			76.55	0	76.81	0	77.07	0	77.33	0	77.58	0	77.58	0
				Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%			51.93	0	53.77	0	55.70	0	57.72	0	59.84	0	59.84	0
				Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%			74.07	0	81.48	0	88.89	0	92.59	0	96.30	0	96.30	0
1	4	16	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan						6,750,000,000		8,500,000,000		8,750,000,000		9,000,000,000		9,250,000,000		42,250,000,000
				Persentase perumahan permukiman yang sehat dan tertata sesuai standar	%			9.24	0	9.45	0	9.68	0	9.92	0	10.18	0	10.18	0
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%			71.94	0	73.37	0	74.46	0	75.58	0	77.08	0	77.08	0
				Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%			84	0	86	0	88	0	90	0	92	0	92	0
				Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	%			11.43	0	11.48	0	11.53	0	11.58	0	11.63	0		0
1	4	17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan						250,000,000		300,000,000		310,000,000		320,000,000		330,000,000		1,510,000,000
				Persentase Asosiasi Pengelola Sarana Air Minum dan Sarana Air Limbah yang aktif	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
1	4	21	Program Pengembangan Kawasan Permukiman						18,500,000,000		23,000,000,000		23,750,000,000		24,500,000,000		25,250,000,000		115,000,000,000
				Rasio permukiman layak huni				79.76	0	79.82	0	79.90	0	79.99	0	80.10	0	80.10	0
				Persentase lingkungan pemukiman kumuh kawasan perkotaan	%			8.26	0	8.16	0	8.05	0	7.94	0	7.84	0	7.84	0
				Persentase penanganan permukiman kumuh	%			4.87	0	6.09	0	7.31	0	8.53	0	9.75	0	9.75	0
				Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%			1.73	0	1.34	0	0.89	0	0.44	0	0.00	0	0.00	0
				Persentase areal kawasan kumuh	%			20.24	0	20.23	0	20.22	0	20.21	0	20.19	0	20.19	0
				Luas pemukiman kumuh	Ha			195	0	192	0	190	0	187	0	185	0	185	0
				Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio				0		0		0		0		0		0
2	4	0	**Pertanahan**						3,500,000,000		3,750,000,000		4,000,000,000		4,250,000,000		4,500,000,000		20,000,000,000
2	4	16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah						3,500,000,000		3,750,000,000		4,000,000,000		4,250,000,000		4,500,000,000		20,000,000,000
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																
1	5	0	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**						5,930,000,000		8,835,000,000		9,165,000,000		9,470,000,000		9,800,000,000		43,200,000,000
1	5	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						600,000,000		700,000,000		750,000,000		775,000,000		800,000,000		3,625,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	5	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30,000,000		35,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		200,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	5	23	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam						5,000,000,000		7,750,000,000		8,000,000,000		8,250,000,000		8,500,000,000		37,500,000,000
				Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Rasio pengurangan resiko bencana				35	0	40	0	45	0	50	0	55	0	55	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	5	24	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana						300,000,000		350,000,000		375,000,000		400,000,000		450,000,000		1,875,000,000
				Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	%			18.52	0	37.04	0	55.56	0	78	0	100	0	100	0
				Informasi peta rawan bencana	%			18.52	0	37.04	0	55.56	0	78	0	100	0	100	0
			KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
1	5	0	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**						2,362,000,000		2,935,000,000		3,045,000,000		3,140,000,000		4,520,000,000		16,002,000,000
1	5	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						400,000,000		475,000,000		500,000,000		525,000,000		550,000,000		2,450,000,000
1	5	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						145,000,000		180,000,000		190,000,000		195,000,000		200,000,000		910,000,000
1	5	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat						905,000,000		1,135,000,000		1,175,000,000		1,200,000,000		1,250,000,000		5,665,000,000
				Persentase masyarakat dan generasi muda yg sadar akan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%			50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0
				Persentase keluarga pahlawan perintis/veteran yang mampu berusaha secara layak	%			50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0
				Nilai kondisi TMP terhadap standar nasional				85.71	0	85.71	0	85.71	0	90.48	0	90.48	0	90.48	0
1	5	17	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan						812,000,000		1,020,000,000		1,050,000,000		1,085,000,000		1,120,000,000		5,087,000,000
1	5	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat						100,000,000		125,000,000		130,000,000		135,000,000		1,400,000,000		1,890,000,000
				Persentase organisasi pemuda yang aktif	%			51.00	0	56.00	0	61.00	0	66.00	0	71.00	0	71.00	0
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
1	5	0	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**						5,725,000,000		6,915,000,000		7,200,000,000		7,528,000,000		7,827,000,000		35,195,000,000
1	5	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,200,000,000		1,350,000,000		1,400,000,000		1,450,000,000		1,500,000,000		6,900,000,000
1	5	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						50,000,000		100,000,000		115,000,000		118,000,000		120,000,000		503,000,000
1	5	16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal						1,750,000,000		2,200,000,000		2,250,000,000		2,350,000,000		2,400,000,000		10,950,000,000
				Persentase sarana prasarana kepemudaan yang tersedia	%			70.37	0	74.07	0	77.78	0	81.48	0	85.19	0	85.19	0
1	5	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan						1,300,000,000		1,550,000,000		1,600,000,000		1,650,000,000		1,725,000,000		7,825,000,000
				Cakupan pelatih bersertifikasi level dasar	%			43.00	0	63.00	0	83.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Cakupan pelatih bersertifikasi level 2	%			0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0
1	5	20	Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum						575,000,000		715,000,000		735,000,000		760,000,000		782,000,000		3,567,000,000
				Persentase pertumbuhan wirausaha muda	%			20.00	0	40.00	0	60.00	0	80.00	0	100.00	0	100.00	0
1	5	22	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran						850,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		1,200,000,000		1,300,000,000		5,450,000,000
				Cakupan pembinaan atlet muda/pelajar	%			3.75	0	3.75	0	3.75	0	3.75	0	3.75	0	18.75	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase cabang olahraga yang berprestasi tingkat provinsi dan nasional	%			80	0	50	0	50	0	80	0	50	0	80	0
				Persentase peningkatan perolehan medali tingkat Provinsi dan Nasional	%			19.06	0	19.35	0	19.64	0	20.59	0	21.36	0	100	0
			DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
1	6	0	**Sosial**						7,705,000,000		8,985,000,000		9,940,000,000		10,620,000,000		11,300,000,000		48,550,000,000
1	6	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,500,000,000		1,700,000,000		1,900,000,000		2,100,000,000		2,300,000,000		9,500,000,000
1	6	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30,000,000		35,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		200,000,000
1	6	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil						1,750,000,000		2,200,000,000		2,300,000,000		2,400,000,000		2,500,000,000		11,150,000,000
				Persentase Fakir Miskin (FM) yang telah berusaha bekerja	%			50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0
				Persentase Lanjut Usia Miskin/ terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%			37.53	0	37.53	0	37.53	0	37.53	0	37.53	0	37.53	0
1	6	16	Program Pelayanan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial						3,000,000,000		3,500,000,000		4,000,000,000		4,250,000,000		4,500,000,000		19,250,000,000
				Persentase PMKS non potensial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%			7.12	0	9.31	0	11.51	0	13.15	0	15.34	0	56.43	0
				Persentase PMKS potensial yang telah berusaha/ bekerja	%			25.00	0	25.00	0	25.00	0	25.00	0	25.00	0	25.00	0
				Persentase PMKS yang berubah sikap perilakunya	%			25.00	0	25.00	0	25.00	0	25.00	0	25.00	0	25.00	0
				Persentase PMKS yang mendapat perlindungan	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase anak yatim dan berkebutuhan khusus/difabel yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%			-	0	26.95	0	26.95	0	26.95	0	26.95	0	26.95	0
				Persentase penyandang disabilitas yang meningkat fungsi fisiknya	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%			51,42	0	51,51	0	51,57	0	51,63	0	51,67	0	51,67	0
				Persentase PMKS yang tertangani	%			52,05	0	52,15	0	52,21	0	52,27,63	0	52,33	0	52,33	0
				Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%			51,41	0	51,5	0	51,57	0	51,62,63	0	51,66	0	51,66	0
				Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%			13,04	0	21,74	0	21,74	0	21,74	0	21,74	0	100	0
				Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%			8,33	0	8,33	0	8,33	0	8,33	0	8,33	0	41,67	0
				Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%			0	0	0	0	33,33	0	33,33	0	33,33	0	100	0
				Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%			0	0	39,58	0	49,17	0	57,2	0	60,18	0	60,81	0
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
1	6	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						1,100,000,000		1,200,000,000		1,300,000,000		1,400,000,000		1,500,000,000		6,500,000,000
				Persentase lembaga masyarakat yang aktif berperan dalam pembangunan	%			83.33	0	83.33	0	91.67	0	91.67	0	91.67	0	91.67	0
				Persentae Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana pelayanan kesejahteraan sosial	KM			0	0	0	0	33.33	0	33.33	0	33.33	0	100	0
1	6	22	Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan						325,000,000		350,000,000		400,000,000		425,000,000		450,000,000		1,950,000,000
				Persentase jumlah venue olahraga yang sesuai standart	venue			1	0	1	0	1	0		0		0	3	0
2	7	0	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						3,470,000,000		4,120,000,000		4,350,000,000		4,580,000,000		4,810,000,000		21,330,000,000
2	7	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat						1,350,000,000		1,650,000,000		1,700,000,000		1,750,000,000		1,800,000,000		8,250,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	7	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan						525,000,000		650,000,000		675,000,000		700,000,000		725,000,000		3,275,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	7	17	Program Peningkatan Partisispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa						450,000,000		500,000,000		525,000,000		550,000,000		575,000,000		2,600,000,000
2	7	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						95,000,000		120,000,000		125,000,000		130,000,000		135,000,000		605,000,000
2	7	19	Program Pengembangan Teknologi dan Sumber Daya Alam Desa						250,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		375,000,000		1,600,000,000
				Persentase Industri Kecil dan Menengah yang dibina	%			1.20	0	1.50	0	1.60	0	1.70	0	1.80	0	4.92	0
2	7	20	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa						800,000,000		900,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		1,200,000,000		5,000,000,000
				Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan sistem pengembangan kreativitas dan inovasi (SPKI)	%			65	0	70	0	75	0	80	0	85	0	85	0
				persentase perangkat daerah yg difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%				0		0		0		0		0		0
2	7	21	Program Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa						0		0		0		0		0		0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase aparatur desa yang terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa dengan administrasi baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH																
2	1	0	**Tenaga Kerja**						7,400,000,000		8,830,000,000		10,250,000,000		11,670,000,000		13,090,000,000		51,240,000,000
2	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2,500,000,000		2,700,000,000		2,900,000,000		3,100,000,000		3,300,000,000		14,500,000,000
				Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina	%			0	0	3	0	4	0	5	0	6	0	6	0
2	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						50,000,000		60,000,000		70,000,000		80,000,000		90,000,000		350,000,000
2	1	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						3,000,000,000		4,000,000,000		5,000,000,000		6,000,000,000		7,000,000,000		25,000,000,000
2	1	16	Program Peningkatan Kesempatan kerja						300,000,000		350,000,000		400,000,000		450,000,000		500,000,000		2,000,000,000
				Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina	%			2	0		0		0		0		0	2	0
2	1	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						900,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		1,200,000,000		1,300,000,000		5,500,000,000
				Persentase peningkatan omzet UMKM yang dibina	%			2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	6	0
2	1	18	Program Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja						650,000,000		720,000,000		780,000,000		840,000,000		900,000,000		3,890,000,000
				Persentase koperasi aktif	%			76.25	0	76.50	0	76.75	0	77.00	0	77.25	0	77.25	0
2	11	0	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**						1,650,000,000		2,700,000,000		3,100,000,000		3,500,000,000		3,900,000,000		14,850,000,000
2	11	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif						400,000,000		450,000,000		500,000,000		550,000,000		600,000,000		2,500,000,000
2	11	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah						750,000,000		1,500,000,000		1,600,000,000		1,700,000,000		1,800,000,000		7,350,000,000
2	11	17	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						500,000,000		750,000,000		1,000,000,000		1,250,000,000		1,500,000,000		5,000,000,000
				Persentase realisasi pelaksanaan kajian strategis daerah	%			65	0	70	0	75	0	80	0	85	0	85	0
3	8	0	**transmigrasi**						150,000,000		175,000,000		200,000,000		225,000,000		250,000,000		1,000,000,000
3	8	15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi						150,000,000		175,000,000		200,000,000		225,000,000		250,000,000		1,000,000,000
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
2	5	0	**Lingkungan Hidup**						41,780,000,000		53,272,700,000		54,928,331,000		56,730,480,930		58,430,545,358		265,142,057,288
2	5	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,750,000,000		1,950,000,000		2,150,000,000		2,350,000,000		2,500,000,000		10,700,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	5	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30,000,000		35,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		200,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	5	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						20,000,000,000		26,950,000,000		27,668,131,000		28,297,000,000		28,550,000,000		131,465,131,000
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	%			96	0	97	0	98	0	99	0	99	0	99	0
				Persentase cakupan area pelayanan persampahan	%			50	0	52	0	54	0	56	0	58	0	58	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%			20	0	22	0	24	0	26	0	27	0	27	0
				Timbulan sampah yang ditangani	%			100	0	97	0	98	0	99	0	99	0	99	0
2	5	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						600,000,000		800,000,000		800,000,000		900,000,000		900,000,000		4,000,000,000
				Persentase ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan	%			70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0
				Persentase kegiatan monitoring/pengawasan kegiatan pelaku usaha dan/atau kegiatan	%			20	0	40	0	60	0	80	0	100	0	100	0
2	5	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						600,000,000		800,000,000		800,000,000		900,000,000		900,000,000		4,000,000,000
				Persentase pembangunan sumur resapan dan pengadaan alat biopori	%			10	0	15	0	20	0	25	0	30	0	30	0
				Persentase luas wilayah yang ditetapkan status kerusakan biomassa	%			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	50	0
2	5	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						600,000,000		800,000,000		800,000,000		900,000,000		900,000,000		4,000,000,000
				Persentase dokumen lingkungan yang diterbitkan	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase sengketa lingkungan hidup yang ditangani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah KabupatenKota lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupatenkota	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	5	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						6,700,000,000		8,937,500,000		9,500,000,000		10,168,280,930		10,980,545,358		46,286,326,288
				Persentase RTH publik	%			11	0	12	0	13	0	14	0	15	0	15	0
				Persentase RTH layak anak	%			4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	8	0
2	5	25	Program Penataan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan						400,000,000		0		0		0		0		400,000,000
				Persentase kegiatan monitoring pengawasan kegiatan pelaku usaha dan atau kegiatan	%			40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Persentase sengketa lingkungan hidup yang ditangani	%			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	5	26	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup						300,000,000		330,000,000		500,000,000		500,000,000		550,000,000		2,180,000,000
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	5	27	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja TPA / TPST						1,000,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000		1,500,000,000		6,700,000,000
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota				72	0	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0
2	5	28	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Purwokerto						1,000,000,000		1,541,700,000		1,541,700,000		1,541,700,000		1,600,000,000		7,225,100,000
				Persentase jumlah sampah di wilayah Purwokerto yang ditangani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	5	29	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Banyumas						900,000,000		900,000,000		900,000,000		900,000,000		1,000,000,000		4,600,000,000
				Persentase jumlah sampah di wilayah Banyumas yang ditangani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	5	30	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Ajibarang						4,900,000,000		4,923,400,000		4,923,400,000		4,923,400,000		5,000,000,000		24,670,200,000
				Persentase jumlah sampah di wilayah Ajibarang yang ditangani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2	5	31	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Wanggon						1,000,000,000		1,361,700,000		1,361,700,000		1,361,700,000		1,400,000,000		6,485,100,000
				Persentase jumlah sampah di wilayah Wangon yang ditangani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	5	32	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Sumpiuh						1,000,000,000		1,361,700,000		1,361,700,000		1,361,700,000		1,400,000,000		6,485,100,000
				Persentase jumlah sampah di wilayah Sumpiuh yang ditangani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	5	33	Program Peningkatan Pelayanan Persampahan Wilayah Kembaran						1,000,000,000		1,181,700,000		1,181,700,000		1,181,700,000		1,200,000,000		5,745,100,000
				Persentase jumlah sampah di wilayah Kembaran yang ditangani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	6	0	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						4,590,000,000		5,290,500,000		5,765,500,000		6,215,500,000		6,665,000,000		28,526,500,000
2	6	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						850,000,000		900,000,000		950,000,000		1,000,000,000		1,050,000,000		4,750,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	6	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						45,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		275,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	6	15	Program Penataan Administrasi Peristiwa Kependudukan						2,500,000,000		3,000,000,000		3,250,000,000		3,500,000,000		3,750,000,000		16,000,000,000
				Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pemohon KTP-Elektronik yang terlayani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk					0		0		0		0		0		0
				Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%				0		0		0		0		0		0
2	6	16	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil						275,000,000		300,000,000		350,000,000		375,000,000		400,000,000		1,700,000,000
				Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pemohon akta kematian yang terlayani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Rasio bayi berakte kelahiran					0		0		0		0		0		0
				Rasio pasangan berakte nikah					0		0		0		0		0		0
				Cakupan penerbitan akta kelahiran	%				0		0		0		0		0		0
2	6	17	Program Pengelolaan Informasi Adminduk						800,000,000		900,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		1,200,000,000		5,000,000,000
				Persentase kecamatan yang update database kependudukan	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	%				0		0		0		0		0		0
2	6	18	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan						120,000,000		140,500,000		160,500,000		180,500,000		200,000,000		801,500,000

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerja sama	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA																
2	2	0	**Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**						1,175,000,000		1,550,000,000		1,875,000,000		2,200,000,000		2,525,000,000		9,325,000,000
2	2	16	Program Penguatan Pengarusutamaan Gender						175,000,000		200,000,000		225,000,000		250,000,000		275,000,000		1,125,000,000
				Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	2	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						500,000,000		600,000,000		650,000,000		700,000,000		750,000,000		3,200,000,000
				Rasio perempuan korban kekerasan				0.49	0	0.48	0	0.47	0	0.46	0	0.45	0	0.44	0
				Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%				0		0		0		0		0		0
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%				0		0		0		0		0		0
				Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%				0		0		0		0		0		0
				Rasio KDRT				0,0017	0	0,0016	0	0,0015	0	0,0014	0	0,0013	0	0,0013	0
2	2	20	Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak						500,000,000		750,000,000		1,000,000,000		1,250,000,000		1,500,000,000		5,000,000,000
				Jumlah kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan)	lembaga			31	0	32	0	33	0	34	0	35	0	35	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Rasio anak korban kekerasan	%			0.010	0	0.009	0	0.008	0	0.007	0	0.006	0		0
				Preferensi kekerasan pada anak perempuan	%				0		0		0		0		0		0
2	6	0	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						895,000,000		950,000,000		1,005,000,000		1,060,000,000		1,115,000,000		5,025,000,000
2	6	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						850,000,000		900,000,000		950,000,000		1,000,000,000		1,050,000,000		4,750,000,000
				Persentase desa yang meningkat prasarananya	%			2.66	0	2.66	0	2.66	0	2.66	0	2.66	0	13.29	0
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 86 Th. 2017)	%			1.67	0	5.06	0	5.07	0	5.07	0	5.00	0	5.06	0
2	6	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						45,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		275,000,000
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 86 Th. 2017)	%			0.12	0	0.12	0	0.11	0	0.10	0	0.09	0	0.11	0
				Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk	lembaga			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0
				Persentase kader pemberdayaan masyarakat desa yang meningkat kapasitasnya	%			90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0	90.00	0
				Raperda kawasan perdesaan yang tersusun	Dokumen			1	0		0	-	0	-	0	1	0		0
				Kelulusan sarjana per desa	Orang			0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0
2	8	0	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						5,648,500,000		6,980,000,000		7,500,000,000		7,800,000,000		8,080,000,000		36,008,500,000
2	8	15	Program Pelayanan Keluarga Berencana						1,148,500,000		1,480,000,000		1,500,000,000		1,550,000,000		1,580,000,000		7,258,500,000
				Persentase desa yg membentuk Bumdes	%			4.98	0	4.98	0	4.98	0	6.64	0	6.64	0	28.24	0
				Persentase Bumdes yg meningkat stratanya	%			7.31	0	7.31	0	7.31	0	7.64	0	7.64	0	37.21	0
				Persentase Pasar Desa yang terbangun	%			13.70	0	13.70	0	13.70	0	13.70	0	16.44	0	71.23	0
				Persentase petani tembakau/cengkih yang dapat meningkatkan kuantitas/kualitas produksi	%			50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0	50.00	0
2	8	25	Program Peningkatan Daya Jangkauan dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB						4,500,000,000		5,500,000,000		6,000,000,000		6,250,000,000		6,500,000,000		28,750,000,000
				Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif berperan dalam pembangunan	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan	%			50.00	0	60.00	0	60.00	0	60.00	0	50.00	0	56.52	0
				Persentase desa yg terpelihara kelestarian adatnya	%			50.00	0	60.00	0	60.00	0	60.00	0	50.00	0	56.52	0
				Ratarata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM				17,94	0	17,94	0	17,94	0	17,94	0	17,94	0	89,7	0
				Ratarata jumlah kelompok binaan PKK				17,94	0	17,94	0	17,94	0	17,94	0	17,94	0	89,7	0
				Persentase LPM aktif	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase LPM berprestasi	%			0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,3	0	0,6	0	1,81	0
				Persentase PKK aktif	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			DINAS PERHUBUNGAN																
2	9	0	**Perhubungan**						20,476,487,533		24,076,121,687		25,759,172,299		27,105,265,812		23,830,331,473		121,247,378,804
2	9	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,600,000,000		1,800,000,000		2,000,000,000		2,200,000,000		2,300,000,000		9,900,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2	9	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						200,000,000		225,000,000		250,000,000		275,000,000		300,000,000		1,250,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	9	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						2,500,000,000		2,750,000,000		3,000,000,000		3,250,000,000		3,500,000,000		15,000,000,000
				Persentase berfungsinya fasilitas kelengkapan jalan dengan baik	%			90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0
2	9	17	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						750,000,000		850,000,000		950,000,000		1,000,000,000		1,050,000,000		4,600,000,000
				Persentase panjang jalan yang sudah terlayani angkutan	%			100	0	80	0	80	0	100	0	100	0	100	0
				Rasio ijin trayek				0,068	0	0,071	0	0,073	0	0,075	0	0,077	0	0,077	0
2	9	18	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						10,176,487,533		12,751,121,687		13,159,172,299		13,580,265,812		14,005,331,473		63,672,378,804
				Persentase ketersediaan fasilitas perhubungan	%			41	0	44	0	47	0	49	0	51	0	51	0
				Persentase ketersediaan terminal	%			37,5	0	37,5	0	50	0	50	0	62,5	0	37,5	0
				Persentase pemasangan rambu-rambu	%			47,49	0	49,24	0	51	0	52,75	0	54,51	0	54,51	0
2	9	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas						3,750,000,000		4,000,000,000		4,500,000,000		4,750,000,000		500,000,000		17,500,000,000
				Persentase kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas	%			96	0	97	0	98	0	99	0	100	0	100	0
2	9	20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor						650,000,000		700,000,000		750,000,000		800,000,000		825,000,000		3,725,000,000
				Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor	%			94	0	94	0	95	0	95	0	96	0	96	0
2	9	21	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan						850,000,000		1,000,000,000		1,150,000,000		1,250,000,000		1,350,000,000		5,600,000,000
				Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
2	10	0	**Komunikasi dan Informatika**						5,230,000,000		6,285,000,000		6,840,000,000		7,395,000,000		7,950,000,000		33,700,000,000
2	10	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						900,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		1,200,000,000		1,300,000,000		5,500,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	10	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30,000,000		35,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		200,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	10	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						275,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		375,000,000		1,625,000,000
				Persentase KIM yang aktif di Kabupaten Banyumas	%			37	0	51	0	66	0	81	0	100	0	100	0
2	10	17	Program Peningkatan SDM Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						0		0		0		0		0		0
2	10	19	Program Pengembangan E Government						1,200,000,000		1,700,000,000		1,800,000,000		1,900,000,000		2,000,000,000		8,600,000,000
				Persentase Perangkat Daerah yang mengelola sistem informasi secara baik	%			15.74	0	20.58	0	25.42	0	30.27	0	35.11	0	35.11	0
				Tingkat kematangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik SPBE				3.3	0	3.4	0	3.5	0	3.6	0	3.7	0	3.7	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2	10	20	Program Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika						2,050,000,000		2,350,000,000		2,625,000,000		2,900,000,000		3,175,000,000		13,100,000,000
				Persentase OPD yang terhubung Fiber Optic	%			18	0	36	0	55	0	73	0	100	0	100	0
				Persentase Wilayah Yang tercoverage MenaraRepeater	%			90.93	0	93.95	0	95.46	0	96.97	0	100	0	100	0
2	10	21	Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik						775,000,000		900,000,000		950,000,000		1,000,000,000		1,050,000,000		4,675,000,000
				Persentase Perangkat Daerah yang memberikan akses informasi publik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Rasio Lapak aduan publik berbasis IT	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Se Jawa Tengah				5	0	4	0	4	0	3	0	2	0	2	0
2	14	0	**Statistik**						300,000,000		450,000,000		500,000,000		600,000,000		650,000,000		2,500,000,000
2	14	15	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah						300,000,000		450,000,000		500,000,000		600,000,000		650,000,000		2,500,000,000
				Persentase keterisian Daftar Informasi Publik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase ketersediaan data informasi dan statistik daerah	%				0		0		0		0		0		0
2	15	0	**Persandian**						550,000,000		650,000,000		675,000,000		700,000,000		725,000,000		3,300,000,000
2	15	15	Program Peningkatan Keamanan Informasi						550,000,000		650,000,000		675,000,000		700,000,000		725,000,000		3,300,000,000
				Standarisasi Keamanan Data ISO 27001	anek			17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																
2	12	0	**Penanaman Modal**						3,925,000,000		4,545,000,000		5,160,000,000		5,775,000,000		6,390,000,000		25,795,000,000
2	12	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2,500,000,000		2,750,000,000		3,000,000,000		3,250,000,000		3,500,000,000		15,000,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	12	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						90,000,000		100,000,000		110,000,000		120,000,000		130,000,000		550,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						500,000,000		750,000,000		1,000,000,000		1,250,000,000		1,500,000,000		5,000,000,000
				Jumlah Investor yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Banyumas	Loi			7	0	8	0	9	0	10	0	11	0	45	0
2	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						60,000,000		70,000,000		75,000,000		80,000,000		85,000,000		370,000,000
				Nilai realisasi tersier	Milyar Rupiah			230	0	234	0	236	0	239	0	242	0	1181	0
2	12	17	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah						350,000,000		400,000,000		450,000,000		500,000,000		550,000,000		2,250,000,000
				Jumlah sektor potensi investasi yang tergali potensi peluang investasi	sektor potensi			2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	0
2	12	18	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan						250,000,000		275,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		1,500,000,000
				Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan sesuai Standar Pelayanan (SP)	%			87	0	88	0	89	0	90	0	91	0	91	0
2	12	19	Program Penanganan Aduan dan Peningkatan Layanan Perizinan						175,000,000		200,000,000		225,000,000		250,000,000		275,000,000		1,125,000,000
				Persentase penanganan pengaduan	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																
2	13	0	**Kepemudaan dan Olah Raga**						6,305,000,000		7,335,000,000		8,120,000,000		8,850,000,000		9,630,000,000		40,240,000,000
2	13	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,850,000,000		2,000,000,000		2,250,000,000		2,500,000,000		2,750,000,000		11,350,000,000
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	13	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						55,000,000		60,000,000		70,000,000		75,000,000		80,000,000		340,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	13	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda						0		0		0		0		0		0
				Realisasi fisik program pengelolaan GOR Satria	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Realisasi keuangan program pengelolaan GOR Satria	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	13	16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan						900,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		1,200,000,000		1,300,000,000		5,500,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	13	17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda						100,000,000		250,000,000		350,000,000		400,000,000		500,000,000		1,600,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	13	18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan						600,000,000		725,000,000		750,000,000		775,000,000		800,000,000		3,650,000,000
2	13	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olahraga						175,000,000		200,000,000		225,000,000		250,000,000		275,000,000		1,125,000,000
2	13	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						1,000,000,000		1,200,000,000		1,300,000,000		1,400,000,000		1,500,000,000		6,400,000,000
2	13	21	Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga						1,100,000,000		1,250,000,000		1,400,000,000		1,550,000,000		1,700,000,000		7,000,000,000
2	13	23	Program Pengelolaan GOR Satria						525,000,000		650,000,000		675,000,000		700,000,000		725,000,000		3,275,000,000
2	16	0	**Kebudayaan**						2,750,000,000		3,150,000,000		3,525,000,000		3,900,000,000		4,275,000,000		17,600,000,000
2	16	15	Program Pengembangan Nilai Budaya						300,000,000		350,000,000		375,000,000		400,000,000		425,000,000		1,850,000,000
				Persentase penanganan pelanggaran PERDA	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan Perkada	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	16	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya						950,000,000		1,050,000,000		1,150,000,000		1,250,000,000		1,350,000,000		5,750,000,000
				Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP	%				0		0		0		0		0		0
				Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	%				0		0		0		0		0		0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
2	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						1,500,000,000		1,750,000,000		2,000,000,000		2,250,000,000		2,500,000,000		10,000,000,000
				Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	2	0	**Pariwisata**						6,200,000,000		7,000,000,000		8,000,000,000		8,750,000,000		9,500,000,000		39,450,000,000
3	2	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						1,200,000,000		1,300,000,000		1,400,000,000		1,500,000,000		1,600,000,000		7,000,000,000
				Persentase peningkatan promosi pariwisata	%			20.00	0	40.00	0	60.00	0	80.00	0	100.00	0	100.00	0
3	2	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						3,200,000,000		3,500,000,000		4,000,000,000		4,250,000,000		4,500,000,000		19,450,000,000
				Persentase tingkat layanan destinasi wisata	%			16,7	0	16,7	0	16,7	0	16,7	0	100.00	0	100	0
3	2	17	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata						500,000,000		750,000,000		1,000,000,000		1,250,000,000		1,500,000,000		5,000,000,000
				Persentase peningkatan SDM kepariwisataan yang bersertifikasi	%			20	0	40	0	60	0	80	0	100	0	100	0
3	2	18	Program Pengelolaan Lokawisata Baturaden						1,300,000,000		1,450,000,000		1,600,000,000		1,750,000,000		1,900,000,000		8,000,000,000
				Terpenuhinya kebutuhan perkantoran UPT Lokawisata Baturraden selama 1 tahun	%			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
				Realisasi fisik program pengelolaan Lokawisata Baturaden	%			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Realisasi keuangan program pengelolaan Lokawisata Baturraden	%			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN																
2	17	0	**Perpustakaan**						1,590,000,000		1,600,000,000		1,650,000,000		1,700,000,000		1,750,000,000		8,290,000,000
2	17	15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan						1,590,000,000		1,600,000,000		1,650,000,000		1,700,000,000		1,750,000,000		8,290,000,000
				Indek Kepuasan Masyarakat IKM Layanan Perpustakaan				81,95	0	82	0	82,1	0	82,13	0	82,15	0	82,15	0
				Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah	%			5,39	0	5,93	0	6,52	0	7,17	0	7,89	0	7,89	0
				Persentase jumlah perpustakaan terbina	%			19.44	0	26.38	0	33.33	0	40.27	0	47.22	0	47.22	0
2	18	0	**Kearsipan**						4,280,000,000		4,800,000,000		5,155,000,000		5,510,000,000		5,865,000,000		25,610,000,000
2	18	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2,500,000,000		3,000,000,000		3,250,000,000		3,500,000,000		3,750,000,000		16,000,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	18	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						45,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		275,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
2	18	16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah						1,735,000,000		1,750,000,000		1,850,000,000		1,950,000,000		2,050,000,000		9,335,000,000
				Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas	%			25	0	40	0	55	0	70	0	90	0	90	0
				Persentase unit kerja/ OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai standar	%			9,1	0	14,5	0	20	0	27,3	0	36,4	0	36,4	0
			DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN																
3	1	0	**Kelautan dan perikanan**						2,930,000,000		3,170,000,000		3,350,000,000		3,520,000,000		3,700,000,000		16,670,000,000
3	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,550,000,000		1,650,000,000		1,750,000,000		1,850,000,000		1,950,000,000		8,750,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						140,000,000		150,000,000		160,000,000		170,000,000		180,000,000		800,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	1	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan						750,000,000		800,000,000		825,000,000		850,000,000		875,000,000		4,100,000,000
				Produksi Perikanan Budidaya	Ton			10,3	0	10,45	0	10,6	0	10,75	0	10,9	0	10,9	0
				Persentase Kelompok Budidaya bersertifikat	%			20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0
				Peningkatan jumlah kelompok yang naik kelas	Kelompok			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	50	0
3	1	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						250,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		375,000,000		1,600,000,000
				Persentase kelompok pengolah dan pemasaran Poklahsar hasil perikanan yang terbina	%			20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	100	0
				Persentase Kelompok Usaha Perikanan bersertifikat	%			20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	100	0
				Peningkatan angka konsumsi ikan	Kg				0		0		0		0		0		0
				Produksi olahan hasil perikanan	Ton			173,6	0	177,1	0	180,6	0	184,2	0	187,9	0	187,9	0
3	1	24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar						120,000,000		140,000,000		150,000,000		150,000,000		160,000,000		720,000,000
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton			874	0	886	0	900	0	914	0	935	0	4,509	0
				Jumlah Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	Lokasi			20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	100	0
3	1	25	Program Penyediaan Benih Ikan Air Tawar						120,000,000		130,000,000		140,000,000		150,000,000		160,000,000		700,000,000
				Persentase peningkatan produksi benih ikan	%			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	50	0
				Produksi calon induk gurame	Ekor			400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0
3	3	0	**Pertanian**						1,705,000,000		1,880,000,000		2,055,000,000		2,230,000,000		2,405,000,000		10,275,000,000
3	3	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak						75,000,000		85,000,000		95,000,000		105,000,000		115,000,000		475,000,000
				Persentase penurunan Angka kesakitan Ternak Besar	%			4.20	0	4.10	0	4.00	0	3.90	0	3.80	0	3.80	0
				Persentase penurunan Angka kesakitan ternak Kambing dan Domba	%			3.90	0	3.80	0	3.70	0	3.60	0	3.50	0	3.50	0
				Persentase penurunan Angka kesakitan ternak ayam	%			2.90	0	2.80	0	2.70	0	2.60	0	2.50	0	2.50	0
				Persentase penurunan Angka kematian ternak Ternak Besar	%			0.65	0	0.63	0	0.60	0	0.57	0	0.55	0	0.55	0
				Persentase penurunan Angka kematian ternak Kambing dan Domba	%			0.29	0	0.28	0	0.27	0	0.26	0	0.25	0	0.25	0
				Persentase penurunan Angka kematian ternak ayam	%			1.95	0	1.90	0	1.85	0	1.83	0	1.81	0	1.81	0
3	3	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan						1,100,000,000		1,200,000,000		1,300,000,000		1,400,000,000		1,500,000,000		6,500,000,000
				Populasi Sapi Potong	ekor			14,781	0	15,224	0	15,681	0	16,151	0	16,636	0	16,636	0
				Populasi Sapi Perah	ekor			2,347	0	2,418	0	2,49	0	2,565	0	2,642	0	2,642	0
				Populasi Kambing	ekor			170,615	0	175,734	0	181,006	0	186,436	0	192,029	0	192,029	0
				Populasi Domba	ekor			15,646	0	16,115	0	16,599	0	17,096	0	17,609	0	17,609	0
				Populasi Ayam Buras	ekor			1,085,558	0	1,118,125	0	1,151,669	0	1,186,219	0	1,221,805	0	1,221,805	0
				Populasi ayam Pedaging	ekor			3,536,097	0	3,642,180	0	3,751,445	0	3,863,989	0	3,979,908	0	3,979,908	0
				Populasi Ayam Petelur	ekor			1,438,247	0	1,481,394	0	1,525,836	0	1,571,611	0	1,618,759	0	1,618,759	0
				Populasi Itik	ekor			146,323	0	150,713	0	155,234	0	159,891	0	164,688	0	164,688	0
3	3	23	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Peternakan						150,000,000		175,000,000		200,000,000		225,000,000		250,000,000		1,000,000,000

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase kelompok pengolah dan pemasaran (Poklahsar) hasil peternakan yang terlatih	%			16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	80	0
				Persentase kelompok usaha peternakan berijin	%			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	50	0
				Produksi olahan hasil peternakan	Ton			502,76	0	509,65	0	521,05	0	529,25	0	548,35	0	548,25	0
3	3	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan						75,000,000		85,000,000		95,000,000		105,000,000		115,000,000		475,000,000
				Persentase kelompok ternak terlatih yang menerapkan teknologi	%			50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
3	3	25	Program Pengembangan Bibit Ternak dan HPT						125,000,000		135,000,000		145,000,000		155,000,000		165,000,000		725,000,000
				Persentase kenaikan ketersediaan bibit hijauan pakan ternak yang unggul	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kenaikan ketersediaan bibit sapi perah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	3	26	Prpgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan						90,000,000		100,000,000		110,000,000		120,000,000		130,000,000		550,000,000
				Indeks Kepuasan Masyarakat IKM Pelayanan Kesehatan Hewan				76	0	77	0	78	0	79	0	80	0	80	0
3	3	27	Program Penyediaan Daging Ternak ASUH						90,000,000		100,000,000		110,000,000		120,000,000		130,000,000		550,000,000
				Persentase pengawasan pemotongan ternak di RPH	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																
2	3	0	**Pangan**						1,400,000,000		1,540,000,000		1,694,000,000		1,863,400,000		2,049,740,000		8,547,140,000
2	3	15	Program Peningkatan Pola Pangan Harapan						500,000,000		550,000,000		605,000,000		665,500,000		732,050,000		3,052,550,000
				Konsumsi protein	KM			48.15	0	50.35	0	52.55	0	54.80	0	57.00	0	57.00	0
				Konsumsi Energi	kkal/ kap/ hari			2,401	0	2,406	0	2,411	0	2,416	0	2,421	0	2,421	0
				Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%			93.43	0	94.43	0	95.43	0	96.43	0	97.43	0	97.43	0
2	3	16	Program Penguatan Cadangan Pangan						900,000,000		990,000,000		1,089,000,000		1,197,900,000		1,317,690,000		5,494,590,000
				Tingkat ketersediaan energi	%			92.00	0	93.00	0	94.00	0	95.00	0	96.00	0	96.00	0
				Tingkat ketersediaan protein (%)	%			92.00	0	93.00	0	94.00	0	95.00	0	96.00	0	96.00	0
				Stabilitas harga dan pasokan pangan	%			96.00	0	97.00	0	98.00	0	99.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%			63.00	0	64.00	0	65.00	0	66.00	0	67.00	0	100.00	0
3	3	0	**Pertanian**						33,113,700,000		36,979,205,500		40,367,583,036		44,075,516,949		48,133,733,645		202,669,739,130
3	3	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,600,000,000		1,700,000,000		1,800,000,000		1,900,000,000		2,000,000,000		9,000,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	3	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						150,000,000		170,000,000		180,000,000		190,000,000		200,000,000		890,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	3	11	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian						21,335,200,000		23,468,720,000		25,815,592,000		28,397,151,200		31,236,866,320		130,253,529,520
				Persentase kelompok tani terlatih yang menerapkan tekhnologi (%)	%			20.00	0	20.00	0	20.00	0	20.00	0	20.00	0	100.00	0
3	3	14	Program Pemberdayaan Petani dan Pengembangan Kelembagaan Petani						1,203,500,000		1,507,985,500		1,556,241,036		1,606,040,749		1,656,309,825		7,530,077,110
				Cakupan bina kelompok petani	%			76.05	0	78.16	0	85.84	0	93.11	0	100.00	0	100.00	0
3	3	15	Program Perlindungan Tanaman						350,000,000		385,000,000		423,500,000		465,850,000		512,435,000		2,136,785,000

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase penurunan serangan OPT (%)	%			2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	2.00	0	10.00	0
3	3	16	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan						1,200,000,000		1,570,000,000		1,702,000,000		1,847,200,000		2,006,920,000		8,326,120,000
				Produksi tanaman kelapa deres	ton			55,830.6	0	56,388.9	0	56,952.8	0	57,522.3	0	58,097.5	0	284,792.1	0
				Produksi tanaman kelapa dalam	ton			13,550.90	0	13,686.41	0	13,823.27	0	13,961.50	0	14,101.12	0	69,123.2	0
				Produksi tanaman kopi	ton			144.9	0	146.3	0	147.8	0	149.3	0	150.8	0	739.1	0
				Produksi tanaman pala	ton			26,492.00	0	26,757	0	27,024	0	27,295	0	27,568	0	135,135.8	0
				Produksi tanaman lada	ton			59,951.28	0	60,551	0	61,156	0	61,768	0	62,386	0	305,811.8	0
				Produksi tanaman cengkeh	ton			316.65	0	319.8	0	323.0	0	326.2	0	329.5	0	1,615.2	0
				Produksi tanaman tembakau	ton			14.41	0	14.6	0	14.7	0	14.9	0	15.0	0	73.5	0
				Rasio jumlah petani pengguna safety belt	Rasio			-	0	0.25	0	0.25	0	0.25	0	0.25	0	1.00	0
3	3	17	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Pertanian						50,000,000		55,000,000		60,500,000		66,550,000		73,205,000		305,255,000
				Jumlah kelompok tani pelaku usaha agibisnis	unit			280	0	308	0	338	0	372	0	409	0	409.0	0
				Jumlah kegiatan promosi produk pertanian (kali)	kali			5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	25.0	0
				Jumlah Produksi Hasil olahan produk pertanian	KM			120	0	122	0	124	0	126	0	128	0	128.0	0
3	3	18	Program Penyediaan Benih Pertanian						50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		250,000,000
				Jumlah komoditas pertanian yang dibuat perbenihan	Jenis			3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	15	0
3	3	19	Program Pengembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura						3,900,000,000		4,290,000,000		4,719,000,000		5,190,900,000		5,709,990,000		23,809,890,000
				Produksi tanaman Durian	ton			5,393	0	5,447	0	5,502	0	5,557	0	5,612	0	27,511	0
				Produksi tanaman Pisang	ton			27,999	0	28,279	0	28,562	0	28,847	0	29,136	0	142,823	0
				Produksi tanaman Cabai	ton			1,601	0	1,617	0	1,634	0	1,65	0	1,666	0	8,169	0
				Produksi tanaman Padi	ton			400	0	425	0	450	0	475	0	500	0	2,250,000	0
				Produksi tanaman Jagung	ton			18,368	0	18,552	0	18,737	0	18,924	0	19,114	0	93,695	0
				Produksi tanaman Kedelai	ton			1,593	0	1,609	0	1,625	0	1,642	0	1,658	0	8,128	0
				Produktivitas tanaman Padi	ton / ha			5.68	0	5.74	0	5.80	0	5.85	0	5.91	0	5.91	0
				Produktivitas tanaman Jagung	ton / ha			6.04	0	6.10	0	6.16	0	6.22	0	6.28	0	6.28	0
				Produktivitas tanaman Kedelai	ton / ha			1.56	0	1.58	0	1.59	0	1.61	0	1.63	0	1.63	0
3	3	20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian						2,075,000,000		2,282,500,000		2,510,750,000		2,761,825,000		3,038,007,500		12,668,082,500
				Persentase penyuluh pertanian terlatih	%			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
3	3	28	Program Pemberdayaan Petani dan Penyuluh Pertanian						1,200,000,000		1,500,000,000		1,550,000,000		1,600,000,000		1,650,000,000		7,500,000,000
				Persentase penyuluh pertanian terlatih	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Cakupan bina petani	%			46.98	0	47.44	0	47.90	0	48.36	0	48,82	0	48.82	0
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																
3	6	0	**Perdagangan**						7,360,000,000		8,450,000,000		8,875,300,000		9,325,200,000		9,775,000,000		43,785,500,000
3	6	18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri						310,000,000		350,000,000		350,300,000		375,200,000		400,000,000		1,785,500,000
				Persentase Industri Kecil dan Menengah yang diikutkan dalam pameran	%			0.24	0	0.25	0	0.26	0	0.27	0	0.28	0	0.82	0
				Persentase usaha perdagangan yang dibina dan diawasi	%			22.9	0	23	0	23.5	0	24	0	25	0	100	0
3	6	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan						375,000,000		400,000,000		425,000,000		450,000,000		475,000,000		2,125,000,000
				Persentase PKL yang tertata dan terbina sesuai tempat yang diijinkan	%			47.00	0	48.00	0	49.00	0	50.00	0	52.00	0	100	0
3	6	20	Program Penigkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan						4,750,000,000		5,500,000,000		5,750,000,000		6,000,000,000		6,250,000,000		28,250,000,000
				Persentase pasar yang sudah direvitalisasi	%			44.00	0	56.00	0	64.00	0	72.00	0	80.00	0	80.00	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase penerimaan PAD dari retribusi pelayanan pasar	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	6	21	Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian						950,000,000		1,100,000,000		1,150,000,000		1,200,000,000		1,250,000,000		5,650,000,000
				Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	%			98.30	0	98.66	0	99.03	0	99.51	0	100.00	0	100.00	0
3	6	22	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I						250,000,000		275,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		1,500,000,000
				Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto I	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	6	23	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II						250,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		375,000,000		1,600,000,000
				Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	6	24	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat						250,000,000		275,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		1,500,000,000
				Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Barat	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	6	25	Program Pengelolaan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur						225,000,000		250,000,000		275,000,000		300,000,000		325,000,000		1,375,000,000
				Persentase realisasi keuangan UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik UPTD Pasar Wilayah Banyumas Timur	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	7	0	**perindustrian**						3,805,000,000		4,370,000,000		4,905,000,000		5,440,000,000		5,750,000,000		24,270,000,000
3	7	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2,750,000,000		3,000,000,000		3,250,000,000		3,500,000,000		3,750,000,000		16,250,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	7	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						100,000,000		120,000,000		130,000,000		140,000,000		150,000,000		640,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
3	7	16	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						750,000,000		1,000,000,000		1,250,000,000		1,500,000,000		1,525,000,000		6,025,000,000
3	7	17	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri						30,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		230,000,000
				Persentase Industri Kecil dan Menengah yang menguasai teknologi industri	%			0.14	0	0.19	0	0.24	0	0.28	0	0.33	0	0.33	0
3	7	18	Penataan Struktur Industri						175,000,000		200,000,000		225,000,000		250,000,000		275,000,000		1,125,000,000
				Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai daya saing	%			5	0	5.2	0	5.4	0	5.5	0	5.6	0	100.00	0
			SEKRETARIAT DAERAH																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						21,610,000,000		24,814,000,000		26,155,018,822		27,495,007,541		36,264,000,000		136,338,026,363
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						6,500,000,000		7,500,000,000		7,750,000,000		8,000,000,000		8,250,000,000		38,000,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						35,000,000		39,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000		224,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	16	Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan						1,150,000,000		1,300,000,000		1,350,000,000		1,400,000,000		1,450,000,000		6,650,000,000
				Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi	%			70	0	75	0	80	0	85	0	90	0	90	0
4	1	26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan						250,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		375,000,000		1,600,000,000
				Persentase rancangan produk hukum daerah yang diselesaikan sesuai SOP	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	27	Program Informasi dan Layanan Hukum						550,000,000		675,000,000		700,000,000		725,000,000		750,000,000		3,400,000,000
				Persentase produk hukum daerah yang disampaikan kepada masyarakat melalui JDIH	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kasus-kasus hukum yang ditangani	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	28	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah						750,000,000		850,000,000		950,000,000		1,050,000,000		1,150,000,000		4,750,000,000
				Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dilaksanakan secara efektif	%			20	0	40	0	60	0	80	0	100	0	100	0
				Persentase perangkat daerah yang mempunyai pelayanan publik berkualitas	%			40	0	45	0	55	0	60	0	70	0	70	0
				Hasil evaluasi SAKIP pada komponen Nilai Pelaporan Kinerja				6.45	0	6.50	0	6.75	0	7.00	0	7.15	0	7.15	0
				Persentase Kinerja Setda yang berkinerja baik	%			90.00	0	90.00	0	95.00	0	95.00	0	95.00	0	95.00	0
4	1	29	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						200,000,000		250,000,000		260,000,000		270,000,000		280,000,000		1,260,000,000
				Persentase PNS Setda yang berkinerja baik	%			90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0
4	1	30	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan						800,000,000		850,000,000		900,000,000		1,000,000,000		1,050,000,000		4,600,000,000
				Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media spanduk sambutan Bupati dan media relasi lainnya	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	31	Program Pelayanan Keprotokolan						350,000,000		400,000,000		425,000,000		450,000,000		475,000,000		2,100,000,000
				Persentase terlaksananya penyelenggaraan acara kedinasan dan pelayanan tamu Bupati/Wa Bupati/Sekretaris Daerah yang sesuai dengan SOP	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	32	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah						375,000,000		450,000,000		475,000,000		500,000,000		525,000,000		2,325,000,000
				Persentase pelaporan kinerja pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunannya	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	33	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan						950,000,000		1,050,000,000		1,150,000,000		1,250,000,000		1,350,000,000		5,750,000,000
				Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	%			80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
4	1	34	Program Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Perekonomian						550,000,000		650,000,000		700,000,000		750,000,000		800,000,000		3,450,000,000
				Persentase pengembangan usaha daerah dan BUMD yang sehat dan profitable	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kebijakan daerah di bidang perekonomian yang sesuai ketentuan yang berlaku	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	35	Program Sosial Keagamaan						2,500,000,000		3,000,000,000		3,100,000,000		3,200,000,000		3,300,000,000		15,100,000,000
				Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	%			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Persentase Bantuan tunjangan makan untuk anak yatim piatu di panti asuhan yang tersalurkan	%			100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	36	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan						650,000,000		750,000,000		850,000,000		875,000,000		900,000,000		4,025,000,000
				Persentase jumlah titik toponimi yang diusulkan pembakuan nama ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	%			80.00	0	85.00	0	90.00	0	95.00	0	100	0	100.00	0
				Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindak lanjuti	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Penyampaian LKPJ LPPD yang tepat waktu	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%			80	0	85	0	85	0	90	0	100	0	100	0
				Persentase jumlah fasilitasi kegiatan otonomi daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%			80	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100	0
4	1	37	Program Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa						1,100,000,000		1,250,000,000		1,300,000,000		1,325,000,000		1,350,000,000		6,325,000,000
				Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	39	Program Pembinaan Keagamaan						2,000,000,000		2,200,000,000		2,400,000,000		2,600,000,000		2,800,000,000		12,000,000,000
				Persentase jumlah kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya	%			0	0	70	0	80	0	90	0	100	0	100	0
4	1	40	Program Kesra						600,000,000		700,000,000		725,000,000		750,000,000		775,000,000		3,550,000,000
				Persentase jumlah fasilitasi dan layanan kebijakan daerah di bidang kesra yang sesuai ketentuan yang berlaku	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase perumusan kebijakan di bidang pendidikan kepemudaan dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang difasilitasi	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Perumusan kebijakan di bidang sosial kesehatan keluarga berencana penanganan bencana alam dan kecelakaan kerja yang difasilitasi	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	41	Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah						2,300,000,000		2,600,000,000		2,750,018,822		2,950,007,541		10,629,000,000		21,229,026,363
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengadaan barang jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas				100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik	%			19.00	0	19.50	0	20.00	0	20.50	0	21.00	0	21.00	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang berhasil	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	42	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian						0		0		0		0		0		0
4	1	42							0		0		0		0		0		0
			SEKRETARIAT DPRD																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						23,350,000,000		26,875,000,000		28,050,000,000		29,225,000,000		30,400,000,000		137,900,000,000
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						2,750,000,000		3,350,000,000		3,450,000,000		3,550,000,000		3,650,000,000		16,750,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						200,000,000		225,000,000		250,000,000		275,000,000		300,000,000		1,250,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	15	Program Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat						3,000,000,000		3,500,000,000		3,750,000,000		4,000,000,000		4,250,000,000		18,500,000,000
				Persentase materi bintek yang di aplikasikan dalam tusi anggota dewan	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	16	Program Layanan Pimpinan dan Kehumasan						1,150,000,000		1,300,000,000		1,350,000,000		1,400,000,000		1,450,000,000		6,650,000,000
				Persentase berita positif kegiatan DPRD di media informasi	%			70	0	75	0	80	0	85	0	90	0	90	0
4	1	17	Program Peningkatan Fasilitasi Produk Hukum						6,500,000,000		7,500,000,000		7,750,000,000		8,000,000,000		8,250,000,000		38,000,000,000
				Persentase persetujuan bersama bupati dan DPRD terhadap Raperda	%			70	0	75	0	80	0	80	0	80	0	80	0
4	1	18	Program Peningkatan Fasilitasi Rapat dan Alat Kelengkapan DPRD						6,500,000,000		7,500,000,000		7,750,000,000		8,000,000,000		8,250,000,000		38,000,000,000
				Persentase rapat-rapat Dewan yang tepat waktu	%			90	0	90	0	90	0	90	0	90	0	90	0
				Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	%			60	0	65	0	70	0	75	0	80	0	90	0
4	1	19	Program Fasilitasi Aspirasi						3,250,000,000		3,500,000,000		3,750,000,000		4,000,000,000		4,250,000,000		18,750,000,000
				Persentase fasilitasi pengkajian aspirasi masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi hukum	%			30	0	40	0	50	0	60	0	65	0	80	0
			INSPEKTORAT																
4	7	0	**Pengawasan**						3,715,000,000		4,170,000,000		4,525,000,000		4,880,000,000		5,335,000,000		22,625,000,000
4	7	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						950,000,000		1,150,000,000		1,200,000,000		1,250,000,000		1,300,000,000		5,850,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	7	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						15,000,000		20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		125,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	7	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah						2,750,000,000		3,000,000,000		3,300,000,000		3,600,000,000		4,000,000,000		16,650,000,000
				Persentase LHP terbit tepat waktu	%			80	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang diselesaikan	%			70	0	72	0	74	0	76	0	78	0	78	0
				Kapabilitas APIP				3	0	3.2	0	3.3	0	3.5	0	3.7	0	3.7	0
				Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN AJIBARANG																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,778,988,000		21,580,451,000		21,877,690,000		22,174,929,000		22,472,200,000		105,884,259,190
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						703,988,000		750,451,000		792,690,000		834,929,000		877,200,000		3,959,258,590
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						75,000,000		80,000,000		85,000,000		90,000,000		95,000,000		425,000,600
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN BANYUMAS																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,679,000,000		21,515,000,000		21,840,000,000		22,175,000,000		22,505,000,000		105,714,000,011
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						669,000,000		750,000,000		820,000,000		900,000,000		975,000,000		4,114,000,006
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						10,000,000		15,000,000		20,000,000		25,000,000		30,000,000		100,000,005
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN BATURRADEN																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,700,180,000		21,520,198,000		21,847,217,800		22,181,939,580		22,525,133,538		105,774,668,918
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						670,180,000		737,198,000		810,917,800		892,009,580		981,210,538		4,091,515,918
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30,000,000		33,000,000		36,300,000		39,930,000		43,923,000		183,153,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN CILONGOK																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,700,180,000		21,520,198,000		21,847,217,800		22,181,939,580		22,525,133,538		105,774,668,918
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						670,180,000		737,198,000		810,917,800		892,009,580		981,210,538		4,091,515,918
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30,000,000		33,000,000		36,300,000		39,930,000		43,923,000		183,153,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN GUMELAR																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,700,180,000		21,520,198,000		21,847,217,800		22,181,939,580		22,525,133,538		105,774,669,018
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						670,180,000		737,198,000		810,917,800		892,009,580		981,210,538		4,091,516,018
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30,000,000		33,000,000		36,300,000		39,930,000		43,923,000		183,153,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN JATILAWANG																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,524,500,000		21,305,000,000		21,586,500,000		21,865,000,000		22,140,000,000		104,421,001,130
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						504,500,000		530,000,000		556,500,000		580,000,000		600,000,000		2,771,000,590
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		150,000,540
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN KALIBAGOR																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,592,460,000		21,401,950,000		21,718,000,000		22,044,950,000		21,500,873,000		104,258,234,190
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						556,860,000		611,450,000		672,500,000		739,450,000		812,5		2,581,073,090
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						35,600,000		40,500,000		45,500,000		55,500,000		60,5		177,161,100
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN KARANGLEWAS																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,767,500,000		21,598,500,000		21,937,100,000		22,284,060,000		22,640,216,000		106,227,377,046
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						760,000,000		836,000,000		919,600,000		1,011,560,000		1,112,716,000		4,639,876,600
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						7,500,000		12,500,000		17,500,000		22,500,000		27,500,000		87,500,446
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN KEBASEN																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,598,140,000		21,398,500,000		21,720,000,000		22,041,000,000		22,372,200,000		105,129,841,200
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						590,640,000		640,000,000		710,000,000		780,000,000		860,000,000		3,580,640,600
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						7,500,000		8,500,000		10,000,000		11,000,000		12,200,000		49,200,600
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN KEDUNGBANTENG																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,267,475,000		21,044,222,500		21,323,644,750		21,606,009,225		21,891,610,148		103,132,961,823
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						247,510,000		272,261,000		299,487,100		329,435,810		362,379,391		1,511,073,401
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						19,965,000		21,961,500		24,157,650		26,573,415		29,230,757		121,888,422
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN KEMBARAN																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,965,800,000		21,715,800,000		21,965,800,000		22,215,800,000		22,465,800,000		106,329,000,000
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						943,800,000		943,800,000		943,800,000		943,800,000		943,800,000		4,719,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000		110,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN KEMRANJEN																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						18,134,996,120		22,002,495,732		22,381,245,305		22,772,369,836		23,177,106,819		108,468,214,412

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,124,996,120		1,237,495,732		1,361,245,305		1,497,369,836		1,647,106,819		6,868,214,412
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						10,000,000		15,000,000		20,000,000		25,000,000		30,000,000		100,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN LUMBIR																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,602,000,000		21,412,200,000		21,728,420,000		22,051,262,000		22,381,388,200		105,175,271,400
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						582,000,000		640,200,000		704,220,000		774,642,000		852,106,200		3,553,168,800
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						20,000,000		22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000		122,102,600
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
			KECAMATAN PATIKRAJA																
4	1	0	Administrasi Pemerintahan						17,713,400,000		21,508,504,000		21,826,008,000		22,098,712,000		21,500,918,616		104,647,542,616
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						668,400,000		708,504,000		771,008,000		788,712,000		853,616		2,937,477,616
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						45,000,000		50,000,000		55,000,000		60,000,000		65		210,065,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN PEKUNCEN																
4	1	0	Administrasi Pemerintahan						17,700,180,000		21,520,198,000		21,847,217,800		22,181,939,580		22,525,133,538		105,774,668,918
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						670,180,000		737,198,000		810,917,800		892,009,580		981,210,538		4,091,515,918
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30,000,000		33,000,000		36,300,000		39,930,000		43,923,000		183,153,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN PURWOJATI																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,420,000,000		21,216,000,000		21,516,100,000		21,820,710,000		22,130,281,000		104,103,091,000
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						410,000,000		451,000,000		496,100,000		545,710,000		600,281,000		2,503,091,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						10,000,000		15,000,000		20,000,000		25,000,000		30,000,000		100,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN PURWOKERTO BARAT																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,816,000,000		24,830,000,000		25,284,000,000		25,748,200,000		26,223,110,000		119,901,311,000
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						766,000,000		3,830,000,000		4,021,500,000		4,222,575,000		4,433,703,750		17,273,779,250
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						50,000,000		250,000,000		262,500,000		275,625,000		289,406,250		1,127,531,750
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						18,111,994,000		22,010,000,000		22,323,000,000		22,639,150,000		22,955,391,875		108,039,537,075
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,086,994,000		1,225,000,000		1,286,250,000		1,350,562,500		1,414,875,000		6,363,682,100
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						25,000,000		35,000,000		36,750,000		38,587,500		40,516,875		175,854,975
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,645,000,000		21,427,250,000		21,711,112,500		21,996,667,375		22,284,000,744		105,064,030,619
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						615,000,000		645,750,000		678,037,500		711,939,375		747,536,344		3,398,263,219
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						30,000,000		31,500,000		33,075,000		34,728,000		36,464,400		165,767,400
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN PURWOKERTO UTARA																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,714,570,963		21,121,750,000		21,390,337,500		21,659,854,375		21,930,347,094		103,816,860,932
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						699,570,963		356,000,000		373,800,000		392,490,000		412,114,500		2,233,975,963
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						15,000,000		15,750,000		16,537,500		17,364,375		18,232,594		82,884,969
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN RAWALO																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,420,000,000		21,216,000,000		21,516,100,000		21,820,710,000		22,130,281,000		104,103,091,000
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						410,000,000		451,000,000		496,100,000		545,710,000		600,281,000		2,503,091,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						10,000,000		15,000,000		20,000,000		25,000,000		30,000,000		100,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN SOKARAJA																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,641,800,000		21,411,800,000		21,676,800,000		21,941,800,000		22,206,800,000		104,879,000,011
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						621,800,000		631,800,000		641,800,000		651,800,000		661,800,000		3,209,000,006
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						20,000,000		30,000,000		35,000,000		40,000,000		45,000,000		170,000,005
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN SOMAGEDE																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,602,000,000		21,412,200,000		21,728,420,000		22,051,262,000		22,381,388,200		105,175,271,400
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						582,000,000		640,200,000		704,220,000		774,642,000		852,106,200		3,553,168,800
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						20,000,000		22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000		122,102,600
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN SUMBANG																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,709,400,000		21,530,340,000		21,858,374,000		22,194,211,400		22,538,632,540		105,830,959,140
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						694,400,000		763,840,000		840,224,000		924,246,400		1,016,671,040		4,239,382,040
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						15,000,000		16,500,000		18,150,000		19,965,000		21,961,500		91,577,100
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN SUMPIUH																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,837,000,000		21,851,200,000		22,211,320,000		22,582,452,000		22,965,697,200		106,625,669,210
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						822,000,000		1,081,700,000		1,189,870,000		1,308,857,000		1,439,742,700		5,020,169,705
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						15,000,000		19,500,000		21,450,000		23,595,000		25,954,500		105,499,505
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN TAMBAK																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,665,000,000		21,481,500,000		21,804,650,000		22,135,115,000		22,473,626,500		105,559,891,500
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500		152,627,500
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						640,000,000		704,000,000		774,400,000		851,840,000		937,024,000		3,907,264,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			KECAMATAN WANGON																
4	1	0	**Administrasi Pemerintahan**						17,679,840,000		21,467,000,000		21,757,000,000		22,049,000,000		22,314,100,000		105,266,941,130
4	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						667,860,000		701,000,000		736,000,000		773,000,000		811,000,000		3,688,860,590
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
4	1	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						11,980,000		16,000,000		21,000,000		26,000,000		3,100,000		78,080,540
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	1	43	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan						17,000,000,000		20,750,000,000		21,000,000,000		21,250,000,000		21,500,000,000		101,500,000,000
				Persentase permohonan administrasi kependudukan dan PATEN yang terlayani secara baik	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa/kelurahan yang memiliki dokumen perencanaan yang baik	%			85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembayaran PBB di kecamatan	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0
				Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	%			95	0	95	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase Linmas terbina	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase pembangunan sarana prasarana yang terbangun	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																
4	2	0	**Perencanaan**						3,510,000,000		3,905,000,000		4,145,000,000		4,380,000,000		4,595,000,000		20,535,000,000
4	2	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,150,000,000		1,300,000,000		1,350,000,000		1,400,000,000		1,450,000,000		6,650,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	2	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						85,000,000		100,000,000		105,000,000		110,000,000		120,000,000		520,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	2	21	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Umum Pembangunan Daerah						400,000,000		425,000,000		450,000,000		475,000,000		500,000,000		2,250,000,000
				Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang perencanaan umum pembangunan daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	2	22	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Ekonomi						250,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		375,000,000		1,600,000,000
				Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang ekonomi	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	2	23	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial						325,000,000		375,000,000		400,000,000		425,000,000		450,000,000		1,975,000,000
				Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang pemerintahan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
4	2	24	Program Peningkatan Kualitas Analisis Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah						1,100,000,000		1,150,000,000		1,200,000,000		1,250,000,000		1,300,000,000		6,000,000,000
				Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase ketersediaan analisis teknokratik bidang infrastruktur dan prasarana wilayah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	2	26	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						100,000,000		150,000,000		200,000,000		250,000,000		275,000,000		975,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program pada dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD	%			65	0	70	0	75	0	80	0	85	0	85	0
4	2	27	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Perencanaan						100,000,000		105,000,000		115,000,000		120,000,000		125,000,000		565,000,000
				Persentase ketersediaan sistem informasi profil daerah yang lengkap	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
			BADAN KEUANGAN DAERAH																
4	3	0	**Keuangan**						60,385,000,000		68,040,000,000		73,320,000,000		76,600,000,000		79,880,000,000		358,225,000,000
4	3	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,600,000,000		1,800,000,000		1,900,000,000		2,000,000,000		2,100,000,000		9,400,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	3	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						35,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000		55,000,000		225,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	3	15	Program Peningkatan Pendapatan Daerah						650,000,000		800,000,000		825,000,000		850,000,000		875,000,000		4,000,000,000
				Persentase realisasi jumlah pendapatan daerah yang meliputi PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang sah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%			6,46	0	6,86	0	7,26	0	7,66	0	8,06	0	8,06	0
4	3	16	Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset Daerah						29,000,000,000		30,000,000,000		33,000,000,000		35,000,000,000		37,000,000,000		164,000,000,000
				Persentase perangkat daerah yang administrasi asetnya baik	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	100	0
4	3	17	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah						250,000,000		275,000,000		300,000,000		325,000,000		350,000,000		1,500,000,000
				Realisasi anggaran kas OPD sesuai target	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%				0		0		0		0		0		0
4	3	18	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah						550,000,000		675,000,000		700,000,000		725,000,000		750,000,000		3,400,000,000
				Persentase Wajib Pajak yang memiliki NPWPD.	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun2019		Tahun2020		Tahun2021		Tahun2022		Tahun2023		Kondisi Kinerja Akhir Periode	
						2017	2018	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
-1			-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
				Persentase obyek pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pajak Daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	3	19	Program Peningkatan Kualitas Dokumen Penganggaran						600,000,000		650,000,000		700,000,000		750,000,000		800,000,000		3,500,000,000
				Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase DPA OPD yang sesuai ketentuan yang berlaku.	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase belanja pendidikan (20%)	%			29	0	29	0	29	0	29	0	29	0	29	0
				Persentase belanja kesehatan (10%)	%			12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0
4	3	20	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah						700,000,000		800,000,000		850,000,000		900,000,000		950,000,000		4,200,000,000
				Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu	%			75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	100	0
4	3	21	Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keuangan Daerah						27,000,000,000		33,000,000,000		35,000,000,000		36,000,000,000		37,000,000,000		168,000,000,000
				Persentase tingkat kepatuhan pembayaran tagihan LPJU imbal jasa PD BPR BKK	KM			100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0
				Persentase tingkat kepatuhan penyampaian LPJ keuangan	KM			95.00	0	95.00	0	95.00	0	95.00	0	100.00	0	100.00	0
			BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH																
4	4	0	**Kepegawaian**						2,475,000,000		2,720,000,000		2,831,000,000		2,938,000,000		3,044,500,000		14,008,500,000
4	4	1	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran						1,700,000,000		1,800,000,000		1,850,000,000		1,900,000,000		1,950,000,000		9,200,000,000
				Persentase realisasi keuangan program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Persentase realisasi fisik program	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	4	6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah						15,000,000		20,000,000		25,000,000		30,000,000		35,000,000		125,000,000
				Kesesuaian program antar dokumen perencanaan perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
				Kesesuaian program antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat daerah	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	4	18	Program Peningkatan Kinerja dan Disiplin ASN						165,000,000		200,000,000		206,000,000		213,000,000		219,500,000		1,003,500,000
				Persentase ASN yang berkinerja baik	%			91	0	93	0	94	0	95	0	96	0	97	0
				Persentase ASN yang memperoleh hukuman disiplin tingkat berat	%			0.0024	0	0.0022	0	0.0021	0	0.002	0	0.0019	0	0.0019	0
4	4	19	Program Peningkatan Tata Kelola Informasi ASN						395,000,000		450,000,000		490,000,000		525,000,000		560,000,000		2,420,000,000
				Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi	%			0.17	0	0.17	0	0.15	0	0.13	0	0.13	0	0.18	0
				Persentase data ASN yang akurat	%			100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
4	4	20	Program Penataan Jabatan, Kepangkatan dan Pengembangan Karir ASN						200,000,000		250,000,000		260,000,000		270,000,000		280,000,000		1,260,000,000
				Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%			90	0	91	0	92	0	93	0	95	0	95	0
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%			90	0	90	0	90	0	90	0	100	0	100	0
4	5	0	**Pendidikan dan Pelatihan**						2,200,000,000		2,500,000,000		2,600,000,000		2,700,000,000		2,800,000,000		12,800,000,000
4	5	15	Program Pengembangan Kompetensi ASN						2,200,000,000		2,500,000,000		2,600,000,000		2,700,000,000		2,800,000,000		12,800,000,000
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%			0.09	0	0.064	0	0.051	0	0.086	0	0.057	0	0.348	0

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Banyumas dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator sasaran (impact) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Reformasi Birokrasi		63.79	NA	66	68	70	73	75	75
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70.75	71.35	71.95	72.55	73.15	73.75	74.35	74.35
3	Persentase penduduk miskin	%	17.05	13.5	12.51	11.53	10.54	9.55	8.56	8.56
4	Indeks Gini		0.310	0.309	0.308	0.307	0.306	0.305	0.304	0.304
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		0.3456	0.3456	0.3416	0.3376	0.3336	0.3296	0.3256	0.3256
6	PDRB per kapita	juta rupiah	27.380	29.230	31.115	33.000	34.885	36.770	38.655	38.655
7	Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6.34	6.35	6.40	6.45	6.50	6.60	6.65	6.65
8	Nilai Tukar Petani (NTP)		100.08	100.33	100.83	101.33	101.84	102.35	102.86	102.86
9	Indeks Ketahanan Pangan		NA	73.99	74.00	74.01	74.02	74.03	74.04	74.04
10	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	%	2	2	2	2	2	2	2	10
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		NA	64.81	63.79	63.88	63.97	64.06	64.15	64.15
12	Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	NA	70.88	79.86	80.01	82.25	82.41	82.56	82.56
13	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan Wisnus)	%	NA	11.91	25.36	5.86	5.48	5.48	6.35	48.48
14	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	NA	NA	0	5	5	10	15	15
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.62	4.49	4.36	4.23	4.06	3.93	3.76	3.76
16	Persentase penurunan konflik sosial	%	NA	78	64	56	44	33	21	21
17	Angka Kriminalitas	Kasus	599	677	731	792	823	891	950	950
18	Indeks Demokrasi		NA	74.46	77.83	79.30	80.31	84.54	86.00	86.00
19	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	NA	NA	32.87	47.47	68.68	85.29	100	100

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	DINAS PENDIDIKAN									
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.63	12.78	12.93	13.08	13.23	13.38	13.53	13.53
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.40	7.45	7.50	7.55	7.60	7.65	7.70	7.70
	DINAS KESEHATAN									
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
4	Angka Kematian Ibu (AKI) per . Kelahiran Hidup		54.16	67.87	67.80	67.50	67.25	67.00	66.50	66.50
5	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.33	73.43	73.53	73.63	73.73	73.83	73.93	73.93
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS (BLUD)									
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Banyumas		76.78	74.89	75.00	76.00	78.00	80.00	85.00	85
7	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	%	68.18	72.73	77.27	77.27	81.82	81.82	86.36	86.36
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG									
8	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan	%	75	79	82	83	84	85	85	85
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD Ajibarang		76.78	79.00	82.00	83.00	84.00	85.00	85.00	85.00
	DINAS PEKERJAAN UMUM									
10	Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa konstruksi	%	NA	NA	17.87	30.29	42.71	55.13	67.55	67.55
11	Persentase aset bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%	57.7	60.7	63.7	66.7	69.7	72.7	75.7	75.7
12	Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	71.80	72.55	73.30	74.05	74.80	75.55	78.80	78.80
13	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	%	NA	83.99	85.20	86.71	88.22	89.73	91.24	91.24
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
14	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	%	NA	83.17	84.17	85.17	86.17	87.17	88.17	88.17
15	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	99.979	99.980	99.981	99.982	99.983	99.984	99.985	99.985
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
16	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	%	NA	25.0	40.0	42.3	50.0	60.0	66.7	66.7
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
17	Persentase penurunan konflik SARA	%	NA	NA	5	5	5	5	5	25
18	Persentase penurunan angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	%	NA	NA	5	5	5	5	5	25
19	Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik	%	70	73	75	75	75	75	75	75
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
20	Tingkat penyelesaian pelanggaran K (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase penegakan perda	%	90	95	100	100	100	100	100	100
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
22	Indeks Desa Membangun		0.660	0.663	0.668	0.674	0.681	0.688	0.694	0.694
23	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU No. Tahun	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
24	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	5	5	5	5	5	5	5	5
25	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	43.19	47.55	51.41	51.50	51.57	51.62	51.66	51.66

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH									
26	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	0,34	1,05	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
27	Persentase koperasi sehat	%	29.12	29.71	30.00	30.25	30.50	30.75	31.00	31.00
28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65.19	65.70	66.09	66.49	66.89	67.30	67.71	67.71
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
29	Indeks Kualitas Air (IKA)		46.94	34.67	54.20	54.40	54.60	54.80	55.00	55.00
30	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		NA	73.94	56.50	56.50	56.50	56.50	56.50	56.50
31	Indeks Kualitas Udara (IKU)		85.72	82.78	83.10	83.20	83.30	83.40	83.50	83.50
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
32	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		81.83	85.91	86.31	87.89	88.15	88.55	89.12	89.12
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB, PP DAN PA									
33	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.87	NA	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82
34	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67.32	NA	67.45	67.50	67.55	67.57	67.60	67.60
35	Nilai Kabupaten Layak Anak		426	514	550	600	650	700	750	750
36	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87.62	NA	87.63	87.64	87.65	87.66	87.67	87.67
	DINAS PERHUBUNGAN									
37	Prosentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan	%	39	43	45	52	53	55	60	60
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
38	Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		8	5	5	4	4	3	2	2
39	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		NA	2.63	2.80	2.90	3.20	3.30	3.50	3.50
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU									
40	Nilai investasi di kawasan industri	Milyar Rupiah	NA	NA	0	0	0	100	100	200
41	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	583	625	255	260	265	270	275	275
42	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		77.23	83.60	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	90.00
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
43	Persentase jenis kesenian yang dilestarikan	%	NA	NA	37.74	50.94	77.36	90.57	100	100
44	Persentase pertumbuhan desa wisata	%	NA	35.71	57.14	64.29	78.57	85.71	100.00	100.00
45	Jumlah kunjungan wisatawan	wisatawan	1233595	2363002	2962421	3134193	3306077	3487246	3708792	16598729
46	Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi	%	NA	35.50	35.50	1.31	2.59	2.94	3.27	45.61
	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN									
47	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat	%	2.80	2.86	2.87	2.88	2.89	2.91	2.93	2.93
48	Nilai penyelenggaraan Kearsipan		52	67	70	72	74	76	77	77
	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN									
49	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Peternakan	%	NA	NA	2	2	2	2	2	10
50	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	NA	NA	2	2	2	2	2	10
51	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	6.19	3.07	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
52	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1.38	1.09	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	7.5
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN									
53	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%	NA	NA	1	1	1	1	1	5
54	Persentase Penguatan cadangan pangan	%	70	75	75	80	82	84	86	86
55	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	90	94	94	95	96	96	97	97

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Target Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN									
56	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	0.39	1.15	1.25	1.34	1.69	1.84	1.98	1.98
57	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	4.44	4.45	4.47	4.48	4.49	4.51	4.52	4.52
58	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5.78	5.80	5.81	5.82	5.83	5.85	5.86	5.86
	SEKRETARIAT DAERAH									
59	Nilai Evaluasi LKJIP Sekretariat Daerah		73.92	73.92	73.92	73.92	73.93	73.94	73.95	73.95
	SEKRETARIAT DPRD									
60	Indeks Kepuasan DPRD	%	80	80	80	81	82	83	84	84
	INSPEKTORAT									
61	Indeks Persepsi Korupsi		3.38	NA	3.45	3.50	3.55	3.65	3.75	3.75
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
62	Prosentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	NA	NA	60	62	65	67	70	70
63	Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan	%	NA	NA	90	91	92	93	95	95
	BADAN KEUANGAN DAERAH									
64	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
65	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	15	15	15.00	15.00	17.00	17.00	18.00	18.00
	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH									
66	Indek Profesionalitas ASN		82.79	82.80	83.10	83.40	83.60	83.60	83.70	83.7
	KECAMATAN									
67	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		52.39	52.99	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00	86.00

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banyumas tertuang pada Tabel 8.3.

Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.63	12.78	12.93	13.08	13.23	13.38	13.53	13.53
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.40	7.45	7.50	7.55	7.60	7.65	7.70	7.70
3	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.33	73.43	73.53	73.63	73.73	73.83	73.93	73.93
4	Indeks Gini		0.310	0.309	0.308	0.307	0.306	0.305	0.304	0.304
5	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		0.3456	0.3456	0.3416	0.3376	0.3336	0.3296	0.3256	0.3256
6	Indeks Pembangunan Manusia		70.75	71.35	71.95	72.55	73.15	73.75	74.35	74.35
7	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	PDRB per kapita	juta rupiah	27.380	29.230	31.115	33.000	34.885	36.770	38.655	38.655
9	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	%	62.00	62.00	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00	100.00
10	Persentase penduduk miskin	%	17.05	13.5	12.51	11.53	10.54	9.55	8.56	8.56
11	Persentase Penguatan cadangan pangan	%	70	NA	75	80	82	84	86	86
12	Persentase penurunan penduduk miskin	%	0.4	3.55	0.99	0.98	0.99	0.99	0.99	4.94
13	Persentase Pertumbuhan PDRB	%	6.34	6.35	6.40	6.45	6.50	6.60	6.65	6.65
14	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5.78	5.80	5.81	5.82	5.83	5.85	5.86	5.86
15	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda	%	4.44	4.45	4.47	4.48	4.49	4.51	4.52	4.52
16	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kehutanan dan	%	3.17	3.28	3.36	3.58	3.72	3.85	4.03	4.03
17	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
18	Skor Pola Pangan Harapan	%	90.01	90.20	90.80	91.00	91.20	91.40	91.60	91.60
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65.19	65.70	66.09	66.49	66.89	67.30	67.71	67.71
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.62	4.49	4.36	4.23	4.06	3.93	3.76	3.76
	B. Aspek Daya Saing									
1	Angka Kriminalitas	Kasus	599	677	731	792	823	891	950	950
2	Indeks Daya Saing Infrastruktur	%	NA	70.88	79.86	80.01	82.25	82.41	82.56	82.56
3	Nilai Tukar Petani (NTP)		100.08	100.33	100.83	101.33	101.84	102.35	102.86	102.86
4	Persentase Pertumbuhan Industri Kreatif	%	NA	NA	0	5	5	10	15	15
5	Rasio Ketergantungan	%	49.8	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0
	C. Aspek Pelayanan Umum									
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	80	95	96	97	98	99	100	100
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	94	95	96	97	98	99	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		81.83	85.91	86.31	87.89	88.15	88.55	89.12	89.12
4	Persentase instansi pengguna data kependudukan yang melakukan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kecamatan yang update database kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase pemohon akta kelahiran yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase pemohon akta kematian yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pemohon akta perkawinan yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pemohon Kartu Identitas Anak yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase pemohon Kartu Keluarga yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase pemohon KTP-Elektronik yang terlayani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Rasio bayi berakte kelahiran	%	86	90	92	93	95.6	97.5	98.7	98.7
15	Rasio pasangan berakte nikah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Administrasi Pemerintahan									
16	Cakupan fasilitasi marbot dan petugas tempat ibadah lainnya	%	NA	NA	0	70	80	90	100	100
17	Indeks Kepuasan DPRD	%	80	80	80	81	82	83	84	84
18	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan		52.39	52.99	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00	86.00
19	Indeks Reformasi Birokrasi		63.79	NA	66	68	70	73	75	75
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		60.22	70.95	72	74	76	78	80	80
21	Nilai Evaluasi LKJIP Sekretariat		73.92	73.92	73.92	73.92	73.93	73.94	73.95	73.95
22	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiapb Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Dokumen	NA	NA	5	5	5	5	5	5
	Energi dan sumber daya mineral									
	Kearsipan									
23	Nilai penyelenggaraan Kearsipan		52	67	70	72	74	76	77	77
24	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	Orang	NA	NA	176	185	287	215	257	1120
25	Persentase pengelolaan arsip statis dalam kondisi baik di Pemerintah Kab.Banyumas	%	NA	10	25	40	55	70	90	90
26	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	NA	5.5	9.1	14.5	20	27.3	36.4	36.4
27	Persentase unit kerja/ OPD yang mempunyai daftar arsip sesuai	%	NA	5.5	9.1	14.5	20	27.3	36.4	36.4
	Kebudayaan									
28	Persentase jenis kesenian yang dilestarikan	%	NA	NA	37.74	50.94	77.36	90.57	100	100
29	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	%	NA	63.64	63.64	72.73	81.82	90.91	100	100
30	Persentase Pelestarian Budaya Banyumas	%	NA	NA	32.87	47.47	68.68	85.29	100	100
31	Persentase penetapan cagar budaya dengan SK Bupati	%	NA	2.00	28	44	60	80	100	100
	Kehutanan									
	Kelautan dan perikanan									
32	Konsumsi Ikan	kg/kapita/ tahun	13.85	14.33	14.38	14.42	14.47	14.52	14.57	14.57
33	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	NA	NA	2	2	2	2	2	10
34	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1.38	1.09	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	7.5
35	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	NA	NA	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	7.5
36	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	NA	NA	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	7.5
37	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	170.2	173.6	173.6	177.1	180.6	184.2	187.9	903.4
38	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10162	10249	10403	10559	10717	10878	11041	53597
39	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.39	872	885	898	912	926	939	4560
	Kepegawaian									
40	Indek Profesionalitas ASN		82.79	82.80	83.10	83.40	83.60	83.60	83.70	83.7
41	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabatan	189	189	189	189	189	189	189	189
42	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	31	31	31	31	31	31	31	31
43	Jumlah pelaksanaan pengisian JPTP & Jabatan administrasi	Keg	26	26	26	26	26	26	26	26
44	Persentase jumlah ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan syarat jabatan	%	40	23	90	91	92	93	95	95
	Kepemudaan dan Olah Raga									
45	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	NA	NA	51	56	61	66	71	71
46	Persentase penurunan konflik	%	NA	78	64	56	44	33	21	21
47	Persentase pertumbuhan pemuda berprestasi	%	NA	35.50	35.50	1.31	2.59	2.94	3.27	45.61
	Kesehatan									
48	Angka keberhasilan pengobatan pasien TB RO	%	70	70	75	75	75	75	75	75
49	Angka Kejadian Malaria (API : kasus per penduduk)		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
50	Angka Kelangsungan Hidup bayi		991.57	992.16	991.97	991.98	991.99	992.00	992.10	992.10
51	Angka kematian balita		9.81	8.94	8.90	8.80	8.60	8.40	8.20	8.20
52	Angka Kematian Bayi		8.43	7.84	8.03	8.01	8.00	7.90	7.90	7.90

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
53	Angka Kematian Ibu (AKI) per . Kelahiran Hidup		54.16	67.87	67.80	67.50	67.25	67.00	66.50	66.50
54	Angka Kematian Neonatal		5.84	5.81	5.50	5.25	5.00	4.75	4.50	4.50
55	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.33	73.43	73.53	73.63	73.73	73.83	73.93	73.93
56	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
57	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
58	Cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan epidemiologi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
59	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
60	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	10	10	11	11,5	12	12,5	13	13
61	Cakupan Jaminan Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
62	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
63	Cakupan kunjugan ibu hamil K	%	100	100	100	100	100	100	100	100
64	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
65	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
66	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	100	100	100	100	100	100
67	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
68	Cakupan pelayanan gawat darurat level yang harus diberikan sarana kesehatan (Rumah Sakit)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
69	Cakupan pelayanan ibu hamil K	%	100	100	100	100	100	100	100	100
70	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100
71	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pada pondok pesantren	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
72	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100
73	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
74	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia - bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100
75	Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK	%	NA	NA	100	100	1001	100	100	100
76	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100
77	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	%	100	100	100	100	100	100	100	100
78	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
79	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
80	Cakupan Puskesmas	%	144	144	148	151	151	151	151	151
81	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78	11.78
82	Case Fatality Rate DBD (%)	%	1,47	3,63	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
83	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD		76.78	79.00	82.00	83.00	84.00	85.00	85.00	85.00
84	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan RSUD		76.78	74.89	75.00	76.00	78.00	80.00	85.00	85
85	Non AFP rate per . penduduk		>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2	>= 2
86	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
87	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
88	Persentase balita gizi kurang mendapatkan PMT	%			100	100	100	100	100	100
89	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	100
90	Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	%			5	4	4	3	3	3
91	Persentase bayi usia - bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%			100	100	100	100	100	100
92	Persentase bayi usia - bulan mendapat ASI Eksklusif	%			54	56	58	60	65	65
93	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	68.18	72.73	77.27	77.27	81.82	81.82	86.36	86.36

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD
94	Persentase Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%			60	75	85	95	100	100
95	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa % untuk	%	5	5	10	15	20	30	30	30
96	Persentase Fasyankes primer yang memberikan pelayanan sesuai	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
97	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
98	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	100
99	Persentase Jaminan Kesehatan Nasional	%	71.21	79.98	100	100	100	100	100	100
100	Persentase kecamatan dengan Pokjanal Desa Siaga	%	18.5	18.5	20	22.5	25	30	35	35
101	Persentase kecamatan yang melaksanakan STBM	%	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
102	Persentase Kecamatan yang memiliki kebijakan PHBS	%	50	50	60	70	80	90	100	100
103	Persentase Kecamatan yang mencapai PHBS Institusi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
104	Persentase Kecamatan yang mencapai Rumah Tangga sehat ,%	%	79.60	79.60	80	80	80	80	80	80
105	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	80	80	80	100	100	100	100	100
106	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN)	%			100	100	100	100	100	100
107	Persentase kunjungan neonatus lengkap dengan MTBM	%			100	100	100	100	100	100
108	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	NA	39.6	100	100	100	100	100	100
109	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	%	NA	64.24	100	100	100	100	100	100
110	Persentase orang terdeteksi dini infeksi Hepatitis B	%	1.82	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
111	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC	%	100	100	100	100	100	100	100	100
112	Persentase orang usia tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	11.58	100	100	100	100	100	100
113	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	16.64	100	100	100	100	100	100
114	Persentase penduduk miskin non kuota terintegrasi JKN	%	95	95	95	95	95	95	95	95
115	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	NA	17.69	100	100	100	100	100	100
116	Persentase Puskesmas dengan capaian SPM Kesehatan %	%	100	100	100	100	100	100	100	100
117	Persentase Puskesmas melaksanakan kesehatan kerja	%	5.00	21.00	46.00	66.00	77.00	92.00	100.00	100.00
118	Persentase Puskesmas melaksanakan Kesehatan Olah Raga pada kelompok masyarakat	%	25	35	43.00	53.00	64.00	75.00	100.00	100.00
119	Persentase puskesmas melaksanakan STBM	%	100	100	100	100	100	100	100	100
120	Persentase Puskesmas	%	95	100	100	100	100	100	100	100
121	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	65	65	65	65	75	85	95	95
122	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar	%	85	85	85	85	86	90	95	95
123	Persentase rumah tangga mengakses sanitasi dasar yang	%			100	100	100	100	100	100
124	Persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar	%	65	65	65	65	75	85	95	95
125	Persentase warga negara usia tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	52.31	100	100	100	100	100	100
126	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%			20	20	15	15	10	10

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
127	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
128	Prevalensi balita stunting	%	24.5	20.4	18	17	16	15	14	14
129	Prevalensi Gizi Buruk	%	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
130	Prevalensi gizi kurang	%	7.60	7.60	7.8	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4
131	Prevalensi HIV / AIDS (%) dari total populasi	%	0.17	0.22	0.14	0.14	0.14	0.14		0.14
132	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai ,%	%			70	72	75	78	80	80
133	Prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari tahun	%	13.31	12.29	20	20	20	20	20	20
134	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	26.3	38.9	38.7	38.5	38.3	38.1	37.9	37.9
135	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat antimalaria yang tepat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
136	Proporsi jumlah kasus Tuberculosis yang terdeteksi dalam program	%	70.1	70.1	72.52	75	77.5	80	82.5	82.5
137	Proporsi penduduk dengan asupan minimal < . Kkal/hari	%			71	70	68	66	64	64
138	Prosentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	75	79	82	83	84	85	85	85
139	Rasio dokter per satuan penduduk	%	0.14	0.15	0.19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
140	Rasio posyandu per satuan balita		20.29	20.90	20.30	20.50	20.55	20.65	20.70	20.70
141	Rasio Puskesmas persatuan		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
142	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
143	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	0.35	0.35	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
144	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	Tingkat Kematian karena Tuberculosis (Per . penduduk)		3	3	3	3	2	2	2	2
146	Tingkat prevalensi Tuberculosis (per . penduduk)		168	168	166	164	162	160	158	158
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									
147	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	53	53	55	60	65	70	75	75
148	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	%	3.730	3.850	3.858	3.862	3.866	3.870	3.873	3.873
149	Indeks Demokrasi		NA	74.46	77.83	79.30	80.31	84.54	86.00	86.00
150	Informasi peta rawan bencana	%	NA	NA	18.52	37.04	55.56	78	100	100
151	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota Satlinmas wilayah	Orang	50	50	50	50	50	50	50	250
152	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
153	Persentase kecamatan yang telah memiliki peta rawan bencana	%	NA	NA	18.52	37.04	55.56	78	100	100
154	Persentase kejadian bencana tertangani dengan cepat dan tepat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
155	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
156	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
157	Persentase lembaga keagamaan	%	NA	52	55	60	65	67	70	70
158	Persentase Pelaksanaan SOP Ketentraman dan Ketertiban	%	100	100	100	100	100	100	100	100
159	Persentase Pemenuhan Sarpras Kelengkapan Satpol PP	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
160	Persentase pemilih pemula yang memberikan hak pilih pada pemilu /pemilukada	%	74	74	75	75	75	75	75	75
161	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
162	Persentase penanganan pelanggaran PERDA	%	90	95	100	100	100	100	100	100
163	Persentase penegakan perda	%	90	95	100	100	100	100	100	100
164	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
165	Persentase penurunan angka konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM	%	NA	NA	5	5	5	5	5	25
166	Persentase penurunan konflik	%	NA	NA	5	5	5	5	5	25
167	Persentase penurunan konflik	%	NA	78	64	56	44	33	21	21

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
168	Persentase pertumbuhan desa tangguh bencana	%	NA	25.0	40.0	42.3	50.0	60.0	66.7	66.7
169	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	%	100	100	100	100	100	100	100	100
170	Presentase LSM, Ormas dan Forum lainnya yang berperan aktif dalam kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	%	NA	NA	25	30	35	40	45	45
171	Rasio pengurangan resiko bencana		NA	NA	35	40	45	50	55	55
172	Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik	%	70	73	75	75	75	75	75	75
173	Tingkat penyelesaian pelanggaran K (ketertiban, ketenteraman,	%	100	100	100	100	100	100	100	100
174	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Keuangan									
175	Bagi hasil kabupaten/kota dan	%	5.79	6.06	6.46	6.86	7.26	7.66	8.06	8.06
176	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	15	15	15.00	15.00	17.00	17.00	18.00	18.00
177	Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
178	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak		0.37	0.35	0.37	0.37	0.39	0.39	0.41	0.41
179	Persentase belanja kesehatan (%)	%	12	12	12	12	12	12	12	12
180	Persentase belanja pendidikan (%)	%	29	29	29	29	29	29	29	29
181	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
182	Persentase SILPA	%	11.94	NA	7.79	6.60	5.58	4.70	3.94	3.94
	Komunikasi dan Informatika									
183	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		NA	2.63	2.80	2.90	3.20	3.30	3.50	3.50
184	Peringkat Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		8	5	5	4	4	3	2	2
185	Rasio Lapak aduan publik berbasis	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
	Koperasi, Usaha Kecil, dan									
186	Persentase koperasi aktif	%	76	76	76.25	76.50	76.75	77.00	77.25	77.25
187	Persentase koperasi sehat	%	29.12	29.71	30.00	30.25	30.50	30.75	31.00	31.00
188	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	0.39	1.15	1.25	1.34	1.69	1.84	1.98	1.98
189	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	0,34	1,05	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
190	Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM	%	0.34	1.05	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	Lingkungan Hidup									
191	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup	Dokumen	NA	NA	0	0	1	0	0	1
192	Indeks Kualitas Air (IKA)		46.94	34.67	54.20	54.40	54.60	54.80	55.00	55.00
193	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		NA	64.81	63.79	63.88	63.97	64.06	64.15	64.15
194	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)		NA	73.94	56.50	56.50	56.50	56.50	56.50	56.50
195	Indeks Kualitas Udara (IKU)		85.72	82.78	83.10	83.20	83.30	83.40	83.50	83.50
196	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		74	73	72	72	72	72	72	72
197	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah KabupatenKota lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
198	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	%	NA	NA	50	52	54	56	58	58
199	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui R	%	NA	22	20	22	24	26	27	27
200	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	54	60	100	97	98	99	99	99
201	Timbulan sampah yang ditangani	%	54	60	100	97	98	99	99	99
	Pangan									
202	Indeks Ketahanan Pangan		NA	73.99	74.00	74.01	74.02	74.03	74.04	74.04
203	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	90	94	94	95	96	96	97	97

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
204	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	70.00	92.43	93.43	94.43	95.43	96.43	97.43	97.43
205	Persentase Penguatan cadangan pangan	%	70	75	75	80	82	84	86	86
206	Stabilitas harga dan pasokan	%	95.00	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00	100.00
207	Tingkat ketersediaan energi	%	91.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	96.00
208	Tingkat ketersediaan protein (%)	%	91.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	96.00
	Pariwisata									
209	Jumlah kunjungan wisatawan	wisatawan	1233595	2363002	2962421	3134193	3306077	3487246	3708792	16598729
210	Persentase pertumbuhan desa wisata	%	NA	35.71	57.14	64.29	78.57	85.71	100.00	100.00
	Pekerjaan Umum dan Penataan									
211	Persentase advice planning yang dikeluarkan sesuai tata ruang	%	100	100	100	100	100	100	100	100
212	Persentase aset bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi	%	57.7	60.7	63.7	66.7	69.7	72.7	75.7	75.7
213	Persentase bangunan gedung Pemerintah Daerah dalam kondisi	%	57.7	60.7	63.7	66.7	69.7	72.7	75.7	75.7
214	Persentase infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	71.80	72.55	73.30	74.05	74.80	75.55	78.80	78.80
215	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	75.39	70.1	71.6	73.1	74.6	76.1	77.60	77.6
216	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> KM/Jam)	%	71.03	43.06	48.06	53.06	58.06	63.06	68.06	68.06
217	Persentase kenaikkan anggaran	%	0	0	5	6	7	8	9	9
218	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan	%	99.979	99.980	99.981	99.982	99.983	99.984	99.985	99.985
219	Persentase ketersediaan sarpras pusat kantor pemerintahan	%	0	0	0	0	0	50	100	100
220	Persentase kinerja perencanaan teknis dan kinerja pembinaan jasa	%	NA	NA	17.87	30.29	42.71	55.13	67.55	67.55
221	Persentase menurunnya pelanggaran tata ruang	%	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015
222	Persentase peningkatan jalan	%	NA	0	20	40	60	80	100	100
223	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi	%	NA	83.99	85.20	86.71	88.22	89.73	91.24	91.24
224	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0.71	0.43	0.48	0.53	0.58	0.63	0.68	0.68
225	Rasio jaringan irigasi		37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69	37.69
226	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		NA	NA	0.92206	0.91293	0.90398	0.89520	0.88659	0.88659
	Pemberdayaan Masyarakat dan									
227	Indeks Desa Membangun		0.660	0.663	0.668	0.674	0.681	0.688	0.694	0.694
228	Kelembagaan Kawasan Perdesaan (PKP) yang terbentuk	lembaga	0	1	2	2	2	2	2	10
229	Kelulusan sarjana per desa	Orang	NA	NA	0	0	1	1	1	3
230	Persentase desa dengan administrasi baik	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
231	Persentase desa yang menghasilkan produk unggulan	%	NA	NA	50	60	60	60	50	57
232	Persentase desa yang meningkat prasarananya	%	NA	1.99	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	13.29
233	Persentase LPM berprestasi	%	0.91	1.81	0.30	0.30	0.30	0.30	0.60	1.81
234	Persentase pemerintahan desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan UU	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
235	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
236	Ratarata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat LPM	%	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	89.7
237	Ratarata jumlah kelompok binaan	%	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	89.7
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
238	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban	%	100	100	100	100	100	100	100	100
239	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
240	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
241	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap	%	100	100	100	100	100	100	100	100
242	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
243	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100
244	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
245	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87.62	NA	87.63	87.64	87.65	87.66	87.67	87.67
246	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67.32	NA	67.45	67.50	67.55	67.57	67.60	67.60
247	Nilai Kabupaten Layak Anak		426	514	550	600	650	700	750	750
248	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	49	49	49	49	49	49	49	49
249	Preferensi kekerasan pada anak perempuan	%	36.89	35.63	34.37	33.11	31.84	30.58	29.32	29.32
250	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Orang	18	18	24	24	24	24	24	24
251	Rasio anak korban kekerasan	%	0.011	0.0110	0.010	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006
252	Rasio KDRT	%	0.0019	0.0018	0.0017	0.0016	0.0015	0.0014	0.0013	0.0013
	Penanaman Modal									
253	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non		77.23	83.60	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	90.00
254	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Publik=MPP)		NA	NA	79	80	81	82	83	83
255	Jumlah aduan yang ditangani	aduan	40	20	20	20	20	20	20	100
256	Nilai Investasi Daerah	Milyar Rupiah	583	625	255	260	265	270	275	275
257	Nilai investasi di kawasan industri	Milyar Rupiah	NA	NA	0	0	0	100	100	200
258	Persentase penanganan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
259	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata (Wisman dan	%	NA	11.91	25.36	5.86	5.48	5.48	6.35	48.48
260	Persentase Pertumbuhan Nilai investasi Daerah	%	2	2	2	2	2	2	2	10
	Pendidikan									
261	Angka Kelulusan (AL) SD / MI /	%	100.00	100.00	100	100	100	100	100	100
262	Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs / Paket B	%	99.99	100.00	100	100	100	100	100	100
263	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/ Paket A ke SMP/MTs/	%	104.39	104.48	100	100	100	100	100	100
264	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP / MTs/ Paket B ke SMA/SMK/MA/ Paket B	%	92.47	96.10	96.3	96.4	96.6	96.8	97	97
265	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	92.57	93.43	93.5	93.6	93.7	93.75	93.8	93.8
266	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs / Paket B (- tahun)	%	76.23	79.44	79.5	79.6	79.65	79.7	79.8	79.8
267	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI / Paket A	%	0.0004	0.0004	0.00035	0.00032	0.00030	0.00027	0.00025	0.00025
268	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs / Paket B	%	0.0020	0.0029	0.0027	0.0025	0.0023	0.0021	0.0020	0.0020
269	Angka rata-rata Nilai UASBN SD		65.00	68.27	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00	78.00
270	Angka rata-rata Nilai UN SMP		52.78	55.58	57	59	61	63	65	65
271	APK PAUD/RA/ Sederajat	%	77.23	77.25	77.5	77.75	78	78.25	78.5	78.5
272	APK SD/MI/Paket A	%	101.91	103.59	103.59	103	102.3	101.7	101	101
273	APK SMP/MTs/Paket B	%	103.05	103.32	103.32	103.0	102.3	101.7	101	103.32
274	APM SD/MI/paket A	%	92.57	93.43	93.50	93.60	93.70	93.75	93.80	93.80
275	APM SMP/MTs/Paket B	%	76.23	79.44	79.5	79.6	79.65	79.7	79.8	79.8
276	Jumlah penerima beasiswa SD (akademis dan non akademis)	pelajar	NA	84.547	86.047	87.547	89.047	90.547	92.000	92.000
277	Jumlah penerima beasiswa SMP	pelajar	NA	37855	38355	38855	39355	39855	40355	40355

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
278	Persentase kepala satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal S/DIV	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
279	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki ijazah	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
280	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
	Persentase kepala satuan pendidikan PAUD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
282	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki ijazah	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
283	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki sertifikat	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
284	Persentase kepala satuan pendidikan SD memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
285	Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki ijazah	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
286	Persentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
287	Persentase pendidik PAUD memiliki ijazah minimal S/DIV bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	%	51.77	52.00	100	100	100	100	100	100
288	Persentase pendidik PAUD memiliki sertifikat profesi guru	%	20.96	22.00	100	100	100	100	100	100
289	Persentase pendidik SD memiliki ijazah minimal S/DIV	%	94.48	95.00	100	100	100	100	100	100
290	Persentase pendidik SD memiliki sertifikat pendidik	%	55.83	60.00	100	100	100	100	100	100
291	Persentase pendidik SMP memiliki sertifikat pendidik	%	63.78	65.00	100	100	100	100	100	100
292	Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal Berprestasi	%	10.41	10	9.09	9.09	8.33	7.69	7.14	7.14
293	Persentase peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/Dikmas Berprestasi	%	5.26	10.00	9.09	8.33	7.69	7.14	6.83	6.83
294	Persentase satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki tenaga penunjang lainnya	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
295	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	%	12.30	15.00	16	18	20	23	25	25
296	Persentase satuan pendidikan SD memiliki tenaga penunjang lainnya	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
297	Persentase Satuan Pendidikan SD Terakreditasi	%	98.30	99.00	100	100	100	100	100	100
298	Persentase satuan pendidikan SMP memiliki tenaga penunjang lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
299	Persentase Satuan Pendidikan SMP Terakreditasi	%	92.27	93.00	94	95	96	97	100	100
300	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	84.84	85.55	86	86.5	87	87.5	88	88
301	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	87.61	88.05	88.5	89	89.5	90	90.5	90.5
302	Persentase siswa PAUD yang mendapat (satu) set alat mewarnai minimal berjumlah (dua belas) warna dalam kondisi baru	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
303	Persentase siswa PAUD yang mendapat enam buah buku gambar dalam kondisi baru tiap	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
304	Persentase siswa pendidikan kesetaraan mendapat (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
305	Persentase siswa pendidikan kesetaraan yang mendapat (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per tahun	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
306	Persentase siswa pendidikan menengah yang mendapat (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
307	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat satu paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per tahun	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
308	Persentase siswa sekolah dasar yang mendapat (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
309	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan kesetaraan memiliki ijazah minimal	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
310	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SD memiliki ijazah minimal	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
311	Persentase tenaga penunjang lainnya pada satuan pendidikan SMP memiliki ijazah minimal	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
312	Persentase tutor pendidikan kesetaraan memiliki jasah minimal S/DIV	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
313	Persentas pendidik SMP memiliki ijazah minimal S/DIV	%	96.11	96.50	100	100	100	100	100	100
314	Persetase siswa pendidikan menengah yang mendapat (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per semester	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
315	Pesentase kepala satuan pendidikan SMP memiliki sertifikat	%	NA	NA	100	100	100	100	100	100
316	Prosentase peningkatan Satuan Pendidikan SD Berprestasi	%	10	17	14	13	11	10	9	100
317	Prosentase peningkatan Satuan Pendidikan SMP Berprestasi	%	10	20	17	14	13	11	10	100
318	Prosentase peningkatan Siswa SD Berprestasi	%	10	11	10	9	8	8	7	67
319	Prosentase peningkatan Siswa SMP Berprestasi	%	10	16.67	14.29	12.5	2.22	2.17	2.13	51.43
320	Rasio Guru terhadap murid PAUD		NA	NA	19.3	18	17	16	15	15
321	Rasio Guru terhadap murid SD		NA	NA	23.5	23.2	22.8	22.4	22.0	22.0
322	Rasio Guru terhadap murid SMP		NA	NA	32.4	32.3	32.2	32.1	32	32
	Pendidikan dan Pelatihan									
323	Indeks Profesionalitas ASN		82.79	82.80	83.1	83.4	83.6	83.6	83.7	83.7
324	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	520	520	520	530	540	540	545	2675
325	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0.083	0.12	0.09	0.064	0.051	0.086	0.087	0.378
	Penelitian dan Pengembangan									
326	Prosentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	%	NA	NA	60	62	65	67	70	70
	Pengawasan									
327	Indeks Persepsi Korupsi		3.38	NA	3.45	3.50	3.55	3.65	3.75	3.75
328	Persentase tindak lanjut temuan BPK yang diselesaikan	%	NA	70	75	78	80	83	85	85
329	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP yang	%	60	65	70	72	74	76	78	78
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
330	Angka kelahiran remaja (perempuan usia â€“) per . perempuan usia â€“ tahun (ASFR	%	0.41	0.32	0.30	0.28	0.26	0.25	0.24	0.24
331	Angka Kelahiran Total TFR		2.31	2.30	2.29	2.28	2.27	2.26	2.25	2.25

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
332	Angka pemakaian kontrasepsiCPR bagi perempuan menikah usia	%	75.25	75.39	75.89	76.39	76.39	76.50	76.89	76.89
333	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	57	68	68	69	69	70	70	70
334	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber KB	%	78.81	80.31	80.81	81.31	81.81	82.31	82.81	82.81
335	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	57	58	58	59	59	60	60	60
336	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah tahun	%	5770	5720	5663	5606	5578	5551	5550	5550
337	Jumlah kebijakan (Perda /Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	aturan	NA	NA	1	1	1	1	1	1
338	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.87	NA	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.82
339	Persentase Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera	%	47	47.00	46.90	46.80	46.70	46.60	46.50	46.50
340	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	36.75	37.38	38	39	40	41	42	42
341	Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	17	20	23	25	27	32	35	35
342	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	6	6	6	8	8	10	10	10
343	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian	%	70	70	70	70	70	74	74	74
344	Persentase wilayah yang terjangkau pelayanan tenaga lini	%	100	100	100	100	100	100	100	100
345	Rasio Akseptor KB		73	74	70	70	70	74	74	74
346	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
347	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	anak	2.8	2.72	2.6	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3
	Perdagangan									
348	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Kelompok	1118	718	54	54	54	54	54	270
349	Jumlah Gula Kelapa Terekspor	Ton	6000	7200	10.000	12.000	18.000	24.000	30.000	30.000
350	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	$ USD	22.691.050	29.912.232	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
351	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	%	4.44	4.45	4.47	4.48	4.49	4.51	4.52	4.52
	Perencanaan									
352	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran perangkat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
353	Persentase kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD	%	61.51	62.76	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00
354	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	NA	NA	90	91	92	93	95	95
355	Persentase terpenuhinya aspek kualitas perencanaan	%	NA	NA	90	91	92	93	95	95
hubun	**Perhubungan**									
356	Persentase ketersediaan terminal	%	37.5	37.5	37.5	50	50	50	62.5	62.5
357	Persentase pemasangan rambu-	%	36	39	41	43	44	46	48	48
358	Prosentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan	%	39	43	45	52	53	55	60	60
359	Rasio ijin trayek		0.064	0.066	0.068	0.071	0.073	0.075	0.077	0.077
	perindustrian									
360	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	662	699	61	66	67	68	69	331
361	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	0.39	1.15	1.25	1.34	1.69	1.84	1.98	1.98
362	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5.78	5.80	5.81	5.82	5.83	5.85	5.86	5.86
	Perpustakaan									
363	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul buku	NA	36290	36340	36390	36440	36490	36540	36540
364	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	59313	53104	54652	56250	57898	59596	61344	61344
365	Persentase jumlah perpustakaan terbina	%	5.55	12.50	19.44	26.38	33.33	40.27	47.22	47.22
366	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat	%	2.80	2.86	2.87	2.88	2.89	2.91	2.93	2.93

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
367	Persentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan daerah	%	4.8	4.9	5.39	5.93	6.52	7.17	7.89	7.89
368	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		NA	NA	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053	0.053
369	Rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	NA	928	1003	1083	1170	1264	1365	1365
	Persandian									
370	Standarisasi Keamanan Data ISO	anek	1	17	17	17	17	17	17	17
	Pertanahan									
371	Persentase luas tanah milik Pemkab yang bersertifikat	%	NA	NA	38.18	38.51	38.83	39.16	39.47	39.47
	Pertanian									
372	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Peternakan	%	NA	NA	2	2	2	2	2	10
373	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	6.19	3.07	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00
374	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian	%	NA	NA	1	1	1	1	1	5
375	Produksi Daging	Ton	19471	21706	21706	22357	23078	23719	24431	115241
376	Produksi olahan hasil peternakan	Ton	NA	500	510	520.21	530.6	541.22	552.04	2654.06
377	Produksi Susu	Liter	5594500	3628600	3748000	3860000	3976000	4095000	4218000	19897000
378	Produksi tanaman Cabai	Ton	1570.00	1800.10	1816.45	1832.50	1848.60	1865.00	1881.50	9244.05
379	Produksi tanaman cengkeh	Ton	310.00	484.16	486.81	489.97	493.17	496.40	499.66	2950.17
380	Produksi tanaman Durian	Ton	4862.40	9780.30	9829.41	9879.02	9929.11	9979.71	10030.82	49648.07
381	Produksi tanaman Jagung	Ton	13006	13136	13267	13400	13534	13669	13806	67677
382	Produksi tanaman Kedelai	Ton	1562.01	1578	1593.41	1609.34	1625.43	1641.69	1658.11	8128.00
383	Produksi tanaman kelapa dalam	Ton	13284	13905.12	14039.02	14174.53	14311.39	14449.63	14589.24	71563.81
384	Produksi tanaman kelapa deres	Ton	54731	53408.86	54830.58	55388.89	55952.78	56522.31	57097.53	279792.09
385	Produksi tanaman kopi	Ton	142.00	143.00	144.90	146.34	147.81	149.29	150.78	739.11
386	Produksi tanaman lada	Ton	58.77	59.36	59.95	60.55	61.16	61.77	62.39	305.81
387	Produksi tanaman Padi	Ton	375000	390000	400000	425000	450000	475000	500000	22500000
388	Produksi tanaman pala	Ton	25.970	36.35	38.97	41.62	44.29	47.00	49.73	221.60
389	Produksi tanaman Pisang	Ton	20510.80	27183.40	27390.56	27599.79	27811.11	28024.55	28240.12	139066.13
390	Produksi tanaman tembakau	Ton	14.00	14.00	14.41	14.56	14.70	14.85	15.00	73.53
391	Produksi Telur	Ton	16910.4	16707	17208	17724	18256	18804	19368	91361
392	Produktivitas tanaman Jagung	ton / ha	5.92	6.30	6.36	6.46	6.48	6.54	6.60	6.60
393	Produktivitas tanaman Kedelai	ton / ha	1.53	1.34	1.36	1.38	1.39	1.41	1.43	1.43
394	Produktivitas tanaman Padi	ton / ha	5.57	5.63	5.77	5.89	6.01	6.13	6.25	6.25
395	Rasio jumlah petani pengguna safety belt	%	NA	NA	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
396	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	NA	76.30	76.55	76.81	77.07	77.33	77.58	77.58
397	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	NA	51.36	51.93	53.77	55.70	57.72	59.84	59.84
398	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan	%	NA	NA	74.07	81.48	88.89	92.59	96.30	96.30
399	Jumlah IPAL Komunal	Unit	58	65	67	72	77	82	87	87
400	Persentase areal kawasan kumuh	%	NA	20.30	20.24	20.23	20.22	20.21	20.19	20.19
401	Persentase drainase permukiman dalam kondisi baik	%	NA	NA	11.43	11.48	11.53	11.58	11.63	11.63
402	Persentase lingkungan pemukiman kumuh kawasan perkotaan	%	NA	8.69	8.26	8.16	8.05	7.94	7.84	7.84
403	Persentase Lingkungan Permukiman yang layak huni	%	NA	83.17	84.17	85.17	86.17	87.17	88.17	88.17
404	Persentase penanganan permukiman kumuh	%	NA	4.65	4.87	6.09	7.31	8.53	9.75	9.75
405	Persentase permukiman yang	%	7.98	9.09	9.24	9.45	9.68	9.92	10.18	9.09
406	Persentase rumah sehat sesuai	%	75.37	75.81	76.55	76.81	77.07	77.33	77.58	77.58
407	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	%	75.33	82.88	84.00	86.00	88.00	90.00	92.00	92
408	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan	%	NA	69.51	71.94	73.37	74.46	75.58	77.08	77.08
409	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	NA	1.95	1.73	1.34	0.89	0.44	0.00	0.00
410	Rasio permukiman layak huni	%	NA	79.70	79.76	79.82	79.90	79.99	80.10	80.10
411	Rasio rumah layak huni	%	NA	76.30	76.56	78.34	80.16	82.03	83.95	83.95
412	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		NA	34.67	37.07	39.42	41.73	43.98	46.18	46.18
	Sosial									
413	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
414	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
415	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
416	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
417	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
418	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
419	Persentase organisasi pemuda yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	5	5	5	5	5	5	5	5
420	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	NA	NA	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	41.67
421	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0	0	0	39.58	49.17	57.20	60.18	60.81
422	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
423	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	43.19	47.55	51.41	51.50	51.57	51.62	51.66	51.66
424	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	43.19	47.55	51.42	51.51	51.57	51.63	51.67	51.67
425	Persentase PMKS yang tertangani	%	43.49	47.78	52.05	52.15	52.21	52.27	52.33	52.33
	Statistik									
426	Persentase Data Informasi dan Statistik Yang Terpublikasi dengan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tenaga Kerja									
427	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun		NA	NA	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
428	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	49.58	66.64	55.00	57.00	59.00	61.00	63.00	63.00
429	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	NA	NA	60	80	100	100	100	100
	transmigrasi									
430	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Total 455 Indikator									

BAB IX
PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2023-2028 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.

Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Bupati Banyumas berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang RPJMD kepada masyarakat;
b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya yang mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019-2024;
d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN